



**BUKU
1**



RKPK

*Subulussalam
Tahun 2026*

**PERATURAN WALI KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 36 TAHUN 2025
Tentang
RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA (RKPK)
SUBULUSSALAM TAHUN 2026**



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 36 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA (RKPK)
SUBULUSSALAM TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA SUBULUSSALAM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK);
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (R-APBK);
- c. bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Subulussalam Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
31. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2025-2045;

32. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
33. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 22);
34. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2025 (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 20);
35. Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam Tahun 2014-2034;
36. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 85);
37. Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Subulussalam Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2018 Nomor 1);
38. Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2025 Nomor 1);
39. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 78 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Subulussalam Tahun 2025-2026 (Lembaran Daaerah Kota Subulussalam Tahun 2023 Nomor 78);
40. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 79 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Subulussalam Tahun 2025-2026 (Lembaran Daaerah Kota Subulussalam Tahun 2023 Nomor 23);
41. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2025 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA (RKPK) SUBULUSSALAM TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kota adalah Kota Subulussalam.
- (2) Walikota adalah Walikota Subulussalam.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam.
- (4) Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
- (5) Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya RPD adalah dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Subulussalam Tahun 2025-2026.
- (6) Rencana Kerja Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Subulussalam untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
- (7) R-APBK adalah Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun 2026.
- (8) KU-APBK adalah Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Kota Subulussalam Tahun 2026.
- (9) PPAS adalah Dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kota Subulussalam Tahun 2026.
- (10) RKA-OPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah.
- (11) Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Subulussalam Tahun 2026 merupakan penjabaran dari hasil Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan (Musrenbang), dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Subulussalam Tahun 2025-2026, yang memuat kebijakan arah keuangan Kota Subulussalam termasuk di dalamnya Arah Kebijakan Umum, Program Pembangunan Kota Subulussalam Tahun 2026.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Subulussalam Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

- a. Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Subulussalam dalam menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026.
- b. Pedoman bagi Pemerintah Kota Subulussalam dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (R-APBK) Tahun 2026 termasuk didalamnya Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Kota (KU-APBK) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026.

Pasal 3

Dalam rangka menyusun R-APBK Tahun 2026 :

- a. Pemerintah Kota Subulussalam menggunakan RKPK Tahun 2026 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Kota (KU-APBK) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada saat pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam;
- b. OPD menggunakan RKPK Tahun 2026 dalam melakukan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-OPD) dengan DPRK.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di : Subulussalam
pada tanggal : 24 Juli 2025 M
28 Muharram 1447 H


WALIKOTA SUBULUSSALAM,

M. RASYID

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 24 Juli 2025 M
28 Muharam 1447 H

 SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM, 


SAIRUN

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2025 NOMOR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.4 Maksud dan Tujuan	I-7
1.5 Sistematika Dokumen RKPK	I-8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-2
2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah	II-2
2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam	II-20
2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-27
2.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	II-60
2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas	II-64
2.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	II-66
2.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah	II-70
2.1.8 Demografi	II-72
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-74
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	II-74
2.2.2 Kesehatan untuk Semua	II-87
2.2.3 Pendidikan Berkualitas dan Merata	II-93
2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif	II-96
2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	II-97
2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	II-98
2.3 Aspek Daya Saing Daerah	II-101
2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-101
2.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	II-104
2.3.3 Transformasi Digital	II-106
2.3.4 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	II-107
2.3.5 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	II-107
2.3.6 Stabilitas Ekonomi Makro	II-110
2.4 Aspek Pelayanan Umum	II-110
2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif	II-110
2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial	II-111
2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Budaya Gentar Kawasan Indeks Daya Saing Daerah	II-116

2.4.4	Kinerja setiap Urusan Pemerintah Daerah	II-117
2.5	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-199
2.5.1	Capaian Pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-199
2.5.2	Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama	II-206
2.5.3	Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Bidang Urusan	II-207
2.5.4	Capaian Pelaksanaan Kinerja RPJMD	II-209
2.5.5	Capaian Pelaksanaan Kinerja RKPK	II-209
2.5.6	Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal	II-215
2.5.7	Capaian Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	II-215
2.6	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-219
2.6.1	Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Kota Subulussalam	II-219
2.6.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-219
2.7	Isu Strategis Pembangunan Daerah	II-225
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1	Kinerja Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Daerah.....	III-1
3.2	PDRB Perkapita.....	III-3
3.3	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-5
3.4	Arah Kebijakan Keuangan Kota Subulussalam	III-8
3.4.1	Arah Kebijakan Pendapatan Kota Subulussalam ...	III-8
3.4.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-12
3.4.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Kota Subulussalam ..	III-16
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026	IV-4
4.2.1	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026	IV-4
4.2.2	Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2026	IV-7
4.2.3	Prioritas Pembangunan Kota Subulussalam Tahun 2026	IV-9
4.2.4	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Subulussalam dengan Prioritas Aceh dan Prioritas Nasional Tahun 2026	IV-10
4.3	Strategi dan Arah Kebijakan Kota Subulussalam	IV-12
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KOTA SUBULUSSALAM....	V-1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI-1
6.1	Indikator Kinerja Utama Kota Subulussalam Tahun 2026 .	VI-1
6.2	Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Bidang Urusan	VI-1
BAB VII	PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Masing-masing Kecamatan di Kota Subulussalam Tahun 2024	II-2
Tabel 2.2	Kualifikasi Topografi Berdasarkan Ketinggian Tiap Kecamatan di Kota Subulussalam	II-6
Tabel 2.3	Klasifikasi Kelerengan Tiap Kecamatan di Kota Subulussalam	II-7
Tabel 2.4	Karakteristik Geologi Kota Subulussalam	II-9
Tabel 2.5	Panjang dan Nama Sungai di Kota Subulussalam	II-15
Tabel 2.6	Luasan DAS di Kota Subulussalam	II-17
Tabel 2.7	Jenis Penggunaan Lahan Per-Kecamatan di Kota Subulussalam	II-25
Tabel 2.8	Potensi Sumber Daya Mineral di Kota Subulussalam	II-26
Tabel 2.9	Potensi Air di Kota Subulussalam	II-27
Tabel 2.10	Potensi Energi Air di Kota Subulussalam	II-27
Tabel 2.11	Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Kota Subulussalam	II-29
Tabel 2.12	Tingkat Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di Setiap Kecamatan di Kota Subulussalam	II-40
Tabel 2.13	Tingkat Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Setiap Kecamatan di Kota Subulussalam	II-47
Tabel 2.14	Tingkat Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kecamatan di Kota Subulussalam	II-51
Tabel 2.15	Tingkat Jasa Ekosistem Pengaturan iklim di Setiap Kota Subulussalam	II-55
Tabel 2.16	Luasan dan Kelas Ekosistem Pendukung Biodiversitas di Kota Subulussalam	II-59
Tabel 2.17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-64
Tabel 2.18	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-72
Tabel 2.19	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Subulussalam (dalam miliar rupiah)	II-76
Tabel 2.20	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Subulussalam (dalam miliar rupiah)	II-77
Tabel 2.21	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2020 s.d 2024 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Harga Konstan (ADHK) Kota Subulussalam	II-78
Tabel 2.22	Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Tahun 2020 s.d 2024 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Subulussalam	II-79
Tabel 2.23	Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2020-2024 Kota Subulussalam	II-81
Tabel 2.24	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-85
Tabel 2.25	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Tahun 2020-2024 Kota Subulussalam	II-86

Tabel 2.26	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2020-2024 Kota Subulussalam	II-96
Tabel 2.27	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-102
Tabel 2.28	Rasio Ketergantungan Penduduk Produktif Di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-103
Tabel 2.29	Status Pekerjaan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-105
Tabel 2.30	Indeks Inovasi Daerah	II-106
Tabel 2.31	PDRB menurut Pengeluaran (ADHB) tahun 2020-2024	II-107
Tabel 2.32	PDRB menurut Pengeluaran (ADHK) tahun 2020-2024	II-107
Tabel 2.33	Rasio Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-109
Tabel 2.34	Tingkat Inflasi Kota di Aceh Tahun 2020-2024	II-110
Tabel 2.35	Beberapa Capaian Kinerja pada Sekretariat Daerah	II-111
Tabel 2.36	Jumlah Demo di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-112
Tabel 2.37	Angka Kriminalitas Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 ...	II-113
Tabel 2.38	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-115
Tabel 2.39	IDSD Kota Subulussalam Tahun 2021-2024	II-116
Tabel 2.40	Fasilitas Pendidikan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 ..	II-120
Tabel 2.41	Kualifikasi Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2020-2023.....	II-122
Tabel 2.42	Daftar Akreditasi Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Subulussalam	II-123
Tabel 2.43	Fasilitas Kesehatan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-124
Tabel 2.44	Jumlah dan Rasio Dokter per Satuan Penduduk di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-125
Tabel 2.45	Kondisi Posyandu di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 ...	II-137
Tabel 2.46	Proporsi Panjang Jaringan Jalan di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-139
Tabel 2.47	Persentase Areal Kawasan Kumuh di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-142
Tabel 2.48	Jumlah Penduduk Penyandang Kesejahteraan Sosial di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-146
Tabel 2.49	Program Balai Tenaga Kerja Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-147
Tabel 2.50	Banyaknya Sertifikat Tanah yang Dikeluarkan Menurut Jenis Hak Atas Tanah di Kota Subulussalam Tahun 2020-2023	II-151
Tabel 2.51	Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-153
Tabel 2.52	Persentase Penduduk Ber-KTP di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-154
Tabel 2.53	Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-154
Tabel 2.54	Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-155

Tabel 2.55	Cakupan Kantor Pemerintahan Desa di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-156
Tabel 2.56	Rasio Akseptor KB dan Jumlah Pasangan Usia Subur di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-157
Tabel 2.57	Tabel Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-158
Tabel 2.58	Jumlah Kampung Keberadaan BTS, Sinyal Telepon Seluler dan Sinyal Internet Telepon Seluler di Kota Subulussalam	II-160
Tabel 2.59	Jumlah Kampung Menurut Keberadaan Fasilitas Komunikasi di Kota Subulussalam	II-161
Tabel 2.60	Jumlah Usaha Agroindustri dan Industri Pengolahan dalam Kategori Kecil dan Menengah di Kota Subulussalam Tahun 2020-2023	II-164
Tabel 2.61	Jumlah Investor PMDN/PMA di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-165
Tabel 2.62	Indeks Daya Saing Investasi Kota Se-Aceh Tahun 2022-2023	II-166
Tabel 2.63	Keaktifan Organisasi Olahraga di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-169
Tabel 2.64	Cagar Budaya di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-170
Tabel 2.65	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2020-2024 Kota Subulussalam	II-170
Tabel 2.66	Produksi Perikanan di Kota Subulussalam Tahun 2020-2023	II-174
Tabel 2.67	Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-174
Tabel 2.68	Nama dan Lokasi Objek Wisata yang Ada di Kota Subulussalam	II-175
Tabel 2.69	Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya Menurut Klasifikasi di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-176
Tabel 2.70	Jumlah Rumah Makan/Restoran di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-176
Tabel 2.71	Luas Panen, Luas Tanam, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Utama di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-177
Tabel 2.72	Luas, Produksi dan Produktivitas Beberapa Jenis Komoditi Perkebunan Unggulan di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-178
Tabel 2.73	Populasi Ternak di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-179
Tabel 2.74	Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-181
Tabel 2.75	Banyaknya Pedagang di Kota Subulussalam Menurut Kecamatan Tahun 2024	II-183
Tabel 2.76	Konsistensi RPJMD dengan Renstra, RKPK, Perubahan Renstra dan Perubahan RKPK Tahun 2021-2024	II-187
Tabel 2.77	Konsistensi RKPD/Perubahan RKPD dengan KUA-PPAS/KUPA-PPAS Tahun 2021-2024	II-188
Tabel 2.78	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-189
Tabel 2.79	Penetapan APBD Subulussalam Tahun 2020-2024	II-190

Tabel 2.80	Pejabat Struktural yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan	II-192
Tabel 2.81	Indeks Desa Membangun Kota Subulussalam Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020-2024	II-194
Tabel 2.82	Kasus Pelanggaran Syari'at Islam di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-197
Tabel 2.83	Jumlah Masjid dan Meunasah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-198
Tabel 2.84	Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Tahun 2020-2024	II-208
Tabel 2.85	Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Daerah Aspek Pelayanan Umum Tahun 2020-2024	II-209
Tabel 2.86	Capaian Kinerja RPJMD Hingga Tahun 2024	II-211
Tabel 2.87	Capaian Kinerja RKPK Subulussalam Tahun 2024	II-213
Tabel 2.88	Capaian TPB Kota Subulussalam	II-216
Tabel 2.89	Capaian Standar Pelayanan Minimal Kota Subulussalam Berdasarkan Bidang Urusan Pelayanan	II-217
Tabel 3.1	Realisasi Pendapatan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024..	III-10
Tabel 3.2	Proyeksi Pendapatan Kota Subulussalam Tahun 2026-2027..	III-11
Tabel 3.3	Realisasi Belanja Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	III-14
Tabel 3.4	Proyeksi Belanja Kota Subulussalam Tahun 2026-2027	III-15
Tabel 3.5	Realisasi Pembiayaan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	III-18
Tabel 3.6	Proyeksi Pembiayaan Kota Subulussalam Tahun 2026-2027	III-19
Tabel 3.7	Rangkuman Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2026-2027	III-20
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Subulussalam	IV-2
Tabel 4.2	Prioritas Nasional Dengan <i>Highlight</i> Intervensi	IV-5
Tabel 4.3	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Subulussalam Dengan Prioritas Nasional Pemerintah Aceh dan Prioritas Nasional	IV-11
Tabel 4.4	Arah Kebijakan dan Strategi Kota Subulussalam Tahun 2026	IV-13
Tabel 5.1	Alokasi Anggaran Per OPD Tahun 2026	V-2
Tabel 5.2	Alokasi Anggaran Berdasarkan Urusan pada RKPK 2026	V-3
Tabel 5.3	<i>Mandatory Spending</i> Alokasi Anggaran Kota Subulussalam Tahun 2026	V-4
Tabel 6.1	Matriks Indikator Kinerja Utama Kota Subulussalam Tahun 2026	VI-1
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Kota Subulussalam Tahun 2026	VI-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar-Dokumen Perencanaan Terhadap RKPK Tahun 2026	I-7
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Subulussalam	II-3
Gambar 2.2	Peta Topografi Kota Subulussalam	II-4
Gambar 2.3	Peta Kemiringan Lereng Kota Subulussalam	II-6
Gambar 2.4	Peta Curah Hujan Kota Subulussalam	II-8
Gambar 2.5	Peta Geologi di Kota Subulussalam	II-10
Gambar 2.6	Peta Sebaran Jenis Tanah di Kota Subulussalam	II-10
Gambar 2.7	Sebaran Sungai Besar dan Kecil yang Melintasi Kota Subulussalam	II-11
Gambar 2.8	Peta WS Alas Singkil dan Baru-Kluet untuk Kota Subulussalam	II-16
Gambar 2.9	Luas DAS Kota Subulussalam	II-17
Gambar 2.10	Peta CAT di Kota Subulussalam	II-18
Gambar 2.11	Peta Hidrologi di Kota Subulussalam	II-19
Gambar 2.12	Peta Penggunaan Lahan di Kota Subulussalam	II-21
Gambar 2.13	Peta Hak Guna Usaha (HGU) di Kota Subulussalam	II-22
Gambar 2.14	Peta Rawan Bencana Kota Subulussalam	II-26
Gambar 2.15	Ketersediaan Air di Kota Subulussalam	II-28
Gambar 2.16	Kebutuhan Air secara Spasial di Kota Subulussalam	II-29
Gambar 2.17	Daya Dukung dan Daya Tampung Air yang Sudah dan Belum Terlampaui di Kota Subulussalam	II-30
Gambar 2.18	Grafik Perhitungan dan Proyeksi Konsumsi Pangan Utama Beras dan Kemampuan Produksi Lahan Sawah di Kota Subulussalam Tahun 2020-2045	II-34
Gambar 2.19	Persentase Ketersediaan Air di Kota Subulussalam	II-36
Gambar 2.20	Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih	II-38
Gambar 2.21	Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kota Subulussalam	II-39
Gambar 2.22	Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam	II-43
Gambar 2.23	Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana	II-43
Gambar 2.24	Luas Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Kota Subulussalam	II-46
Gambar 2.25	Peta Jasa Ekosistem Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Kota Subulussalam	II-46
Gambar 2.26	Persentase Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kota Subulussalam	II-49
Gambar 2.27	Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kota Subulussalam	II-50
Gambar 2.28	Luas Jasa Pengaturan Iklim Kota Subulussalam	II-53
Gambar 2.29	Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kota Subulussalam	II-54
Gambar 2.30	Luas Ekosistem Pendukung Biodiversitas di Kota Subulussalam	II-57

Gambar 2.31	Peta Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas di Kota Subulussalam	II-58
Gambar 2.32	Ketersediaan Air Baku Domestik dan Industri (meter kubik per detik)	II-60
Gambar 2.33	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-61
Gambar 2.34	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-61
Gambar 2.35	Konsumsi Listrik per Kapita Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-62
Gambar 2.36	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-63
Gambar 2.37	Peta Jaringan Air Bersih Perpipaan di Kota Subulussalam	II-63
Gambar 2.38	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-65
Gambar 2.39	Pengelolaan Sampah di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-66
Gambar 2.40	Peta Rawan Bencana Kota Subulussalam	II-69
Gambar 2.41	Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-69
Gambar 2.42	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-70
Gambar 2.43	Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Subulussalam Tahun 2024	II-73
Gambar 2.44	Proyeksi Penduduk Kota Subulussalam Tahun 2025 dan 2030	II-74
Gambar 2.45	Perbandingan Laju PDRB Kota Subulussalam, Provinsi Aceh Dan Nasional Tahun 2020-2024	II-75
Gambar 2.46	PDRB per Kapita Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 .	II-80
Gambar 2.47	Konsumsi Rumah Tangga per Kapita per Tahun (Juta Rp)	II-82
Gambar 2.48	Indeks Gini Kota Subulussalam, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024	II-83
Gambar 2.49	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kota Subulussalam, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024	II-84
Gambar 2.50	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Subulussalam, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024	II-84
Gambar 2.51	Persentase Penduduk Miskin di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh Dan Nasional Tahun 2020-2024	II-86
Gambar 2.52	Usia Harapan Hidup Kota Subulussalam, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024	II-87
Gambar 2.53	Angka Prevalensi Kota Subulussalam Tahun 2021-2024 .	II-88
Gambar 2.54	Indeks Penanganan Khusus <i>Stunting</i> (IPKS) Kota Subulussalam Tahun 2021-2024	II-88

Gambar 2.55	Persentase Masyarakat yang Mengeluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan (dalam persen) di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-89
Gambar 2.56	Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-90
Gambar 2.57	Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-91
Gambar 2.58	Angka Kematian Balita (AKABA) di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-92
Gambar 2.59	Persentase Kondisi Gizi Balita Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-92
Gambar 2.60	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Subulussalam (dalam Rupiah), Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024	II-93
Gambar 2.61	Angka Harapan Lama Sekolah Kota Subulussalam (dalam tahun) Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024	II-94
Gambar 2.62	Indikator Masyarakat Digital Indonesia Kota Subulussalam Tahun 2022-2024	II-95
Gambar 2.63	Angka Melek Huruf Kota Subulussalam (dalam persen), Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024	II-95
Gambar 2.64	Angka Literasi dan Numerasi Kota Subulussalam Tahun 2022-2024	II-96
Gambar 2.65	Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-97
Gambar 2.66	Indeks Pembangunan Syariat (IPS) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-97
Gambar 2.67	Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Subulussalam Tahun 2021-2023	II-98
Gambar 2.68	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Kota Subulussalam Tahun 2020-2023	II-99
Gambar 2.69	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-99
Gambar 2.70	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-100
Gambar 2.71	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-100
Gambar 2.72	Rasio Penduduk dengan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Perguruan Tinggi di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 (Per 10.000 penduduk	II-101
Gambar 2.73	Persentase Wirausaha di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-104
Gambar 2.74	Indeks SPBE Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-106
Gambar 2.75	Persentase Rumah Tinggal Layak Huni Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-108
Gambar 2.76	Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-109
Gambar 2.77	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-117

Gambar 2.78	Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-118
Gambar 2.79	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-118
Gambar 2.80	Peta Sebaran Fasilitas Pendidikan di Kota Subulussalam	II-121
Gambar 2.81	Cakupan Desa UCI (Universal Child Immunization) di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-126
Gambar 2.82	Kasus Tuberkulosis di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-127
Gambar 2.83	Kasus HIV/AIDS yang Dilaporkan di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-128
Gambar 2.84	Angka Kesakitan Diare di Kota Subulussalam Tahun 2020-2023	II-129
Gambar 2.85	Kasus Demam Berdarah Dengue di Kota Subulussalam Tahun 2020-2025	II-130
Gambar 2.86	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kota Subulussalam Tahun 2020-2023	II-130
Gambar 2.87	Persentase Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-132
Gambar 2.88	Cakupan Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi 0-6 Bulan di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-132
Gambar 2.89	Angka Kematian Kasar / <i>Gross Death Rate</i> di RSUD Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-133
Gambar 2.90	Angka Kematian Murni / <i>Nett Death Rate</i> di RSUD Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-134
Gambar 2.91	<i>Bed Occupancy Rate</i> di RSUD Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-135
Gambar 2.92	<i>Bed Turn Over</i> (BTO) di RSUD Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-135
Gambar 2.93	<i>Turn Of Interest</i> (TOI) di RSUD Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-136
Gambar 2.94	<i>Average Length Of Stay</i> (ALOS) di RSUD Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-140
Gambar 2.95	Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Luas (meter persegi)	II-140
Gambar 2.96	Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum	II-140
Gambar 2.97	Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan	II-141
Gambar 2.98	Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar	II-141
Gambar 2.99	Jumlah Bencana Hidrometeorologis di Kota Subulussalam	II-143
Gambar 2.100	Jumlah Korban Bencana Hidrometeorologis di Kota Subulussalam	II-143
Gambar 2.101	Rekapitulasi Penduduk yang tergolong DTKS di Kota Subulussalam Tahun 2021-2024	II-145

Gambar 2.102	Rekapitulasi Keluarga yang tergolong DTKS di Kota Subulussalam Tahun 2021-2024	II-145
Gambar 2.103	Jumlah Penduduk Usia Kerja Kota Subulussalam Tahun 2024	II-147
Gambar 2.104	Proporsi Perempuan Pernah Kawin 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Pertama Kali Berumur Kurang dari 20 Tahun Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-148
Gambar 2.105	Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang Ditangani Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-149
Gambar 2.106	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Kota Subulussalam Tahun 2021-2024	II-149
Gambar 2.107	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Subulussalam Tahun 2021-2024	II-150
Gambar 2.108	Luas Tutupan Lahan di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-152
Gambar 2.109	Layanan Kinerja LLAJ Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-158
Gambar 2.110	Persentase Anggota Rumah Tangga Mengakses Internet Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-161
Gambar 2.111	Persentase Anggota Rumah Tangga Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel atau Komputer di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-162
Gambar 2.112	Jumlah Koperasi di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-163
Gambar 2.113	Nilai Indeks Pembangunan Statistik Kota Subulussalam Tahun 2023-2024	II-169
Gambar 2.114	Perpustakaan di Kota Subulussalam	II-171
Gambar 2.115	Kunjungan Perpustakaan Daerah Tahun 2020-2024	II-172
Gambar 2.116	Koleksi Buku Perpustakaan Daerah Tahun 2020-2024 ...	II-172
Gambar 2.117	Peta Kawasan TAHURA Lae Kombih	II-180
Gambar 2.118	Peta Blok Kawasan TAHURA Lae Kombih	II-181
Gambar 2.119	Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-183
Gambar 2.120	Banyaknya Industri Menurut Jenisnya di Kota Subulussalam Tahun 2021-2024	II-184
Gambar 2.121	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-185
Gambar 2.122	Persentase Qanun Kota Subulussalam yang Disahkan Tahun 2020-2024	II-185
Gambar 2.123	Capaian Kinerja Program RKPK dan RPJMD 2020-2024 .	II-189
Gambar 2.124	Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Subulussalam Tahun 2024	II-191
Gambar 2.125	Indeks Profesionalitas ASN Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-192
Gambar 2.126	Persentase Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Tingkat Penanganan Pengaduan Oleh Masyarakat Di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-193

Gambar 2.127	Jumlah Temuan BPK di Kota Subulussalam Tahun 2020-2023	II-194
Gambar 2.128	Persentase Penyelesaian Potensi Konflik Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-195
Gambar 2.129	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Syariat Islam Tahun 2020-2024	II-197
Gambar 2.130	Capaian TPB Kota Subulussalam Berdasarkan Tujuan ...	II-216
Gambar 4.1	8 (Delapan) Prioritas Nasional	IV-4

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan 2024
- Lampiran 2 Evaluasi Pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah
- Lampiran 3 Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama
- Lampiran 4 Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Bidang Urusan
- Lampiran 5 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Kota Subulussalam Tahun 2026
- Lampiran 6 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Lampiran 7 Alokasi Anggaran untuk Standar Pelayanan Minimal pada RKPK Subulussalam Tahun 2026
- Lampiran 8 Konsistensi Program Antara RPD/RPJMD Tahun Pelaksanaan 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan Nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan ini adalah awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, serta berwawasan lingkungan. Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK). RKPK Subulussalam tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Rencana Pembangunan Aceh (RPA) dari Pemerintah Aceh.

RKPK Subulussalam digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Kota dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Subulussalam hingga akhirnya menjadi Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) dan pada akhirnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD).

Dokumen RKPK Subulussalam Tahun 2026 pada tahap rancangan awal masih mempedomani RPD dan belum sepenuhnya mempedomani RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 dikarenakan masih dalam tahapan penyusunan rancangan awal. Selain itu, RKPK ini juga mempedomani RPA dan RKPA dari Pemerintah Aceh, RKP, Program Strategis Nasional, dan Pedoman Penyusunan RKPK. Proses penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPK dilakukan

secara mendalam melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) mulai dari proses Musrenbang Kampung, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang serta penyusunan dan penetapan RKPK. Untuk mensinergikan dan mengharmoniskan penyusunan RKPK, dilakukan penjangkaran saran dan masukan dari *stakeholder* melalui Konsultasi Publik. Selain itu, hasil reses maupun pokok-pokok pikiran DPRK Subulussalam juga menjadi masukan dalam penyusunan RKPK yang diharmonisasi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan sistem informasi terkait lainnya.

Penyusunan RKPK Subulussalam Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa RKPK disusun dengan tahapan yaitu:

- 1) Penyusunan Rancangan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusunan RKPK Subulussalam Tahun 2026 tanggal 18 Desember 2024
- 2) Penyusunan Rancangan Awal RKPK tanggal 18 Februari 2025
- 3) Penetapan Pagu Indikatif tanggal 18 Februari 2025
- 4) Pendistribusian Surat Edaran Wali Kota Subulussalam kepada Perangkat Daerah tentang Penyusunan Renja OPD tanggal 4 Maret 2025
- 5) Penyempurnaan Rancangan Awal RKPK Tahun 2026 tanggal 5 Maret 2025
- 6) Pengajuan Rancangan Awal RKPK kepada Wali Kota Subulussalam melalui Sekretaris Daerah tanggal 10 Maret 2025
- 7) Musrenbang RKPK Tingkat Kecamatan Tanggal 20 Maret 2025
- 8) *Desk* Forum Perangkat Daerah tanggal 21, 24, 25 Maret 2025
- 9) Penyusunan Rancangan RKPK tanggal 8 April 2025
- 10) Forum Konsultasi Publik RKPK tanggal 9 April 2025
- 11) Musrenbang RKPK Tingkat Kota pada tanggal 16 April 2025
- 12) *Desk Musrenbang* RKPK pada tanggal 21-23 April 2025
- 13) Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan RKPA pada tanggal 22-25 April 2025
- 14) *Desk* DOKA dan TDBH Migas RKPA pada tanggal 7-8 Mei 2025
- 15) Penyusunan Rancangan Akhir RKPK pada tanggal 9 Mei 2025
- 16) Reviu Inspektorat direncanakan pada tanggal 12 Juni 2025
- 17) Tindak lanjut Hasil Reviu Rancangan Akhir RKPK Subulussalam Tahun 2026 pada tanggal 16 Juni 2025
- 18) Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Subulussalam pada tanggal 16 Juni 2025
- 19) Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Subulussalam pada tanggal 14 Juli 2025

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPK Subulussalam Tahun 2026 sebagaimana diamanatkan peraturan perundangan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10);
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 10) Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 13) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - 14) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
- 20) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 21) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032. (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9; Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9);
- 22) Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
- 23) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Aceh tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 130);
- 24) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
- 25) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8);
- 26) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);
- 27) Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2014 Nomor 3)
- 28) Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 85);
- 29) Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Subulussalam Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2018 Nomor 1);

- 30) Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 78 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Subulussalam Tahun 2025-2026 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2023 Nomor 78).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan merupakan keterkaitan program strategis antar dokumen. Dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara, keterkaitan dimaksud telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1.

Posisi dokumen RKPK sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran dokumen RPJMD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RKPD tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, yang juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah dimaksud selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Dalam hubungannya dengan RKP, RKPD diselaraskan dengan RKP melalui forum Musrenbang Nasional dan RKPA melalui forum Musrenbang Provinsi Aceh.

Dari gambar 1.1., dijelaskan hubungan antara dokumen RKPK Subulussalam Tahun 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

a. Hubungan dengan RKPA Tahun 2026

RKPK Subulussalam Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada RKPA Tahun 2026 dan RKP Tahun 2026 serta program strategis nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Keterkaitan RKPK Subulussalam Tahun 2026 dan RKPA Tahun 2026 meliputi pemetaan kebijakan (tema pembangunan), sasaran dan prioritas pembangunan serta program prioritas Tahun 2026.

b. Hubungan dengan RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029

Rancangan Awal RKPK masih mempedomani RPD Kota Subulussalam Tahun 2025-2026, dengan penyesuaian pada RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029. Perumusan permasalahan dan isu strategis RKPK Subulussalam Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2024. RKPK Subulussalam Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama dari RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029. Penyusunan RKPK Subulussalam Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 dengan penyelarasan sasaran dan prioritas

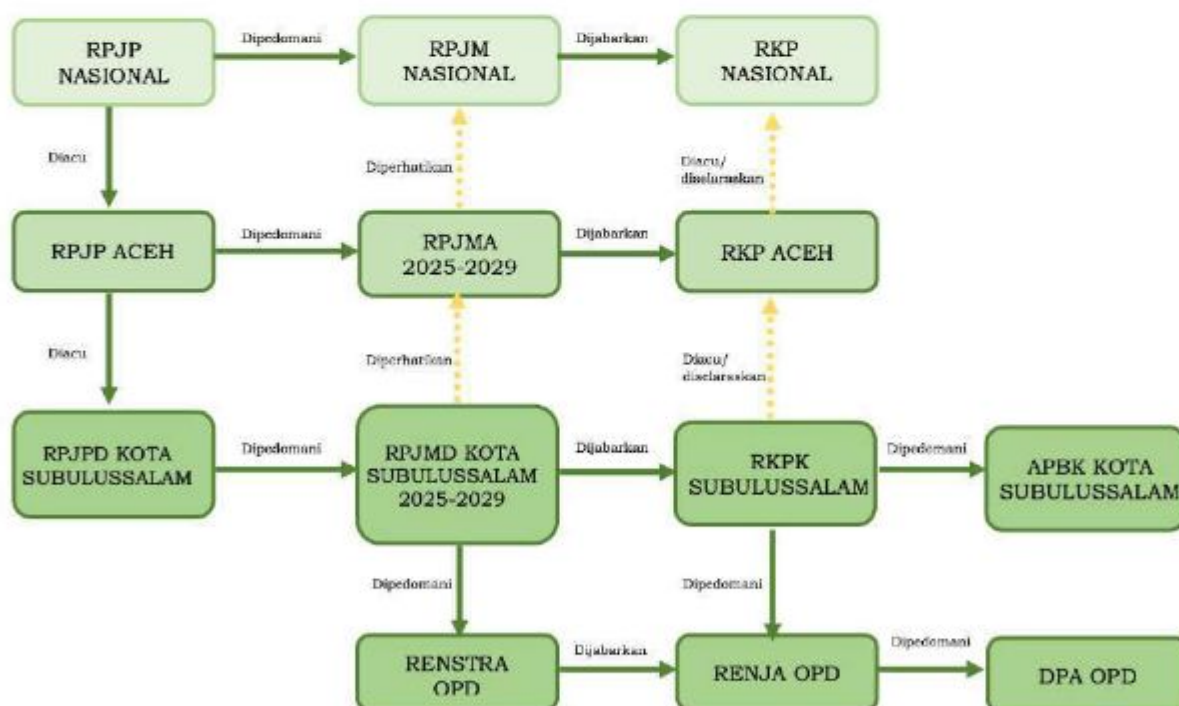
pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah.

c. Hubungan dengan Renja-PD Tahun 2026

RKPK Subulussalam Tahun 2026 menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam penyempurnaan rancangan akhir Renja-PD Tahun 2026. Keselarasan antara kedua dokumen ini meliputi permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif Tahun 2026.

d. Hubungan dengan KUA-PPAS dan R-APBK 2026

RKPK Subulussalam Tahun 2026 menjadi dasar/acuan dalam penyusunan rancangan KUA-PPAS Kota Subulussalam dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (R-APBK) Tahun 2026. Keterkaitan antar dokumen ini mencakup penyelarasan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam rancangan KUA-PPAS dan R-APBK Subulussalam Tahun 2026 dengan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif yang terdapat dalam RKPK Subulussalam Tahun 2026.



Gambar 1.1
Hubungan Antar-Dokumen Perencanaan Terhadap RKPK Tahun 2026

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPK Subulussalam Tahun 2026 dimaksudkan sebagai Pedoman arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 serta sebagai upaya mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar-wilayah, antar-sektor pembangunan dan antar-tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam prioritas pembangunan daerah Kota Subulussalam.

Sedangkan tujuan dari disusunnya dokumen RKPK Tahun 2026 ini adalah untuk:

- 1) Memberikan landasan operasional bagi seluruh SKPK di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026;
- 2) Tersedianya acuan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Subulussalam Tahun 2026 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Subulussalam Tahun 2026;
- 3) Tersedianya acuan untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBK) Tahun 2026; dan
- 4) Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

Dengan demikian RKPK merupakan bahan acuan bagi setiap pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan daerah tahun 2026 sehingga tercipta sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar-bidang/fungsi dan antar-wilayah (kecamatan) untuk mencapai Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dengan mengacu pada tujuan pembangunan nasional maupun Provinsi Aceh.

1.5. Sistematika Dokumen RKPK

Berdasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, RKPK Subulussalam Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Memuat gambaran umum tentang penyusunan RKPK yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan dokumen RKPK.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat kondisi umum (dari Aspek Geografi Dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya

Saing Daerah), Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPK sampai tahun berjalan dan realisasi pencapaian RPJMD tahun 2025–2029, serta Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2024 dan perkiraan tahun 2026, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan dalam pembangunan perekonomian daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPK tahun 2024 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah

Memuat rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPK) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 serta aspirasi dari masyarakat.

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB VII Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Nama Subulussalam diberikan oleh Gubernur Aceh Prof. Ali Hasyimi pada tanggal 14 September 1962. Pada saat itu, wilayah Kota Subulussalam belum menjadi wilayah otonom dan masih bergabung dengan Kabupaten Aceh Selatan Kecamatan Simpang Kiri. Subulussalam juga menjadi ibukota Kecamatan Simpang Kiri. Pada tahun 1999, terjadi pemekaran Kabupaten Aceh Singkil dari Kabupaten Aceh Selatan dan wilayah Kota Subulussalam berada di bawahnya.

Pembentukan kecamatan-kecamatan pecahan Simpang Kiri dimulai pada tahun 2000 dimana Kecamatan Simpang Kiri dimekarkan dengan Pembentukan Kecamatan Rundeng sehingga wilayah Kecamatan Simpang Kiri terpecah menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Rundeng dan Kecamatan Simpang Kiri. Kemudian pada Tahun 2001 terjadi lagi pemekaran dari kecamatan Simpang Kiri sebanyak 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Penanggalan, Kota Baharu dan Kecamatan Sultan Daulat sehingga wilayah Simpang Kiri terpecah menjadi 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Rundeng, Kecamatan Kota Baharu, Kecamatan Penanggalan dan Kecamatan Sultan Daulat. Selanjutnya pada pertengahan tahun 2002 terjadi lagi pemekaran Kecamatan dari Kecamatan Simpang Kiri sebanyak 1 Kecamatan yaitu pembentukan Kecamatan Singkohor sebagai pemekaran dari Kecamatan Kota Baharu sehingga wilayah Kecamatan Simpang Kiri terpecah menjadi 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Rundeng, Kecamatan Kota Baharu, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Sultan Daulat dan Kecamatan Singkohor. Dan terakhir pada awal tahun 2005 terjadi pemekaran Kecamatan yang berasal dari wilayah Kecamatan Simpang Kiri sebanyak 1 Kecamatan yaitu dengan pembentukan Kecamatan Longkib sebagai pemekaran dari Kecamatan Rundeng sehingga wilayah Kecamatan Simpang Kiri terpecah menjadi 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Rundeng, Kecamatan Kota Baharu, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Longkib.

Kota Subulussalam resmi menjadi wilayah otonom dengan keluarnya Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kota Subulussalam telah menjadi 1 (satu) dari 5 (lima) kota di wilayah Provinsi Aceh dan menjadi kabupaten/kota termuda. Kota Subulussalam saat ini memiliki 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Longkib, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Rundeng, Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Sultan Daulat.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

2.1.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Secara astronomis, Kota Subulussalam terletak di antara 2°27'30" - 3°00'00" LU dan 97°45'00' - 98°10'00" BT dengan luas wilayah 1.391 Km persegi (Kota Subulussalam Dalam Angka Tahun 2024) atau 1.184,04 Km persegi (Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014). Sedangkan secara geografis Kota Subulussalam berada di bagian Paling selatan Provinsi Aceh. Secara administratif, wilayah Kota Subulussalam memiliki konstelasi regional yang berada di bagian perbatasan antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara.
- Sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat, Provinsi Sumatera Utara.
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil.
- Sebelah barat : berbatasan dengan Kecamatan Trumon dan Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan.

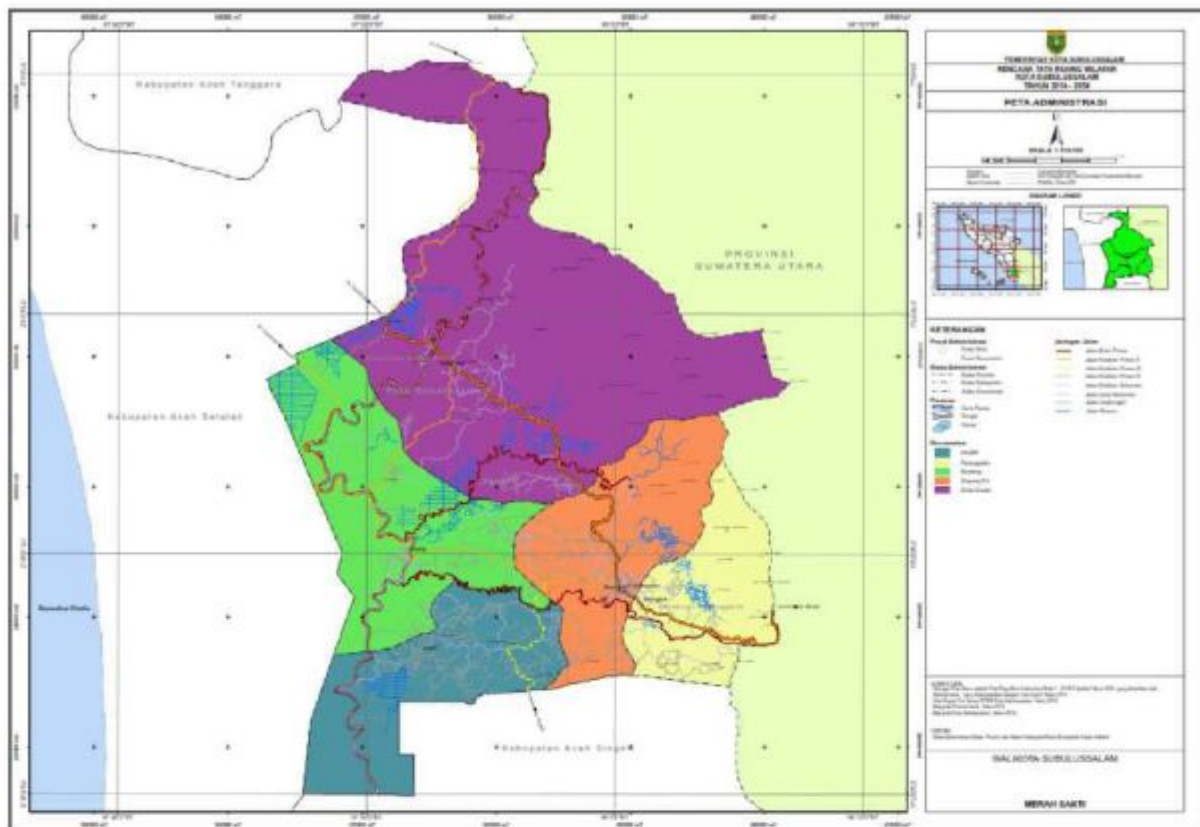
Secara administrasi hingga tahun 2024 Kampung (Desa) di Kota Subulussalam seluruhnya berjumlah 82 kampung, yang terdiri dari 17 kampung di Kecamatan Simpang Kiri, 13 kampung di Kecamatan Penanggalan, 23 kampung di Kecamatan Rundeng, 19 kampung di Kecamatan Sultan daulat, 10 kampung di Kecamatan Longkib. Berikut disajikan peta administrasi Kota Subulussalam dan rincian luas wilayah kecamatan di Kota Subulussalam dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Luas Wilayah Masing-masing Kecamatan di Kota Subulussalam Tahun 2024

No.	Nama Kecamatan	Luas (Km ²)	Luas (Ha)	Jumlah Kampung
1	Simpang Kiri	220,11	22.011,25	17
2	Penanggalan	116,12	11.612,20	13
3	Rundeng	158,15	15.815,29	23
4	Sultan Daulat	523,70	52.369,74	19
5	Longkib	165,96	16.596,00	10
Total		1.184,04	118.404,48	82

Sumber : Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014



Sumber: Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kota Subulussalam

Keuntungan letak geografis dan batas wilayah Kota Subulussalam antara lain:

1) Akses ke Jalur Perdagangan

- Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Aceh Tenggara, yang memungkinkan akses perdagangan antara wilayah pesisir dan pedalaman.
- Dekat dengan Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, sehingga berpotensi sebagai daerah transit atau penyangga logistik.

2) Sumber Daya Alam yang Melimpah

- Memiliki hutan tropis yang kaya dengan hasil kayu dan non-kayu (seperti karet, kelapa sawit, dan hasil hutan lainnya).
- Memiliki sungai-sungai yang dapat dimanfaatkan untuk irigasi, transportasi, dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro.

3) Potensi Pariwisata Alam

Memiliki keindahan alam seperti air terjun, hutan, dan sungai yang berpotensi untuk pengembangan ekowisata.

4) Kontribusi Kota Subulussalam terhadap Wilayah Sekitarnya

- Kontribusi Ekonomi Menghasilkan komoditas perkebunan seperti karet dan kelapa sawit yang didistribusikan ke wilayah sekitar dan ekspor.
- Menjadi pusat perdagangan hasil hutan dan pertanian bagi kabupaten tetangga seperti Aceh Singkil dan Aceh Tenggara.
- Kontribusi Infrastruktur Sebagai penghubung transportasi darat antara Aceh Tenggara dan wilayah pesisir barat Aceh.
- Memiliki potensi pengembangan jalan tol atau jalan nasional untuk meningkatkan konektivitas regional.
- Kontribusi Lingkungan Hidup Hutan di Subulussalam berperan sebagai paru-paru hijau dan penyangga ekosistem bagi wilayah sekitarnya.
- Melindungi daerah aliran sungai (DAS) yang penting bagi pasokan air bersih di Aceh Singkil dan sekitarnya.
- Kontribusi Sosial dan Budaya Memiliki keberagaman etnis (Aceh, Batak, Singkil) yang memperkaya budaya regional.
- Menjadi pusat pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terencil sekitarnya.

2.1.1.2. Kondisi Topografi

Topografi merupakan bentuk permukaan suatu lahan yang dikelompokkan berdasarkan perbedaan ketinggian (*amplitude*) dari permukaan bumi (bidang datar) suatu bentuk bentang lahan (*landform*). Berdasarkan karakteristik topografinya, Kota Subulussalam diklasifikasikan menjadi 4 (Empat) bagian, yaitu:

- 1) Dataran Rendah yang menjadi dominasi karakteristik bentang alam Kota Subulussalam, dengan kemiringan 00 – 20 dengan persentase luas terhadap luas kota adalah 45,00 persen;
- 2) Daerah/dataran Landai dengan kemiringan 20 – 50 dengan persentase luas terhadap luas kota adalah 10,80 persen; dan
- 3) Dataran tinggi dengan kemiringan 50 – 150 dengan persentase luas terhadap luas kota adalah 26,45 persen.
- 4) Dataran perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan 150 – 1000, yaitu:
 - a. Daerah perbukitan dengan kemiringan 150 – 400 dengan persentase luas terhadap luas kota adalah 17,00 persen; dan
 - b. Daerah pegunungan terjal dengan kemiringan melebihi 400 dengan persentase luas terhadap luas kota adalah 1,12 persen.

Adapun Kondisi topografi dan jarak kampong/desa pada masing-masing kecamatan dapat dijelaskan berikut:

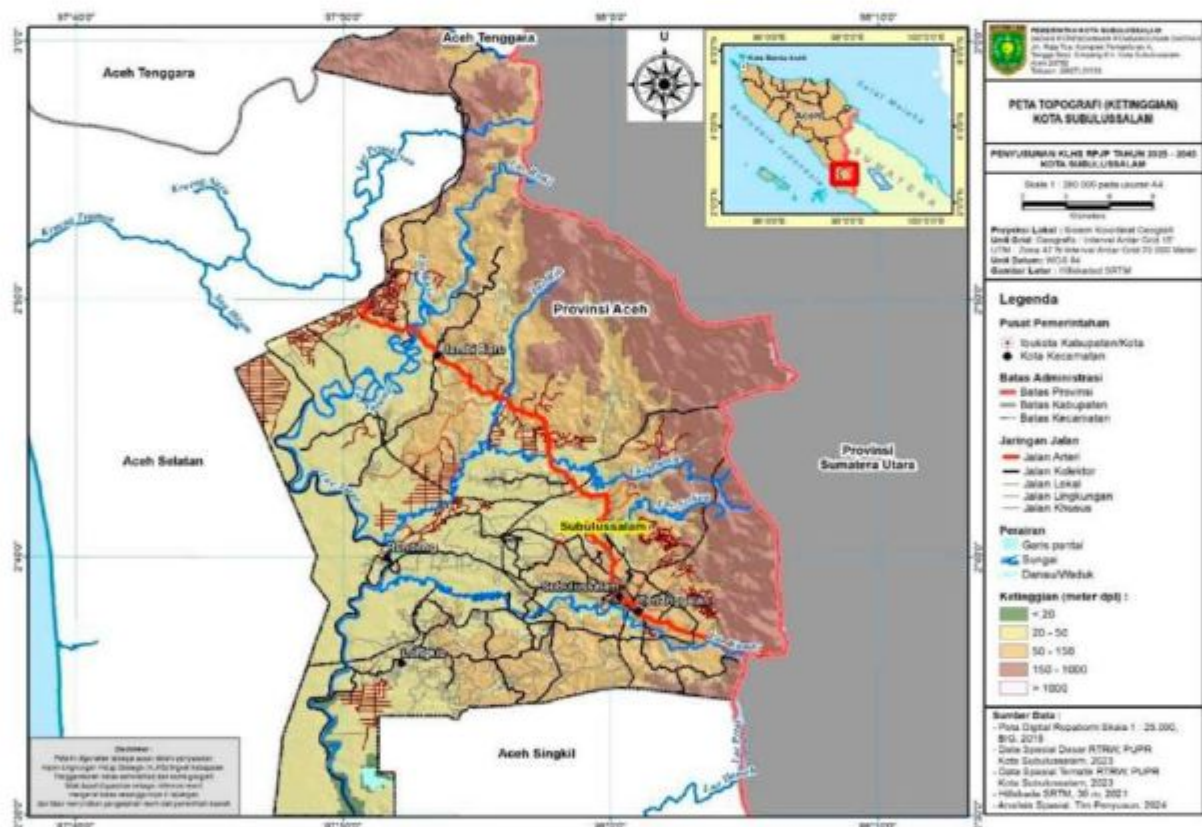
- 1) Keadaan topografi Kecamatan Simpang Kiri; Keadaan topografi di kecamatan Simpang Kiri pada umumnya datar, hanya dua desa saja yang sebagian besar keadaan topografinya berbukit yaitu Desa Sikelondang dan Desa Subulussalam Barat. Ketinggian rata-rata antara 70-221 mdpl. Posisi desa yang terjauh dari Ibukota Kecamatan Simpang Kiri (Desa Subulussalam) adalah Desa Makmur Jaya sejauh 11,40 Km dan desa yang terdekat adalah Desa Subulussalam Timur sejauh 0,17 Km. Secara umum semua desa di Kecamatan Simpang Kiri sangat mudah untuk dijangkau dengan semua jenis kendaraan.
- 2) Keadaan topografi Kecamatan Penanggalan; Pada umumnya berbukit-bukit, hanya lima desa saja yang memiliki keadaan topografi datar yaitu Desa Lae Motong, Desa Cepu, Desa Penanggalan, Desa Dasan Raja dan Desa Penanggalan Timur. Ketinggian rata-rata antara 70-221 mdpl. Desa yang terjauh dari ibukota Kecamatan Penanggalan (Desa Penanggalan) adalah Desa Lae Ikan sejauh 8,06 Km. Desa Lae Ikan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pak-Pak Barat (Provinsi Sumatera Utara). Desa yang terdekat dengan ibukota Kecamatan adalah Desa Dasan Raja dan Penanggalan Barat sejauh 0,5 Km. Kecamatan Penanggalan merupakan andalan Pemerintah Kota Subulussalam sebagai pintu gerbang masuk ke provinsi Aceh wilayah barat.
- 3) Keadaan topografi Kecamatan Rundeng; Pada umumnya datar, dengan ketinggian rata-rata hanya 20 mdpl dan hampir semua desa di Kecamatan Rundeng berada di pinggiran sungai. Geruguh merupakan desa yang paling jauh dari ibukota kecamatan (Desa Pasar Rundeng) yang berjarak 29,04 Km. Transportasi yang digunakan untuk menjangkau setiap desa di Kecamatan Rundeng umumnya menggunakan transportasi air berupa sampan, kapal *boat* atau sejenisnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi jalan yang belum baik atau sebahagian besar badan jalan belum beraspal (jalan tanah).
- 4) Keadaan topografi Kecamatan Sultan Daulat; Pada umumnya berbukit-bukit, hanya enam desa saja yang memiliki keadaan topografi datar yaitu, Desa Pulo Kedep, Suka Maju, Jambi Baru, Singgersing, Pasir Belo serta Jabi-Jabi, dengan ketinggian rata-rata antara 10 meter sampai 350 mdpl. Posisi desa yang terjauh dari ibukota kecamatan adalah Desa Lae Simolap yaitu sejauh 23,10 Km dan desa yang terdekat adalah Desa Gunung Bakti yaitu sejauh 1,16 Km. sebagian kecil letak desa yang ada di Kecamatan Sultan Daulat terletak di pinggiran sungai.
- 5) Keadaan topografi Kecamatan Longkib; Pada umumnya berbukit, hanya tiga desa yang topografinya datar yaitu Desa Longkib, Panji dan Sepang. Posisi desa yang terjauh dari ibukota kecamatan adalah Desa Sepang yaitu sejauh 16,97

Km dan desa yang terdekat adalah Desa Lac Saga sejauh 5,30 Km dari Darul Aman (Ibukota Kecamatan).

Tabel 2.2.
Klasifikasi Topografi Berdasarkan Ketinggian Tiap Kecamatan di Kota Subulussalam

Kecamatan	Topografi / Ketinggian (mdpl)					Luas (Ha)
	<20	20-50	50-150	150-1000	>1000	
Longkib	989,56	10.963,16	3.862,58			15.815,30
Penanggalan		337,19	4.806,99	6.468,04		11.612,22
Rundeng		21.931,70	79,55			22.011,25
Simpang Kiri		4.695,46	9.060,91	2.839,63		16.596,00
Sultan Daulat		12.715,24	19.719,70	19.789,98		52.369,74
Kota Subulussalam	989,56	50.642,75	37.529,73	29.097,65	144,82	118.404,48

Sumber : KLHS RPJPD Kota Subulussalam Tahun 2025-2045



Sumber : KLHS RPJPD Kota Subulussalam Tahun 2025-2045

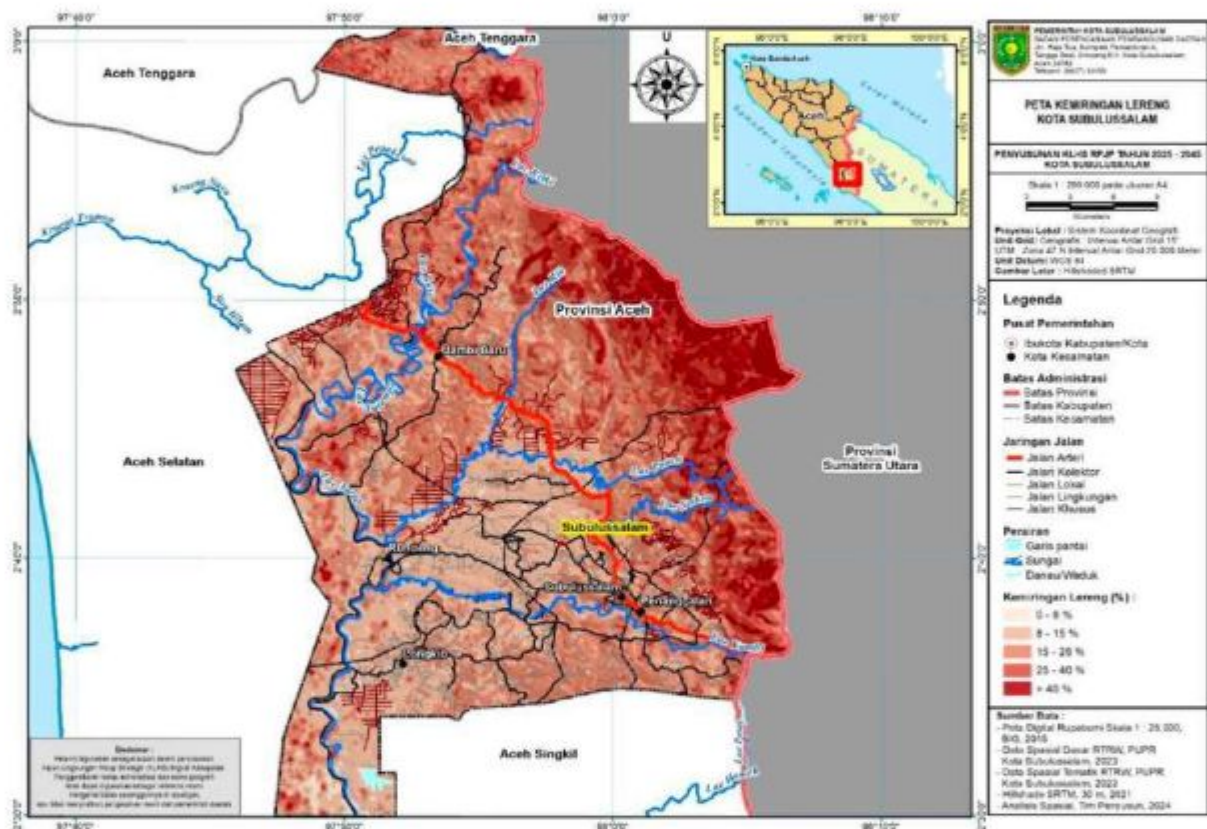
Gambar 2.2.
Peta Topografi Kota Subulussalam

Tabel 2.3.

Klasifikasi Kelerengan Tiap Kecamatan di Kota Subulussalam

Kecamatan	Kemiringan Lereng					Luas (Ha)
	0-8%	8-15%	15-25%	25-40%	>40%	
Longkib	990,16	9.457,61	4.866,94	403,56	97,01	15.815,28
Penanggalan		1.381,77	4.757,19	3.907,53	1.565,71	11.612,20
Rundeng	702,97	12.828,26	6.828,37	1.337,86	313,79	22.011,25
Simpang Kiri	52,57	4.836,29	8.461,31	2.623,65	622,20	16.596,02
Sultan Daulat	181,87	8.120,12	24.130,70	13.425,93	6.511,13	52.369,75
Kota Subulussalam	1.927,57	36.624,05	49.044,51	21.698,51	9.109,84	118404,48

Sumber : KLHS RPJPD Kota Subulussalam Tahun 2025-2045



Sumber : KLHS RPJPD Kota Subulussalam Tahun 2025-2045

Gambar 2.3.

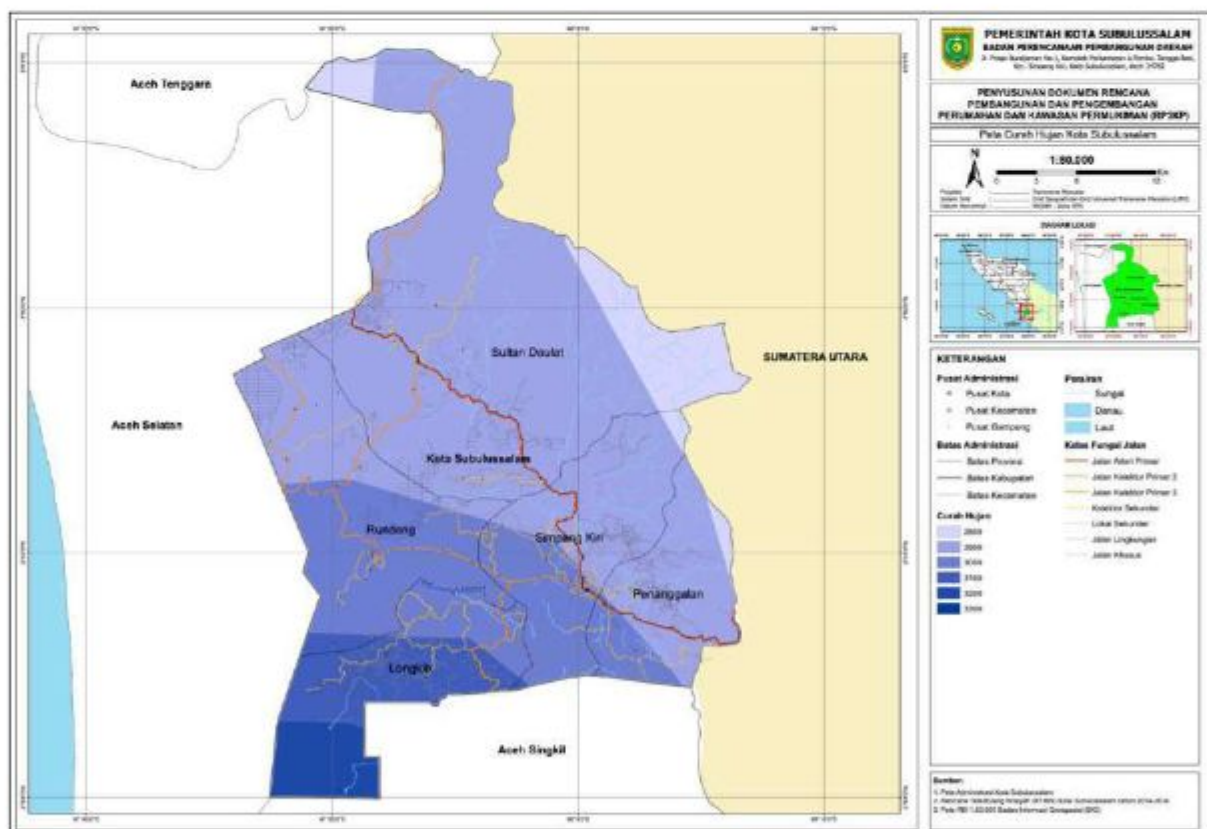
Peta Kemiringan Lereng Kota Subulussalam

Kota Subulussalam memiliki klasifikasi kelerengan 0-8 persen, 8-15 persen, 15-25 persen, 25-40 persen, dan lebih dari 40 persen. Berdasarkan kelompok kelerengan tersebut kemiringan lereng 15-25 persen adalah yang paling dominan dengan luas mencapai 49.044,51 Ha (41,42 persen) dari luas Kota Subulussalam. Disusul dengan kemiringan lereng 8-15 persen dengan luas mencapai 36.624,05 Ha (30,93 persen). Kondisi ketinggian secara keseluruhan berada di bawah kurang dari 1.500 meter dpl. Berikut pada tabel di bawah ini penjelasan dari masing-masing kemiringan lereng di Kota Subulussalam berdasarkan klasifikasinya di tiap

kecamatan serta gambar yang menunjukkan agihan kemiringan lereng Kota Subulussalam yang disajikan dalam peta kemiringan lereng.

2.1.1.3. Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim sangat berpengaruh pada suatu daerah, baik pada potensi sumberdaya alam maupun dalam potensi kebencanaan alam. Kota Subulussalam terletak pada wilayah yang dipengaruhi oleh dua jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim tropika. Iklim musim sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Biasanya satu periode perubahan angin adalah 6 bulan. Iklim musim terdiri dari 2 jenis, yaitu angin musim barat daya (Muson Barat) dan angin musim timur laut (Muson Timur). Angin muson barat bertiup sekitar bulan Oktober hingga April yang basah sehingga menyebabkan hujan. Angin muson timur bertiup sekitar bulan April hingga bulan Oktober yang sifatnya kering yang mengakibatkan wilayah mengalami musim kering/kemarau.



Sumber : RP3KP Kota Subulussalam, 2023

Gambar 2.4.
Peta Curah Hujan Kota Subulussalam

Sebagai daerah yang berada pada iklim tropis, kondisi iklim di Kota Subulussalam juga dipengaruhi oleh iklim tropis yang bersifat panas sehingga

menyebabkan curah hujan tinggi. Parameter iklim, seperti curah hujan, suhu udara, kelembaban udara dan arah angin, sangat berpengaruh pada potensi pengembangan sumberdaya alam, baik dilihat sebagai potensi cadangan alamiah maupun potensi alam berkesinambungan. Pada tahun 2022, Kota Subulussalam tercatat memiliki:

- a) rata-rata suhu udara minimum 28,17°C dan maksimum 33,67°C;
 - b) rata-rata curah hujan perbulan maksimum 240,33 mm dengan rata-rata hari hujan per bulan maksimum 19 kali;
 - c) kelembaban udara minimum 48 persen dan maksimum 97 persen;
 - d) tekanan udara antara 991,6 mb – 1018,5 mb;
- arah angin terbanyak adalah Angin Selatan dengan kecepatan angin rata-rata 0,1 – 5,4 m/s (Sumber: <https://www.bmkg.go.id>).

2.1.1.4. Kondisi Geologi

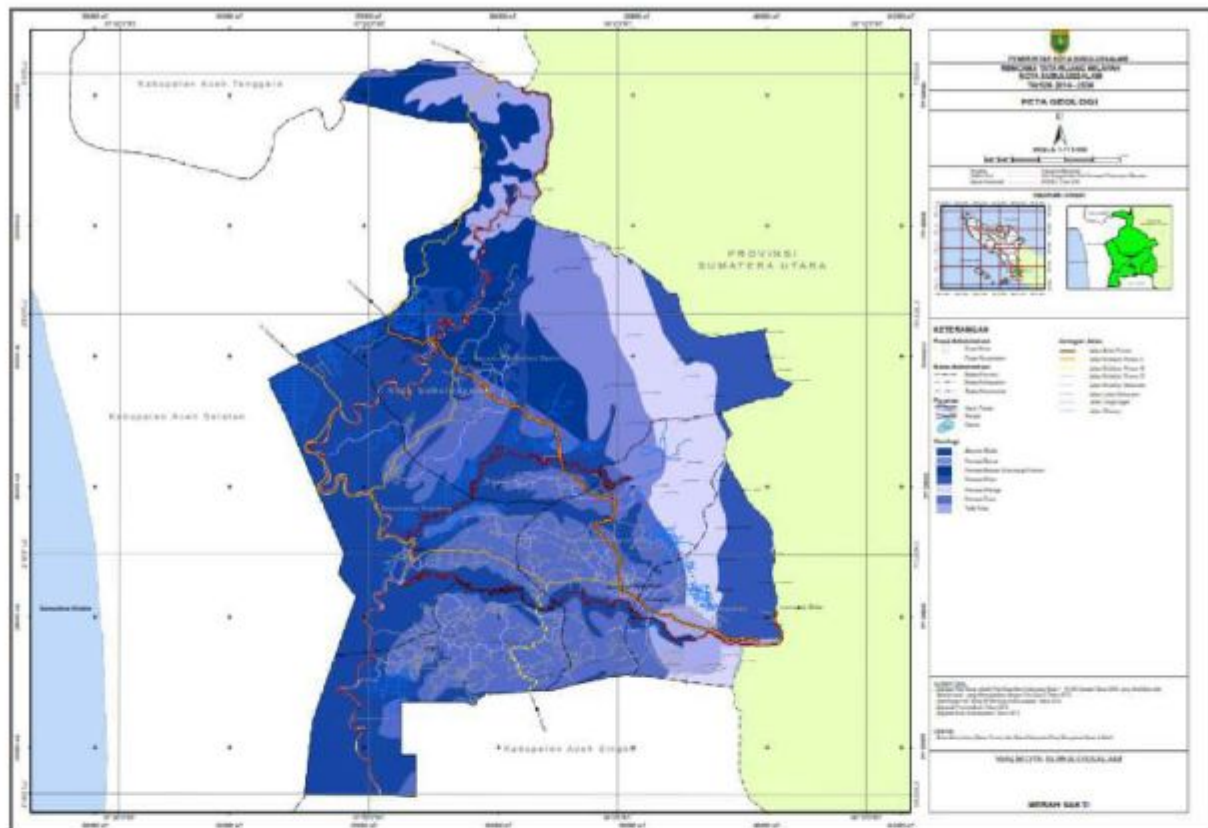
Ditinjau dari struktur geologis, Kota Subulussalam memiliki struktur geologi yang terdiri atas *arenite sandstone*, *boulder-sandstone*, *conglomerate*, *sandstone*, *tuff*, *volcanic rock*. Dari beragamnya struktur geologis tersebut, Kota Subulussalam didominasi oleh struktur geologi *conglomerate*. Sedangkan struktur geologi yang memiliki komposisi terkecil adalah *tuff*.

Struktur *arenite sandstone* mendominasi di wilayah perbukitan di bagian timur Kota Subulussalam beserta dengan struktur *sandstone*, yaitu di Kecamatan Penanggalan. Struktur *conglomerate* yang mendominasi struktur geologi Kota Subulussalam tersebar di seluruh kecamatan, dengan dominasi pada Kecamatan Simpang Kiri. Komposisi *tuff* dan *volcanic rock* mendominasi di bagian utara pada areal hutan yakni di Kecamatan Sultan Daulat. Sementara komposisi *boulder-sandstone* mendominasi areal di samping sungai-sungai yang melintasi Kota Subulussalam, terutama sungai Lae Kombih, Lae Soraya, Lae Belegen, dan Lae Batu-batu. Selanjutnya peta geologi Kota Subulussalam dapat dilihat pada Gambar 2.5. dan Karakteristik Geologi Kota Subulussalam disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4.
Karakteristik Geologi Kota Subulussalam

Jenis Geologi	Luas (Ha)
Aluvium Muda (Qh)	38.962,66
Formasi Barus (Tmbar)	9.195,55
Formasi Batuan Gunung Api Trumon (Tmvt)	14.978,85
Formasi Kluet (Puk)	8.418,60
Formasi Sibolga (Tlsb)	12.305,92
Formasi Tutut (QTt)	27.781,92
Tuffa Toba (Qvt)	7.030,92
Total	118.404,48

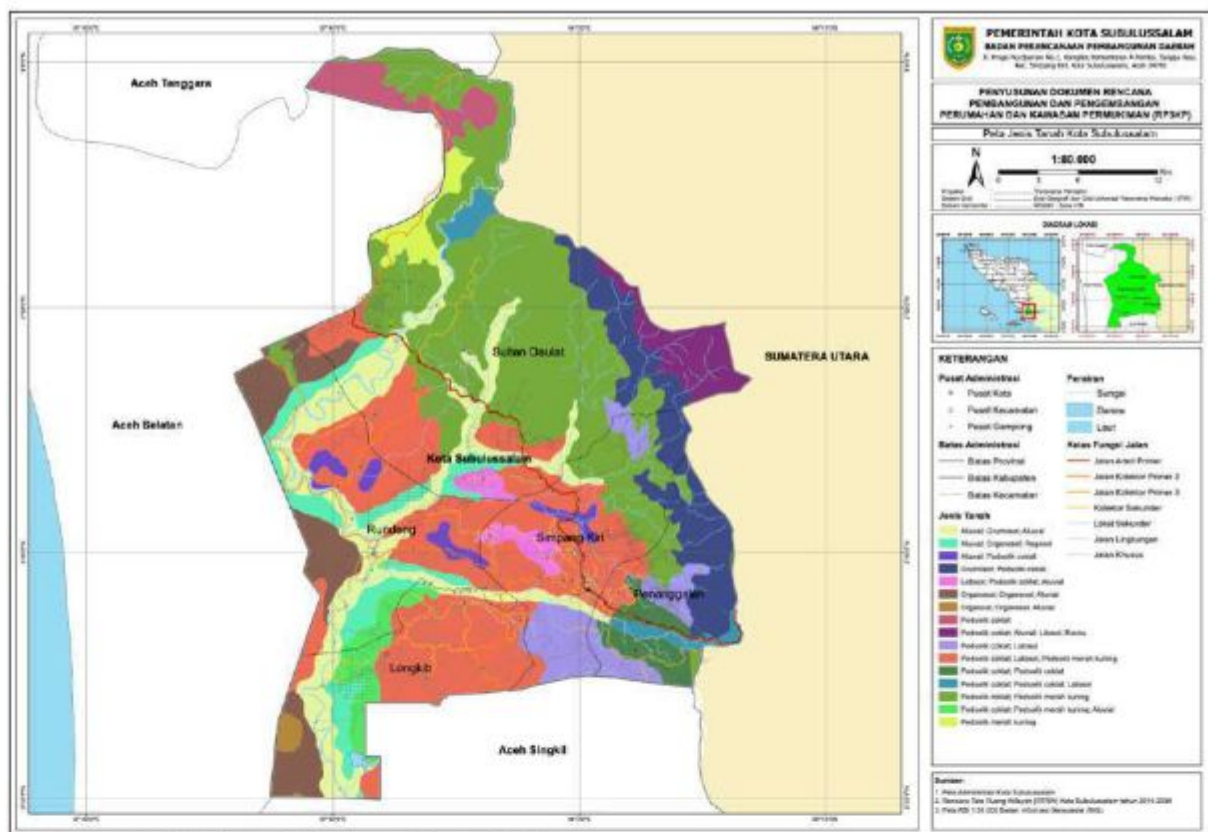
Sumber: Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014



Sumber: Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014

Gambar 2.5.
Peta Geologi di Kota Subulussalam

Kota Subulussalam memiliki berbagai jenis tanah yang didominasi oleh kompleks *podsolik* coklat dan *podsolik* Merah Kuning (PMK) seluas 31.572,39 Ha (26,66 persen) dari luas total wilayah Kota Subulussalam. Selanjutnya wilayah ini didominasi oleh kompleks *podsolik* coklat, latosol dan PMK seluas 28.390,72 Ha (23,97 persen) dan kompleks *aluvial*, *grumosol* dan *aluvial* seluas 13.462,84 Ha (11,37 persen). Distribusi jenis tanah di Kota Subulussalam dapat dilihat pada Gambar 2.6.



Sumber: RP3KP Kota Subulussalam, 2023

Gambar 2.6.
Peta Sebaran Jenis Tanah di Kota Subulussalam

Jenis tanah PMK mendominasi pada wilayah utara dan timur Kota Subulussalam, sementara jenis tanah Organosol dan Glei Humus mendominasi jenis tanah di wilayah selatan dan barat Kota Subulussalam. Adapun karakteristik khas jenis tanah di Kota Subulussalam adalah sebagai berikut:

- Podsolik Merah Kuning (PMK)* memiliki karakteristik tekstur tanah liat, porositas jelek dan mudah larut. Kandungan bahan organik dan unsur hara pada jenis tanah ini umumnya rendah. Permeabilitas tanah sedang hingga agak lambat, serta memiliki daya menahan air yang kurang baik serta peka terhadap erosi.
- Organosol* tersusun dari bahan organik atau campuran bahan mineral dengan bahan organik. Ketebalan minimum 40 cm dan paling sedikit mengandung 30 persen bahan organik atau lebih 20 persen bila berpasir. Warna tanah gelap, pH rendah, drainase terhambat sampai sangat terhambat. Bila hendak digunakan untuk pertanian memerlukan drainase/irigasi.
- Latosol* merupakan tanah yang miskin akan zat hara terutama zat Pospat, Kalium dan Nitrogen dan rendah kadar humusnya, struktur tanah teguh dan mantap, tidak plastis (lambut) serta tahan terhadap erosi. Jenis tanah ini dapat diolah untuk pertanian sepanjang tahun.

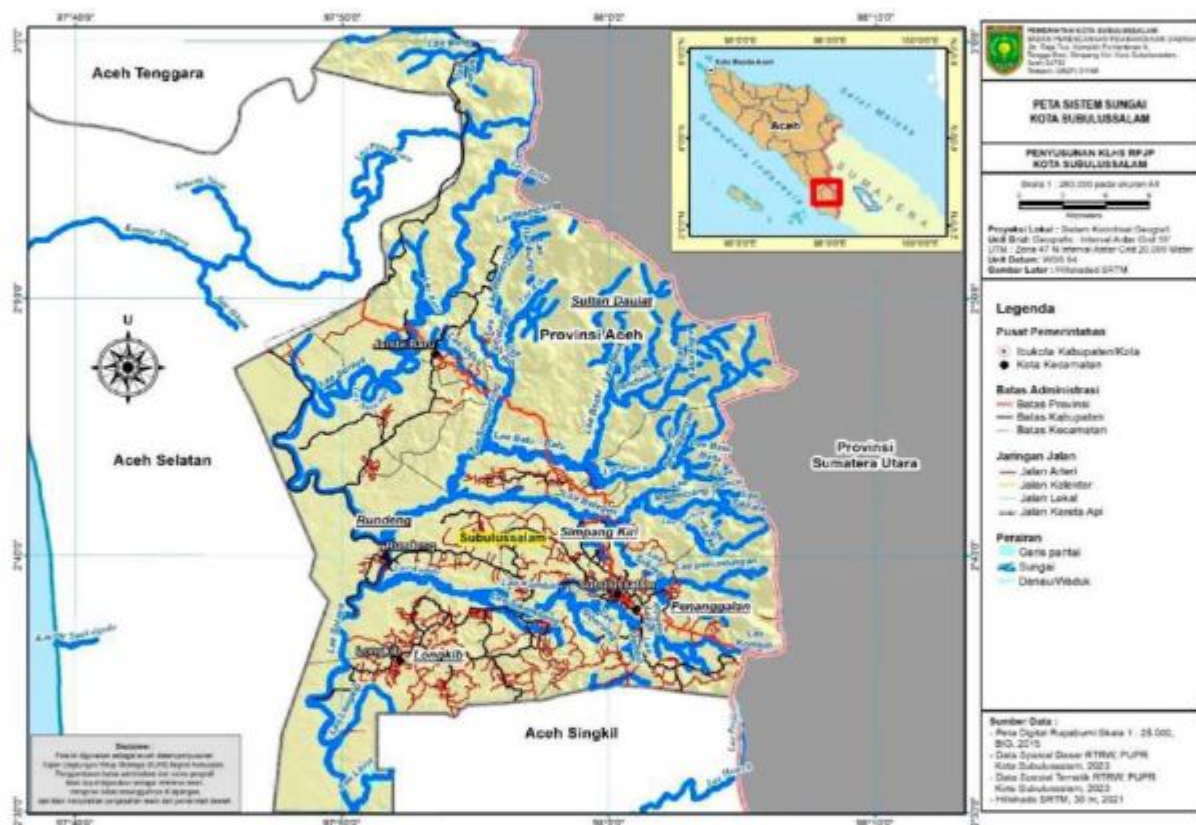
2.1.1.5. Kondisi Hidrologi

1) Air Permukaan

Kota Subulussalam dianugerahi dengan kekayaan sumber daya air yang melimpah, yang mencakup baik air permukaan seperti sungai dan rawa, maupun air bawah tanah yang berasal dari berbagai mata air. Di antara berbagai sumber daya air tersebut, Sungai Besar Lae Soraya menonjol sebagai salah satu potensi utama. Sungai ini, bersama dengan beberapa sungai lain yang berukuran lebih kecil dan beragam anak sungai yang mengalir di seluruh wilayah Kota Subulussalam, membentuk jaringan hidrologi yang kaya. Secara umum, sungai-sungai di Subulussalam memiliki karakteristik berkelok dan pendek, yang cenderung menyebabkan berbagai bencana seperti genangan atau luapan air sungai. Namun, dengan lebar yang cukup dari beberapa sungai, seperti Lae Soraya, terdapat potensi yang signifikan untuk mengembangkan sistem transportasi berbasis sungai. Sungai-sungai ini, meskipun secara keseluruhan berkontribusi pada risiko bencana genangan akibat luapan, juga menawarkan peluang untuk dimanfaatkan dalam mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Aliran sungai yang melintasi wilayah Kota Subulussalam adalah:

- a. Sungai Lae Soraya yang merupakan sungai besar yang melintasi Kota Subulussalam di batas barat kota, mengalir dari utara ke selatan melalui Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Rundeng dan Kecamatan Longkib hingga Kabupaten Aceh Singkil. Hulu sungai Lae Soraya di Kabupaten Aceh Tenggara dan bermuara di Kabupaten Aceh Singkil.
- b. Sungai Lae Kombih yang membentang dari timur ke barat kota, mengalir dari Provinsi Sumatera Utara melintasi Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Rundeng, bermuara pada Sungai Lae Soraya di Kecamatan Rundeng.
- c. Sungai Lae Batu-batu mengalir melintasi Kecamatan Sultan Daulat dan Kecamatan Rundeng, memiliki hulu di Kecamatan Sultan Daulat dan bermuara di Lae Belegen menuju Lae Soraya.
- d. Sungai Lae Biski yang merupakan hulu dari sungai Lae Batu - batu di Kecamatan Sultan Daulat.
- e. Sungai Lae Belegen yang mengalir dari Kecamatan Simpang Kiri menuju Kecamatan Rundeng dan bermuara di Sungai Lae Soraya.

- f. Sungai Lae Sarkea yang merupakan daerah hulu, mengalir dari Kecamatan Penanggalan menuju Kecamatan Simpang Kiri dan bermuara di Sungai Lae Belegen.
- g. Sungai Lae Sireprep yang merupakan daerah hulu di Kecamatan Penanggalan, mengalir menuju Kecamatan Simpang Kiri dan bermuara di Sungai Lae Belegen.
- h. Sungai Lae Penuntungan di Kecamatan Penanggalan, bermuara di Sungai Lae Sireprep.



Sumber: Data Spasial RTRW Kota Subulussalam Tahun 2014-2034

Gambar 2.7.
Sebaran Sungai Besar dan Kecil yang Melintasi Kota Subulussalam

Melalui pengelolaan dan pemanfaatan yang bijaksana, potensi hidrologi di Kota Subulussalam ini dapat menjadi aset berharga dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, yang tidak hanya memperkuat infrastruktur dasar tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sungai-sungai yang ada di Kota Subulussalam merupakan sumber daya air yang sangat potensial dan belum secara optimal dimanfaatkan. Tabel berikut memperlihatkan nama sungai dan panjangnya. Sungai besar adalah Lae Soraya, Lae Batu – Batu, dan Lae Kombih.

Sungai terpanjang adalah Lac Soraya mencapai 1033,23 Km yang membelah Kecamatan Longkib, Rundeng, dan Sultan Daulat.

Dilihat dari jumlah sungai yang ada di Kota Subulussalam dan curah hujan yang cukup tinggi, belum lagi keberadaan cekungan air tanah (CAT) dapat disebutkan ketersediaan air sebenarnya sangat berlimpah di Kota ini. Sungai-sungai yang melintasi Kota Subulussalam dan panjangnya diperlihatkan dalam Tabel dan Gambar berikut.

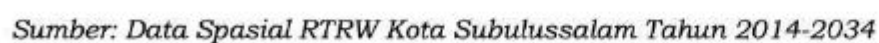


Tabel 2.5.
Panjang dan Nama Sungai di Kota Subulussalam

Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)						Keterangan
	Longkib	Penanggalan	Rundeng	Simpang Kiri	Sultan Daulat	Total	
Lae Soraya	16,37		41,65		45,21	103,23	Sungai Besar
Lae Batu-batu		3,98	10,19	15,81	24,67	54,65	Sungai Besar
Lae Kombih	14,48	12,21	8,98	10,74		46,41	Sungai Besar
Lae Belegen		1,83	4,03	17,63	6,07	29,56	Sungai Kecil
Lae Sirerep		10,18		7,48		17,66	Sungai Kecil
Lae Beski					17,19	17,19	Sungai Kecil
Lae Rambung					16,81	16,81	Sungai Kecil
Lae Sibelegen					12,73	12,73	Sungai Kecil
Lae Sikerabang	8,34			2,00		10,34	Sungai Kecil
Lae Penuntungan		9,77				9,77	Sungai Kecil
Lae Betar					8,57	8,57	Sungai Kecil
Lae Longkib	8,06					8,06	Sungai Kecil
Lae Raso					7,62	7,62	Sungai Kecil
Lae Pandulangan					7,51	7,51	Sungai Kecil
Lae Linor	6,46					6,46	Sungai Kecil
Lae Baturangin					6,21	6,21	Sungai Kecil
Lae Rih					5,08	5,08	Sungai Kecil
Lae Singgersing					4,76	4,76	Sungai Kecil
Lae Malembang		0,94		3,73		4,67	Sungai Kecil
Lae Sikilala		4,50				4,50	Sungai Kecil
Lae Kersik					4,29	4,29	Sungai Kecil
Lae Siberuing				4,26		4,26	Sungai Kecil
Lae Gambit		4,25				4,25	Sungai Kecil
Lae Seunggargas				2,43		2,43	Sungai Kecil
Lae Bereng					2,41	2,41	Sungai Kecil
Lae Serkea				1,97		1,97	Sungai Kecil
Lae Puncu		1,94				1,94	Sungai Kecil
Total Panjang (Km)	53,71	49,6	64,85	66,06	169,13	403,34	

Sumber : KLHS RPJP Kota Subulussalam Tahun 2025-2045

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 menjelaskan bahwa Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km² atau 200.000 ha. Sesuai dengan Lampiran V.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tanggal 18 Maret 2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai, Kota Subulussalam berada dalam WS Baro-Kluet (01.07.B) dan WS Alas-Singkil (0.1.09.A2). WS Alas-Singkil merupakan wilayah sungai lintas Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Sementara WS Baro-Kluet menjadi wilayah sungai lintas kabupaten, yaitu Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan Kota Subulussalam, berada dalam dua WS, yaitu Alas-Singkil dan Baru-Kluet. Peta WS dimaksud diperlihatkan dalam Gambar berikut.



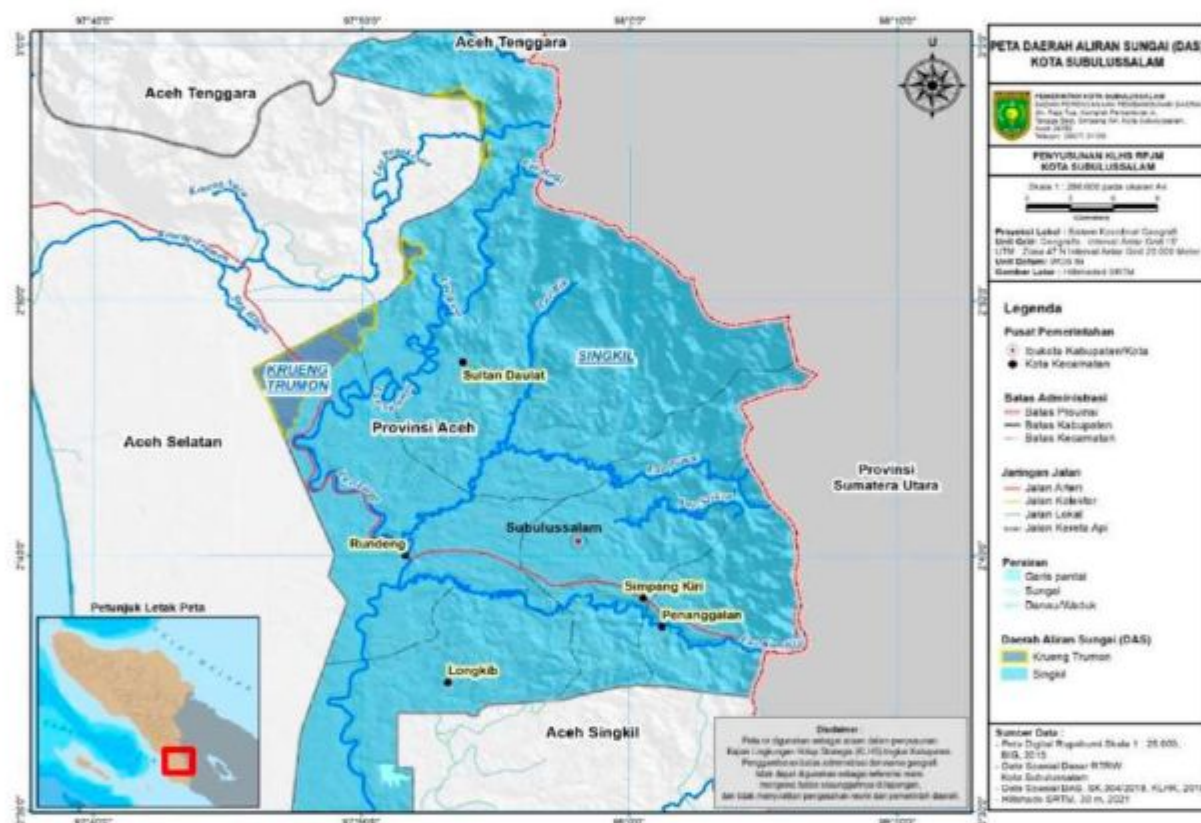
Dalam hal pengelolaan Wilayah Sungai (WS), Kota Subulussalam termasuk ke dalam WS Alas-Singkil sebagai WS lintas provinsi karena menjadi sumber air bagi

Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Oleh karenanya, pengelolaan WS yang melintasi Kota Subulussalam ini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, yang didasarkan pada Permen PU Nomor 11A/PRT/M/2006.

Tabel 2.6.
Luasan DAS di Kota Subulussalam

Nama DAS	Wilayah Sungai		Luas (Ha)
	Alas-Singkil	Baru-Kluet	
Krueng Trumon	2.652,39	465,43	3.117,81
Singkil	115.075,6	34,61	115.110,21
Kota Subulussalam	117.727,99	500,04	118.110,21

Sumber: Data Spasial RTRW Kota Subulussalam Tahun 2014-2034



Sumber: Data Spasial RTRW Kota Subulussalam Tahun 2014-2034

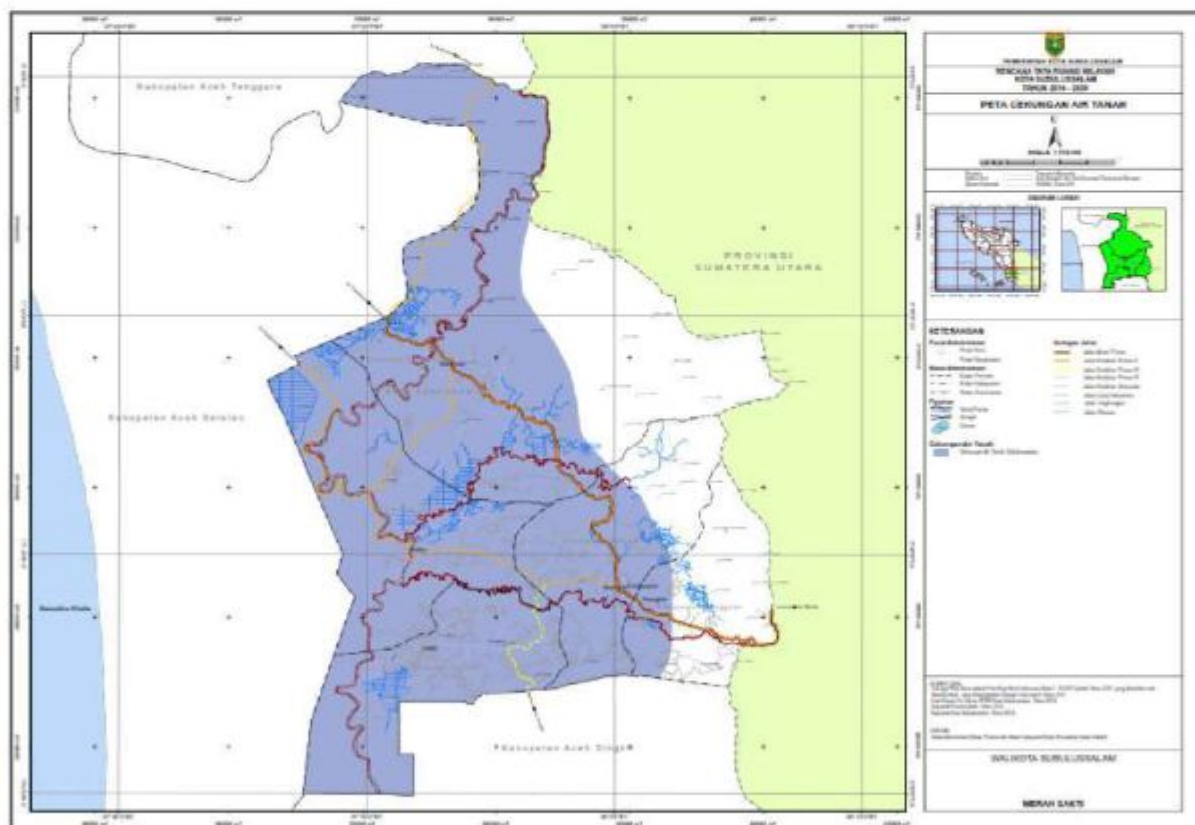
Gambar 2.9.
Luas DAS Kota Subulussalam

Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (Permen PUPR No. 10/PRT/M/2015). Menurut Bambang (2008) DAS adalah suatu

daerah yang dibatasi oleh punggung-punggung gunung/pergunungan dimana air hujan yang jatuh di daerah tersebut akan mengalir menuju sungai utama pada suatu titik/stasiun yang ditinjau. Berdasarkan SK MenLHK No.304/2018 tentang Penetapan Peta Daerah Aliran Sungai, hanya ada dua (2) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terkait dengan Kota Subulussalam, yaitu DAS Trumon dan Singkil. Dokumen RTRWK Subulussalam menyebutkan DAS di Kota Subulussalam adalah DAS Trumon, Hitan, dan Singkil. Pembagian luas DAS dan Peta DAS dimaksud masing-masing disajikan dalam Tabel 2.7. dan Gambar 2.8.

3) Cekungan Air Tanah (CAT)

Pengelolaan air tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk menjaga kelangsungan, daya dukung dan fungsi air tanah. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan melalui pemetaan tingkat kriteria zona kerentanan air tanah. Selanjutnya peta CAT dapat dilihat pada Gambar 2.5.

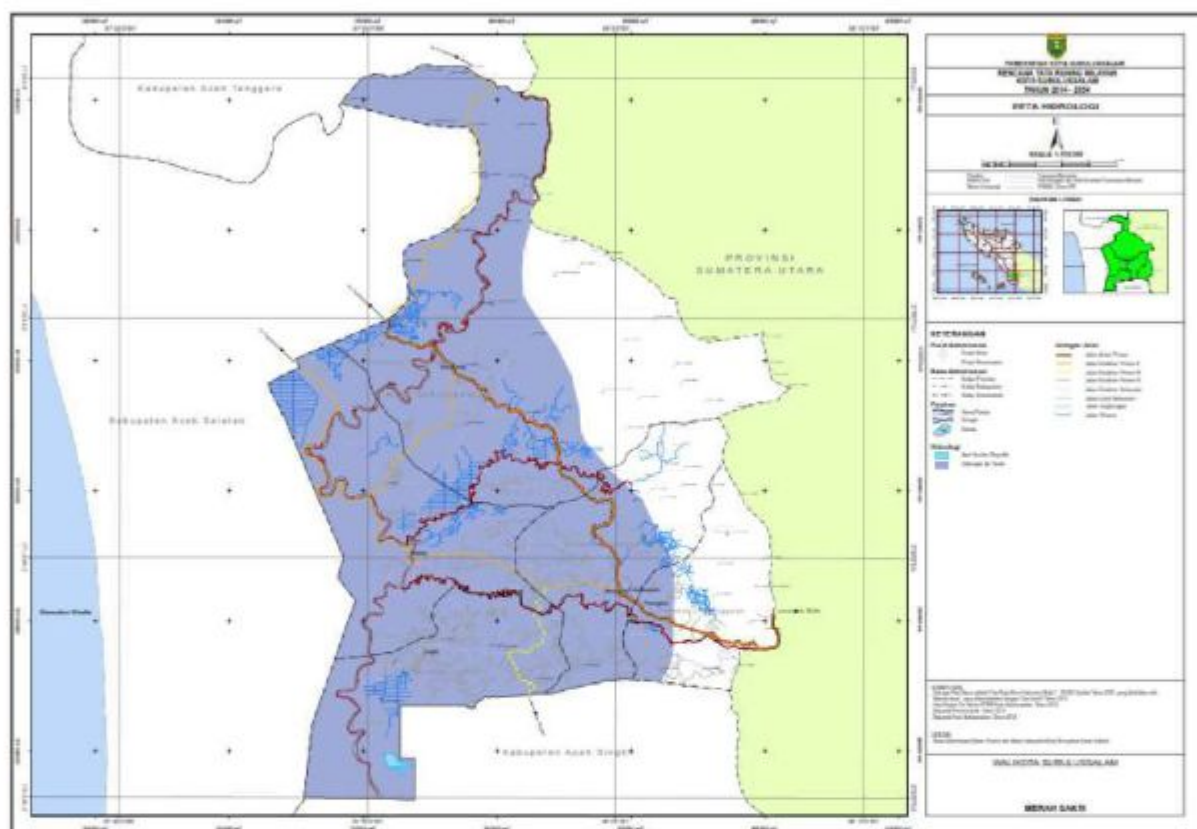


Sumber: Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014

Gambar 2.10.
Peta CAT di Kota Subulussalam

RTRW Kota Subulussalam 2014-2034 memberikan informasi CAT di Kota Subulussalam seluas 86.079,88 Ha meliputi Kecamatan Rundeng seluas 22.011,25

Ha, Kecamatan Penanggalan seluas 2.473,83 Ha, Kecamatan Longkib seluas 12.815,29 Ha, Kecamatan Sultan Daulat seluas 34.629,66 Ha, Kecamatan Simpang Kiri seluas 11.149, 85 Ha. Data ini menunjukkan bahwa Kecamatan Sultan Daulat memiliki kontribusi terbesar terhadap luas CAT di Kota Subulussalam, diikuti oleh Kecamatan Rundeng dan Longkib. Informasi ini sangat penting untuk berbagai kepentingan, termasuk perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya air, dan mitigasi bencana.



Sumber: Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014

Gambar 2.11.
Peta Hidrologi di Kota Subulussalam

Gambar 2.4. merupakan Peta Hidrologi Kota Subulussalam yang secara umum karakteristik sungai dan anak sungai yang melintasi Kota Subulussalam merupakan sungai di daerah pegunungan yang alirannya berkelok-kelok. Kerusakan hutan di hulu sungai menyebabkan tingginya tingkat sedimentasi yang terjadi pada beberapa anak sungai. Hal ini mengakibatkan daya tampung sungai menjadi berkurang dan terjadi genangan di beberapa lokasi. Fenomena banjir sering terjadi pada kondisi curah hujan yang tinggi pada beberapa desa yang berdekatan dengan bantaran sungai di Kota Subulussalam. Di samping itu, kondisi sungai di Kota Subulussalam pada umumnya belum bertanggung juga dapat menyebabkan terjadinya bencana banjir. Di sisi lain, keberadaan sungai-sungai di

Kota Subulussalam memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi, air minum dan perhubungan (transportasi sungai).

2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Kota Subulussalam memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat besar. Beberapa potensi SDA di antaranya:

2.1.2.1. Potensi pemanfaatan lahan

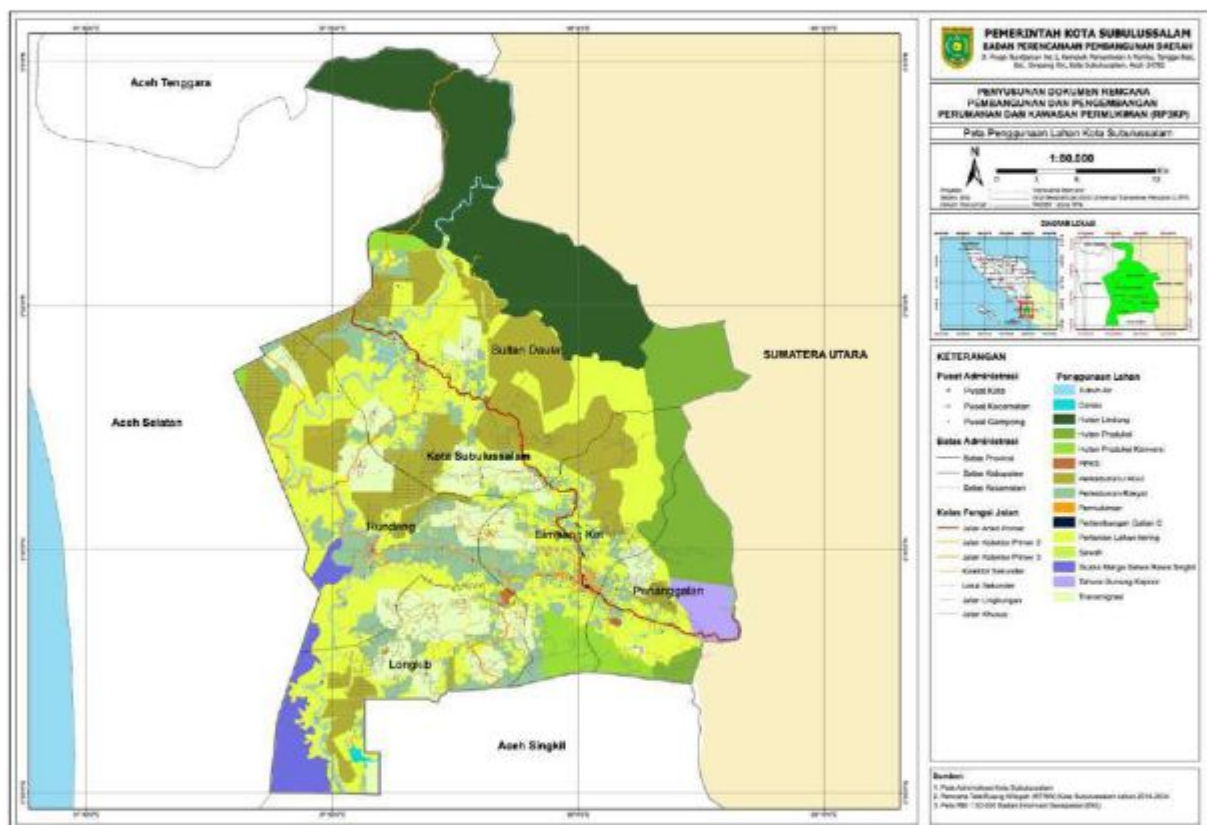
Berdasarkan Qanun RTRW Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam Tahun 2014-2034, luas kawasan lindung ditetapkan seluas 25.926,93 Ha (21,90 persen) dan Kawasan Budidaya seluas 92.477,50 Ha (78,10 persen). Dari data jenis penggunaan lahan menunjukkan bahwa penggunaan lahan di Kota Subulussalam untuk hutan lindung seluas 19.275 Ha berada di kecamatan Sultan Daulat dan Tahura Plasma Nutfah Kapur seluas 1.713,21 Ha. Tahura Plasma Nutfah Kapur ini direncanakan menjadi pusat penelitian plasma nutfah pohon kapur di provinsi Aceh. Selanjutnya kawasan budidaya didominasi oleh pertanian lahan kering seluas 32.252,47 Ha, perkebunan besar (HGU) seluas 19.690,45 Ha dan perkebunan rakyat seluas 13.539,76 Ha. Secara lebih rinci penggunaan lahan di Kota Subulussalam disajikan dalam Tabel 2.7.

Peruntukan lahan adalah tingkat kecocokan dari sebidang lahan untuk suatu kegiatan atau penggunaan tertentu yang lebih spesifik dari kemampuan lahan. Peruntukan lahan Kota Subulussalam sesuai dengan Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam Tahun 2014-2034 secara umum terdiri atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, disebutkan bahwa pada dasarnya kelompok utama dari kawasan lindung adalah sebagai berikut:

- 1) Hutan lindung;
- 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yang meliputi kawasan bergambut dan kawasan resapan air;
- 3) Kawasan perlindungan setempat, yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air;

- 4) Ruang terbuka hijau (RTH) kota, yang antara lain meliputi taman RT, taman RW, taman kota dan permakaman;
- 5) Kawasan suaka alam dan cagar budaya;
- 6) Kawasan rawan bencana alam, yang meliputi kawasan rawan tanah longsor, dan kawasan rawan banjir; dan
- 7) Kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

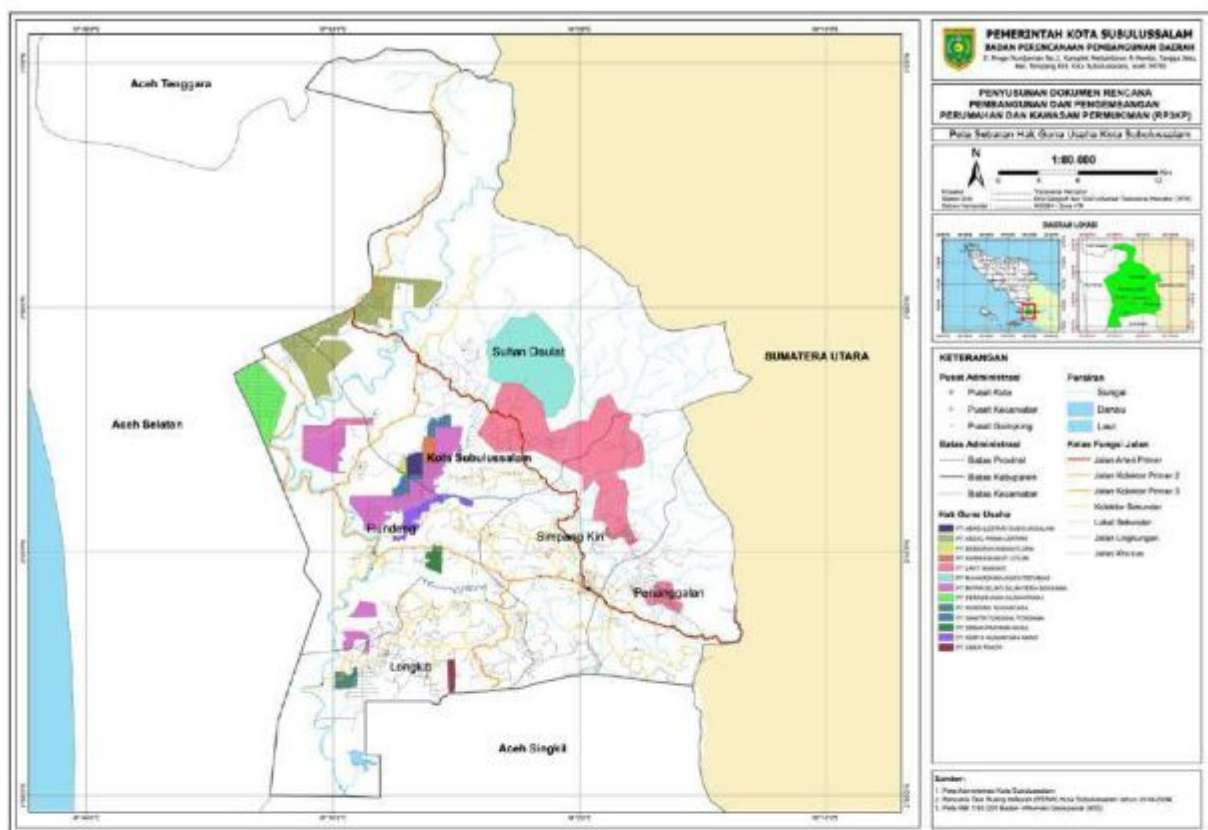


Sumber: Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014

Gambar 2.12.
Peta Penggunaan Lahan di Kota Subulussalam

Terkait dengan penggolongan tersebut, maka di Kota Subulussalam terdapat beberapa kawasan yang termasuk dalam kawasan dengan fungsi lindung, antara lain:

- 1) Hutan Lindung;
- 2) Kawasan Perlindungan Setempat;
- 3) Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya;
- 4) Kawasan Rawan Bencana Alam;
- 5) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota;



Sumber: RP3KP Kota Subulussalam, 2023

Gambar 2.13.
Peta Hak Guna Usaha (HGU) di Kota Subulussalam

Kawasan peruntukan perumahan merupakan fungsi ruang kota yang terdiri dari kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya. Dalam kaitannya dengan pendistribusian penduduk serta pengembangan karakter ruang kota serta pertimbangan daya dukung dan daya tampung ruang, maka kawasan peruntukan perumahan di Kota Subulussalam diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu kawasan peruntukan perumahan dengan tingkat kepadatan tinggi, kawasan peruntukan perumahan dengan tingkat kepadatan sedang dan kawasan peruntukan perumahan dengan tingkat kepadatan rendah.

- 1) Kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi; Fungsi ini ditetapkan di wilayah pusat pelayanan kota, yakni di Simpang Kiri dan Penanggalan. Kawasan ini merupakan kawasan yang diperkirakan dan diarahkan untuk terus berkembang menjadi satu kawasan perkotaan dengan intensitas kegiatan yang tinggi. Oleh karena itu arahan kepadatan penduduk cenderung tinggi. Terkait dengan pembentukan kepadatan kawasan tersebut maka pembangunan perumahan dan permukiman pada kawasan ini dapat dilakukan dengan KDB hingga 60-70 persen. Kawasan perumahan kepadatan tinggi seluas 1.651,67 Ha, meliputi :

- a. Kampung Subulussalam, Subulussalam Utara, Subulussalam Barat, Subulussalam Selatan, Lae Oram, dan Pegayo di Kecamatan Simpang Kiri;
 - b. Kampung Penanggalan, Cepu, Kuta Tengah, Penuntungan, dan Lae Mbersih di Kecamatan Penanggalan;
 - c. Kampung Sikerabang, Bukit Alim, dan Darul Aman di Kecamatan Longkib;
 - d. Kampung Pasar Rundeng, Teladan Baru, Lae Pamualan, dan Harapan Baru di Kecamatan Rundeng;
 - e. Kampung Namo Buaya, Singgersing, Jambi Baru, dan Gunung Bakti di Kecamatan Sultan Daulat.
- 2) Kawasan peruntukan perumahan kepadatan sedang; Peruntukan ini dikembangkan pada kawasan peruntukan perumahan yang berada di sekitar sub pusat pelayanan kota, yakni di Jambi Baru-Kutagara, Pasar Rundeng-Teladan Baru dan KTM Longkib. Terkait dengan pembentukan kawasan kepadatan sedang maka pembangunan perumahan dan permukiman pada kawasan ini dapat dilakukan dengan KDB hingga 50 persen. Kawasan perumahan kepadatan sedang seluas 1,992,17 Ha, meliputi:
- a. Kampung Sikelondang, Tangga Besi, Kuta Cepu, dan Suka Makmur di Kecamatan Simpang Kiri;
 - b. Kampung Baru, Sikelang, dan Jontor di Kecamatan Penanggalan;
 - c. Kampung Lae Saga, Bangun Sari, dan Darussalam di Kecamatan Longkib;
 - d. Kampung Badar, Blukur Makmur, Binanga, Oboh, Muara Batu-batu, Panglima Saman, Sibungke, Sibuasan, Sepadan, dan Mandilam di Kecamatan Rundeng;
 - e. Kampung Bunga Tanjung, Pulo Kedep, Pulo Belen, Suka Maju, Jabi-jabi, dan Lae Langge di Kecamatan Sultan Daulat.
- 3) Kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah; Peruntukan ini dikembangkan pada kawasan-kawasan yang berada di sekitar pusat pelayanan lingkungan, yakni di Kawasan Suka Makmur-Pasar Panjang (Kecamatan Simpang Kiri), Kawasan Kampung Baru-Jontor (Kecamatan Penanggalan), Kawasan Namo Buaya (Kecamatan Sultan Daulat), Kawasan Cipare-Pare (Kecamatan Sultan Daulat) Kawasan Sepadan-Bunga Tanjung (Kecamatan Rundeng dan Sultan Daulat), Kawasan Kuala Kepeng-Tanah Tumbuh (Kecamatan Rundeng), Kawasan Singgersing (Kecamatan Sultan Daulat), Kawasan Harapan Baru-Teladan Baru (Kecamatan Rundeng), Kawasan Kuta Beringin-Oboh (Kecamatan Rundeng), Kawasan Sikerabang (Kecamatan

Longkib), Kawasan Darussalam-Bukit Alim (Kecamatan Longkib), Kawasan Desa Longkib (Kecamatan Longkib). Untuk menjaga kepadatan kawasan maka pembangunan perumahan dan permukiman pada kawasan ini dibatasi dengan penetapan KDB maksimal sebesar 30 persen. Kawasan perumahan kepadatan rendah seluas 1.383,26 Ha, meliputi:

- a. Kampung Mukti Makmur, Makmur Jaya, Pasar Panjang dan Buluh Dori di Kecamatan Simpang Kiri;
 - b. Kampung Lae Ikan, dan Lae Motong di Kecamatan Penanggalan;
 - c. Kampung Panji, Longkib, dan Sepang di Kecamatan longkib;
 - d. Kampung Siperkas, Kuta Beringin, Tualang, Tanah Tumbuh, Lae Mate, Kuala Kepeng, Geruguh, dan Suak Jampak di Kecamatan Rundeng;
 - e. Kampung Darul Makmur, Sigrun, Pasir Belo, dan Bawan di Kecamatan Sultan Daulat.
- 4) Pengembangan kawasan permukiman; Di samping pengembangan kawasan untuk perumahan, juga direncanakan pengembangan kawasan permukiman yang menempati lokasi di seluruh wilayah Kota Subulussalam di luar kawasan peruntukan perumahan. Secara keseluruhan pengembangan kawasan permukiman seluas 3.875,95 Ha, meliputi :
- a. Kecamatan Rundeng dengan luas 733,13 Ha, meliputi Kampung Harapan Baru, Kampung Teladan Baru dan Kampung Sepadan;
 - b. Kecamatan Penanggalan dengan luas 485,42 Ha, meliputi Kampung Penuntungan, Kampung Cepu, Kampung Kuta Tengah, Kampung penanggalan dan Kampung Kampung Baru;
 - c. Kecamatan Longkib dengan luas 560,5 Ha, meliputi Kampung Sikerabang, Kampung Bangun Sari, Kampung Bukit Alim dan Kampung Darul Aman;
 - d. Kecamatan Sultan Daulat dengan luas 1.638,76 Ha, meliputi Kampung Gunung Bakti, Kampung Jambi Baru, Kampung Pulo Belen, Kampung Pulo Belen, Kampung Cipar-pare Timur dan Kampung Namo Buaya; dan
 - e. Kecamatan Simpang Kiri dengan luas 458,14 Ha, meliputi Kampung Suka Makmur, Kampung Sikelondang, Kampung Tangga Besi dan Kampung Lae Oram.

Sementara itu, di Kota Subulussalam juga terdapat kawasan transmigrasi seluas 9.908,11 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan.



Tabel 2.7.
Jenis Penggunaan Lahan Per-Kecamatan di Kota Subulussalam

No.	Uraian	Luas Lahan (Ha)					Total
		Simpang Kiri	Penanggalan	Rundeng	Sultan Daulat	Longkib	
1	Formasi Hutan	5.514	6.677	4.434	34.732	6.197	57.554
2	Non Vegetasi Lainnya	42	10	14	12	5	83
3	Pertanian Lainnya	1.133	732	3.559	2.114	1.979	9.518
4	Sawah	59	41	64	72	35	270
5	Sawit	8.278	4.574	9.227	14.847	7.128	44.055
6	Sungai, Danau, Laut	1	2	608	478	192	1.281
7	Tumbuhan Non Hutan	572	1.074	1.171	1.414	1.354	5.584
Total		15.598	13.109	19.078	53.668	16.890	118.344

Sumber : HaKA, 2023

2.1.2.2. Potensi Pertambangan dan Mineral

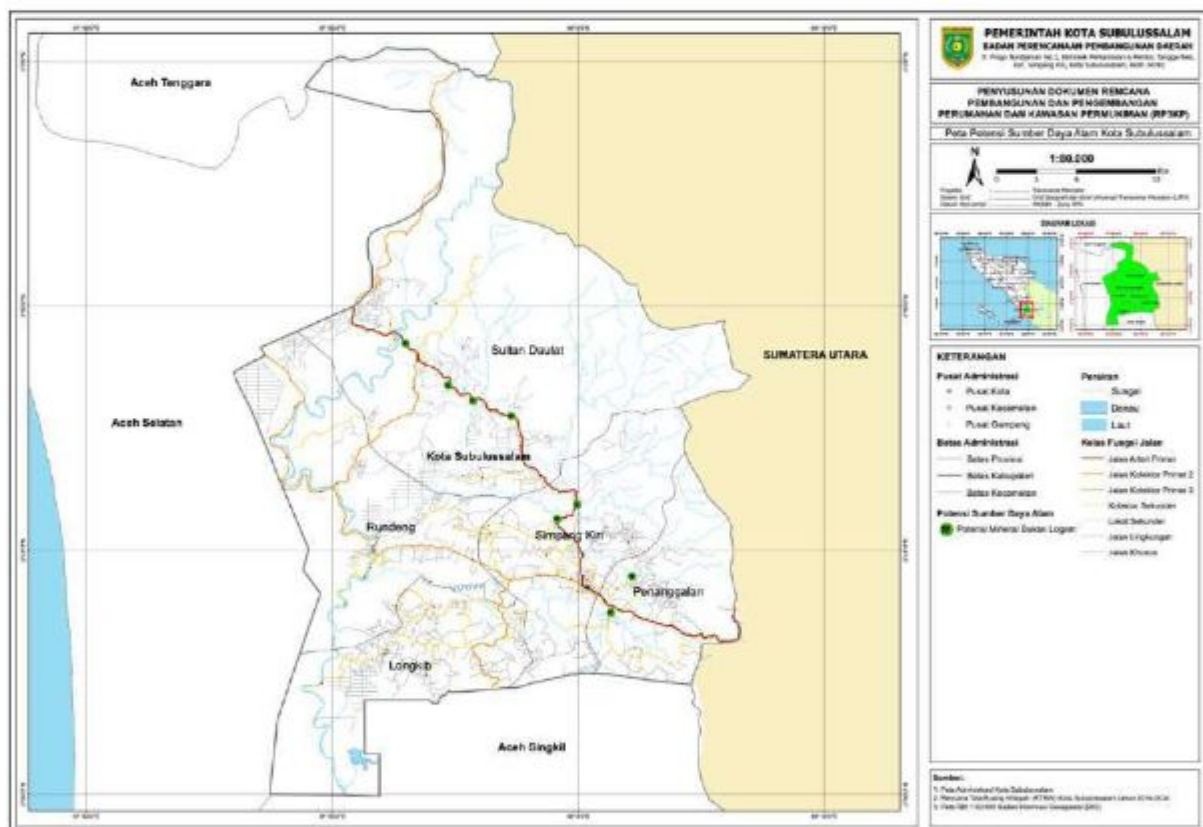
1) Pertambangan

Menurut ESDM Aceh, terdapat 2 potensi komoditas tambang di Kota Subulussalam, yaitu biji besi magnetit dan galena atau timah hitam. Potensi biji besi magnetit mencapai 20 juta ton. Adapun potensi sumber daya mineral di Kota Subulussalam adalah sebagai berikut.

Tabel 2.8.
Potensi Sumber Daya Mineral di Kota Subulussalam

No.	Komoditas	Potensi Sumber Daya	Keterangan
1.	Biji Besi Magnetit	20.000.000 ton	Primer, Belum ditambang
2.	Galena, Timah Hitam	4.000.000 ton	Primer, Belum ditambang

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Aceh, 2020



Sumber : RPK3KP Kota Subulussalam, 2023

Gambar 2.14.
Peta Potensi Sumber Daya Alam Kota Subulussalam

2) Bukan Logam dan Batuan

Potensi sumber daya mineral bukan logam dan batuan di Kota Subulussalam sebagian besar berasal dari komoditas pasir dan batu. Adapun potensi Bukan Logam dan Batuan di Kota Subulussalam adalah sebagai berikut.

Tabel 2.9.
Potensi Bukan Logam dan Batuan di Kota Subulussalam

No.	Komoditas	Lokasi	Luas	Keterangan
1.	Pasir dan Batu	Kecamatan Simpang Kiri	5,5 Ha	Operasi Produksi
2.	Pasir dan Batu	Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Penanggalan	7,07 Ha	Eksplorasi
3.	Kerikil Galian dari Bukit	Kecamatan Simpang Kiri	4 Ha	Operasi Produksi
4.	Batu Gunung	Kecamatan Penanggalan	0,5 Ha	Operasi Produksi

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Aceh, 2020

3) Potensi Energi Air

Terdapat 3 potensi utama sumber daya air di Kota Subulussalam, namun pada tahun 2024, potensi pembangunan PLTA Lae Kombih menjadi isu utama. Potensi tertinggi pada PLTA Lae Soraya dengan kapasitas listrik yang dihasilkan mencapai 240 MW. Adapun potensi Energi Air di Kota Subulussalam adalah sebagai berikut.

Tabel 2.10.
Potensi Energi Air di Kota Subulussalam

No.	Nama Pembangkit	Lokasi	Kapasitas (MW)	Keterangan
1.	PLTA Lae Soraya	Pasir Belo	240	Calon IPP, Potensi
2.	PLTM Subulussalam	Subulussalam	7,4	Potensi
3.	PLTA Lawe Alas	Lawe Alas	124	Calon IPP

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Aceh, 2020

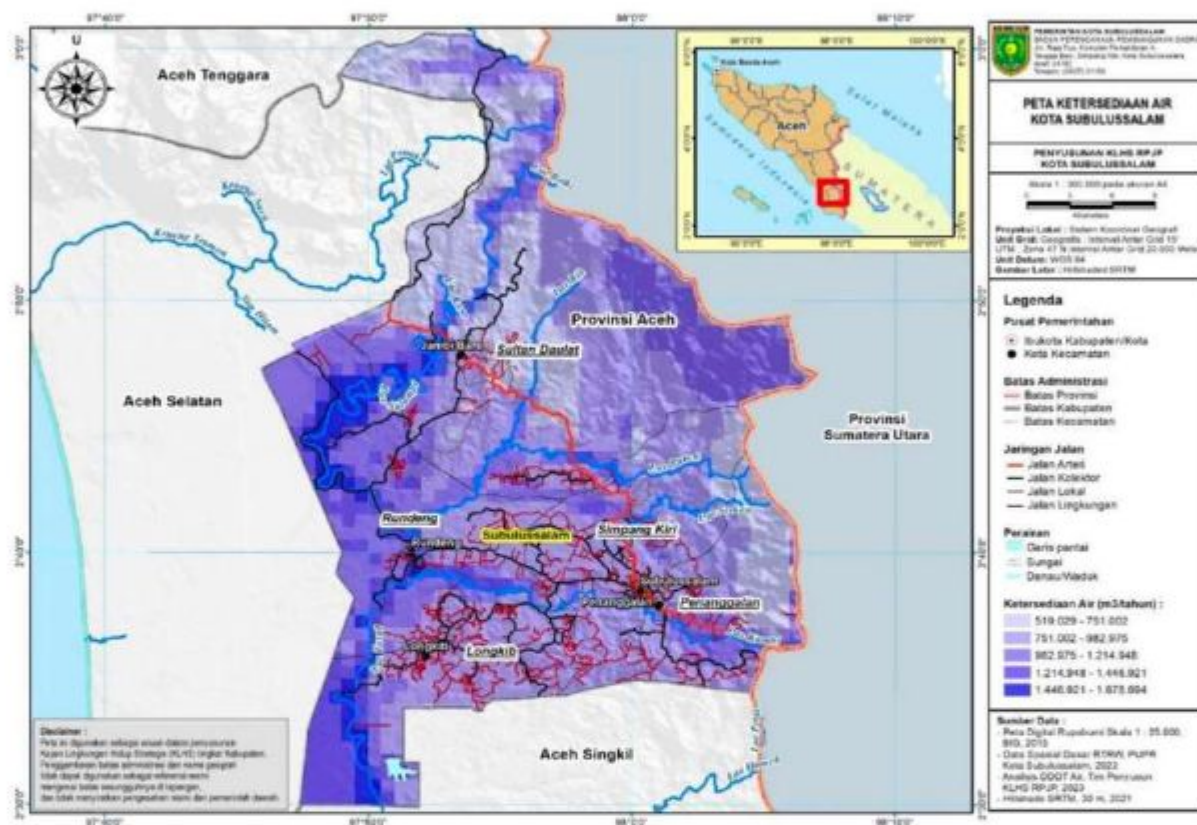
2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.1.3.1. Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Kota Subulussalam

Berdasarkan data ketersediaan dan kebutuhan air di lima kecamatan di Kota Subulussalam, seperti yang diperlihatkan pada Gambar berikut, kita dapat melakukan analisis untuk menentukan wilayah dengan ketersediaan dan kebutuhan air.

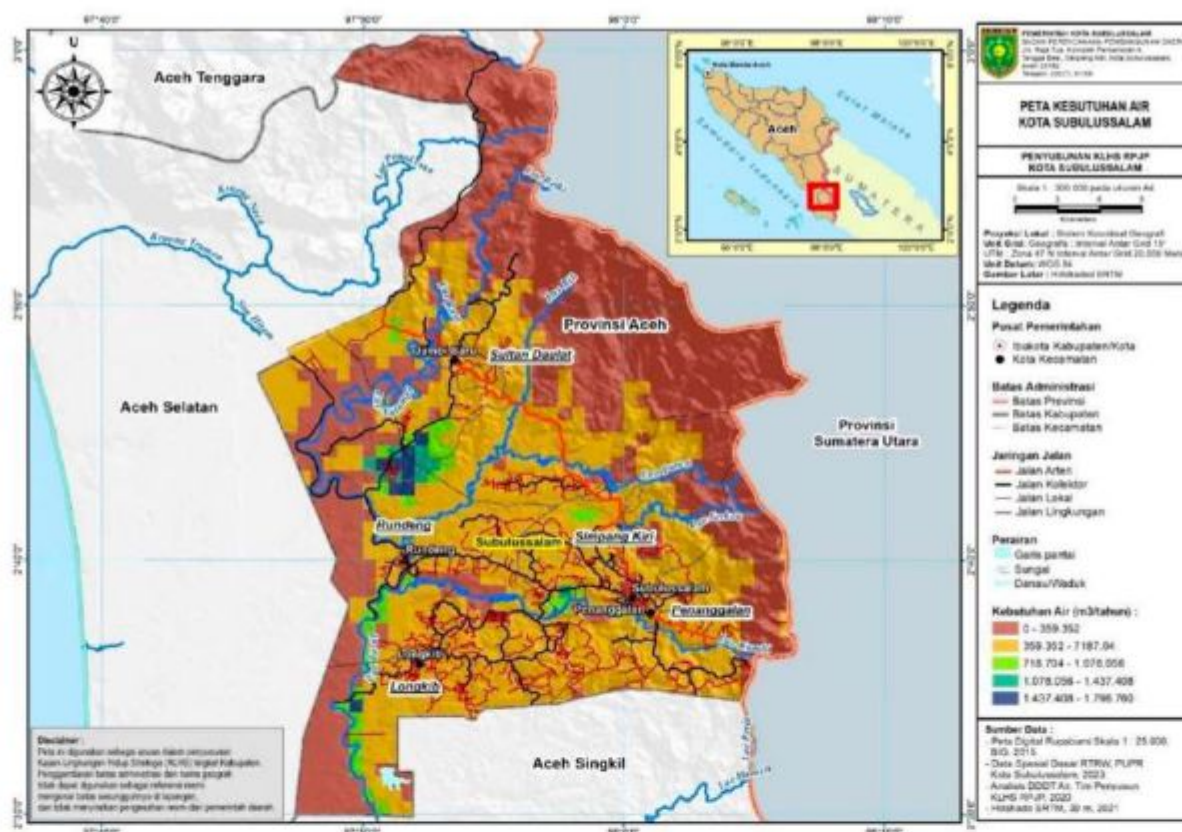
Untuk Kecamatan Longkib, luas wilayahnya adalah 15,815.30 Ha, dengan 15,729.93 Ha belum terlampaui batas DDDT air dan hanya 85.36 Ha yang terlampaui. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Longkib masih berada di bawah batas DDDT air yang ditetapkan. Di Kecamatan Penanggalan, seluruh wilayahnya yang berluas 11,587.30 Ha belum terlampaui batas DDDT air. Ini menandakan bahwa kecamatan ini berhasil mengelola sumber daya airnya dengan baik tanpa melebihi kapasitas. Sementara itu, Kecamatan Rundeng memiliki total luas 22,011.26 Ha, dengan 21,002.97 Ha belum terlampaui dan 1,008.29 Ha yang terlampaui. Hal ini menunjukkan bahwa ada sebagian kecil wilayah Rundeng yang

telah melebihi batas DDDT air. Kecamatan Simpang Kiri memiliki total luas 16,591.71 Ha, dengan sebagian besar wilayahnya, yaitu 16,506.36 Ha, belum terlampaui batas DDDT air, dan hanya 85.35 Ha yang terlampaui. Sultan Daulat adalah kecamatan dengan luas wilayah terbesar, yaitu 52,286.08 Ha. Dari total luas ini, 49,552.73 Ha belum terlampaui dan 2,733.34 Ha terlampaui. Ini menunjukkan bahwa Sultan Daulat memiliki area terbesar yang melebihi batas DDDT air dibandingkan dengan kecamatan lainnya.



Gambar 2.15.
Ketersediaan Air di Kota Subulussalam

Secara total, dari keseluruhan luas Kota Subulussalam, 114,379.29 Ha belum terlampaui batas DDDT air dan hanya 3,912.35 Ha terlampaui. Ini menandakan bahwa sebagian besar wilayah masih berada dalam batas DDDT air yang dapat diterima, namun masih ada area yang perlu diperhatikan karena telah melebihi kapasitas. Dengan demikian, meskipun secara umum kondisi DDDT air di berbagai kecamatan masih dalam batas yang aman, tetapi ada beberapa area, khususnya di Kecamatan Sultan Daulat, yang memerlukan tindakan pengelolaan sumber daya air yang lebih efektif untuk mengembalikan kondisi ke dalam batas DDDT air yang aman. Rincinya dapat merujuk Gambar berikut.



Gambar 2.16.
Kebutuhan Air secara Spasial di Kota Subulussalam

Tabel 2.11.
Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Kota Subulussalam

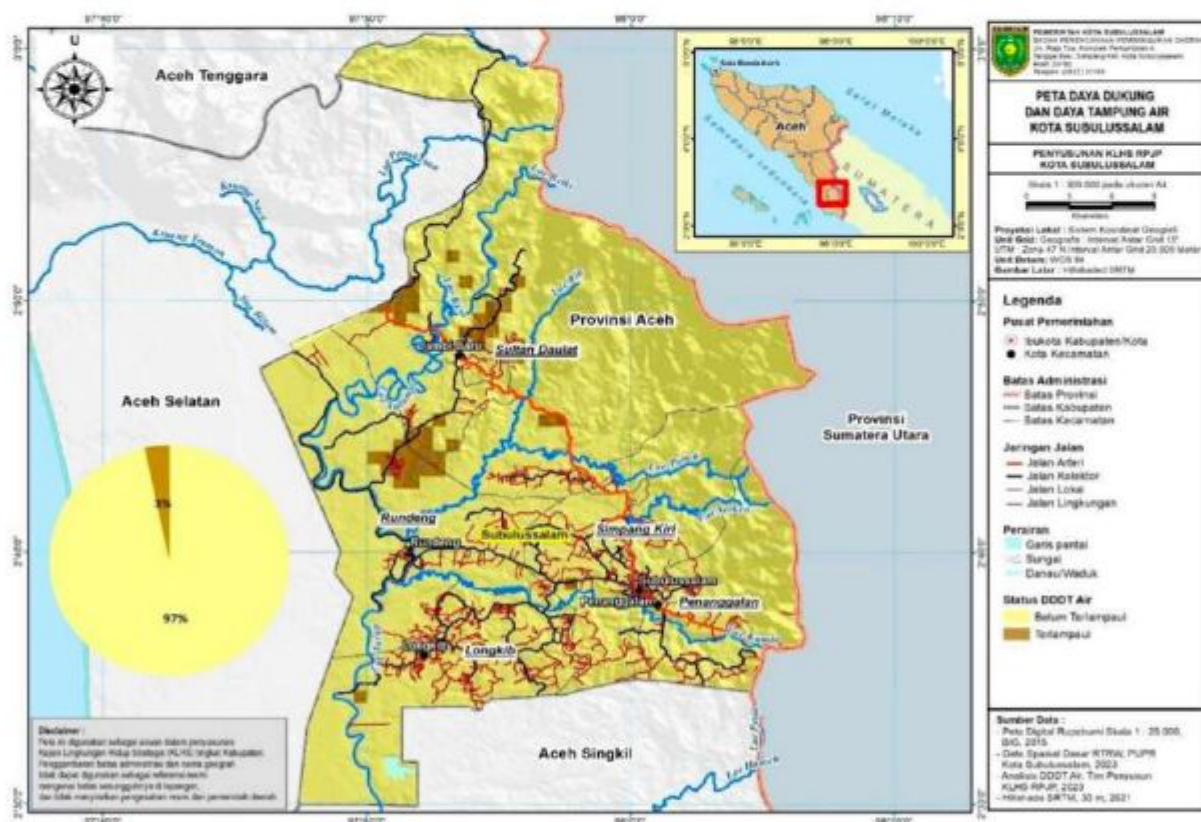
Kecamatan	Status DDDT Air		Luas (Ha)
	Belum Terlampaui	Terlampaui	
Longkib	15.729,93	85,36	15.815,30
Penanggalan	11.587,30	-	11.587,30
Rundeng	21.002,97	1.008,29	22.011,26
Simpang Kiri	16.506,36	85,35	16.591,71
Sultan Daulat	49.552,73	2.733,34	52.286,08
Total Luas (Ha)	114.379,29	3.912,35	118.291,64

Status daya dukung dan daya tampung air di Kota Subulussalam yang belum terlampaui menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya air masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut. Namun, penting untuk menganalisis kondisi ini lebih lanjut dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Dari segi lingkungan, belum terlampauinya daya dukung dan daya tampung air mengindikasikan bahwa ekosistem yang terkait dengan sumber daya air, seperti hutan, sungai, dan lahan gambut, masih relatif terjaga. Kondisi ini penting untuk menjaga keseimbangan hidrologi, mencegah erosi, dan menjaga kualitas air. Namun, tekanan terhadap lingkungan tetap perlu diwaspadai. Alih fungsi lahan

untuk perkebunan, pertambangan, atau pembangunan infrastruktur dapat mengancam kelestarian sumber daya air jika tidak dikelola dengan baik. Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Subulussalam telah menyebabkan penurunan kualitas air sungai akibat sedimentasi dan pencemaran dari limbah perkebunan. Hal ini perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam lagi tentunya.

Dari segi sosial, belum terlampaunya daya dukung dan daya tampung air berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti akses yang lebih baik terhadap air bersih dan peluang untuk mengembangkan kegiatan berbasis sumber daya air, seperti pertanian, perikanan, atau ekowisata. Namun, distribusi manfaat ini perlu dilakukan secara adil dan inklusif, dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat adat. Masih terdapat penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pengelolaan sumber daya air juga berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.17.
Daya Dukung dan Daya Tampung Air yang Sudah dan Belum Terlampaui di Kota Subulussalam

Dari segi ekonomi, ketersediaan sumber daya air yang memadai merupakan modal penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kota Subulussalam. Air adalah input yang vital bagi sektor-sektor produktif,

seperti pertanian, industri, atau pariwisata. Menurut data dari Bappeda Kota Subulussalam, sektor pertanian menyumbang PDRB kota cukup signifikan, sehingga pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah.

Meskipun demikian, pembangunan ekonomi juga harus dilakukan secara seimbang dengan pelestarian lingkungan dan pemenuhan kebutuhan sosial. Pengembangan industri atau pariwisata yang tidak terkendali dapat meningkatkan tekanan terhadap sumber daya air dan menimbulkan konflik dengan kebutuhan masyarakat lokal. Diperlukan perencanaan yang matang dan partisipatif untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya air memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

Berdasarkan data status air di Kota Subulussalam, beberapa kecamatan mengalami status Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) air yang terlampaui. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Longkib, Rundeng, Simpang Kiri, dan Sultan Daulat. Kecamatan Sultan Daulat memiliki luas area terluas yang status DDDT airnya terlampaui, yaitu seluas 2.733,34 hektar dari total luas 52.286,08 hektar. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan penduduk yang pesat, perubahan tata guna lahan, dan aktivitas ekonomi yang intensif di kecamatan tersebut. Kecamatan Sultan Daulat merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian Kota Subulussalam, sehingga tekanan terhadap sumber daya air lebih tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Kecamatan Rundeng juga memiliki luas area yang cukup signifikan dengan status DDDT air terlampaui, yaitu 1.008,29 hektar dari total luas 22.011,26 hektar. Rundeng merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Singkil dan memiliki topografi berbukit-bukit. Kondisi ini dapat menyebabkan erosi dan sedimentasi yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas air di kecamatan tersebut. Sementara itu, Kecamatan Longkib dan Simpang Kiri memiliki luas area dengan status DDDT air terlampaui yang relatif kecil, masing-masing 85,36 hektar dan 85,35 hektar. Meskipun luasnya kecil, tetap perlu diwaspadai karena dapat menunjukkan adanya tekanan terhadap sumber daya air di lokasi-lokasi tertentu dalam kecamatan tersebut.

Secara umum, status DDDT air yang terlampaui di beberapa kecamatan Kota Subulussalam dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan penduduk, perubahan tata guna lahan, aktivitas ekonomi yang intensif, serta kondisi topografi yang memengaruhi kualitas dan kuantitas air. Diperlukan upaya pengelolaan sumber daya air yang lebih baik dan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan air di Kota Subulussalam.

2.1.3.2. Daya Dukung Lahan untuk Permukiman

Berdasarkan kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan saat ini, kajian ini dapat menggambarkan bahwa untuk menampung penduduk saat ini di Kota Subulussalam, lahan yang tersedia masih cukup dengan kelas sedang. Kemampuan lahan untuk tempat tinggal atau permukiman penduduk di Kota Subulussalam adalah dengan ambang batas (Ap) 6.477.272 penduduk, dan Dengan penduduk saat ini (95.199 belum terlampaui. Namun demikian akan lebih dalam nantinya dilihat dari sisi jasa ekosistem budaya (C1) untuk menyediakan tempat tinggal dengan kelas sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah akan dibahas pada bagian DDDT lingkungan berbasis Jasa Ekosistem (JE). Namun demikian dari kajian DDDT lahan untuk permukiman ini dinyatakan bahwa luas lahan di Kota Subulussalam yang layak untuk wilayah permukiman adalah seluas 52.580 hektar.

2.1.3.3. Daya Dukung Lahan untuk Permukiman

Konsumsi pangan menjadi salah satu objek yang dihitung oleh BPS dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat lantaran ini menyangkut dengan pengeluaran (*expenditure*) penduduk. Pada tahun 2020, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kota Subulussalam untuk makanan sebesar Rp484.105 dan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk non makanan sebesar Rp433.839. Untuk itu penduduk di Kota Subulussalam memerlukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi pengeluaran tersebut. Hasil Kajian dari Swiss Contact juga mencoba menjelaskan mengenai pendapatan untuk hidup layak di Kota Subulussalam dimana menurut pola makan untuk rumah tangga dengan empat orang anggota keluarga per bulan saja adalah sebesar Rp. 2,690,327. Telah termasuk di dalamnya konsumsi protein, karbohidrat dan lemak sebagaimana dianjurkan. Dan itu menjadi bagian dari total biaya penghidupan yang layak di Kota Subulussalam saat ini, yaitu sebesar Rp. 6.883.578 per bulan.

Untuk beras adalah salah satu komoditi yang dimana di saat masyarakat tidak dapat memproduksi sendiri maka mereka harus membeli. Dan menurut BPS pengeluaran terbesar makanan masyarakat saat ini digunakan untuk konsumsi makanan dan minuman jadi (12,60 persen) diikuti rokok (9,70 persen) dan padi-padian (8,49 persen). Maka untuk itu pembangunan ke depan dapat diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi sejumlah pengeluaran tersebut.

Kebutuhan Konsumsi

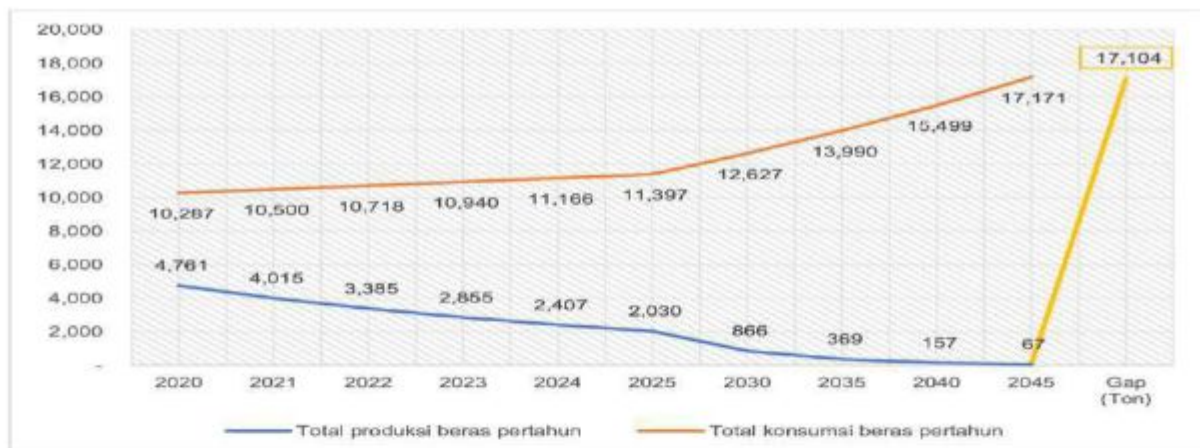
Tingkat konsumsi masyarakat Kota Subulussalam terhadap beras dapat dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang ada saat ini, ditambah dengan rata-rata konsumsi penduduk terhadap beras dalam satu tahun. Jumlah penduduk Kota Subulussalam pada tahun 2023 adalah sebesar 95.962 jiwa, sementara konsumsi beras per kapita per tahun adalah sebesar 114 kilogram. Dengan demikian maka kebutuhan beras per tahun di Kota Subulussalam adalah sebesar 10.940 ton.

Produksi Pangan Utama Beras

Produksi padi di Kota Subulussalam saat ini sangat tergantung pada luasan lahan sawah yang tersedia dan kesuburannya. Pada tahun 2023 Kota Subulussalam memiliki lahan sawah seluas 1.113 hektar. Setiap hektar sawah diperkirakan mampu memproduksi padi sebanyak 4,5ton sekali panen, sementara diperkirakan jumlah panen per tahun adalah sebanyak 1 kali. Dengan demikian kemampuan lahan di Kota Subulussalam memproduksi padi dalam setahun adalah sebesar 5.008 ton per tahun, sehingga dapat dihitung ketersediaan beras per tahun di Kota Subulussalam secara swasembada adalah sebesar 2.855 ton.

Gap antara Produksi dan Konsumsi

Salah satu isu di Kota Subulussalam adalah tentang penyusutan lahan baku sawah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang mencatat bahwa pada tahun 2010 di Kota Subulussalam masih terdapat lahan sawah seluas 10.206 hektar, namun pada tahun 2020 hanya tinggal 1.856 hektar. Artinya, telah terjadi kehilangan lahan sawah sebesar -15,67 persen setiap tahun. Untuk itu kemampuan Kota Subulussalam menghasilkan beras semakin menurun. Untuk kebutuhan mendatang, semisal untuk periode 5 tahun pembangunan sesuai rancangan RPJMD Kota Subulussalam 2025-2049, hal ini dapat menjadi salah satu isu utama. Semakin kecil kemampuan lahan dalam menghasilkan pangan utama, maka semakin besar kemungkinan masyarakat untuk menambah pengeluaran untuk memenuhi konsumsi pangan. Kajian yang dilakukan oleh Bappeda Aceh menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir telah banyak masyarakat yang mengkonversi lahan sawah menjadi perkebunan kelapa sawit, di samping menjadi lahan perumahan dan lokasi-lokasi usaha. Untuk itu agenda untuk menciptakan lahan pertanian sawah yang baru ke depan dapat dinilai strategis. Berikut adalah gambaran kebutuhan beras dan kemampuan lahan di Kota Subulussalam untuk menghasilkan pangan utama beras, dimana jika tidak dilakukan upaya, maka gap antara kebutuhan dan pemenuhan tersebut akan semakin lebar. Pada tahun 2045 dapat dihitung bahwa Kota Subulussalam membutuhkan pasokan beras dari luar daerah sebesar 17.104 ton per tahun.



Gambar 2.18.

Grafik Perhitungan dan Proyeksi Konsumsi Pangan Utama Beras dan Kemampuan Produksi Lahan Sawah di Kota Subulussalam Tahun 2020-2045

2.1.3.4. Jasa Ekosistem Lingkungan Hidup

Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan, sebagaimana dikonseptualisasikan dalam Penilaian Ekosistem Milenium oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, berangkat dari premis bahwa nilai jasa ekosistem yang lebih tinggi mengindikasikan kapasitas yang lebih besar dalam daya dukung dan daya tampung lingkungan. Jasa ekosistem, yang merupakan manfaat esensial yang diakses manusia dari lingkungan alam, dikondisikan oleh interaksi antara faktor endogen dan dinamika faktor eksogen. Hal ini diwujudkan melalui tiga aspek utama: Vegetasi Alam (KVA), Tata Guna Lahan, dan Karakteristik Bentang Alam (KBA).

Jasa ekosistem dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori utama manfaat, yaitu: penyediaan (*provisioning*), pengaturan (*regulating*), budaya (*cultural*), dan pendukung (*supporting*). Premis mendasar dalam evaluasi jasa ekosistem menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat jasa ekosistem yang tersedia dalam suatu wilayah, maka akan semakin tinggi pula kemampuan wilayah tersebut dalam mendukung dan menampung kebutuhan lingkungan hidup. Dengan demikian, pemahaman terhadap kapasitas jasa ekosistem menjadi krusial dalam penilaian daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kota Subulussalam, menandakan pentingnya integrasi antara kelestarian ekosistem dengan perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam kajian KLHS ini hanya 6 jasa ekosistem saja yang diuraikan yang dianggap paling terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Subulussalam.

2.1.3.5. Jasa Lingkungan Tinggi

a. Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih (P2)

Ketersediaan air bersih di suatu wilayah bergantung kepada pasokan dan cadangan air tanah dan permukaan. Karakteristik tanah mempengaruhi kemampuan untuk menyerap dan mengalirkan air. Jenis batuan tiap ekoregion akan menggambarkan potensi akuifer atau impermeable layer. Hal ini berpengaruh untuk penyerapan air hujan ke dalam tanah.

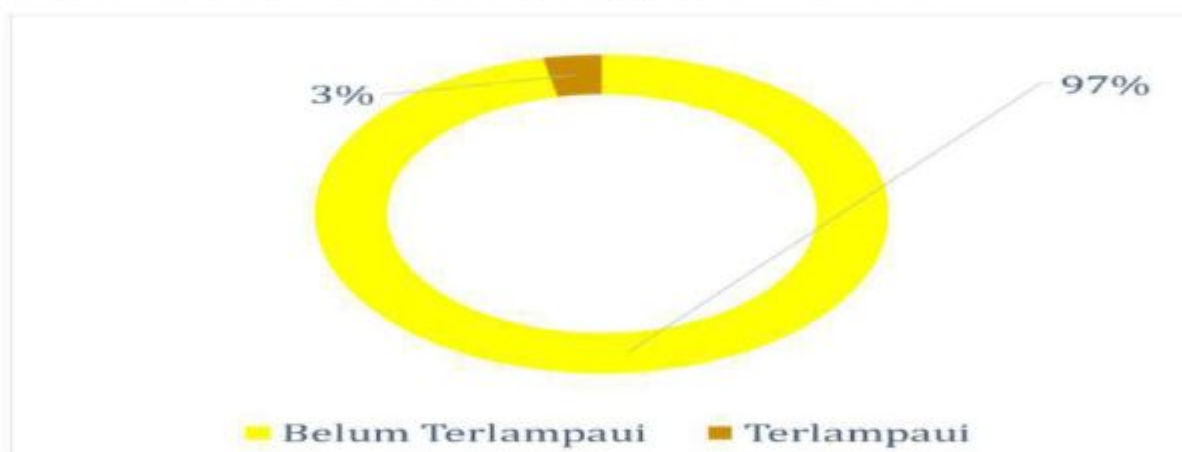
Ekosistem dataran aluvial, dataran fluvomarin dan lembah antar pegunungan/perbukitan memiliki potensi tinggi. Luasan lahan berpotensi tinggi di Ekosistem berpotensi sedang dan rendah untuk penyediaan air adalah pegunungan/perbukitan struktural patahan atau lipatan. Perbedaan karakteristik tanah dan batuan antar Ekosistem menyebabkan variasi kemampuan dalam menyerap dan mengalirkan air. Hal tersebut akan mempengaruhi ketersediaan air tanah dan permukaan suatu wilayah. Karakteristik tanah di dataran aluvial dataran fluvomarin dan lembah antar pegunungan/perbukitan didominasi oleh pasir. Rongga antar pori-pori tanah di tanah bertekstur pasir relatif besar sehingga dapat menampung air tanah. Jarak pori antar tanah yang besar juga memudahkan air hujan masuk dan mengalir.

Ekosistem ini memiliki banyak akuifer karena tingginya kemampuan dalam meluluskan dan meneruskan air. Ekosistem lembah mempunyai potensi tinggi untuk ketersediaan air karena lokasinya lebih rendah. Hal ini sesuai dengan konsep gravitasi bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi ke lebih rendah. Air hujan yang jatuh di pegunungan akan mengalir ke lembah sehingga potensi ketersediaannya tinggi. Sebagian Wilayah Kota Subulussalam berada pada ekosistem dataran aluvial, fluviomarin dan lembah antar pegunungan/perbukitan. Ekosistem pegunungan dan perbukitan struktural mempunyai potensi rendah untuk penyediaan air bersih. Karakteristik batuan di bentuk lahan struktural berupa batuan keras. Kondisi ini membuat banyak impermeable layer (lapisan yang terdiri dari batuan yang kedap air) di wilayah ini. Air hujan tidak akan bisa masuk ke dalam tanah dan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Hal ini membuat air tanah sulit ditemukan di pegunungan atau perbukitan struktural. Sumber air permukaan, yang berupa sungai, hanya mengalir saat musim penghujan saja. Sumber air hanya berasal dari rembesan yang muncul di rekahan batuan. Kondisi tersebut membuat penyediaan air bersih di ekosistem ini relatif lebih rendah dibandingkan dataran aluvial. Masyarakat di pegunungan atau perbukitan sering mengalami kesulitan air bersih, terutama musim kemarau. Namun keberadaan sungai-sungai besar yang melintas Kota Subulussalam serta

perannya sebagai daerah perlintasan sungai, merupakan potensi air baku alamiah yang perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Ketersediaan sumber air baku yang belum terlampaui di Kota Subulussalam merupakan nilai positif bagi daerah. Untuk itu perlindungan terhadap kuantitas dan kualitas harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Grafik 3.21 memperlihatkan bahwa hasil analisis ketersediaan air (neraca air di Kota Subulussalam) masih sangat berlimpah atau belum terlampaui. Hanya sebagian kecil dari Kecamatan Sultan Daud saja yang sudah dilampaui yaitu mencapai 3 persen. Pada prinsipnya ketersediaan air di kedua DAS (DAS Singkil dan Trumon masih sangat berlebihan).

Kebutuhan air baku di Subulussalam semakin tinggi menyusul meningkatnya pertumbuhan penduduk dan perluasan permukiman dalam lima tahun terakhir. Cakupan pelayanan air bersih Subulussalam juga terus meluas sehingga membutuhkan pasokan air lebih banyak. Selama ini, PDAM Subulussalam saat ini masih mengandalkan dua sumber air bersih yakni dari Sungai Lae Soraya dan Sungai Lae Sirep-rep. Untuk itu yang perlu ditingkatkan adalah sistem jaringan air bersih ke sambungan rumah dan kapasitas produksi PDAM daerah.



Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja Penyusunan KLHS revisi RPJMK Subulussalam 2019-2024

Gambar 2.19.
Persentase Ketersediaan Air di Kota Subulussalam

Selain itu Kota Subulussalam memiliki sumber air baku yang melimpah yang berasal dari CAT seluas 86.079,88 Ha maupun air permukaan yang belum optimal dimanfaatkan. Dengan adanya sungai-sungai tersebut, maka Kota Subulussalam memiliki potensi pemanfaatan sungai untuk kebutuhan irigasi, perhubungan (transportasi sungai), serta sanitasi lingkungan. Terkait dengan prasarana irigasi kota, Kota Subulussalam memiliki total luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota seluas 4.310 Ha.

Kegiatan pemanfaatan air tanah yang berlebihan terutama di kawasan permukiman dan perkebunan kelapa sawit yang berlebihan sebaiknya perlu di hindari karena akan mengganggu stabilitas cadangan air tanah. Komoditas kelapa sawit dikenal banyak membutuhkan air untuk perkembangannya. Sementara ketersediaan air permukaan masih belum dimanfaatkan secara optimal. Mungkin hal ini lah yang menyebabkan mengapa jasa ekosistem penyediaan air bersih berada pada kategori rendah. Sepertinya hal ini juga diindikasikan adanya penurunan tutupan hutan, peningkatan luasan lahan kritis dan penurunan kualitas air sungai (daerah aliran sungai).

Berdasarkan Tabel yang disajikan, dapat dianalisis bahwa Kota Subulussalam memiliki total luas wilayah 118.245,03 hektar yang terbagi ke dalam lima kecamatan dengan tingkat jasa ekosistem penyediaan air bersih yang bervariasi dari sangat rendah hingga sangat tinggi.

Kecamatan Sultan Daulat merupakan kecamatan terluas dengan 52.284,67 hektar atau sekitar 44,22 persen dari total luas Kota Subulussalam. Di kecamatan ini, area dengan tingkat jasa ekosistem penyediaan air bersih tinggi mendominasi, mencakup 17.545,24 hektar (33,56 persen dari luas kecamatan). Hal ini mengindikasikan bahwa Sultan Daulat memiliki potensi yang baik dalam penyediaan air bersih. Kecamatan Rundeng, dengan luas 22.011,25 hektar, mayoritas wilayahnya (75,15 persen) termasuk dalam kategori jasa ekosistem penyediaan air bersih rendah. Ini menunjukkan bahwa Rundeng mungkin menghadapi tantangan dalam penyediaan air bersih dan memerlukan perhatian khusus. Kecamatan Simpang Kiri dan Longkib memiliki luas yang hampir sama, masing-masing 16.589,70 hektar dan 15.779,15 hektar. Di Simpang Kiri, 64,09 persen wilayahnya tergolong jasa ekosistem penyediaan air bersih rendah, sementara di Longkib, 78,80 persen wilayahnya juga masuk kategori rendah. Kedua kecamatan ini juga mungkin memerlukan strategi khusus untuk meningkatkan penyediaan air bersih. Kecamatan Penanggalan, meskipun merupakan kecamatan terkecil dengan luas 11.580,26 hektar, memiliki distribusi tingkat jasa ekosistem penyediaan air bersih yang lebih beragam. 45,19 persen wilayahnya tergolong sangat rendah, namun 32,11 persen tergolong tinggi. Ini menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam potensi penyediaan air bersih di kecamatan ini.

Secara keseluruhan, Kota Subulussalam didominasi oleh area dengan tingkat jasa ekosistem penyediaan air bersih rendah (46,44 persen) dan sangat rendah (24,25 persen). Namun, terdapat 19,69 persen wilayah yang tergolong tingkat tinggi, terutama di Kecamatan Sultan Daulat dan Penanggalan. Ini menunjukkan

adanya potensi sumber daya air yang baik di beberapa area, namun sebagian besar wilayah kota mungkin menghadapi tantangan dalam penyediaan air bersih.

Analisis ini dapat digunakan oleh pemerintah Kota Subulussalam untuk merencanakan strategi pengelolaan sumber daya air dan peningkatan layanan penyediaan air bersih. Area dengan tingkat jasa ekosistem tinggi dapat dijadikan prioritas untuk konservasi, sementara area dengan tingkat rendah mungkin memerlukan intervensi dan pengembangan infrastruktur air bersih. Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di Setiap Kecamatan di Kota Subulussalam diperlihatkan dalam Gambar berikut. Sementara sebaran secara spasial disajikan dalam Gambar berikut.



Gambar 2.20.
Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih

**Tabel 2.12.****Tingkat Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di Setiap Kecamatan di Kota Subulussalam**

Kecamatan	Sangat Tinggi		Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat Rendah		Total
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	
Longkib	255,69	1,62	0,15	0,00	2.010,42	12,74	12.434,01	78,80	1.078,88	6,84	15.779,15
Penanggalan	12,00	0,10	3.717,90	32,11	169,39	1,46	2.447,45	21,13	5.233,52	45,19	11.580,26
Rundeng	698,59	3,17	2,24	0,01	744,32	3,38	16.541,87	75,15	4.024,23	18,28	22.011,25
Simpang Kiri	75,72	0,46	2.022,12	12,19	788,09	4,75	10.631,88	64,09	3.071,89	18,52	16.589,70
Sultan Daulat	564,79	1,08	17.545,24	33,56	6.208,63	11,87	12.860,44	24,60	15.265,02	29,20	52.284,67
Kota Subulussalam	1.606,79	1,36	23.287,65	19,69	9.920,86	8,39	54.915,64	46,44	28.673,54	24,25	118.245,03

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja Penyusunan KLHS revisi RPJMK Subulussalam 2019-2024

b. Jasa Ekosistem Pengaturan Perlindungan dari Bencana (R3)

Sebenarnya lahan di Kota Subulussalam mempunyai potensi tinggi sampai dengan sangat tinggi untuk mengatur dan mencegah terjadinya bencana. 13,80 persen luas wilayahnya mempunyai potensi sangat tinggi dan 3,87 persen termasuk dalam klasifikasi tinggi. Luasan yang berpotensi sangat rendah 16,38 persen atau 19.310,52 Ha. Selebihnya termasuk sedang dan rendah. Penggunaan lahan di masing-masing Ekosistem akan mencerminkan perlindungan dan pencegahan terjadinya bencana di wilayah tersebut. Fakta menunjukkan bahwa penggunaan lahan di Kota Subulussalam didominasi oleh perkebunan Kelapa sawit. Walaupun semakin banyak vegetasi maka perlindungan terhadap bencana akan semakin besar tetapi bukan untuk hanya satu jenis tanaman saja. Wilayah yang sudah berupa permukiman akan meningkatkan risiko jatuh korban dan kerugian akibat bencana.

Sebagian besar wilayah Kota Subulussalam yang berupa pegunungan dan perbukitan membuat adanya potensi bahaya erosi dan tanah longsor. Kemiringan lereng curam dan jenis tanah yang mudah tererosi menjadi penyebab terjadinya bencana. Hampir seluruh pegunungan di Kota Subulussalam ini sudah bukan berupa hutan primer sehingga bencana sering terjadi di daerah ini. Sebagian air hujan yang jatuh akan langsung menuju ke tanah menjadi aliran permukaan yang mengalir begitu cepat ke daerah hilirnya. Hal ini akan meningkatkan beban tanah dan menciptakan bidang gelincir yang memicu tanah longsor. Sebenarnya keberadaan pegunungan juga berperan penting untuk mengurangi potensi bahaya banjir di bagian hilir. Air hujan yang terserap akan mengurangi jumlah yang langsung menuju ke sistem sungai dan sedimentasi. Aliran permukaan dan volume sungai akan stabil sehingga bahaya banjir dapat berkurang. Kerusakan wilayah hulu dapat berakibat terjadinya banjir di bagian hulu dan berimbas ke wilayah hilir.

Sungai Lae Soraya sendiri merupakan sungai besar yang berhulu di wilayah Kota Subulussalam dan melintas di batas barat kota, mengalir dari utara ke selatan melalui Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Rundeng dan Kecamatan Longkib hingga Aceh Singkil. Sementara Sungai Lae Kombih yang membentang dari timur ke barat kota, mengalir dari Provinsi Sumatera Utara melintasi Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Rundeng, bermuara pada Sungai Lae Soraya di Kecamatan Rundeng. Kerusakan lahan sudah cukup parah di bagian hulunya dan berdampak ke Kota Subulussalam dan wilayah hilirnya yaitu Aceh Singkil.

Berdasarkan Tabel yang disajikan, Kecamatan Sultan Daulat merupakan kecamatan terluas dengan 52.284,67 hektar atau sekitar 44,22 persen dari total

luas Kota Subulussalam. Di kecamatan ini, distribusi tingkat jasa ekosistem cukup beragam. Area dengan tingkat sedang mendominasi, mencakup 15.716,33 hektar (30,06 persen dari luas kecamatan), diikuti oleh area dengan tingkat rendah sebesar 19.990,07 hektar (38,23 persen). Yang menarik, Sultan Daulat memiliki area terluas dengan tingkat jasa ekosistem sangat tinggi, yaitu 10.315,79 hektar (19,73 persen), menunjukkan potensi yang baik dalam pencegahan dan perlindungan bencana di sebagian wilayahnya.

Kecamatan Rundeng, dengan luas 22.011,25 hektar, mayoritas wilayahnya termasuk dalam kategori jasa ekosistem sangat rendah (51,16 persen) dan rendah (38,36 persen). Ini mengindikasikan bahwa Rundeng mungkin lebih rentan terhadap bencana dan memerlukan perhatian khusus dalam hal mitigasi bencana. Kecamatan Simpang Kiri dan Longkib memiliki luas yang hampir sama, masing-masing 16.589,70 hektar dan 15.779,15 hektar. Di Simpang Kiri, 79,55 persen wilayahnya tergolong jasa ekosistem rendah, sementara di Longkib, 66,48 persen wilayahnya juga masuk kategori rendah. Namun, Longkib memiliki area yang cukup signifikan (21,50 persen) dengan tingkat jasa ekosistem tinggi, yang bisa menjadi fokus untuk upaya konservasi dan perlindungan. Kecamatan Penanggalan, meskipun merupakan kecamatan terkecil dengan luas 11.580,26 hektar, memiliki distribusi yang menarik. Mayoritas wilayahnya (65,07 persen) tergolong tingkat jasa ekosistem rendah, namun terdapat 33,98 persen wilayah dengan tingkat sedang, menunjukkan adanya potensi untuk peningkatan fungsi ekosistem dalam pencegahan dan perlindungan bencana.

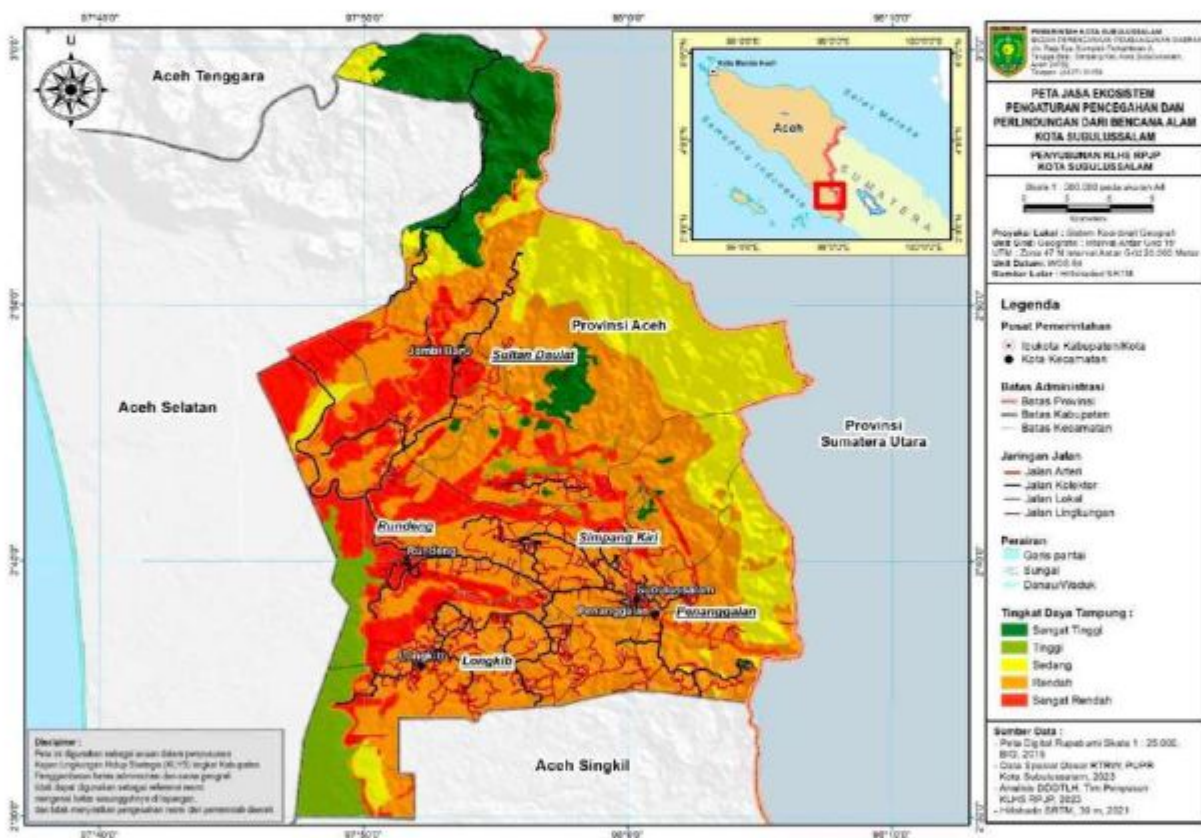
Secara keseluruhan, Kota Subulussalam didominasi oleh area dengan tingkat jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana rendah (50,45 persen) dan sedang (19,34 persen). Namun, terdapat 8,90 persen wilayah yang tergolong tingkat sangat tinggi, terutama di Kecamatan Sultan Daulat, yang bisa menjadi area prioritas untuk konservasi dan model pengelolaan ekosistem yang baik. Rinciannya diperlihatkan dalam Gambar 2.38.

Analisis ini dapat digunakan oleh pemerintah Kota Subulussalam untuk merencanakan strategi mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan. Area dengan tingkat jasa ekosistem tinggi dan sangat tinggi perlu dijaga dan ditingkatkan fungsinya, sementara area dengan tingkat rendah dan sangat rendah memerlukan intervensi untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana. Adapun sebaran secara spasial dapat dilihat dalam Gambar berikut.



Gambar 2.22.

Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam



Gambar 2.23.

Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana

Penggunaan lahan di Kota Subulussalam yang didominasi oleh perkebunan kelapa sawit dapat mempengaruhi efektivitas jasa ekosistem dalam pencegahan bencana. Meskipun vegetasi yang lebih banyak dapat meningkatkan perlindungan terhadap bencana, dominasi satu jenis tanaman saja dapat mengurangi keragaman ekosistem dan fungsi pencegahannya.

Kondisi geografis Kota Subulussalam yang sebagian besar berupa pegunungan dan perbukitan juga meningkatkan potensi bahaya erosi dan tanah longsor. Hilangnya hutan primer di pegunungan ini menyebabkan air hujan langsung mengalir ke permukaan tanah, meningkatkan risiko tanah longsor. Sebaliknya, keberadaan pegunungan yang berfungsi dengan baik dapat mengurangi potensi banjir di bagian hilir dengan menyerap air hujan dan menstabilkan aliran permukaan.

Untuk meningkatkan upaya pencegahan kebencanaan di Kota Subulussalam, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

- 1) Konservasi dan restorasi ekosistem: Memprioritaskan konservasi di area dengan tingkat jasa ekosistem sangat tinggi, seperti di Kecamatan Sultan Daulat, dan merestorasi ekosistem yang terdegradasi di area dengan tingkat rendah dan sangat rendah.
- 2) Diversifikasi penggunaan lahan: Mendorong keragaman tanaman dan sistem agroforestri untuk meningkatkan ketahanan ekosistem dan fungsi pencegahan bencana, daripada hanya mengandalkan satu jenis tanaman seperti kelapa sawit.
- 3) Pengelolaan DAS terpadu: Menerapkan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu, termasuk konservasi hutan di bagian hulu, untuk mengurangi risiko banjir dan sedimentasi di bagian hilir.
- 4) Perencanaan tata ruang berbasis risiko: Mengintegrasikan penilaian risiko bencana dalam perencanaan tata ruang kota, dengan mempertimbangkan tingkat jasa ekosistem dan kerentanan wilayah terhadap bencana.
- 5) Peningkatan kapasitas masyarakat: Meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana, termasuk melalui pendidikan dan pelatihan tentang peran ekosistem dalam pencegahan bencana.

Dengan mengadopsi pendekatan yang holistik dan berbasis ekosistem dalam upaya pencegahan kebencanaan, Kota Subulussalam dapat meningkatkan ketahanan wilayahnya terhadap bencana dan melindungi kesejahteraan masyarakatnya.

c. Jasa Ekosistem Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (C1)

Jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup (sense of living) yang didefinisikan sebagai ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera, jangkar “kampung halaman” yang punya nilai sentimental yang disediakan oleh ekosistem (P3S, 2016). Ruang hidup ini didukung oleh kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi sehingga memberikan dukungan kehidupan baik secara sosial, ekonomi

maupun budaya. Jasa ekosistem sebagai tempat tinggal dan ruang hidup secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar. Secara umum, jenis lahan yang memiliki potensi tinggi sebagai tempat tinggal dan ruang hidup terletak pada ekoregion dataran aluvial, dataran kaki gunung api, dan dataran fluviomarin. Ketiga ekoregion tersebut merupakan wilayah yang memiliki kondisi geografis yang datar dengan ketersediaan air bersih yang relatif banyak, sehingga cocok untuk pengembangan permukiman.

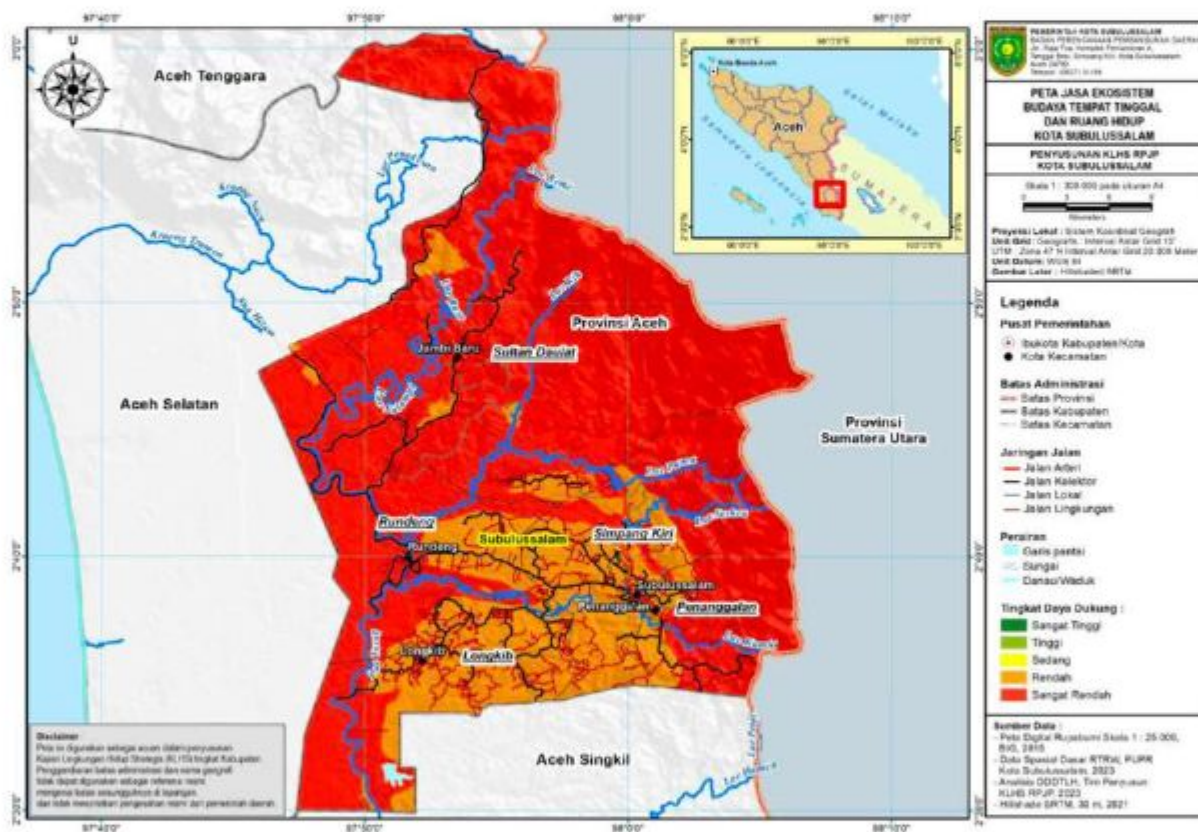
Jasa ekosistem budaya untuk tempat tinggal dan ruang hidup di Kota Subulussalam didominasi oleh kelas sangat rendah, yaitu seluas 90.856,16 hektar. Sementara itu kawasan yang memiliki kelas sangat tinggi hanya seluas 710,31 dan kawasan dengan kelas tinggi hanya seluas 335,56 hektar. Kecamatan yang memiliki kawasan dengan kelas sangat tinggi adalah Kecamatan Simpang Kiri, yaitu seluas 445,63 hektar, sementara dengan kelas tinggi terluas hanya di Kecamatan Rundeng, yaitu seluas 155,58 hektar. Kecamatan yang memiliki kelas sangat rendah terluas adalah Kecamatan Sultan Daulat, yaitu seluas 50.114,75 hektar, kemudian di Kecamatan Rundeng seluas 17.886,70 hektar.

Kelas jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup di Kota Subulussalam didominasi oleh kelas sangat rendah sebesar 77 persen dan kelas rendah sebesar 22 persen. Dengan demikian maka potensi wilayah di Kota Subulussalam untuk mendukung pemukiman yang baik didominasi oleh 99 persen rendah. Sisanya, hanya 1 persen yang mendukung dengan kelas sedang, tinggi, dan sangat tinggi.

Peta di bawah memperlihatkan lokasi-lokasi dimana kelas jasa ekosistem tempat tinggal dan ruang hidup di Kota Subulussalam dengan kelas sangat rendah sangat dominan. Demikian juga wilayah dengan kelas rendah juga terlihat mendominasi. Hanya sebagian kecil, seperti di Kecamatan Simpang Kiri terdapat wilayah yang berwarna hijau yang menunjukkan terdapat wilayah dengan kelas tinggi dan sangat tinggi.



Gambar 2.24.
**Luas Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup
di Kota Subulussalam**



Gambar 2.25.
Peta Jasa Ekosistem Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Kota Subulussalam



Tabel 2.13.

Tingkat Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Setiap Kecamatan di Kota Subulussalam

Kecamatan	Sangat Tinggi		Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat Rendah		Total
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	
Longkib	73,36	0,46	12,45	0,08	0,22	0,00	9.364,10	59,34	6.329,01	40,11	15.779,15
Penanggalan	61,06	0,53	54,30	0,47	1,64	0,01	1.811,28	15,64	9.651,97	83,35	11.580,26
Rundeng	94,58	0,43	155,58	0,71	19,64	0,09	3.854,75	17,51	17.886,70	81,26	22.011,25
Simpang Kiri	445,63	2,69	20,10	0,12	33,82	0,20	9.216,42	55,56	6.873,72	41,43	16.589,70
Sultan Daulat	35,67	0,07	93,12	0,18	61,05	0,12	1.980,06	3,79	50.114,75	95,85	52.284,67
Kota Subulussalam	710,31	0,60	335,56	0,18	116,38	0,10	26.226,61	22,18	90.856,16	76,84	118.245,03

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja Penyusunan KLHS revisi RPJMK Subulussalam 2019-2024

d. Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JPE1)

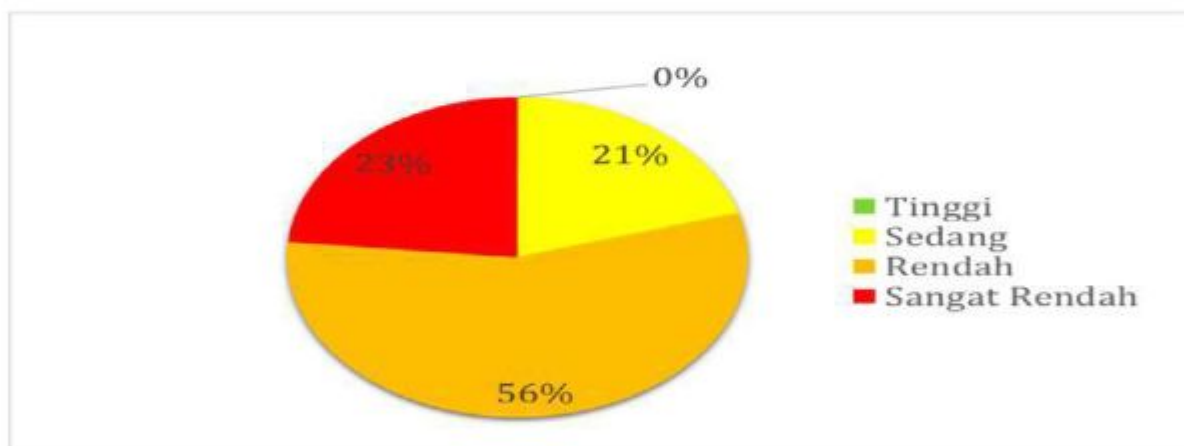
Dari klasifikasi jasa ekosistemnya, Kota Subulussalam memperlihatkan 52.639,7 Ha luas lahannya berupa pegunungan dan perbukitan lipatan dan patahan, yang kurang sesuai untuk dimanfaatkan sebagai jasa lingkungan untuk budidaya pertanian lahan basah. Kondisi tanah di pegunungan dan perbukitan struktural memiliki ketebalan yang tipis dan minim unsur hara. Ketersediaan air di ekosistem ini juga terbatas karena terdapat impermeable layer sehingga minim air tanah. Ekoregion yang sesuai untuk pertanian tanaman pangan adalah dataran aluvial dan fluviomarin. Kota Subulussalam berada di ekosistem tersebut dengan luasan mencapai 54.323,24 Ha. Tanah alluvium memiliki tanah dengan lapisan tebal dan kandungan unsur haranya tinggi. Ketersediaan air di dataran aluvial melimpah karena tekstur tanah yang mempunyai kemampuan mengalirkan air dengan baik. Karakteristik tersebut sesuai untuk pengembangan pertanian lahan basah. Kegiatan pertanian lahan basah membutuhkan lahan yang subur serta ketersediaan air yang cukup (Sumber: Analisis Tim Ahli terkait, Daya dukung daya tampung Kota Subulussalam, 2024).

Terlihat dari Tabel di bawah bahwa hanya 68,8 Ha atau 0,058% dari luasan wilayah Kota Subulussalam yang berpotensi tinggi dan 27.259,38Ha atau 23,12% dari luas wilayahnya yang berpotensi tinggi sebagai jasa penyedia pangan. Selebihnya termasuk kategori sedang, rendah, dan sangat rendah. Kecamatan Sultan Daulat wilayahnya paling luas yaitu 20.306,47 Ha atau 17,22% dengan potensi sangat rendah sebagai penyedia jasa pangan. Sementara Simpang Kiri dan Longkib memiliki indeks tinggi, masing-masing seluas 9.192,02 Ha dan 8.917,49Ha atau 7,8% dan 7,56% dari luas wilayahnya. Maknanya adalah kecamatan-kecamatan yang memiliki potensi tinggi dan sangat tinggi sebagai jasa penyedia pangan haruslah dioptimalkan kemampuannya untuk dimanfaatkan, sebab dari karakteristik bentang lahan, tata guna lahan, dan vegetasi mendukung untuk menjadi penyedia jasa penyediaan pangan. Sebagai gambaran umum dapat dilihat Tabel berikut, persentasenya, dan sebaran spasialnya disajikan dalam Gambar di bawah.

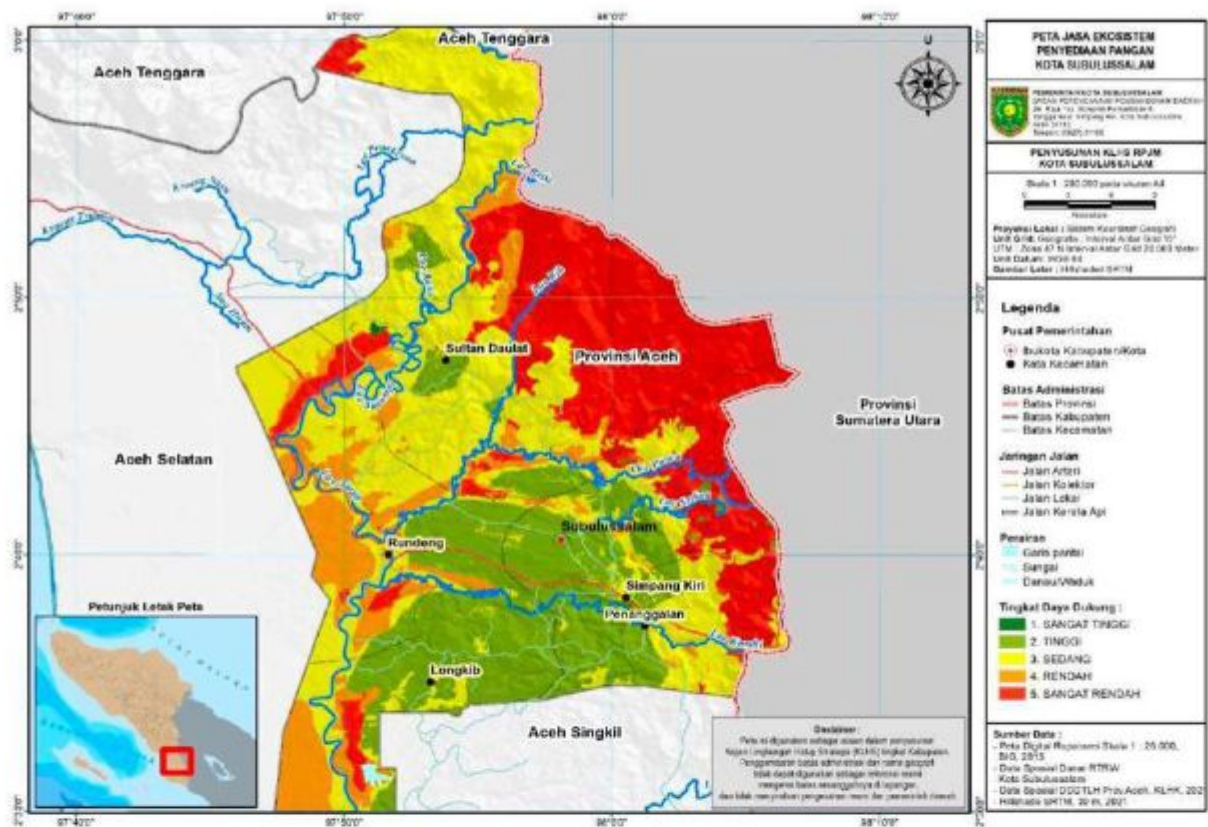
Jasa ekosistem penyediaan pangan di Kota Subulussalam memiliki peran penting dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dari aspek sosial, jasa ekosistem ini berkontribusi terhadap ketahanan pangan masyarakat lokal, pelestarian budaya dan kearifan lokal, serta mendukung kesehatan masyarakat melalui akses terhadap pangan yang beragam, segar, dan bergizi. Dalam aspek ekonomi, jasa ekosistem penyediaan pangan memberikan peluang mata pencaharian bagi masyarakat di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, mendorong pengembangan ekonomi lokal, serta menghemat biaya terkait

transportasi dan distribusi pangan. Sementara dari aspek lingkungan, menjaga dan memanfaatkan sumber pangan dari ekosistem secara berkelanjutan dapat melestarikan keanekaragaman hayati, menjaga kualitas lahan dan sumber daya air, serta berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Subulussalam menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 28,37% dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota pada tahun 2020. Angka ini menekankan peran penting jasa ekosistem penyediaan pangan terhadap perekonomian lokal. Untuk memastikan kelestarian jasa ekosistem penyediaan pangan di Kota Subulussalam, diperlukan upaya-upaya sinergis dari pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Menjaga dan memanfaatkan jasa ekosistem ini secara berkelanjutan dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan bagi kota tersebut. Dengan pengelolaan yang tepat, Kota Subulussalam dapat mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keseimbangan lingkungan untuk generasi sekarang dan masa depan.



Gambar 2.26.
Persentase Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kota Subulussalam



Gambar 2.27.
Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kota Subulussalam

**Tabel 2.14.****Tingkat Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kecamatan di Kota Subulussalam**

Kecamatan	Sangat Tinggi		Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat Rendah		Total
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	
Longkib	0,00	0,00	2,23	0,01	8.509,96	53,93	3.096,76	19,63	4.170,20	26,43	15.779,15
Penanggalan	0,00	0,00	1,51	0,01	1.697,85	14,66	8.745,09	75,52	1.135,81	9,81	11.580,26
Rundeng	0,00	0,00	0,64	0,00	3.714,01	16,87	10.351,14	47,03	7.945,46	36,10	22.011,25
Simpang Kiri	0,00	0,00	1,70	0,01	8.554,18	51,56	6.179,03	37,25	1.854,78	11,18	16.589,70
Sultan Daulat	0,00	0,00	62,71	0,12	1.727,04	3,30	37.860,56	72,41	12.634,34	24,16	52.284,67
Kota Subulussalam	0,00	0,00	0,06	0,06	24.203,05	20,47	66.232,58	56,01	27.740,60	23,46	118.245,03

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja Penyusunan KLHS revisi RPJMK Subulussalam 2019-2024

e. Jasa Ekosistem Pengaturan Lingkungan (JER1)

Jasa pengatur iklim yaitu ekosistem yaitu berfungsi mempengaruhi iklim lokal dan global melalui tutupan lahan dan proses yang dimediasi secara biologis. Tiap ekosistem memiliki ketinggian tempat yang berbeda-beda. Perbedaan ketinggian tersebut akan mempengaruhi kondisi suhu, kelembaban, potensi curah hujan, dan angin. Curah hujan di Kota Subulussalam akan tergantung kondisi pegunungan yang mempunyai curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan dataran rendah. Ada indikasi kemampuan pengendalian gas rumah kaca dan penyerapan karbon sudah menyusut karena berkurangnya hutan primer di Kota Subulussalam.

Ekosistem yang mempunyai luasan sempit seperti lembah antar pegunungan/perbukitan, atau dataran fluvio marin, berpotensi rendah untuk pengaturan iklim. Dampak yang dihasilkan terhadap iklim dari Ekosistem tersebut relatif minim karena luasnya sempit. Jumlah vegetasi di wilayah ini sudah berkurang karena pemanfaatannya berubah. Potensi untuk mengendalikan gas rumah kaca dan penyerapan karbon relatif rendah. Wilayah permukiman justru menjadi penyumbang gas kaca dan emisi karbon sehingga mempengaruhi kondisi iklim. Hanya saja, luasan permukiman masih relatif sempit dibandingkan hutan sehingga masih dapat diserap oleh hutan. Minimnya vegetasi juga akan membuat suhu udara menjadi lebih panas karena minim pasokan oksigen murni.

Kota Subulussalam secara keseluruhan didominasi oleh area dengan tingkat jasa ekosistem pengaturan iklim rendah, mencakup 60,61% (71.665,70 hektar) dari total luas wilayah, seperti yang disajikan dalam Tabel berikut. Ini diikuti oleh area dengan tingkat sangat rendah sebesar 15,04% (17.789,82 hektar). Namun, terdapat juga area dengan tingkat jasa ekosistem pengaturan iklim yang lebih baik, yaitu 8,71% (10.301,13 hektar) tergolong sangat tinggi, 4,96% (5.869,50 hektar) tinggi, dan 10,67% (12.618,88 hektar) sedang.

Kecamatan Sultan Daulat, yang merupakan kecamatan terluas dengan 52.284,67 hektar, memiliki distribusi yang unik. Meskipun 57,81% wilayahnya tergolong rendah, kecamatan ini memiliki area terluas dengan tingkat jasa ekosistem pengaturan iklim sangat tinggi, yaitu 10.180,32 hektar (19,47%). Ini menunjukkan bahwa Sultan Daulat memiliki potensi signifikan dalam pengaturan iklim di sebagian wilayahnya. Kecamatan Rundeng, dengan luas 22.011,25 hektar, mayoritas wilayahnya termasuk dalam kategori jasa ekosistem pengaturan iklim rendah (53,22%) dan sangat rendah (39,06%). Ini mengindikasikan bahwa Rundeng mungkin kurang berkontribusi dalam pengaturan iklim dan mungkin memerlukan upaya peningkatan fungsi ekosistem. Kecamatan Simpang Kiri dan Longkib memiliki pola yang serupa, dengan dominasi area tingkat rendah (70,64%

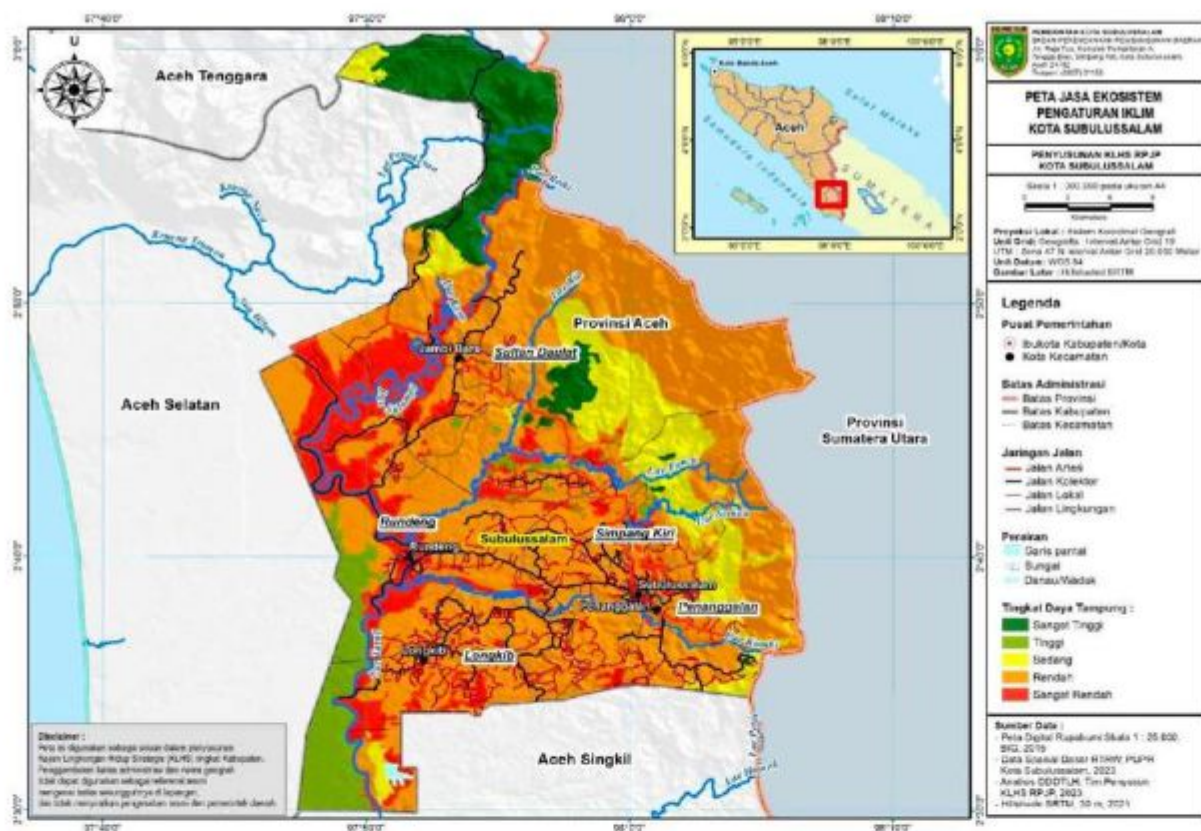
dan 60,44% masing-masing). Namun, Longkib memiliki area yang cukup signifikan (21,50%) dengan tingkat jasa ekosistem pengaturan iklim tinggi, yang bisa menjadi fokus untuk upaya konservasi dan peningkatan. Kecamatan Penanggalan, meskipun merupakan kecamatan terkecil, memiliki 73,15% wilayahnya tergolong tingkat jasa ekosistem pengaturan iklim rendah. Namun, terdapat 24,87% wilayah dengan tingkat sedang, menunjukkan adanya potensi untuk peningkatan fungsi ekosistem dalam pengaturan iklim. Untuk luasannya secara rinci diperlihatkan dalam Gambar berikut.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Subulussalam memiliki tingkat jasa ekosistem pengaturan iklim yang relatif rendah. Namun, keberadaan area dengan tingkat sangat tinggi dan tinggi, terutama di Kecamatan Sultan Daulat dan Longkib, menunjukkan adanya potensi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi ekosistem dalam pengaturan iklim.



Gambar 2.28.
Luas Jasa Pengaturan Iklim Kota Subulussalam

Pemerintah Kota Subulussalam dapat menggunakan informasi ini untuk merencanakan strategi pengelolaan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Area dengan tingkat jasa ekosistem tinggi dan sangat tinggi perlu dijaga dan ditingkatkan fungsinya, sementara area dengan tingkat rendah dan sangat rendah memerlukan intervensi untuk meningkatkan kemampuan ekosistem dalam pengaturan iklim. Untuk peta sebarannya disajikan dalam Gambar Peta berikut.



Gambar 2.29.
Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kota Subulussalam

**Tabel 2.15.****Tingkat Jasa Ekosistem Pengaturan iklim di Setiap Kota Subulussalam**

Kecamatan	Sangat Tinggi		Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat Rendah		Total
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	
Longkib	0,00	0,00	3.391,96	21,50	520,30	3,30	9.537,15	60,44	2.329,75	14,76	15.779,15
Penanggalan	38,69	0,33	0,00	0,00	2.879,52	24,87	8.471,20	73,15	190,84	1,65	11.580,26
Rundeng	0,00	0,00	1.700,01	7,72	0,00	0,00	11.713,45	53,22	8.597,79	39,06	22.011,25
Simpang Kiri	82,12	0,49	153,60	0,93	3.168,37	19,10	11.718,68	70,64	1.466,93	8,84	16.589,70
Sultan Daulat	10.180,32	19,47	623,93	1,19	6.050,69	11,57	30.225,21	57,81	5.204,51	9,95	52.284,67
Kota Subulussalam	10.301,13	8,71	5.869,50	4,96	12.618,88	10,67	71.665,70	60,61	17.789,82	15,04	118.245,03

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja Penyusunan KLHS revisi RPJMK Subulussalam 2019-2024

f. Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas (JED4)

Keanekaragaman hayati (biodiversitas) adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan variasi bentuk kehidupan di bumi, interaksi diantara berbagai makhluk hidup dengan lingkungan dan habitatnya. Ada tiga jenis tingkat keanekaragaman hayati yaitu keanekaragaman tingkat genetik, spesies dan ekosistem. Keanekaragaman genetik merupakan keanekaragaman yang terjadi pada tingkat populasi yang sama. Semakin beragam keanekaragaman genetik suatu populasi maka menunjukkan semakin besar kemampuan populasi tersebut beradaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Keanekaragaman tingkat spesies dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama di suatu tempat. Biasanya, semakin jauh dari kehidupan manusia, keanekaragaman tingkat spesies juga semakin tinggi. Selanjutnya, keanekaragaman ekosistem memiliki kaitan dengan kekayaan tipe habitat. Keanekaragaman ekosistem tidak hanya terjadi dari satu pulau ke pulau lainnya, tetapi juga dari satu tempat ke tempat lainnya dalam satu pulau. Keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari.

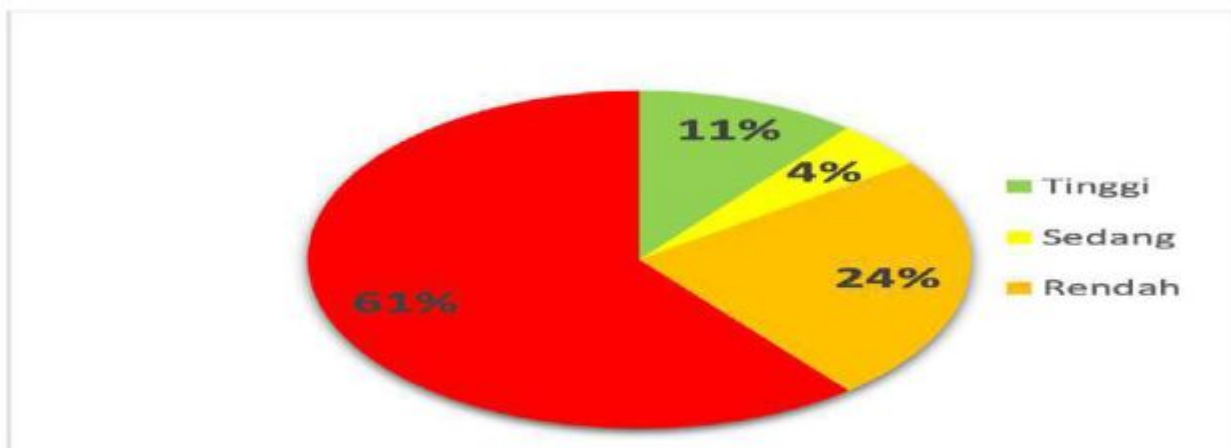
Jasa lingkungan di Kota Subulussalam saat ini untuk mendukung keanekaragaman hayati didominasi oleh kelas sangat rendah, yaitu 71.984,66 hektar. Tidak terdapat wilayah dengan kelas sangat tinggi, hanya kelas tinggi seluas 12.712,13 hektar. Kecamatan yang memiliki wilayah dengan kelas sangat rendah terbesar adalah Kecamatan Sultan Daulat, yaitu seluas 24.837,75 hektar, kemudian Kecamatan Rundeng seluas 16.838,46 hektar. Kecamatan Sultan Daulat juga memiliki wilayah dengan kelas rendah terluas, yaitu sebesar 16.225,84 hektar. Sementara itu wilayah dengan kelas tinggi untuk pendukung biodiversitas ini hanya seluas 12.712,13 hektar, dan yang terluas juga di Kecamatan Sultan Daulat, yaitu seluas 10.597,85 hektar.

61 persen dari luasan wilayah Kota Subulussalam saat ini memiliki jasa lingkungan dengan kelas sangat rendah untuk pendukung biodiversitas, kemudian diikuti oleh 24 (Duapuluh empat) persen dengan kelas rendah. Wilayah yang memiliki kelas tinggi hanya terdiri dari 11 (Sebelas) persen, sementara untuk saat ini tidak terdapat lagi wilayah dengan kelas sangat tinggi.

Kajian ini dilengkapi dengan peta yang menggambarkan wilayah-wilayah di Kota Subulussalam dengan kelas jasa lingkungannya masing-masing sebagai pendukung biodiversitas. Pada peta ini dapat dilihat bahwa wilayah yang memiliki kemampuan mendukung biodiversitas tersebut hanya terdapat di sebagian kecil kecamatan. Sementara itu yang memiliki kemampuan yang sudah rendah dan

bahkan sangat rendah terlihat sangat luas dengan warna merah dan orange. Hal yang cukup ganjil dari peta ini adalah menunjukkan semakin ke wilayah hutan, kemampuan pendukung biodiversitas terlihat rendah. Seharusnya wilayah yang berbatasan dengan hutan dan hutan lindung kemampuan pendukung biodiversitasnya tinggi.

Namun demikian penting disampaikan bahwa data dan peta ini bukanlah dari hasil pengukuran yang harus dilakukan untuk Kota Subulussalam. Data dan peta ini diambil dari hasil pengukuran jasa lingkungan di tingkat Provinsi Aceh guna menggambarkan kondisi jasa lingkungan di Kota Subulussalam, sehingga terdapat hasil pengukuran yang tidak mendetail, seperti dalam melihat wilayah dengan setiap kelas jasa ekosistemnya.



Gambar 2.30.
Luas Ekosistem Pendukung Biodiversitas di Kota Subulussalam

Tabel 2.16.

Luasan dan Kelas Ekosistem Pendukung Biodiversitas di Kota Subulussalam

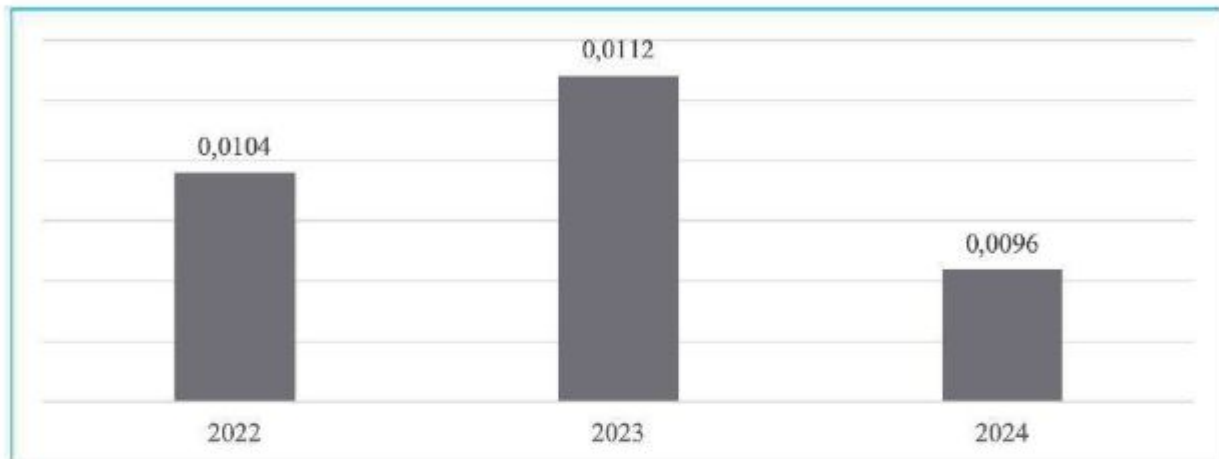
Kecamatan	Sangat Tinggi		Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat Rendah		Total
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	
Longkib	0,00	0,00	1.154,03	7,31	2.968,04	18,81	1.533,33	9,72	10.123,76	64,16	15.779,15
Penanggalan	0,00	0,00	38,69	0,33	12,00	0,10	4.455,60	38,48	7.073,97	61,09	11.580,26
Rundeng	0,00	0,00	712,07	3,24	1.686,53	7,66	2.774,19	12,60	16.838,46	76,50	22.011,25
Simpang Kiri	0,00	0,00	209,49	1,26	101,71	0,61	3.167,76	19,09	13.110,73	79,03	16.589,70
Sultan Daulat	0,00	0,00	10.597,85	20,27	623,23	1,19	16.225,84	31,03	24.837,75	47,50	52.284,67
Kota Subulussalam	0,00	0,00	12.712,13	10,75	5.391,51	4,56	28.156,72	23,81	71.984,66	60,88	118.245,03

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja Penyusunan KLHS revisi RPJMK Subulussalam 2019-2024

2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

2.1.4.1. Air Baku

Ketersediaan air baku domestik dan industri di Kota Subulussalam tergolong sangat kecil. Pada tahun 2024, hanya tersedia 0,0096 meter kubik per detik, jauh dari target nasional pada tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu 131,36 meter kubik per detik.



Gambar 2.32.

Ketersediaan Air Baku Domestik dan Industri (meter kubik per detik)

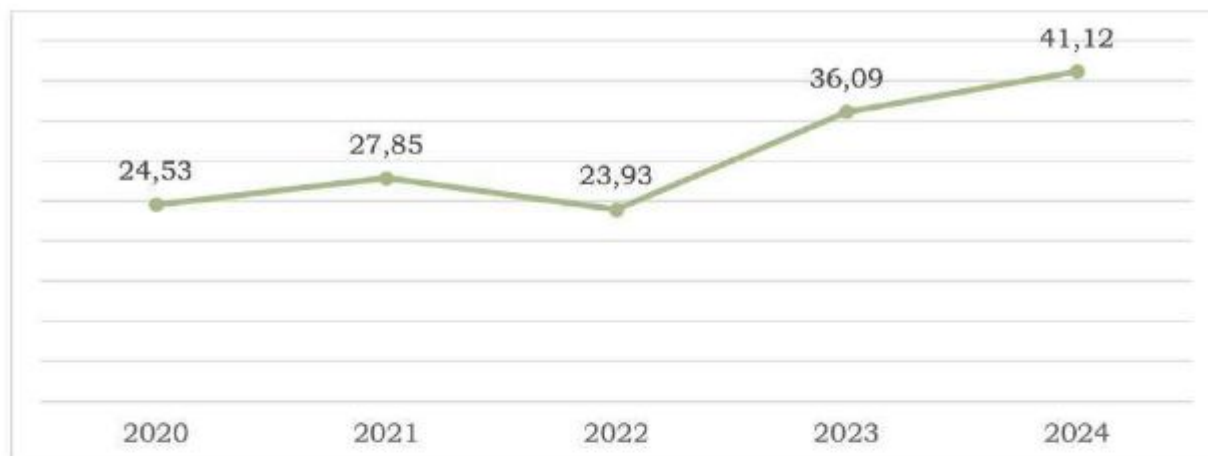
2.1.4.2. Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Subulussalam mengalami kenaikan sejak tahun 2020. Pada tahun 2020, IKP Kota Subulussalam hanya 24,53 atau berkategori Sangat Rawan Pangan. Angka ini meningkat pada tahun 2023 menjadi 36,09 atau berkategori Rawan Pangan atau kategori II. Meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 41,12. Angka ini menunjukkan perbaikan ketahanan pangan di Kota Subulussalam setiap tahunnya.

Produksi pertanian yang menurun, degradasi tanah dan sumber air, jaringan logistik buruk, kehilangan pangan yang tinggi, daya beli masyarakat rendah, ketimpangan akses pangan, tinggi ketergantungan pangan dari luar daerah menjadi beberapa faktor penyebab kerawanan pangan di Kota Subulussalam. Sedangkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan sebesar 0,00 persen di Kota Subulussalam sejak tahun 2020-2024.

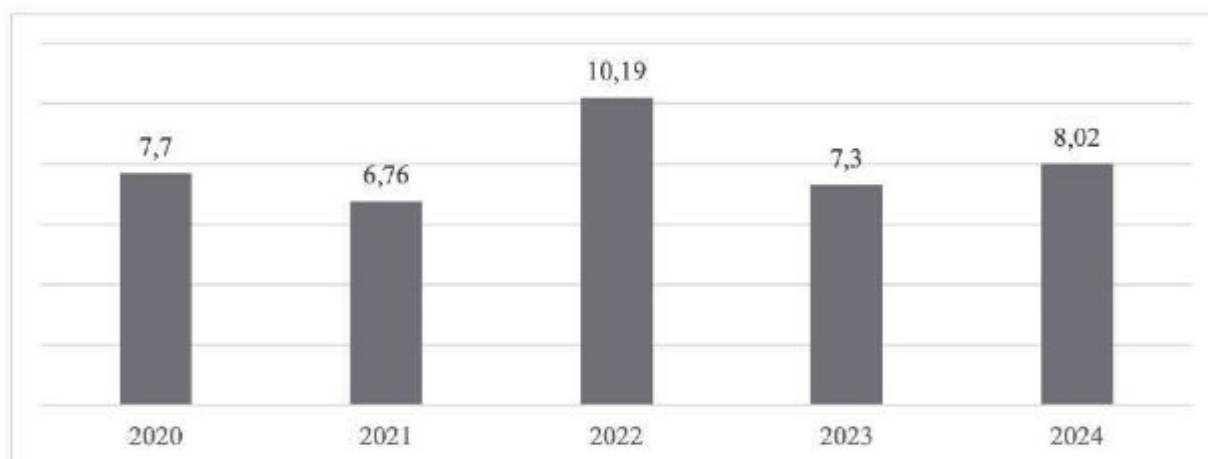
Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kota Subulussalam mengalami kenaikan sejak tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 sebesar 7,7 persen, meningkat menjadi 8,02 persen pada tahun 2024. Beberapa permasalahan penyebab di antaranya Keterbatasan akses terhadap pangan bergizi, kemiskinan dan daya beli rendah, produktivitas pertanian yang rendah, kurangnya edukasi gizi dan pola konsumsi tidak seimbang, serta kebijakan dan program yang kurang

efektif. Dampaknya akan menjurus ke gizi buruk dan *stunting*, penurunan produktivitas kerja dan ketahanan pangan melemah.



Sumber : Badan Pangan Indonesia, 2024

Gambar 2.33.
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, 2025

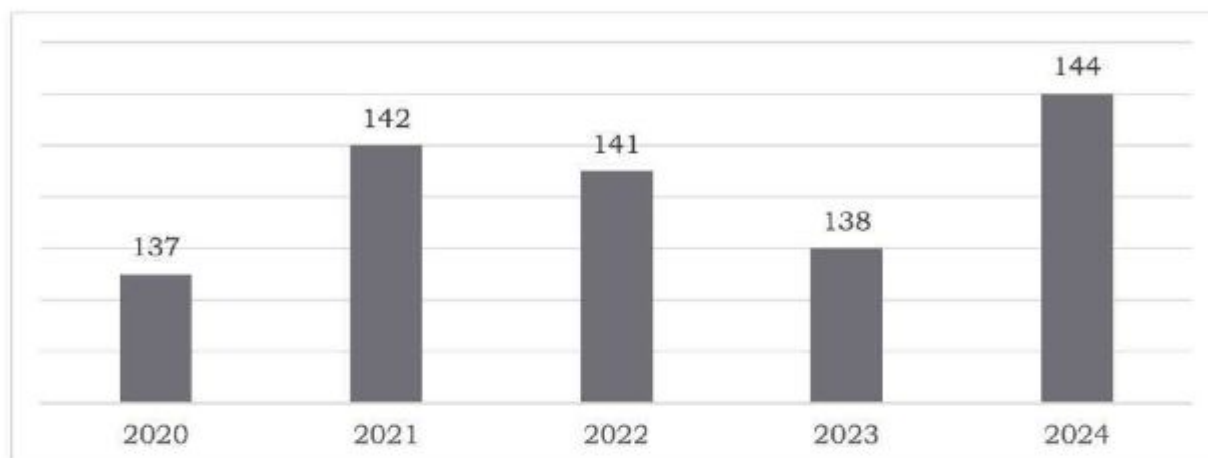
Gambar 2.34.
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

2.1.4.3. Konsumsi Listrik per Kapita

Konsumsi listrik per kapita merupakan salah satu indikator penting yang tidak hanya mengukur seberapa besar energi listrik yang dikonsumsi oleh setiap penduduk dalam suatu wilayah, tetapi juga menjadi cerminan tingkat kemajuan ekonomi, kualitas hidup, dan efektivitas pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Di daerah perkotaan yang maju, konsumsi listrik per kapita cenderung tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi berjalan dinamis, kualitas hidup masyarakat baik, infrastruktur energi memadai.

Sebaliknya, di daerah pedesaan atau wilayah tertinggal, konsumsi listrik per kapita yang rendah dapat mengindikasikan keterbatasan akses listrik, aktivitas ekonomi terbatas, kendala infrastruktur.

Konsumsi listrik per kapita Kota Subulussalam mengalami kenaikan sejak tahun 2020-2024, yaitu dengan rata-rata sekitar 140 KWh. Angka ini tentunya masih jauh dari target TPB nasional yaitu 1.400 KWh.



Sumber : UP3 PLN Subulussalam, 2025

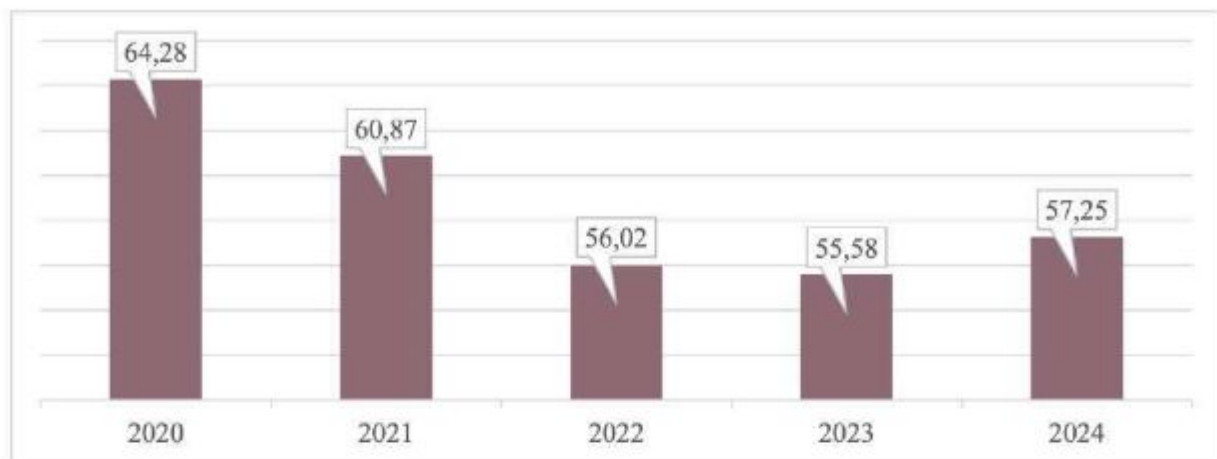
Gambar 2.35.
Konsumsi Listrik per Kapita Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

2.1.4.4. Air Minum Layak

Capaian rumah tangga menggunakan air minum layak Kota Subulussalam Tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2020, Persentase Rumah Tangga menggunakan air minum layak sebesar 64,28 persen dan 57,25 persen pada tahun 2024. Adapun Rumah Tangga Menggunakan Air Minum Layak Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar di bawah ini.

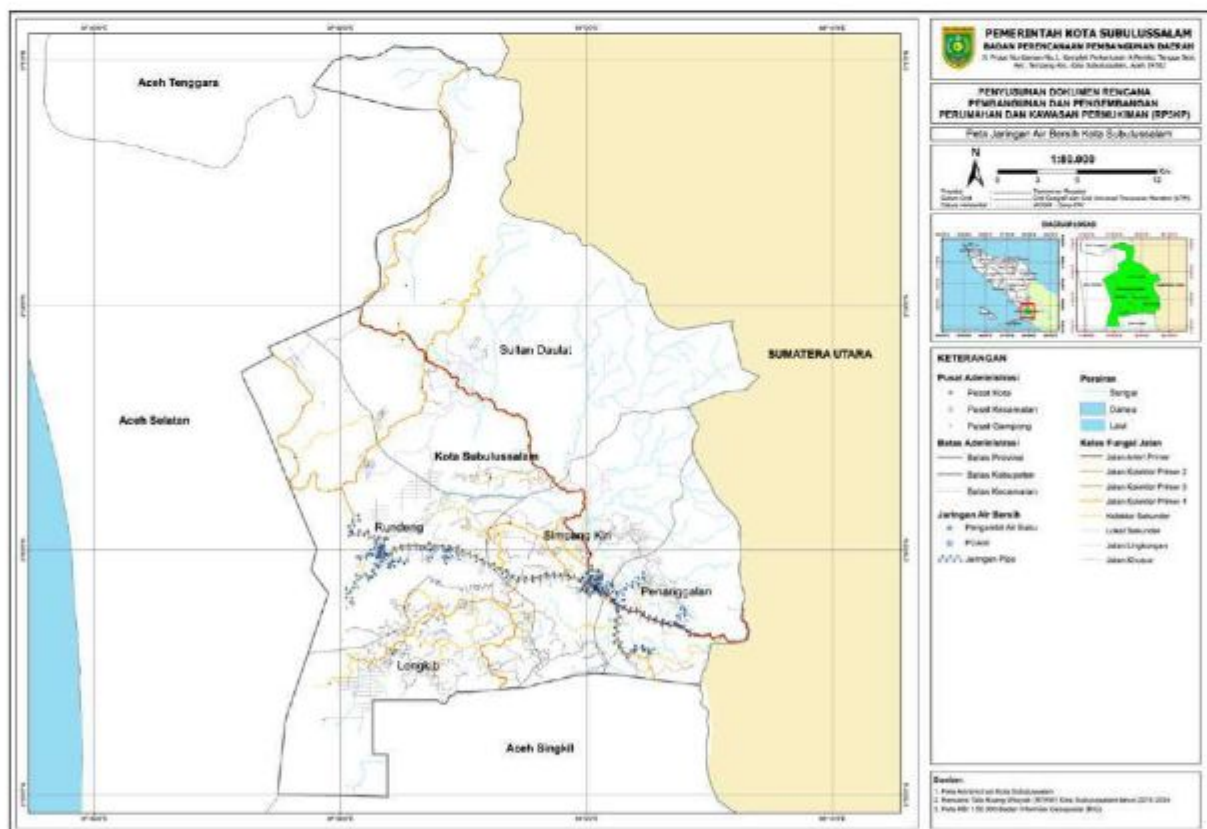
Belum tercapainya seluruh rumah tangga yang berakses air minum layak disebabkan antara lain:

- a. sistem Pelayanan air Minum yang belum memadai;
- b. belum lengkap dan terbaharukan perangkat regulasi yang mendukung penyediaan air minum;
- c. menurunnya kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air baku air minum;
- d. masih terbatasnya penyedia air minum oleh perusahaan daerah air minum yang sehat (kredibel dan profesional);
- e. belum optimalnya sistem perencanaan penyediaan air minum; dan
- f. terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek penyediaan air minum.



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2025

Gambar 2.36.
Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024



Sumber: RP3KP Kota Subulussalam, 2023

Gambar 2.37.
Peta Jaringan Ari Bersih Perpipaan di Kota Subulussalam

Untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti yang diuraikan di atas, maka Pemerintah Kota Subulussalam dapat melakukan berbagai kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada:

- a. penyediaan perangkat peraturan di daerah untuk mendukung pelayanan air minum;
- b. memastikan ketersediaan air baku air minum;
- c. meningkatkan prioritas pembangunan prasarana dan sarana air minum;
- d. meningkatkan kinerja manajemen penyelenggaraan air minum;
- e. meningkatkan cakupan pelayanan air minum; dan
- f. pengembangan alternatif sumber pendanaan bagi pembangunan air minum.

2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.5.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Pada tahun 2020-2024, pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) sudah mulai dihitung. Nilai IKLH Kota Subulussalam Tahun 2020 sebesar 64,77 dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 74,28. Nilai indeks tutupan lahan/hutan di Kota Subulussalam pada tahun 2024 adalah 51,78 atau berada dalam kondisi sedang. Adapun indeks kualitas tutupan lahan di Kota Subulussalam adalah sebagai berikut.

Tabel 2.17.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
IKLH	64,77	71,54	73,88	72,54	74,28
IKU	68,30	88,98	70,00	88,67	95,07
IKA	86,72	65,00	90,24	54,59	65,00
IKTL	45,66	50,53	50,27	61,70	51,78

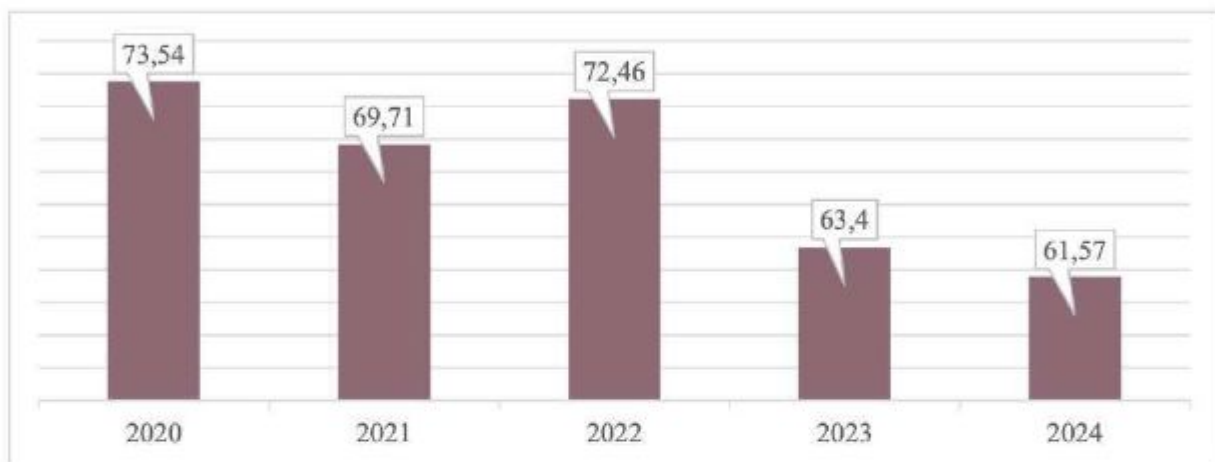
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam, 2024

2.1.5.2. Sanitasi Layak

Menurut Organisasi Kesehatan dunia (WHO), sanitasi adalah usaha pengendalian faktor- faktor lingkungan fisik manusia yang mungkin menimbulkan atau dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi perkembangan fisik, kesehatan dan daya tahan hidup manusia. Adapun Ruang lingkup sanitasi ini antara lain yaitu Air Limbah, Persampahan, Drainase lingkungan, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi *Higiene*. Salah satu faktor yang menjadi penilaian rumah layak huni adalah rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut:

- a. Fasilitas air bersih,
- b. Pembuangan air besar/tinja,
- c. Pembuangan air limbah (air bekas) dan
- d. pembuangan sampah.

Kota Subulussalam pada tahun 2020 memiliki rumah tinggal bersanitasi sebanyak 73,54 persen dari jumlah seluruh rumah tinggal. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 61,57 persen. Hal ini menggambarkan capaian rumah tinggal bersanitasi di Kota Subulussalam masih rendah.



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2025

Gambar 2.38.
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak di Kota Subulussalam
Tahun 2020-2024

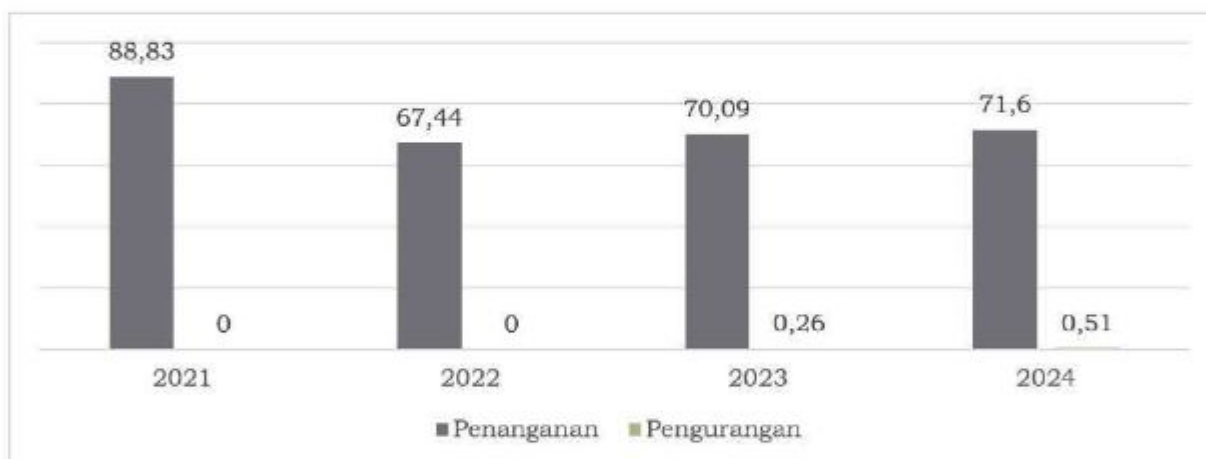
Masih terdapatnya rumah tinggal yang belum bersanitasi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. masyarakat belum menganggap penting untuk memiliki jamban sendiri;
- b. masyarakat pada umumnya masih menggunakan jamban cubluk;
- c. perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di sungai/ pekarangan/ selokan masih menjadi kebiasaan masyarakat khususnya di daerah pinggiran sungai.

Upaya Pemerintah Kota Subulussalam untuk mengatasi hal tersebut di atas yaitu dengan meningkatkan sosialisasi pentingnya rumah tinggal bersanitasi, menyediakan MCK/MCK++, membangun IPAL Komunal dan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM-SANIMAS) peduli sanitasi, penyuluhan dan Kampanye Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) serta mengawal dan melaksanakan Program Kotaku yang telah digagas oleh Pemerintah Pusat di daerah.

2.1.5.3. Pengelolaan Sampah

Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik sebesar 71,60 persen untuk penanganan dan 0,51 persen untuk pengurangan. Artinya masih banyak sampah di Kota Subulussalam belum terjadi pengurangan. Bahkan, dengan keluarnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2025 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Berupa Paksaan Pemerintah Penghentian Pengelolaan Sampah Sistem Pembuangan Terbuka (Open Dumping) Pada Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Sarkea Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kota Subulussalam, Di Desa Kuta Cepu, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, perlu dilakukan perubahan sistem TPA yang ada di Subulussalam sehingga dapat dilakukan pengurangan sampah. Secara kuantitas, sampah yang terkelola di Kota Subulussalam mencapai 12.866,25 ton.



Sumber : DLHK Kota Subulussalam, 2025

Gambar 2.39.
Pengelolaan Sampah di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

2.1.6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kebencanaan di Kota Subulussalam tidak dapat terlepas dari sistem kebencanaan Indonesia bahkan dunia. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng/kulit bumi aktif yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan, Lempeng Euro-Asia di bagian utara dan Lempeng Pasifik di bagian Timur. Ketiga lempengan tersebut bergerak dan saling bertumbukan sehingga lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Euro-Asia dan menimbulkan gempa bumi, jalur gunung api, dan sesar atau patahan. Penunjaman di Indonesia juga banyak terdapat patahan aktif seperti Patahan Semangko di Sumatera, Cimandiri di Jawa

dan banyak patahan dan sub patahan lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karenanya kejadian gempa beserta dampak yang ditimbulkannya yang dapat terjadi secara tiba-tiba harus dapat diantisipasi secara dini kejadiannya, misalkan melalui *hazard warning system* dan optimalisasi upaya mitigasi bencana.

Sebagian besar wilayah Sumatera merupakan wilayah rawan gempa karena dilalui patahan aktif sesar Semangko yang memanjang dari ujung utara Pulau Sumatera hingga Selat Sunda. Kota Banda Aceh, Padang, termasuk regional Kota Subulussalam merupakan daerah yang dilalui sesar Semangko. Berdasarkan informasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), wilayah-wilayah tersebut tengah terjadi penumpukan energi yang siap dilepaskan kapan saja. Berdasarkan catatan yang ada selama ini, besar gempa bervariasi antara 5 hingga di atas 7 skala Richter (SR).

Bencana kegempaan di sebagian wilayah Sumatera Utara dan Barat dan sekitarnya pada hakikatnya dipicu pula oleh adanya patahan-patahan benua yang berdasarkan tinjauan geologi memberikan dorongan kuat di dasar bumi yang menyebabkan gerakan tanah bahkan gempa. Gempa besar punya kecenderungan berulang di jalur patahan Sumatera sebagai hasil pelepasan energi yang menumpuk di patahan.

Kota Subulussalam yang terletak di wilayah barat Sumatera tentunya memiliki risiko bencana gempa bumi yang cukup besar. Berdasarkan identifikasi kerentanan terhadap bencana gempa bumi, secara regional Kota Subulussalam berada pada risiko gempa bumi skala I-V MMI atau setara dengan < 5 skala *richter*. Sesuai dengan RTRW Kota Subulussalam kawasan rawan bencana alam terdiri dari:

1) Rawan longsor dan gerakan tanah;

Kawasan rawan longsor dan atau gerakan tanah meliputi seluas 107.150,53 ha yang terdiri dari intensitas menengah dan rendah. Kawasan Intensitas menengah terdapat di Kampong Sikelang, Kampong Baru, Kuta Tengah dan Cepu seluas 4.615,60 Ha yang berada di Kecamatan Penanggalan, Kampong Subulussalam, Subulussalam Barat, Subulussalam Selatan, Pegayo, Suka Makmur, Pasar Panjang dan Mukti Makmur seluas 4.934,09 Ha yang berada di Kecamatan Simpang Kiri, Kampong Darul Aman seluas 13,45 Ha yang berada di Kecamatan Longkib, Kampong Badar, Harapan Baru dan Teladan Baru seluas 906,37 Ha yang berada di Kecamatan Rundeng, Kampong Namo Buaya, Singgersing, Darul Makmur Pulo Belen dan Pulo Kedep, Jabi-Jabi, Suka Maju dan Pasir Belo seluas 5.877,48 Ha yang berada di Kecamatan Sultan Daulat.

Kawasan dengan intensitas rendah terdapat di Kampung Penanggalan, Lae Mbersih, Penuntungan dan Lae Motong seluas 3.057,81 Ha yang berada di Kecamatan Penanggalan. Kampung Subulussalam Utara, Lae Oram, Tangga Besi, Kuta Cepu, Makmur Jaya, Buluh Dori dan Sikelondang seluas 11.585,32 Ha yang berada di Kecamatan Simpang Kiri. Kampung Rantau Panjang, Bukit Alim, Sikerabang, Bangun Sari, Lae Saga, Darussalam, Panji, Longkib dan Sepang seluas 15.588,33 Ha yang berada di Kecamatan Longkib. Kampung Siperkas, Kuta Beringin, Oboh, Binanga, Belukur Makmur, Pasar Rundeng, Lae Pamualan, Muara Batu-batu, Panglima Saman, Sibungke, Sibuasan, Sepadan, Dah, Lae Mate, Mandilam Tualang, Tanah Tumbuh, Kuala Kepeng, Geruguh dan Suak Jampak seluas 20.513,46 Ha yang berada di Kecamatan Rundeng. Kampung cipar-pari Timur, Cipar-pari, Lae Simolap, Bunga Tanjung, Jambi Baru, Gunung Bakti, Lae Langge dan Bawan seluas 40.058,92 Ha yang berada di Kecamatan Sultan Daulat.

2) Kawasan Rawan Kebakaran

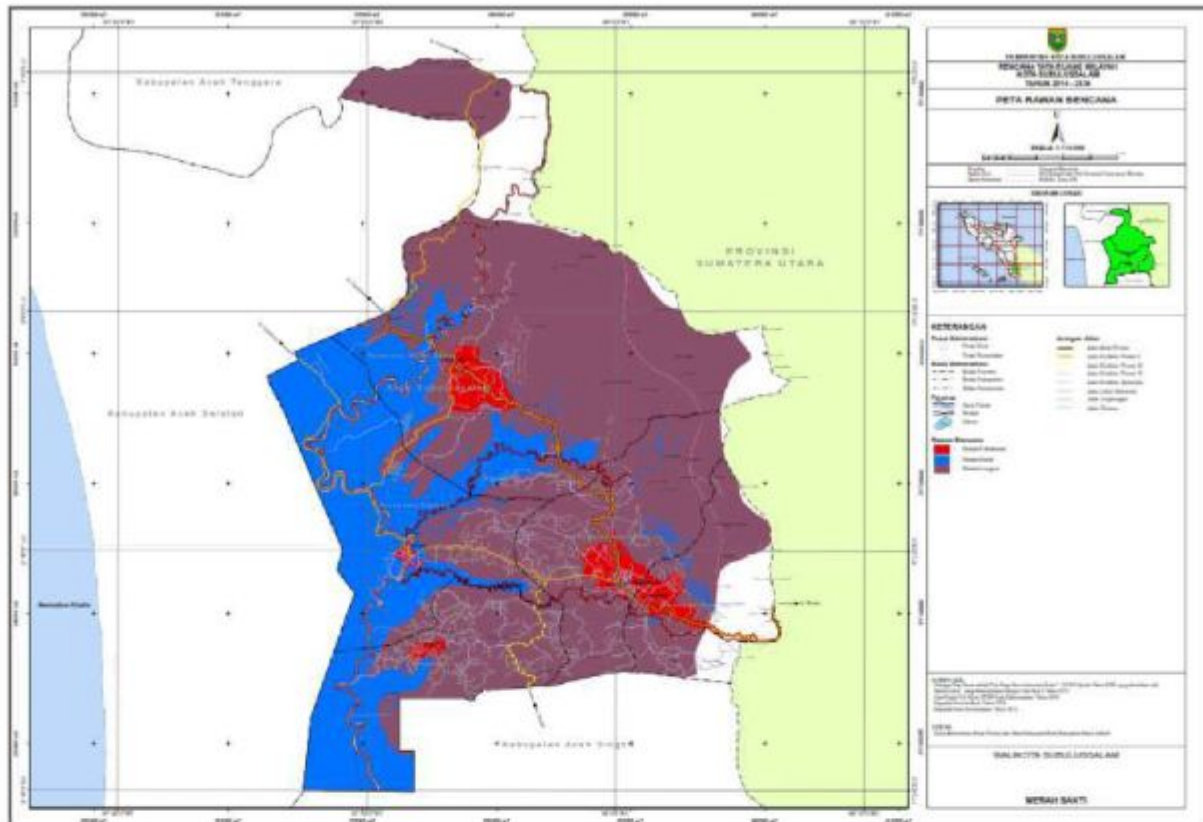
Kawasan rawan kebakaran meliputi:

- a. Kecamatan Longkib di Kampung Darul Aman, Kecamatan Penanggalan di Kampung Penanggalan, Penuntungan, Lae Mbersih, Cepu, kuta Tengah, Kampung Baru, Sikelang, Jontor;
- b. Kecamatan Rundeng di Kampung Pasar Rundeng, Belukur Makmur;
- c. Kecamatan Simpang Kiri di kampung Suka Makmur, Tangga Besi, Subulussalam Selatan, Subulussalam Barat, Subulussalam Utara, Lae Oram, Subulussalam, Pegayo; dan
- d. Kecamatan Sultan Daulat di Kampung Gunung Bakti, Jambi Baru, Pulo Belen.

3) Kawasan rawan banjir

Kawasan rawan banjir di Kota Subulussalam menggenangi areal lahan seluas 28.498,49 Ha, meliputi:

- a. Kecamatan Longkib berada di Kampung Sepang, Longkib, Panji dan Darul Aman seluas 6.555,27 Ha;
- b. Kecamatan Rundengberada di KampungSiperkas, Kuta Beringin, Oboh, Binanga, Belukur Makmur, Pasar Rundeng, Lae Pamualan, Panglima Saman, Sibungke, Sibuasan, Dah, Lae Mate, Sepadan, Mandilam, Tualang, Tanah Tumbuh, Kuala Kepeng, Geruguh dan Suak Jampak seluas 15.653,23 Ha; dan
- c. Kecamatan Sultan Daulat berada di Kampung Lae Simolap, Bunga Tanjung, Jabi-jabi Suka Maju, Sigrun, Pasir Belo, Bawan dan Lae Langge seluas 6.289,99 Ha.

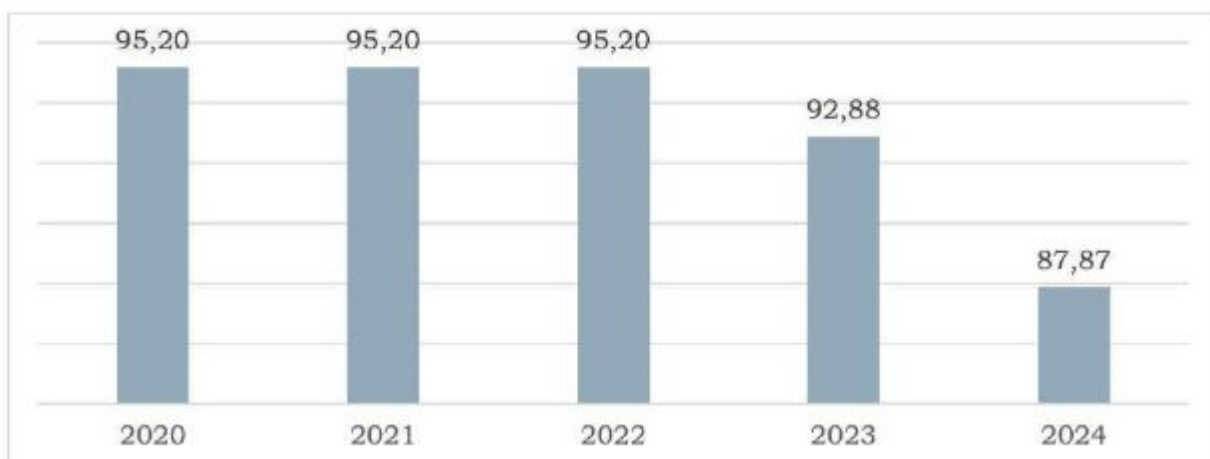


Sumber: Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014

Gambar 2.40.
Peta Rawan Bencana Kota Subulussalam

2.1.6.1. Indeks Risiko Bencana (IRB)

Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Subulussalam mengalami penurunan sejak tahun 2020-2024. Pada tahun 2020-2022, IRB Kota Subulussalam pada angka 95,20 atau berkategori sedang. Angka ini turun pada tahun 2024 menjadi 87,87 atau berkategori sedang.

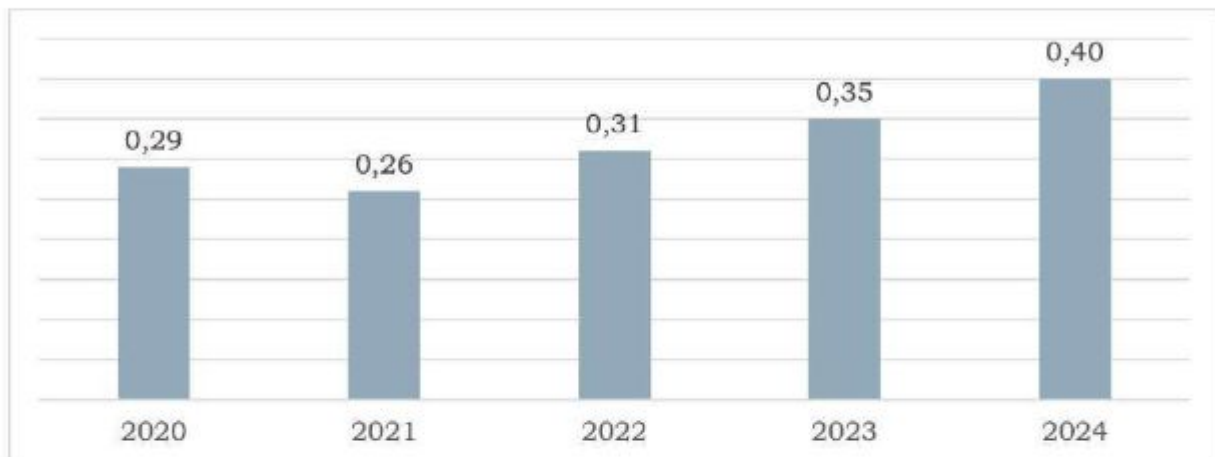


Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana , 2024

Gambar 2.41.
Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

2.1.6.2. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Subulussalam mengalami peningkatan sejak tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, IKD Kota Subulussalam pada angka 0,29 lalu meningkat menjadi 0,40 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan ketahanan Kota Subulussalam setiap tahunnya meningkat.



Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana , 2024

Gambar 2.42.
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan Kota Subulussalam harus mengadopsi rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang provinsi demikian juga dengan rencana tata ruang Subulussalam. Karena kota Subulussalam terletak pada lokasi yang sangat strategis dengan berbatasan langsung provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Infrastruktur- infrastruktur yang direncanakan oleh nasional seperti jalan kereta api, pelabuhan laut, terminal barang dan penumpang, merupakan potensi yang harus perhatian pemerintah dalam waktu pendek maupun jangka panjang.

- 1) Berdasarkan karakteristik sumber daya yang ada, Wilayah Kota Subulussalam terbagi menjadi 4 kawasan yaitu:
 - a. Kawasan dataran tinggi yang dimulai dari pada ketinggian 50-1000 mdpl. Pola spasial yang terlihat dari peta ketinggian dan kemiringan lahan Kota Subulussalam adalah bahwa ketinggian semakin meningkat dari sisi barat menuju sisi timur. Wilayah dengan ketinggian terbesar terkonsentrasi pada timur kota, khususnya pada Desa Penanggalan dan Sultan Daulat.

- Morfologi lahan pegunungan di sebelah timur, kemudian lahan datar sampai dengan bergelombang pada sisi tengah sampai barat wilayah kota.
- b. Kawasan timur meliputi Kecamatan Penanggalan. Wilayah ini merupakan daerah wisata (air terjun) dan daerah hutan lindung dan perkebunan daerah ini sebagian besar wilayahnya ialah berbukit-bukit.
 - c. Kawasan tengah meliputi Ibukota Subulussalam itu sendiri dan Kecamatan Simpang Kiri. Wilayah ini merupakan pusat ibukota Kota Subulussalam, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa serta semua fasilitas pemerintah lainnya.
 - d. Kawasan barat meliputi Kecamatan Rundeng, Sultan Daulat dan Longkib, dan merupakan daerah perkebunan dan pertanian yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri CPO serta daerah yang masuk ke dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).
- 2) Berdasarkan lintas antar daerah, kondisi wilayah Kota Subulussalam merupakan pintu gerbang keluar masuk dari Aceh bagian barat selatan juga dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Subulussalam dengan Kabupaten Aceh Singkil sebagai kota perkebunan dan pelabuhan, Kabupaten Aceh Selatan sebagai kota perkebunan, penghasil perikanan dan pelabuhan, Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai kota perdagangan dan jasa serta pertanian, Kabupaten Nagan Raya sebagai kota perkebunan, Kabupaten Aceh Barat sebagai kota perdagangan dan jasa, perkebunan serta industri, Kabupaten Simeulue sebagai kota perkebunan dan pelabuhan serta Kabupaten Aceh Jaya sebagai kota perkebunan. Kota Subulussalam berkembang secara ilmiah akibat potensi wilayahnya dan Kota Subulussalam berkembang karena lokasi yang berada dijalur regional antara Medan, Sumatera Utara/ke kota di pesisir barat Provinsi Aceh yang mana permintaan akan kegiatan jasa pelayanan dan perdagangan berkembang dengan sendirinya.
- 3) Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan, Wilayah Kota Subulussalam merupakan termasuk di dalam Kawasan Andalan Meulaboh dan sekitarnya, dengan arah pengembangan dan peningkatan pertanian, perikanan, pertambangan dan perkebunan serta peningkatan pemanfaatan lahan yang kurang produktif dan marginal. Berdasarkan letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat tersebut, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut :
- a. Wilayah Aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu) merupakan perkembangan Kota Subulussalam, maka Kota Subulussalam

yang terletak pada perbatasan langsung antara Pemerintah Aceh dan Provinsi Sumatera Utara khususnya Kecamatan Penanggalan merupakan wilayah aglomerasi Kota Subulussalam dan Pemerintah Aceh.

- b. Wilayah Sub-urban (wilayah perbatasan antara desa dan kota) meliputi kota Kecamatan Simpang Kiri, Kota Kecamatan Penanggalan dan Kota Kecamatan Rundeng, Kota Kecamatan Sultan Daulat dan Kota Kecamatan Longkib terletak agak jauh dari kota Subulussalam dan berkembang menjadi tujuan kegiatan masyarakat di wilayah kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan.
- c. Wilayah fungsi khusus atau wilayah penyangga (*buffer zone*) meliputi Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Sultan Daulat dan Kecamatan Rundeng yang merupakan pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya.

2.1.8. Demografi

Kependudukan adalah karakteristik yang paling mewakili dalam menentukan gambaran masalah suatu wilayah, karena penduduk sebagai suatu objek pokok suatu wilayah merupakan komponen yang selalu mengalami perkembangan yang dinamis dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan penduduk Kota Subulussalam secara umum dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kebijakan pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkat kelahiran dan kematian serta meningkatkan mobilitas penduduk. Upaya untuk menurunkan tingkat kelahiran antara lain dengan mendorong kegiatan, seperti penundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, dan kampanye program KB. Sementara upaya menurunkan kematian dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

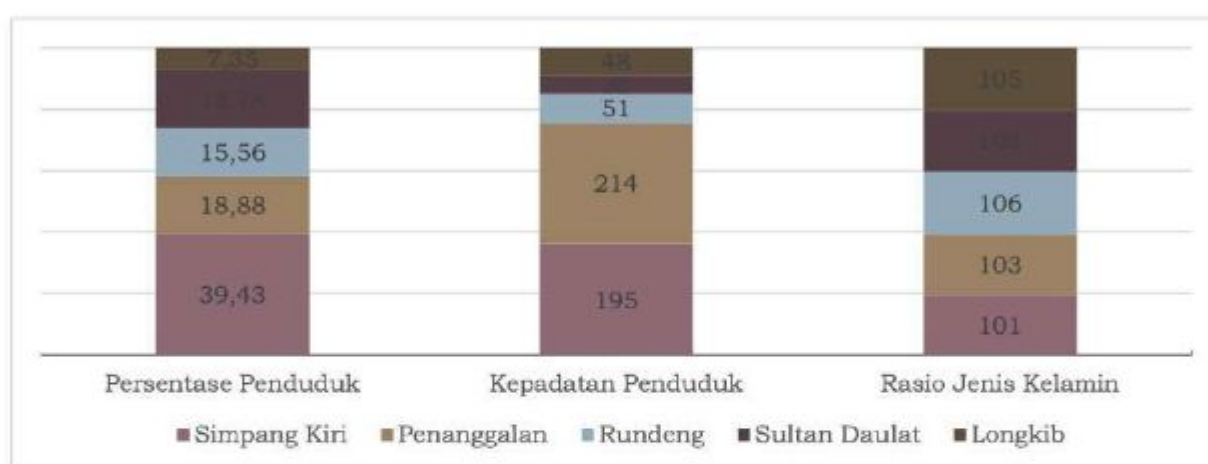
Tabel 2.18.
Jumlah dan laju Pertumbuhan Penduduk Kota Subulussalam
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan (Persen)
2020	90.751	2,91
2021	92.671	2,12
2022	95.199	0,95
2023	97.770	2,73
2024	99.062	2,70

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025

Menurut proyeksi BPS, jumlah penduduk Kota Subulussalam terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kota Subulussalam yaitu sebanyak 90.751 jiwa dan meningkat menjadi 99.062 jiwa pada tahun 2024. Secara rinci jumlah penduduk Kota Subulussalam dapat dilihat pada Tabel di atas.

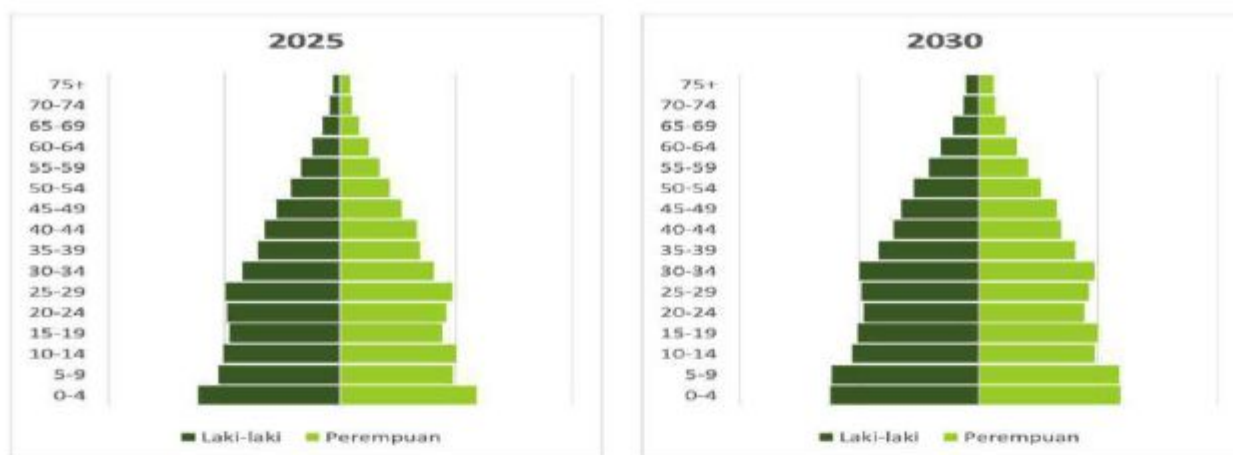
Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Akhir Tahun 2024, Penduduk Kota Subulussalam berjumlah 99.062 jiwa yang terdiri dari 50.275 jiwa (50,75 persen) laki-laki dan 48.787 jiwa (49,25 persen) perempuan, sedangkan untuk konsentrasi jumlah penduduk di Kota Subulussalam terdapat di Kecamatan Simpang Kiri dengan proporsi terbesar yaitu 39.060 jiwa (39,43 persen) dan proporsi terendah di Kecamatan Longkib yaitu 7.281 jiwa (7,35 persen).



Gambar 2.43.
Distribusi Persentase Penduduk (Persen), Kepadatan Penduduk (jiwa/Km persegi), Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Subulussalam Tahun 2024

Secara keseluruhan jumlah penduduk laki-laki di Kota Subulussalam lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan seperti tampak dari rasio jenis kelamin yang lebih besar dari 100 persen. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu.

Proyeksi penduduk Kota Subulussalam pada tahun 2030 berjumlah 112.197 jiwa dengan rasio penduduk perempuan dan laki-laki 1,03 (laki-laki = 56.902 jiwa dan perempuan = 55.295 jiwa). Rasio ketergantungan tahun 2030 sebesar 53,68. Adapun proyeksi penduduk Kota Subulussalam untuk tahun 2030 disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.44.
Proyeksi Penduduk Kota Subulussalam Tahun 2025 dan 2030

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

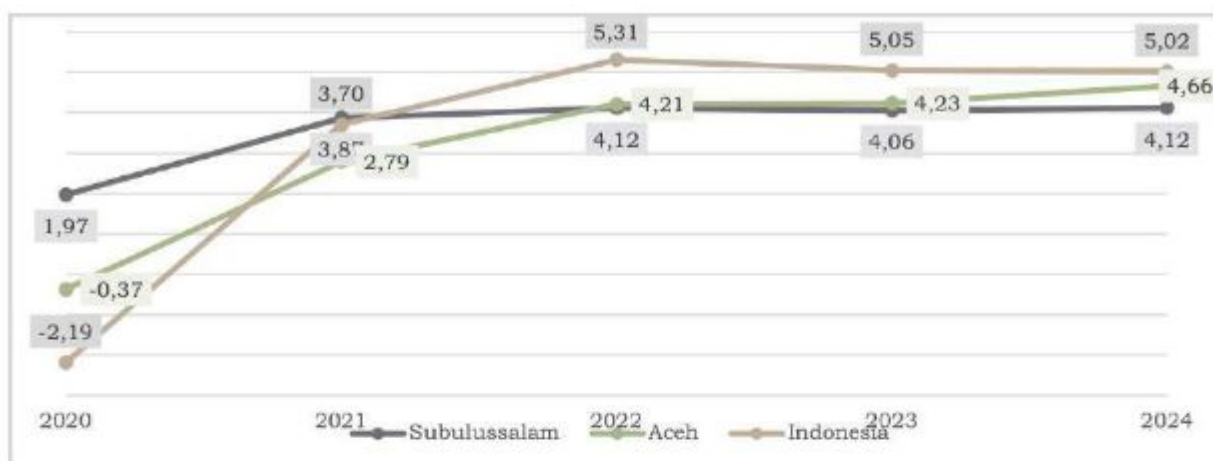
1) Pertumbuhan Ekonomi

Jika melihat data dari tahun 2020-2024 PDRB Kota Subulussalam mengalami peningkatan, pada tahun 2020 laju PDRB sebesar 1,97 persen dimana terjadi akibat dari pandemi Covid-19. Angka ini tergolong rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sebelumnya yang berada di atas angka 4 persen. Lalu mengalami kenaikan secara perlahan kembali pada tahun 2021 dan 2022 dimana kembali ke angka 4,12 persen, namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 menjadi 4,06 persen. Begitu juga halnya pada tahun 2024, dimana kembali mengalami peningkatan pada angka 4,12 persen.

Pada tahun 2024, laju PDRB Kota Subulussalam lebih rendah dari pada laju PDRB Provinsi Aceh dan Nasional. Laju PDRB Provinsi Aceh dan Nasional masing-masing 4,66 persen dan 5,02 persen. Sedangkan untuk mengetahui PDRB Kota Subulussalam Atas Dasar Harga Konstan disajikan per sektor usaha, dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Secara Umum, baik PDRB atas dasar harga konstan maupun PDRB atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Jika PDRB atas dasar harga Konstan pada tahun 2020 sebesar Rp1385,41 miliar maka pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp1.623,25 miliar, atau terjadi peningkatan sebesar Rp237,84 miliar (17,17 persen). Sedangkan untuk PDRB atas harga dasar berlaku pada tahun 2020 sebesar Rp1.803,68 miliar dan pada tahun 2024 sebesar Rp2.761,85 miliar, atau ada peningkatan sebesar Rp958,17 miliar (53,12 persen). Pertumbuhan kontribusi sektor tertinggi PDRB ADHB 2020-2024 disumbangkan oleh sektor Industri Pengolahan (105,69 persen), diikuti oleh sektor Transportasi

dan Perdagangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mengalami pertumbuhan di atas 50 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025

Gambar 2.45.

Perbandingan Laju PDRB Kota Subulussalam, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

Kontribusi sektor lapangan usaha tertinggi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi mencapai 26,05 persen pada tahun 2024. Selanjutnya diikuti oleh sektor Industri Pengolahan (19,37 persen), sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (16,64 persen) dan sektor Konstruksi (14,31 persen). Hal ini juga terlihat bahwa sektor primer terutama bidang pertanian dan perkebunan menjadi penyumbang terbesar perekonomian di Kota Subulussalam dengan luas perkebunan kelapa sawit mencapai lebih 45 ribu hektar. Kondisi pemerintahan yang berbentuk kota, menjadikan Kota Subulussalam berpotensi memiliki pertumbuhan ekonomi bidang jasa, namun dalam 5 tahun terakhir, terjadi penurunan kontribusi sektor jasa.

Potensi lainnya pada sektor Transportasi dan Perdagangan dimana mengalami peningkatan yang signifikan. Mengingat kondisi geografis Kota Subulussalam yang berada pada wilayah perbatasan antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara dan merupakan pintu masuk perekonomian wilayah barat selatan Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara, menjadikan sektor Transportasi dan Perdagangan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan.



Tabel 2.19.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Kota Subulussalam (dalam miliar rupiah)

No.	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	319,59	23,07	326,50	22,69	335,21	22,37	359,37	23,05	371,52	22,89
B	Pertambangan dan Penggalian	33,33	2,41	32,38	2,25	29,94	2	29,66	1,9	28,80	1,77
C	Industri Pengolahan	187,96	13,57	199,86	13,89	213,69	14,26	225,53	14,47	235,33	14,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,51	0,11	1,53	0,11	1,58	0,11	1,65	0,11	1,72	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,24	0,02	0,25	0,02	0,25	0,02	0,25	0,02	0,26	0,02
F	Konstruksi	225,55	16,28	227,82	15,83	234,60	15,66	239,99	15,39	248,71	15,32
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	250,44	18,08	261,54	18,18	277,55	18,52	294,38	18,88	302,30	18,62
H	Transportasi dan Pergudangan	55,79	4,82	77,11	5,36	80,51	5,37	82,69	5,3	93,75	5,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,26	0,81	11,34	0,79	14,13	0,94	14,91	0,96	15,41	0,95
J	Informasi dan Komunikasi	45,64	3,29	49,05	3,41	53,05	3,54	54,30	3,48	55,49	3,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	27,72	2	26,60	1,85	25,32	1,69	22,56	1,45	27,60	1,70
L	Real Estate	45,97	3,32	47,40	3,29	48,79	3,26	49,99	3,21	51,32	3,16
M,N	Jasa Perusahaan	4,63	0,33	4,67	0,32	5,14	0,34	5,07	0,33	5,26	0,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	95,85	6,92	100,50	6,98	101,21	6,75	100,86	6,47	105,48	6,50
P	Jasa Pendidikan	33,34	2,41	34,17	2,37	35,21	2,35	35,72	2,29	37,20	2,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	26,77	1,93	29,29	2,04	32,09	2,14	31,72	2,03	32,23	1,99
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,84	0,64	9,00	0,63	10,02	0,67	10,43	0,67	10,86	0,67
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		1385,41	100,00	1439,00	100,00	1498,30	100,00	1559,06	100,00	1623,25	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025

Tabel 2.20.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Kota Subulussalam (dalam miliar rupiah)

No	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	387,45	21,48	469,55	22,24	543,97	23	611,92	23,91	691,71	26,05
B	Pertambangan dan Penggalian	29,42	1,63	29,82	1,41	30,27	1,28	30,82	1,2	31,04	1,12
C	Industri Pengolahan	260,10	14,42	394,51	18,69	463,65	19,61	500,12	19,54	534,99	19,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,64	0,09	1,66	0,08	1,75	0,07	1,84	0,07	1,92	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,31	0,02	0,33	0,02	0,33	0,01	0,34	0,01	0,38	0,01
F	Konstruksi	310,33	17,21	329,43	15,61	360,32	15,24	379,70	14,83	395,27	14,31
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	330,23	18,31	357,32	16,93	393,91	16,66	438,08	17,12	459,64	16,64
H	Transportasi dan Pergudangan	79,22	4,39	96,59	4,58	110,27	4,66	124,22	4,85	143,95	5,21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,66	0,92	16,97	0,8	22,04	0,93	23,99	0,94	25,54	0,92
J	Informasi dan Komunikasi	52,26	2,9	56,80	2,69	62,21	2,63	64,39	2,52	65,00	2,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	39,73	2,2	38,77	1,84	40,20	1,7	36,36	1,42	44,97	1,63
L	Real Estate	64,11	3,55	67,05	3,18	71,37	3,02	74,43	2,91	75,44	2,73
M,N	Jasa Perusahaan	5,50	0,3	5,65	0,27	6,79	0,29	6,89	0,27	7,14	0,26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	133,22	7,39	145,27	6,88	147,35	6,23	152,31	5,95	164,75	5,97
P	Jasa Pendidikan	47,20	2,62	50,12	2,37	52,11	2,2	53,65	2,1	56,79	2,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	34,66	1,92	38,93	1,84	44,64	1,89	45,59	1,78	48,49	1,76
R,S,T,U	Jasa lainnya	11,65	0,65	12,18	0,58	13,70	0,58	14,94	0,58	14,83	0,54
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		1803,68	100,00	2110,95	100,00	2364,90	100,00	2559,59	100,00	2761,85	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025



Tabel 2.21.

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2020 s.d. 2024 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Subulussalam

No	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,06	-0,23	0,76	-0,38	0,76	-0,32	0,91	0,68	2,14	-0,16
B	Pertambangan dan Penggalan	0,02	0,07	-0,22	-0,16	-0,13	-0,25	-0,08	-0,1	-0,08	-0,13
C	Industri Pengolahan	-0,43	-0,16	4,27	0,32	0,92	0,37	-0,07	0,2	-0,17	0,03
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0	0	-0,01	0	-0,01	0	0	0	0,00	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0	0	0	0	-0,01	0	0	0	0,00	0,00
F	Konstruksi	-1,21	-1,22	-1,6	-0,45	-0,37	-0,17	-0,41	-0,26	-0,52	-0,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,95	0,7	-1,38	0,1	-0,27	0,35	0,46	0,36	-0,48	-0,26
H	Transportasi dan Pergudangan	1,04	1,02	0,19	0,54	0,08	0,02	0,19	-0,07	0,36	0,48
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,08	0,07	-0,12	-0,02	0,13	0,16	0,01	0,01	-0,02	-0,01
J	Informasi dan Komunikasi	-0,21	-0,24	-0,21	0,11	-0,06	0,13	-0,11	-0,06	-0,17	-0,06
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,03	-0,01	-0,36	-0,15	-0,14	-0,16	-0,28	-0,24	0,21	0,25
L	Real Estate	0,18	0,2	-0,37	-0,02	-0,16	-0,04	-0,11	-0,05	-0,18	-0,05
M,N	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	-0,03	-0,01	0,02	0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,33	-0,11	-0,51	0,06	-0,65	-0,23	-0,28	-0,29	0,02	0,03
P	Jasa Pendidikan	-0,08	-0,04	-0,25	-0,03	-0,17	-0,02	-0,1	-0,06	-0,04	0,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,12	-0,08	-0,08	0,1	0,05	0,11	-0,11	-0,11	-0,02	-0,04
R,S,T,U	Jasa lainnya	-0,01	0	-0,07	-0,01	0	0,04	0	0	-0,04	0,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		1,97		3,87		4,12		4,06		4,12	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025



Tabel 2.22.

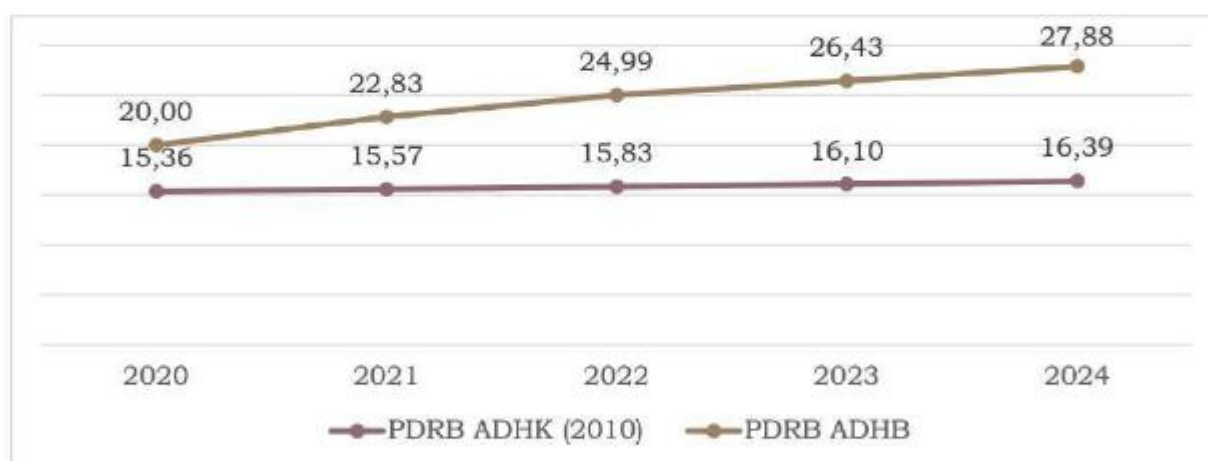
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Tahun 2020 s.d. 2024 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Subulussalam

No	Sektor	Pertumbuhan	
		ADHB	ADHK
		%	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	78,53	16,25
B	Pertambangan dan Penggalian	5,51	-13,59
C	Industri Pengolahan	105,69	25,20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	17,07	13,91
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22,58	8,33
F	Konstruksi	27,37	10,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	39,19	20,71
H	Transportasi dan Pergudangan	81,71	68,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	53,30	36,86
J	Informasi dan Komunikasi	24,38	21,58
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	13,19	-0,43
L	Real Estate	17,67	11,64
M,N	Jasa Perusahaan	29,82	13,61
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	23,67	10,05
P	Jasa Pendidikan	20,32	11,58
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	39,90	20,40
R,S,T,U	Jasa lainnya	27,30	22,85
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		53,12	17,17

2) Pendapatan per Kapita

Konsumsi rumah tangga per kapita dihitung dengan cara nilai PDRB Menurut Pengeluaran komponen konsumsi rumah tangga dibagi dengan jumlah penduduk wilayah tersebut. Pada tahun 2024 PDRB per kapita Kota Subulussalam mencapai 27,88 juta rupiah, naik dari tahun 2020 sebesar 20,00 juta rupiah. Nilai konsumsi rumah tangga per kapita maupun per rumah tangga di Kota Subulussalam dalam kurun waktu 2020-2024 terus meningkat, ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata daya beli penduduk yang juga indikasi adanya peningkatan rata-rata pendapatan. Selain pendapatan, peningkatan nilai konsumsi rumah tangga juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain, di antaranya adalah tingkat inflasi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Pengeluaran konsumsi rumah tangga tahun 2024 mencapai 1.111.170 rupiah dan meningkat dibandingkan tahun 2020 yang hanya pada angka 917.945 rupiah.

Pengeluaran terbesar didominasi oleh pengeluaran untuk kebutuhan pangan (>50 persen). Lebih dari 10 persen pengeluaran rumah tangga didominasi oleh pembelian rokok. Sedangkan sebagian besar pengeluaran non pangan dihabiskan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga. Hal ini karena masih banyak penduduk Kota Subulussalam belum memiliki rumah pribadi kepemilikan sendiri.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025

Gambar 2.46.
PDRB per Kapita Kota Subulussalam Tahun 2020-2024



Tabel 2.23.
Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2020-2024 Kota Subulussalam

Kelompok	2020	2021	2022	2023	2024
Padi-padian/ <i>Cereals</i>	77.913	76.730	78.946	95.623	108.853
Umbi-umbian/ <i>Tubers</i>	3.610	4.922	5.696	5.537	5.220
Ikan/udang/cumi/kerang/ <i>Fish/shrimp/common squid/shells</i>	59.969	58.999	76.532	75.054	71.527
Daging/ <i>Meat</i>	9.327	12.720	18.844	15.139	13.588
Telur dan Susu / <i>Egg and milk</i>	19.689	20.045	24.986	26.391	20.368
Sayur-sayuran/ <i>Vegetables</i>	37.284	44.282	55.586	56.091	58.436
Kacang-kacangan/ <i>Legumes</i>	6.871	8.834	10.359	9.417	8.383
Buah-buahan/ <i>Fruits</i>	22.026	21.832	34.109	33.371	26.684
Minyak dan kelapa (<i>Oil and coconut</i>)	15.522	19.770	25.353	21.967	23.196
Bahan minuman / <i>beverage stuffs</i>	14.915	17.560	17.330	22.070	16.947
Bumbu-bumbuan/ <i>Spices</i>	9.761	11.836	13.608	12.985	12.902
Konsumsi lainnya / <i>Miscellaneous food items</i>	5.493	6.599	7.731	7.995	6.726
Makanan dan minuman jadi / <i>prepared food dan beverages</i>	115.673	118.027	151.466	160.588	131.017
Rokok/ <i>Cigarettes</i>	89.053	82.999	99.365	114.856	113.846
Jumlah makanan / <i>Total food</i>	484.105	505.157	619.912	657.084	617.693
Perumahan dan fasilitas rumah tangga / <i>housing and household facilities</i>	184.350	164.607	199.024	228.448	206.827
Aneka komoditas dan jasa / <i>Goods and serveices</i>	90.091	73.244	108.799	151.930	107.678
Pakaian, alas, kaki, dan tutup kepala/ <i>Clothing, footwear, and headgear</i>	58.059	44.121	49.492	62.748	45.557
Komoditas tahan lama / <i>Durable goods</i>	35.886	30.307	62.358	49.351	NA
Pajak, pungutan, dan asuransi / <i>Taxes and insurance</i>	49.127	43.742	59.682	61.312	60.743
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/ <i>parties and ceremonies</i>	16.325	10.271	8.664	24.716	6.354
Jumlah bukan makanan / <i>Total non-food</i>	433.839	366.293	487.919	578.505	493.477
Jumlah/ <i>Total</i>	917.945	871.450	1.107.831	1.235.589	1.111.170

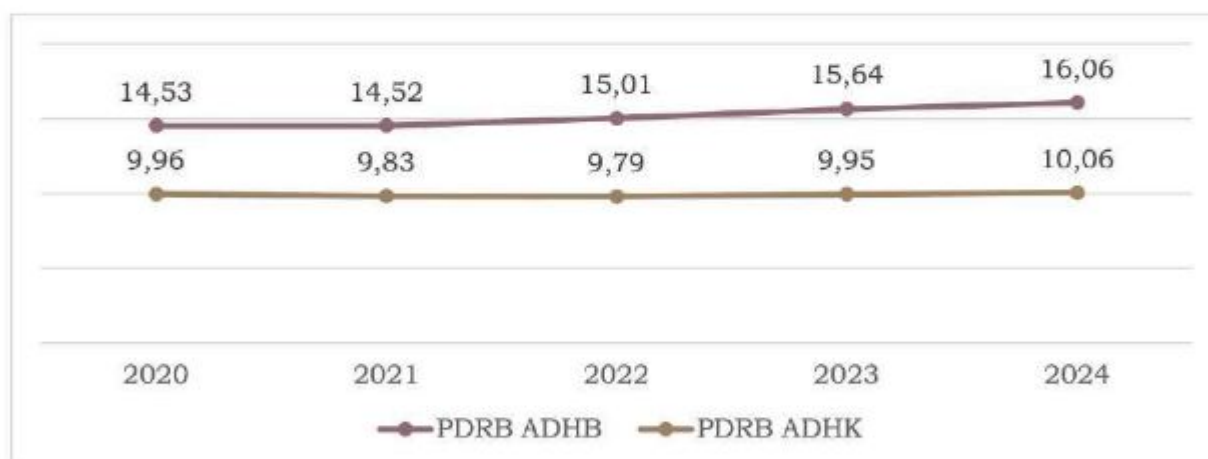
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

3) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan salah satu variabel makro ekonomi yang menggambarkan besarnya pendapatan yang dibelanjakan. Kegunaan dari konsumsi rumah tangga per kapita adalah untuk memperoleh gambaran besarnya rata-rata konsumsi yang dilakukan rumah tangga maupun perorangan di suatu wilayah, sehingga dinilai perlu adanya nilai konsumsi rumah tangga per kapita maupun per-rumah tangga.

Konsumsi rumah tangga per kapita dihitung dengan cara nilai PDRB Menurut Pengeluaran komponen konsumsi rumah tangga dibagi dengan jumlah penduduk wilayah tersebut. Pada tahun 2024 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per tahun atas dasar harga berlaku kota Subulussalam mencapai 16,06 juta rupiah, sedikit menurun dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 14,53 juta rupiah. Sementara untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per tahun atas dasar harga konstan mencapai 10,06 juta rupiah di tahun 2024.

Nilai konsumsi rumah tangga per kapita maupun per rumah tangga di Kota Subulussalam dalam kurun waktu 2020-2024 memiliki tren meningkat, ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata daya beli penduduk yang juga indikasi adanya peningkatan rata-rata pendapatan. Selain pendapatan, peningkatan nilai konsumsi rumah tangga juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain, di antaranya adalah tingkat inflasi dan perubahan gaya hidup masyarakat.



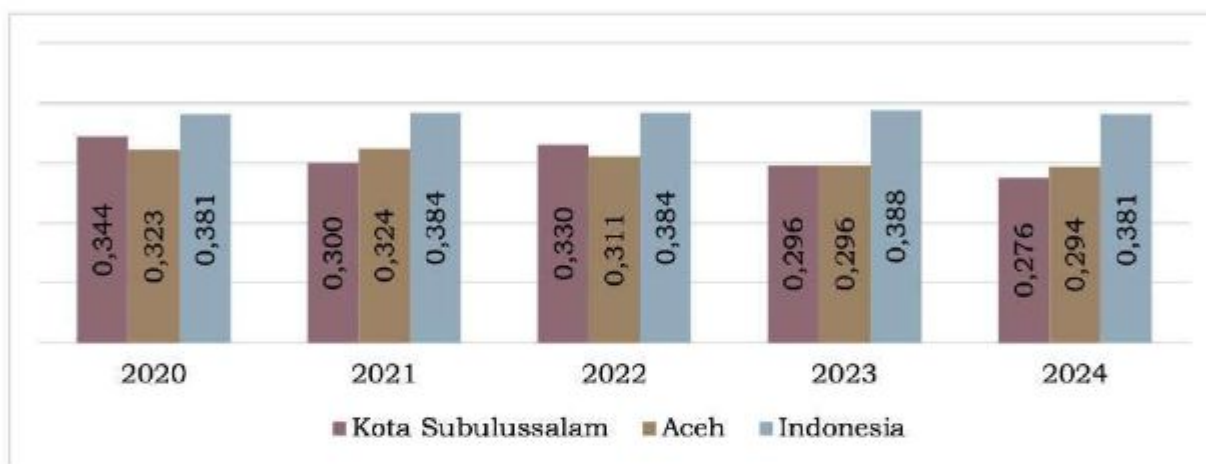
Gambar 2.47.
Konsumsi Rumah Tangga per Kapita per Tahun (Juta Rp)

4) Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)

Indeks Gini Kota Subulussalam tahun 2020 sebesar 0,344. Hal ini menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat masih dikategorikan sebagai ketimpangan rendah dan juga berarti bahwa pendapatan per kapita penduduk Kota Subulussalam relatif merata. Pada tahun 2021, indeks gini

Kota Subulussalam mengalami penurunan ke angka 0,276. Artinya ketimpangan pendapatan antar-penduduk semakin rapat/sempit. Namun pada tahun 2024 mengalami kenaikan kembali menjadi 0,276.

Pada tahun 2020, indeks gini Kota Subulussalam berada di atas Nasional dan Provinsi. Namun pada tahun 2024, Indeks Gini Kota Subulussalam mengalami penurunan sehingga berada di bawah Provinsi Aceh dan Nasional. Beberapa hal yang menyebabkan masih tingginya indeks gini yaitu pertumbuhan ekonomi tidak inklusif (masih berpusat pada beberapa sektor), konsentrasi kepemilikan aset serta variasi lapangan pekerjaan.

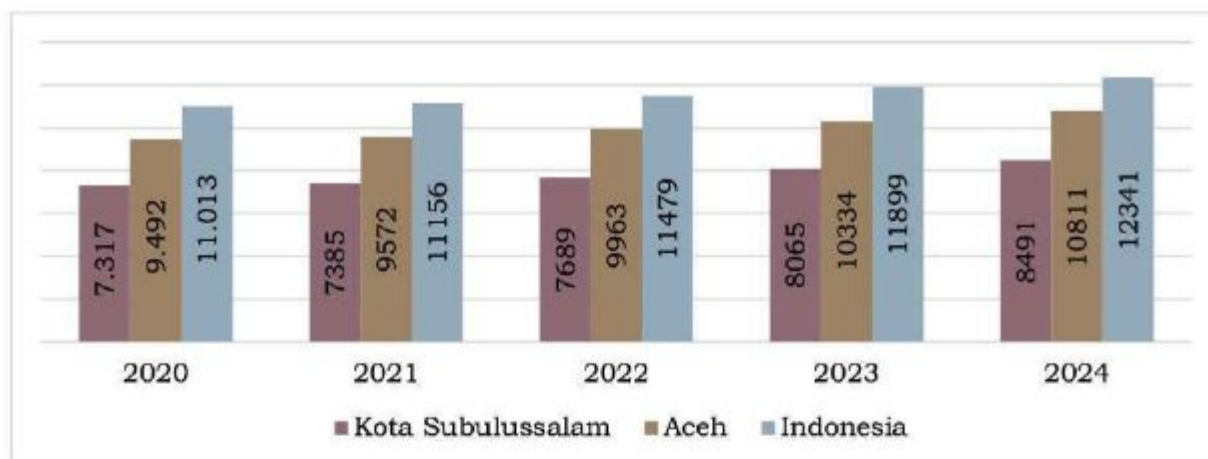


Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.48.
Indeks Gini Kota Subulussalam, Provinsi Aceh dan Nasional
Tahun 2020-2024

5) Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kota Subulussalam masih tergolong sangat rendah yaitu pada angka 8,49 juta per kapita per tahun, jauh di bawah Aceh dan Nasional dengan masing-masing sebesar 10,81 juta rupiah per orang per tahun dan 12,34 juta per orang per tahun. Namun pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kota Subulussalam mengalami kenaikan sejak tahun 2020, yaitu 7,32 juta rupiah per orang per tahun menjadi 9,49 juta rupiah per orang per tahun.



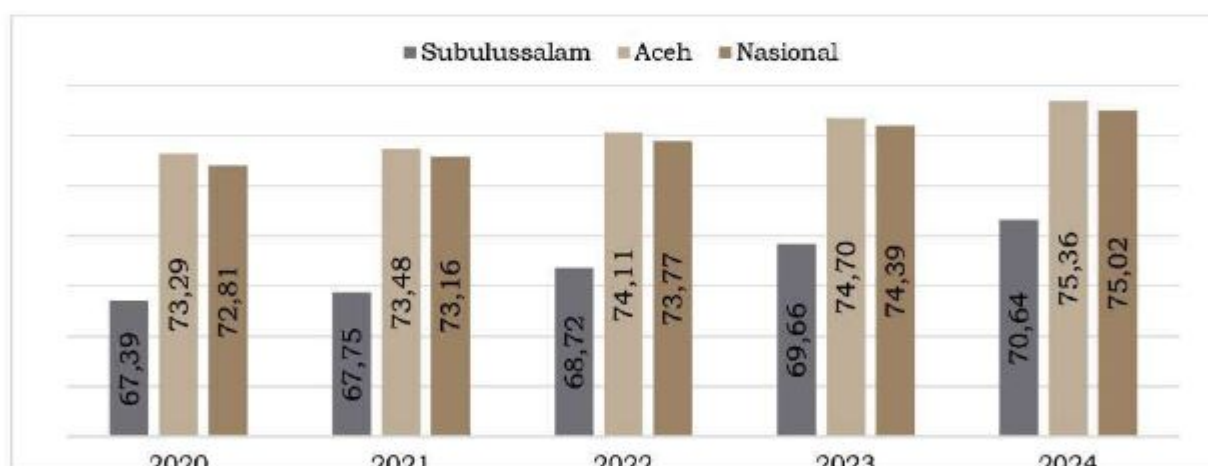
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.49.

Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (dalam Ribuan/Orang/Tahun) Kota Subulussalam, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

6) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam lima tahun terakhir yaitu 2020-2024, pembangunan manusia di Kota Subulussalam terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, capaian IPM Kota Subulussalam adalah sebesar 67,39 dan terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 70,64 pada tahun 2024. Namun Angka IPM Kota Subulussalam secara umum lebih rendah dari IPM Provinsi Aceh yang sebesar 75,36 dan IPM Nasional sebesar 75,02 di tahun 2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.50.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Subulussalam, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

Perlu perhatian khusus terhadap rendahnya capaian IPM Kota Subulussalam, berdasarkan data statistik, IPM Kota Subulussalam merupakan yang terendah dari 23 Kabupaten Kota yang ada di Aceh. Penyebab utama IPM Kota Subulussalam

adalah masih rendahnya rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan dibandingkan kabupaten/kota lain di Aceh.

7) Tingkat Pengangguran Terbuka

Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka di suatu wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Dalam lingkup Kota Subulussalam, TPT dari tahun 2020-2024 mengalami penurunan dari 6,93 persen menjadi 5,12 persen.

Tabel 2.24.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja	33.165	33.348	35.538	44.762	46.434
- Bekerja	30.867	31.261	33.496	42.214	44.058
- Pengangguran	2.298	2.087	2.042	2.548	2.376
Bukan Angkatan Kerja (Sekolah, Mengurus rumah tangga, Lainnya)	18.508	18.937	18.937	21.308	21.256
Penduduk Usia Kerja	51.673	52.285	52.285	66.070	67.690
TPAK (Persen)	64,18	63,78	67,04	67,75	68,60
TPT (Persen)	6,93	6,26	5,75	5,69	5,12

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025

Sama halnya dengan tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja di suatu wilayah juga dapat mengindikasikan seberapa besar kesempatan kerja di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja maka mengindikasikan semakin luas kesempatan kerja. Dalam lingkup Kota Subulussalam, TPAK mengalami kenaikan pada tahun 2024 yaitu dari 64,18 persen pada tahun 2020 menjadi 68,60 persen. Artinya bahwa dari 100 penduduk usia kerja, terdapat 68-69 penduduk yang tersedia untuk memproduksi pada waktu tertentu. Upaya peningkatan kesempatan kerja dan perbaikan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing mutlak dilakukan, hal tersebut sangat perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha melalui pendidikan formal maupun informal.

8) Tingkat Kemiskinan

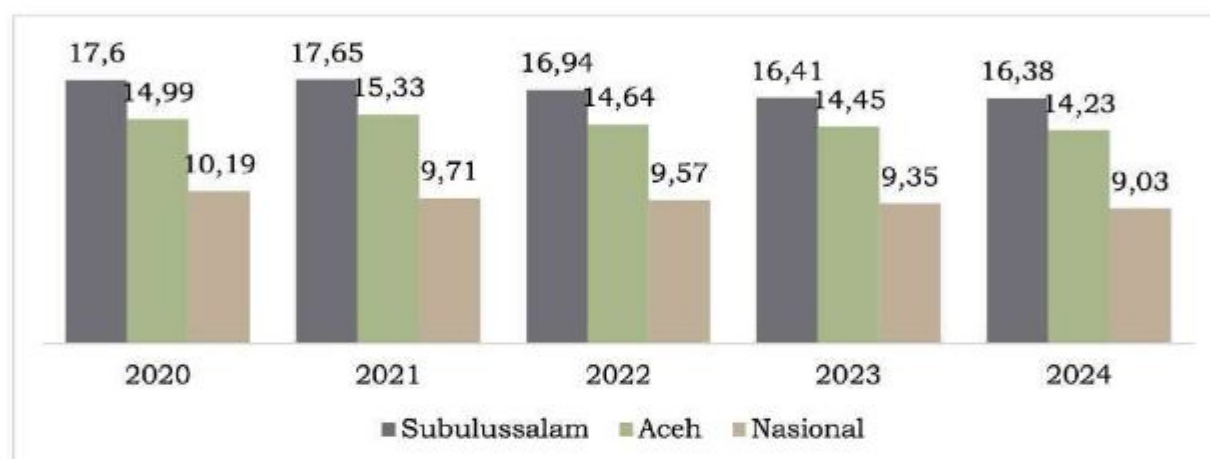
Angka kemiskinan Kota Subulussalam mengalami penurunan sejak tahun 2020-2024, mulai dari 17,60 persen menurun menjadi 16,38 persen pada tahun 2024 (penurunan sebesar 1,22 persen). Meskipun angka kemiskinan Kota

Subulussalam pada tahun 2024 di atas Provinsi Aceh (14,23 persen) dan nasional (9,03 persen).

Tabel 2.25.
Garis Kemiskinan Dan Penduduk Miskin Tahun 2020-2024 Kota Subulussalam

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Penduduk Miskin	
				Jumlah (000)	Persentase
2020	400.517	2,27	0,44	14,46	17,60
2021	418.643	2,29	0,48	14,46	17,65
2022	444.418	2,45	0,50	14,06	16,94
2023	487.777	2,19	0,50	13,80	16,41
2024	504.372	2,11	0,41	13,95	16,38

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.51.
Persentase Penduduk Miskin di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

Dari segi jumlah penduduk miskin, terjadi pengurangan sejak tahun 2020-2024, yaitu dari 14,46 ribu jiwa menjadi 13,95 ribu jiwa. Artinya terjadi penurunan sekitar 510 jiwa penduduk miskin di Kota Subulussalam selama 5 tahun terakhir. Hal ini juga sejalan persentase pengangguran terbuka di Kota Subulussalam. Tingkat rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan tergolong terjadi penurunan, dari 2,27 pada tahun 2020 menjadi 2,11 pada tahun 2024. Artinya gap antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan tergolong rendah karena berada di bawah Provinsi (2,62).

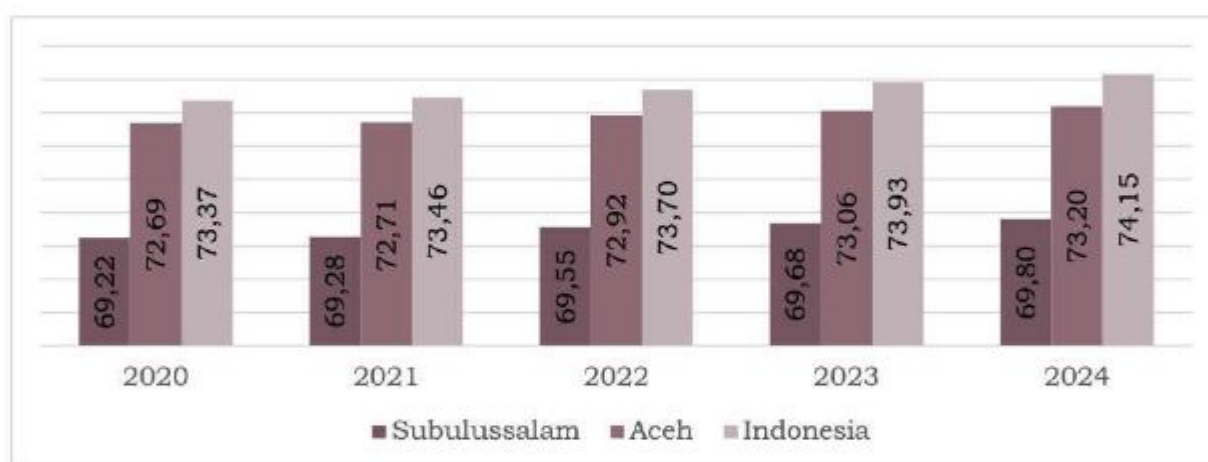
Data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2024 memberikan informasi persentase kemiskinan Kota Subulussalam dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, persentase penduduk di Kota Subulussalam masih jauh lebih tinggi. Ini perlu perhatian serius sehingga persentase penduduk miskin di Kota

Subulussalam dapat diturunkan. Beberapa penyebab utama masih tingginya angka kemiskinan di Kota Subulussalam adalah ketimpangan akses sumber daya, pengangguran yang masih tinggi, inflasi harga kebutuhan pokok, rendahnya rata-rata lama sekolah, dan bencana alam tahunan.

2.2.2. Kesehatan untuk Semua

1) Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Subulussalam masih tergolong rendah dibandingkan UHH Provinsi Aceh dan Nasional. Pada tahun 2024, UHH Kota Subulussalam hanya berada pada angka 69,80 tahun, jauh lebih rendah dibandingkan Aceh dan Nasional yaitu masing-masing 73,20 tahun dan 74,15 tahun.



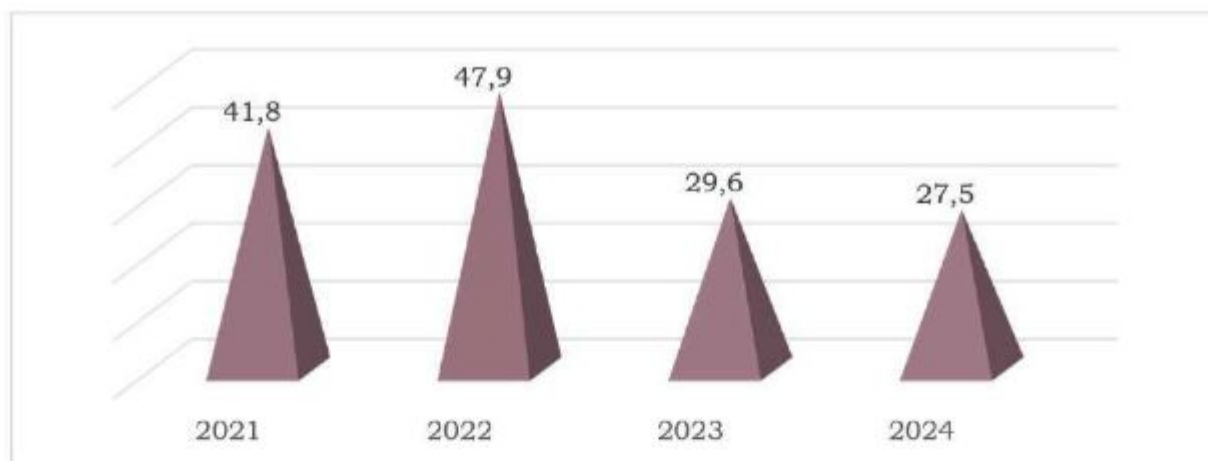
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.52.
Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Subulussalam, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

Beberapa faktor penyebab masih rendahnya AHH Kota Subulussalam adalah masih tingginya angka kesakitan, akses terbatas ke layanan kesehatan dasar, gizi buruk, angka kemiskinan, rendahnya rata-rata lama sekolah, akses terhadap air dan sanitasi layak dan aman, serta perilaku dan gaya hidup tidak sehat.

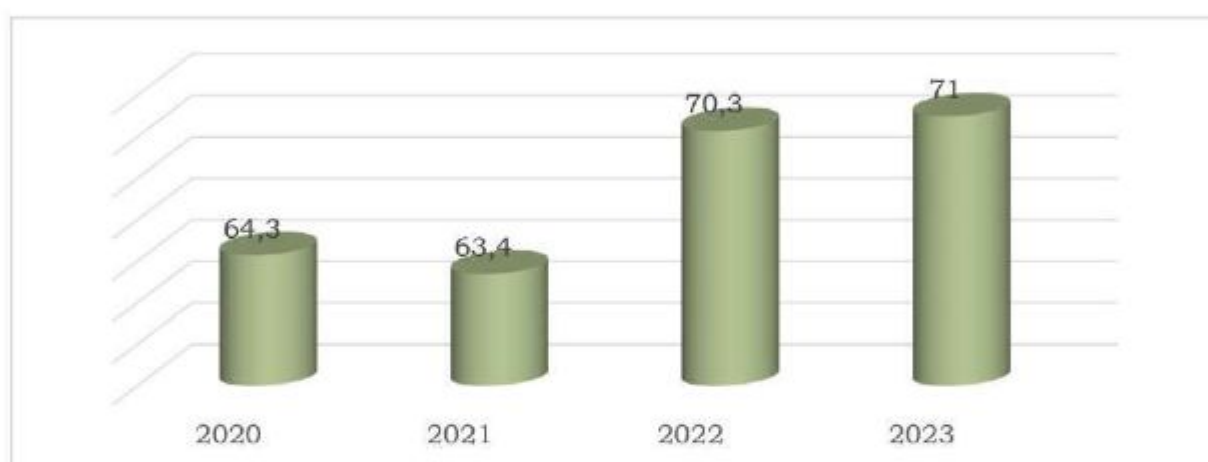
2) Angka Stunting

Angka *stunting* di Kota Subulussalam mengalami fluktuasi sejak tahun 2021-2024. Angka *stunting* tahun 2021 berada pada angka 41,8 persen dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 47,9 persen. Angka ini tergolong sangat tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Aceh. Namun, pada tahun 2024 mengalami penurunan ke angka 27,5 persen.



Sumber : Kementerian Kesehatan, 2024

Gambar 2.53.
Angka Prevalensi Stunting Kota Subulussalam Tahun 2021-2024



Sumber : Kementerian Kesehatan, 2024

Gambar 2.54.
Indeks Penanganan Khusus Stunting (IPKS)
Kota Subulussalam Tahun 2021-2023

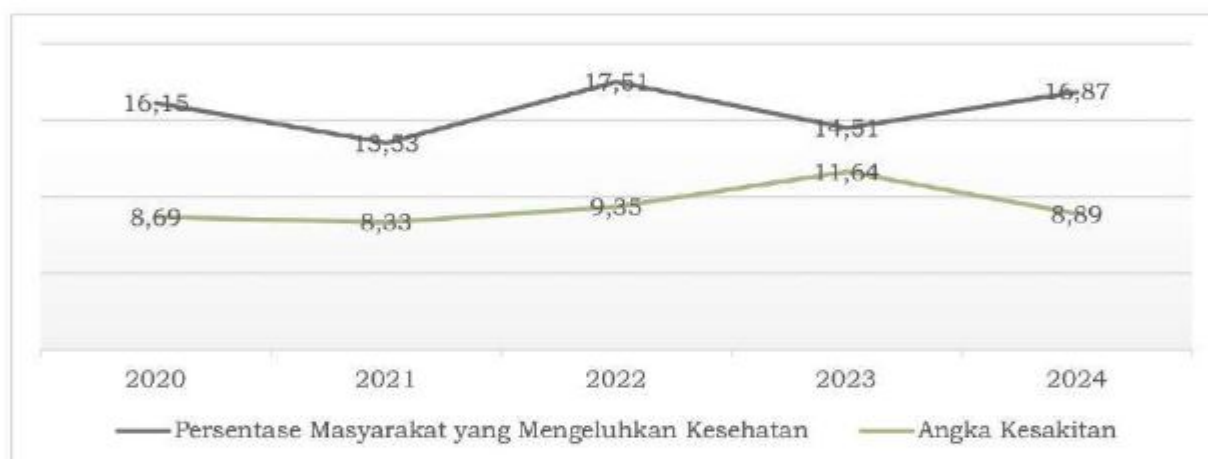
Indeks yang digunakan untuk mengetahui seberapa baik penanganan *stunting* di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) bertanggung jawab untuk menyusun analisis kinerja penurunan *stunting* melalui IKPS. IKPS Kota Subulussalam sejak tahun 2020-2023 mengalami peningkatan, dari 64,3 pada tahun 2020 menjadi 71,00 pada tahun 2023. Angka pada tahun 2023 merujuk pada IKPS Provinsi Aceh dikarenakan tidak adanya perhitungan untuk Kota Subulussalam pada tahun tersebut yang disebabkan oleh RSE yang tinggi (>25 persen). Tingginya IKPS menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penurunan dan penanganan angka *stunting*.

2) Persentase Masyarakat yang Mengeluhan Kesehatan

Persentase Masyarakat yang Mengeluhan Kesehatan di Kota Subulussalam mengalami fluktuasi pada tahun 2020-2024. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, terjadi peningkatan pada tahun 2020, yaitu sebesar 16,15 persen. Lalu mengalami penurunan pada Tahun 2021 menjadi 13,53 persen. Namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 yaitu menjadi 16,87 persen.

3) Angka Kesakitan

Angka Kesakitan di Kota Subulussalam mengalami fluktuasi pada tahun 2020-2024. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, angka kesakitan pada tahun 2020 yaitu sebesar 8,69 persen. Lalu mengalami penurunan pada Tahun 2021 menjadi 8,33 persen. Namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 yaitu menjadi 8,89 persen.



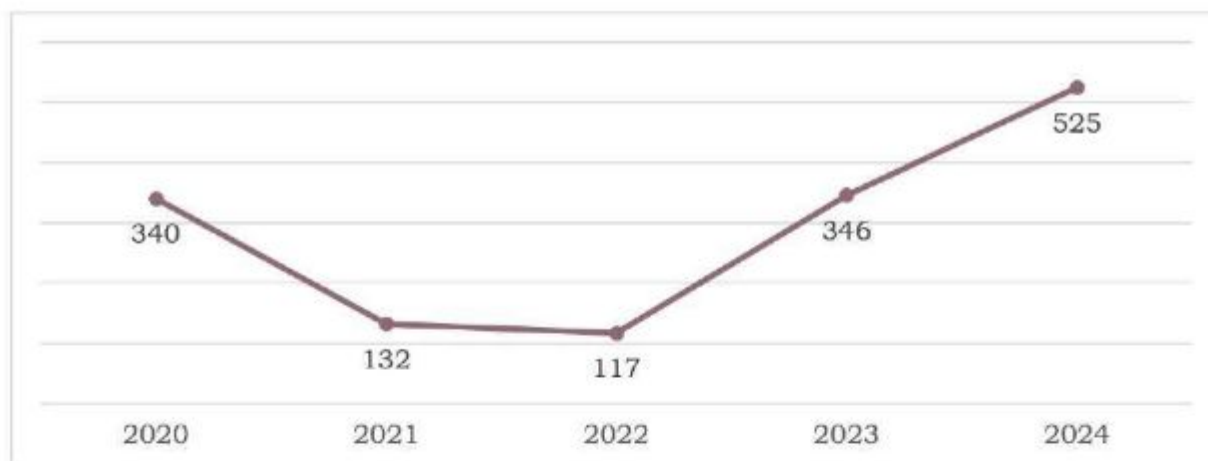
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.55.

Persentase Masyarakat yang Mengeluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan (dalam persen) di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

4) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Subulussalam mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2020, AKI Kota Subulussalam mencapai 340 kasus per 100.000 lahir hidup (LH). Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2021-2022 mencapai angka 117 kasus per 100.000 LH. Namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 346 kasus per 100.000 LH. Lalu pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 525 kasus per 100.000 LH.



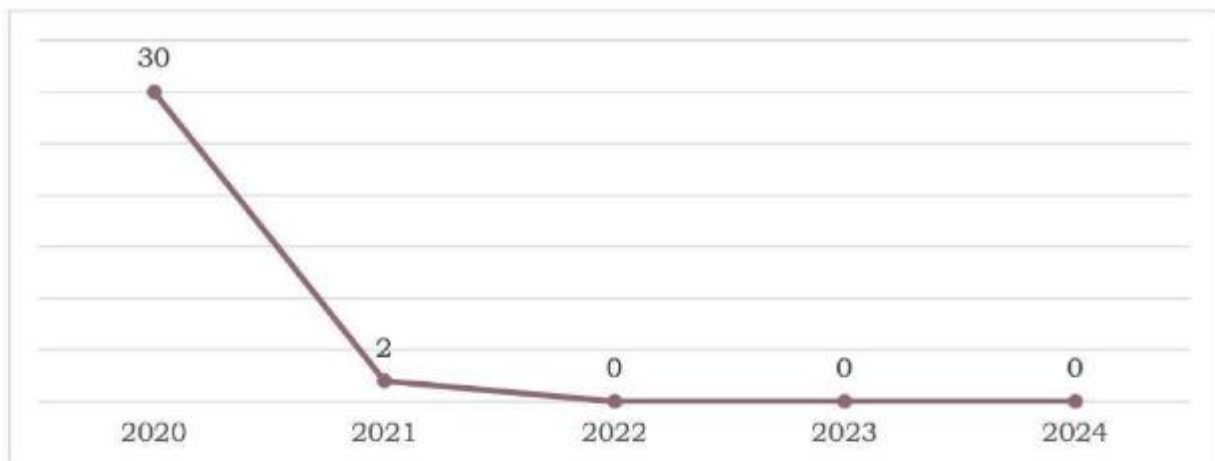
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.56.
Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Beberapa jenis penyebab kematian pada ibu bersalin, pasca persalinan dan hamil adalah seperti pendarahan, hipertensi, infeksi gangguan sistem peredaran darah, gangguan metabolik dan lainnya. Upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Subulussalam melalui Dinas Kesehatan terutama garda terdepan yaitu Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, kemudahan mendapat cuti hamil dan melahirkan dan pelayanan keluarga berencana. Di samping itu, pentingnya melakukan intervensi lebih kekhulu yakni kepada kelompok remaja dan dewasa muda dalam upaya percepatan penurunan AKI.

5) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Subulussalam mengalami penurunan yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, terdapat 30 kasus AKB per 1.000 LH dan menurun pada tahun 2021 menjadi 2 kasus per 1.000 LH. Pada tahun 2022-2024, tidak terjadi kasus kematian bayi. Hal ini berbanding terbalik dengan kematian ibu yang terjadi. Hal ini juga menunjukkan perlunya penanganan serius untuk ibu hamil agar dapat melahirkan selamat beserta bayinya.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.57.

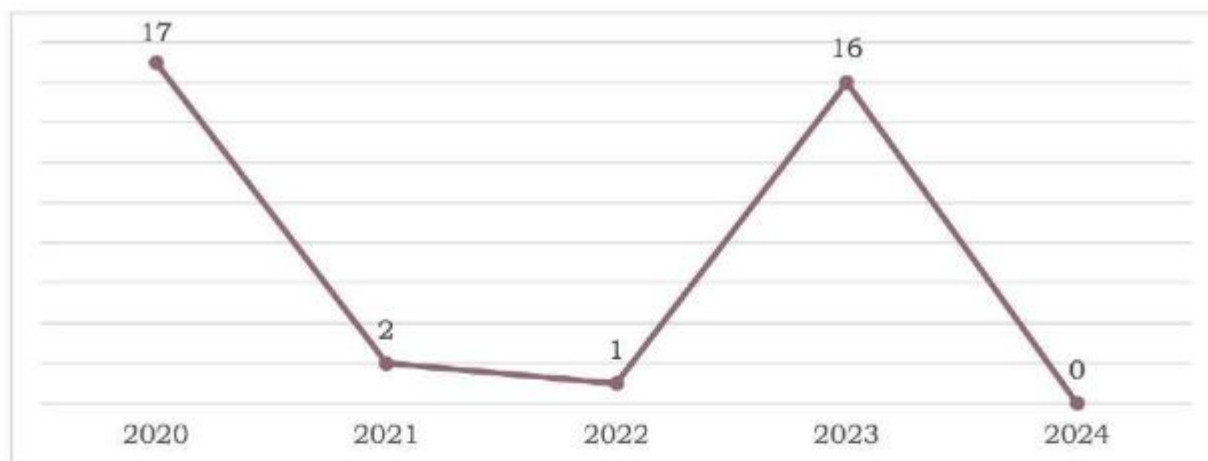
Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Pemerintah Kota Subulussalam telah berhasil menjalankan program pemerintah dalam penanganan AKB yang telah dirumuskan dalam suatu kebijakan publik yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No.39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, dimana satu dari 4 area prioritasnya adalah penurunan AKB.

6) Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2020, AKABA mencapai 17 kasus per 1.000 LH. Pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan mencapai 1 kasus per 1.000 LH. Namun mengalami kenaikan kembali pada tahun 2023 ke angka 16 kasus per 1.000 LH. Lalu mengalami penurunan kembali pada tahun 2024 menjadi 0 kasus per 1.000 LH.

Perlu diupayakan penerapan pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat rumah tangga dan adanya penguatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Terobosan yang telah dilakukan berupa pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan secara berkesinambungan dan terus menerus di Kota Subulussalam. Selain itu beberapa Program yang dilaksanakan yaitu balita 6-59 bulan mendapatkan kapsul vitamin A, balita Gizi Kurang mendapatkan makanan tambahan, Kasus balita Gizi buruk mendapat perawatan, balita yang di timbang berat badannya, balita ditimbang yang naik berat badannya, persentase balita di bawah garis merah dan balita mempunyai buku KIA dan MKS.



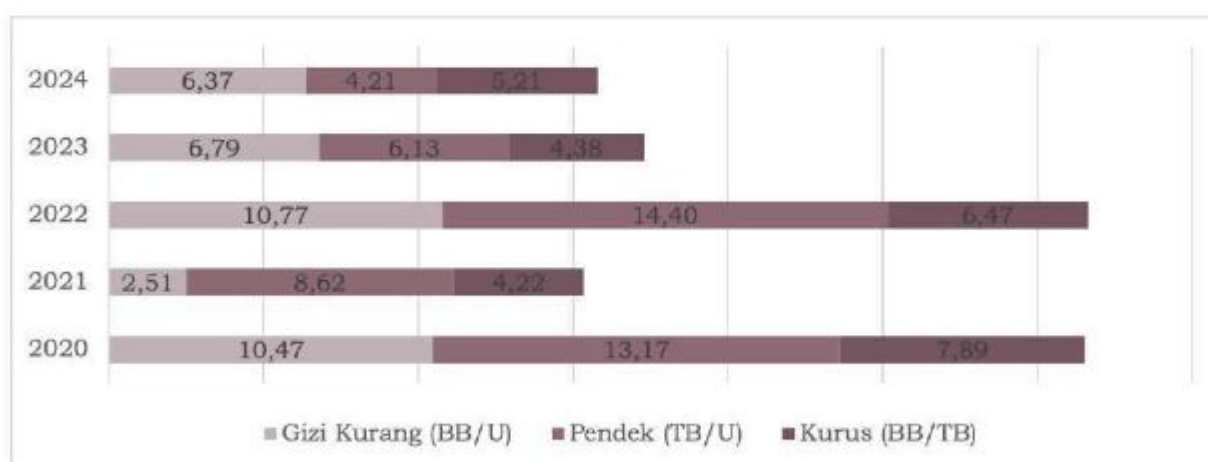
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.58.

Angka Kematian Balita (AKABA) di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

7) Status Gizi Balita

Persentase balita gizi kurang (BB/U) mengalami fluktuasi setiap tahunnya, begitu juga untuk balita pendek (TB/U), dan balita kurus (BB/TB) pada tahun 2020-2024. Kondisi gizi balita yang terjadi paling banyak adalah gizi kurang dan pendek. Balita pendek menggambarkan adanya masalah gizi kronis yang dipengaruhi oleh kondisi ibu, masa janin dan masa bayi/balita termasuk penyakit yang diderita selama masa balita, seperti masalah gizi lainnya tidak hanya terkait masalah kesehatan, namun kondisi lain yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kesehatan.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.59.

Persentase Kondisi Gizi Balita Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

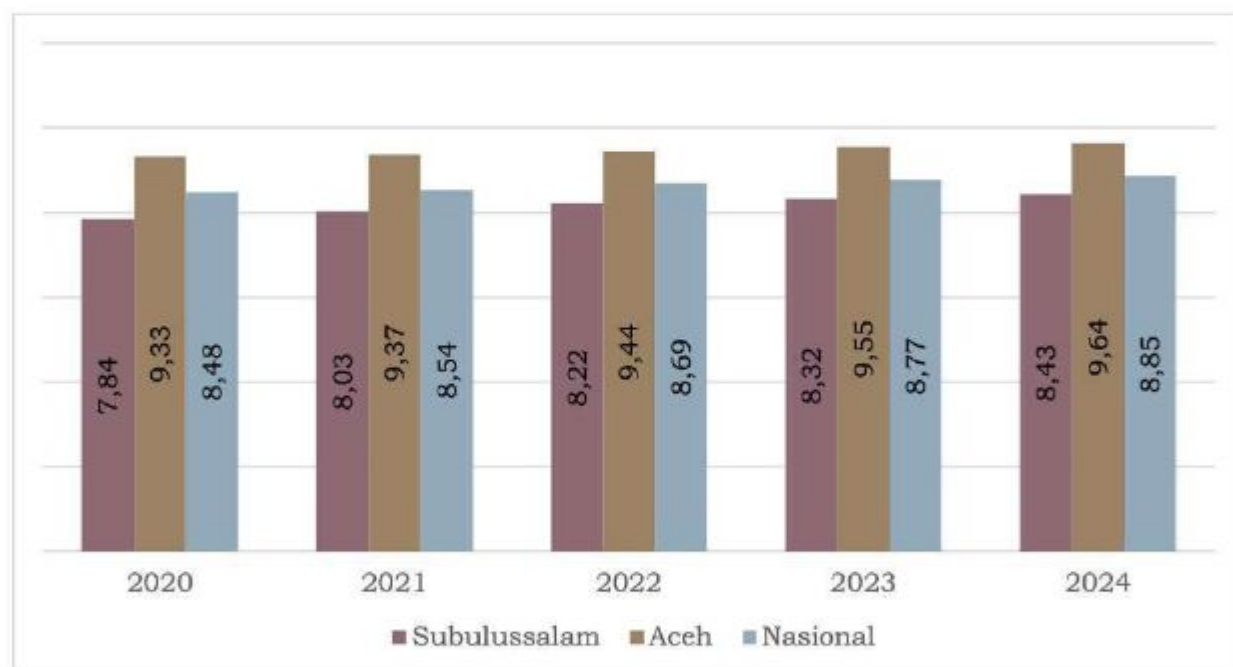
Penanggulangan kasus balita gizi buruk dapat dilakukan dengan pemberian PMT yang pendanaannya melalui dana APBD Kota Subulussalam dan APBD

Provinsi Aceh. PMT yang diberikan berupa pemberian susu, biskuit MP—ASI dan bubur susu. Dari jumlah kasus yang dibantu hampir semuanya mengalami kenaikan berat badan yang cukup menggembirakan.

2.2.3. Pendidikan Berkualitas dan Merata

1) Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka RLS Kota Subulussalam memang mengalami peningkatan sejak dari tahun 2020 dari 7,84 tahun menjadi 8,43 tahun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan yang ditamatkan penduduk Kota Subulussalam tahun 2023 hanya sampai jenjang kelas VIII SMP/ sederajat. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa pendidikan di Kota Subulussalam belum sepenuhnya terlaksana program wajib belajar 9 tahun yang menjadi kewenangan kab/kota. Jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional, Angka RLS Kota Subulussalam masih sangat rendah.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.60.
Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Subulussalam (dalam tahun),
Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

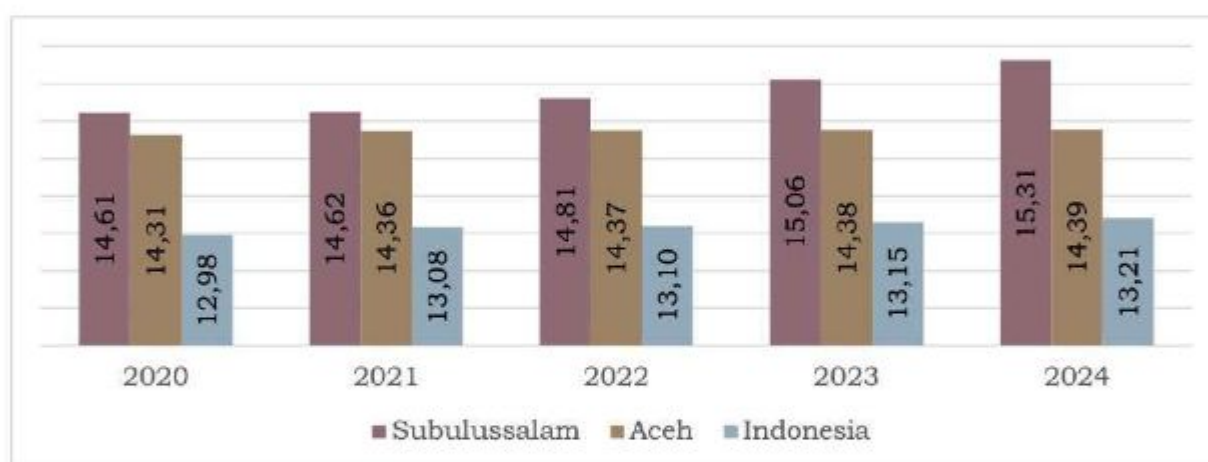
Rata-rata lama sekolah di Kota Subulussalam yang masih di bawah 9 tahun merupakan permasalahan Kota Subulussalam yang harus ditingkatkan dan mendapat perhatian serius. APM Kota Subulussalam usia 13-15 tahun yang tidak mencapai 100 persen menunjukkan terdapat penduduk yang usia 13-15 tahun

tidak mengenyam pendidikan.

Beberapa penyebab masih rendahnya rata-rata lama sekolah adalah masih tingginya angka kemiskinan, tingginya angka keputusan sekolah dan aksesibilitas pendidikan.

2) Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah di Kota Subulussalam mengalami peningkatan sejak tahun 2020, dari 14,61 menjadi 15,31 tahun (tahun 2024). Artinya, lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang selama 15,31 tahun atau paling rendah menamatkan diploma III. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dan Provinsi Aceh. Untuk itu perlu adanya upaya agar Angka Harapan Lama Sekolah semakin meningkat.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.61.
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Subulussalam (dalam tahun),
Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

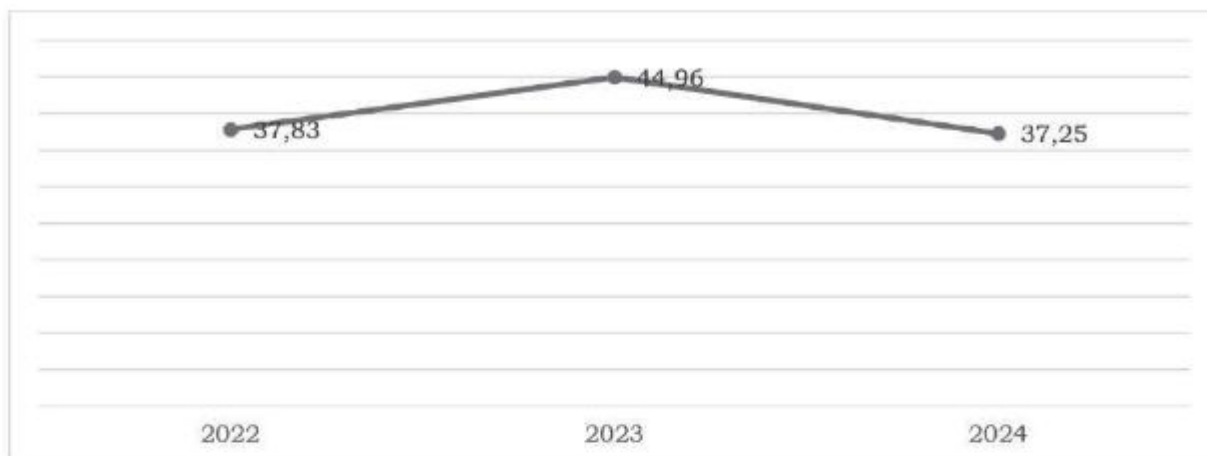
3) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Kota Subulussalam mulai berpartisipasi dalam pengukuran IPLM sejak tahun 2022. Terjadi peningkatan sejak IPLM dari 53,76 pada tahun 2022 menjadi 71,93 pada tahun 2024. Beberapa penyebab masih rendahnya IPLM di antaranya terbatasnya akses ke fasilitas penyedia literasi seperti taman bacaan, kemiskinan, kurikulum pendidikan, budaya dan lingkungan yang tidak mendukung, dan aksesibilitas terhadap layanan internet.

4) Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

Terjadi penurunan IMDI Kota Subulussalam sejak tahun 2022-2024, yaitu dari 37,83 menjadi 37,25 dengan kategori “Cukup”. Indikator pendukung terendah

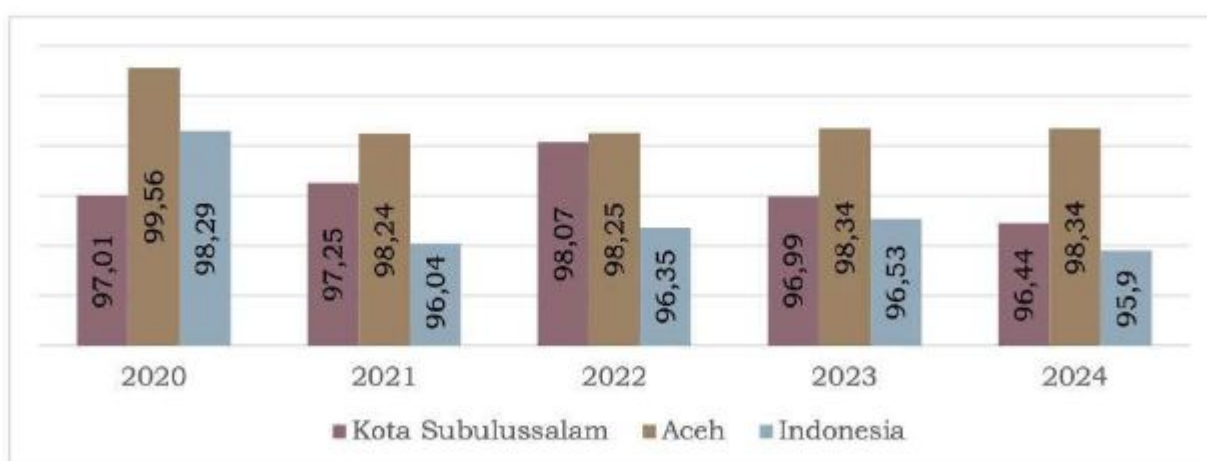
adalah pemberdayaan (19,53), tertinggi adalah Infrastruktur dan Ekosistem (49,24).



Gambar 2.62.
Indikator Masyarakat Digital Indonesia Kota Subulussalam Tahun 2022-2024

5) Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf Kota Subulussalam mengalami penurunan pada tahun 2023, yaitu 96,99 persen dibandingkan tahun 2020, yaitu 97,25 persen. Artinya, sejak tahun 2020-2024, Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis meningkat ke angka 96,44 persen. Namun, AMH Kota Subulussalam masih di bawah Provinsi Aceh, namun di atas rata-rata nasional. Hal ini menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota Subulussalam dalam memberantas buta huruf.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.63.
Angka Melek Huruf Kota Subulussalam (dalam persen), Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

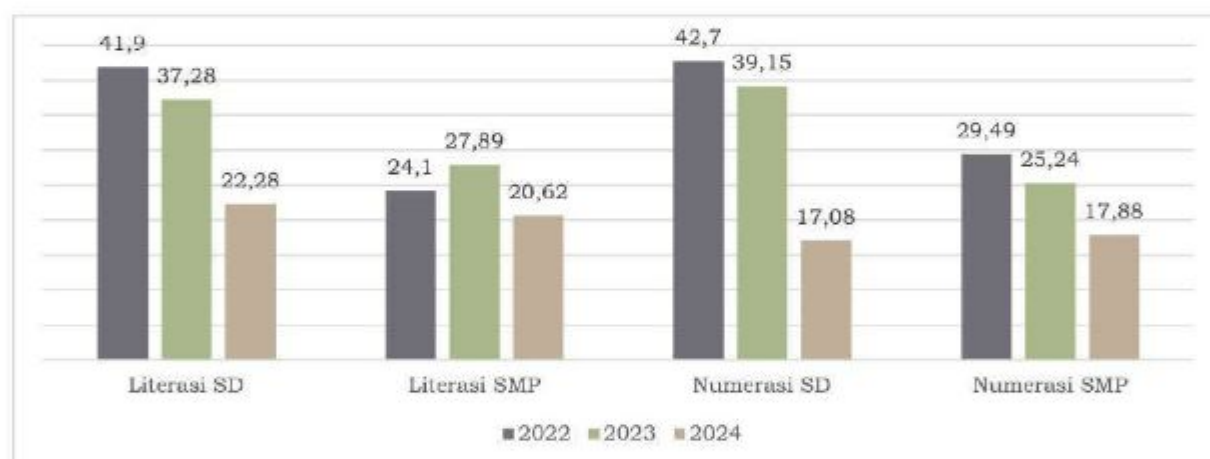
Tabel 2.26.**Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2020 s.d. 2024 Kota Subulussalam**

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	96,33	95,63	94,94	95,99	96,44
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	61.315	62.901	64.904	66.928	67.423
3	Angka Melek Huruf	97,01	97,25	98,07	96,99	96,44

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

6) Angka Literasi dan Numerasi

Angka literasi dan numerasi Kota Subulussalam mengalami penurunan setiap tahunnya sejak tahun 2023-2024. Beberapa hal yang menyebabkan angka literasi dan numerasi rendah, di antaranya kualitas pembelajaran yang rendah seperti kualitas guru, kurikulum dan penilaian formatif; infrastruktur dan akses pendidikan seperti fasilitas belajar dan sarana prasarana; sosial ekonomi seperti kemiskinan dan budaya literasi; kebijakan dan tata kelola pendidikan serta faktor lingkungan dan geografis.



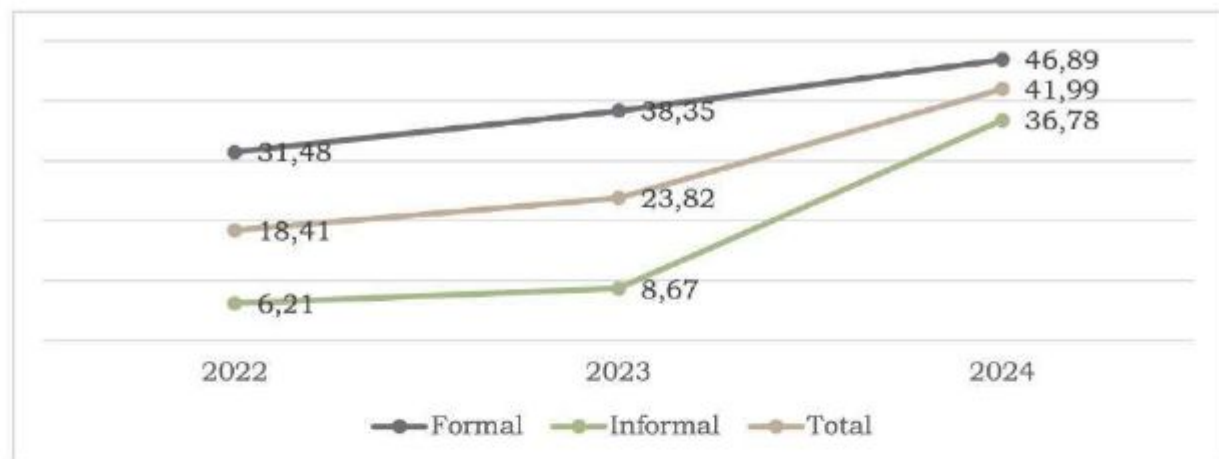
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam, 2025

Gambar 2.64.**Angka Literasi dan Numerasi Kota Subulussalam Tahun 2022-2024****2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif**

Dengan adanya Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), penduduk yang memiliki KTP Aceh mendapatkan pelayanan BPJS golongan III secara gratis. Dengan demikian, seluruh penduduk Kota Subulussalam telah terdaftar dan mendapatkan pelayanan BPJS.

Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Subulussalam meningkat setiap tahunnya. Meskipun demikian, penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan masih banyak yang harus ditingkatkan, karena terdapat

setidaknya 58 persen pekerja belum terdaftar sebagai peserta. Bahkan, untuk pekerja sektor informal, terdapat setidaknya 63 persen pekerja yang belum menjadi peserta jaminan sosial.

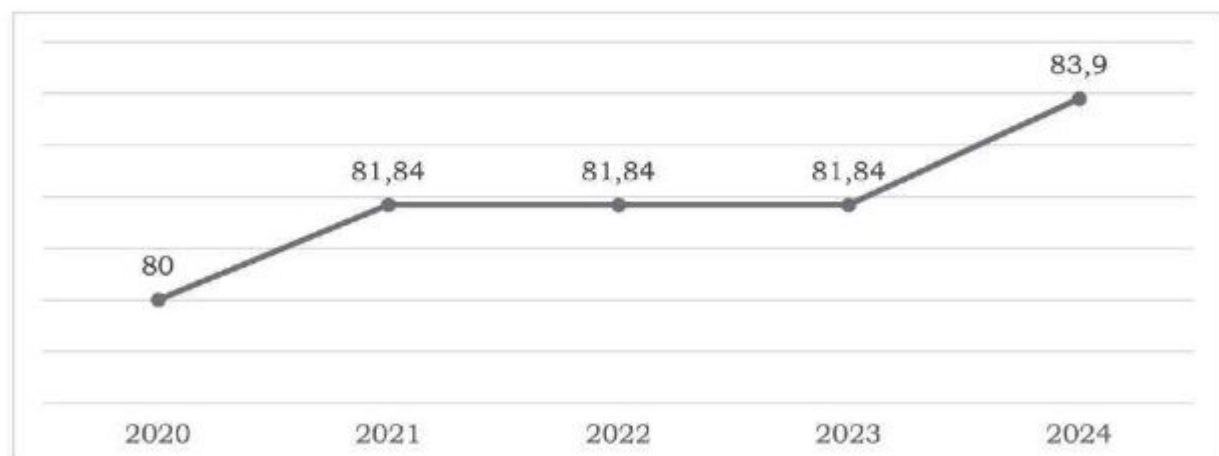


Sumber : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan , 2025

Gambar 2.65.
Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Subulussalam
Tahun 2022-2024

2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Indeks pembangunan syariat (IPS) Kota Subulussalam merujuk pada perolehan capaian IPS Provinsi Aceh. IPS Kota Subulussalam mengalami kenaikan setiap tahunnya sejak tahun 2020-2024. IPS mengalami kenaikan dari 80,00 pada tahun 2020 menjadi 83,9 pada tahun 2024.



Sumber : Dinas Syariat Islam Aceh, 2024

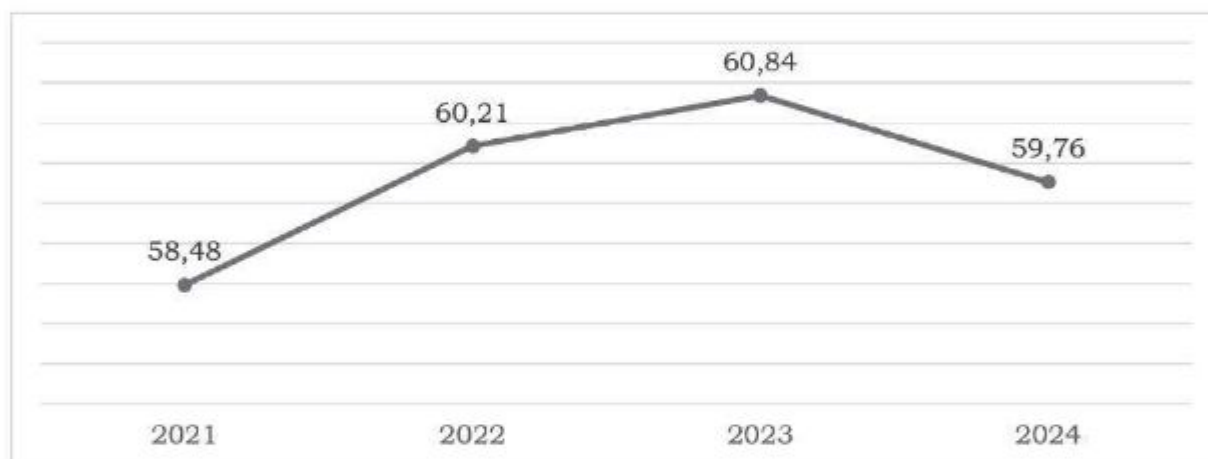
Gambar 2.66.
Indeks Pembangunan Syariat (IPS) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Beberapa faktor penyebab rendahnya IPS adalah lemahnya integrasi keuangan syariah dengan sektor riil, regulasi parsial dan tidak konsisten, kurikulum pendidikan kurang menekankan literasi syariah, minimnya ahli ekonomi syariah, resistensi terhadap perubahan sistem, dan pemanfaatan ZISWAF belum optimal. Kota Subulussalam merupakan salah satu kabupaten/kota yang capaian Indeks Melek Al-Quran sangat rendah di Aceh.

2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

1) Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) mengalami kenaikan sejak 2021-2023, namun mengalami penurunan pada tahun 2024. Pada tahun 2021, IPA Kota Subulussalam sebesar 58,48, meningkat pada tahun 2023 menjadi 60,84. Namun angka ini mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 59,76.

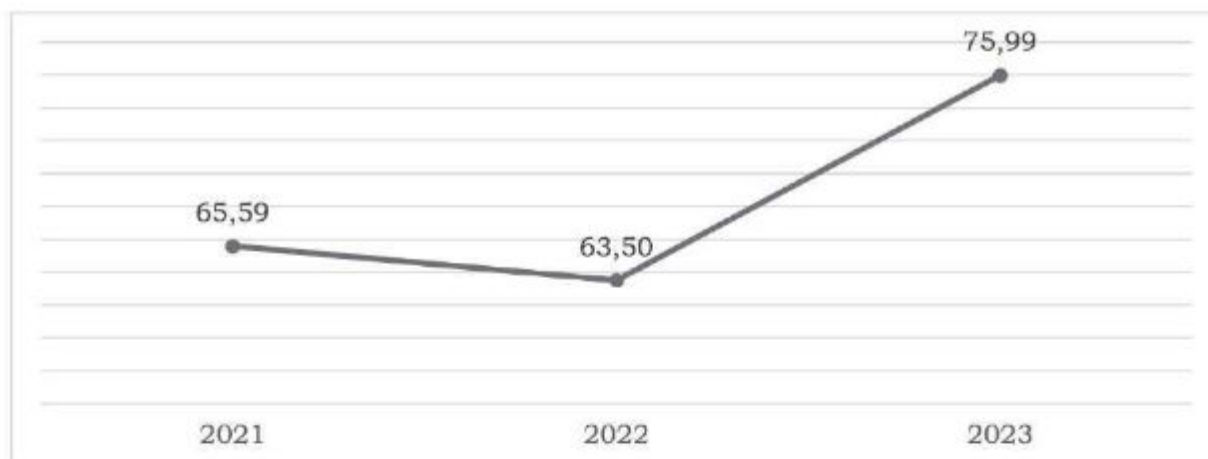


Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

Gambar 2.67.
Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Subulussalam Tahun 2021-2024

2) Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Kota Subulussalam mengalami kenaikan signifikan sejak tahun 2021-2023. Pada tahun 2021, IPKA Kota Subulussalam sebesar 65,59 dan meningkat menjadi 75,99 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan pembangunan di Kota Subulussalam setiap tahun memerhatikan perlindungan anak dalam situasi dan kondisi tertentu.

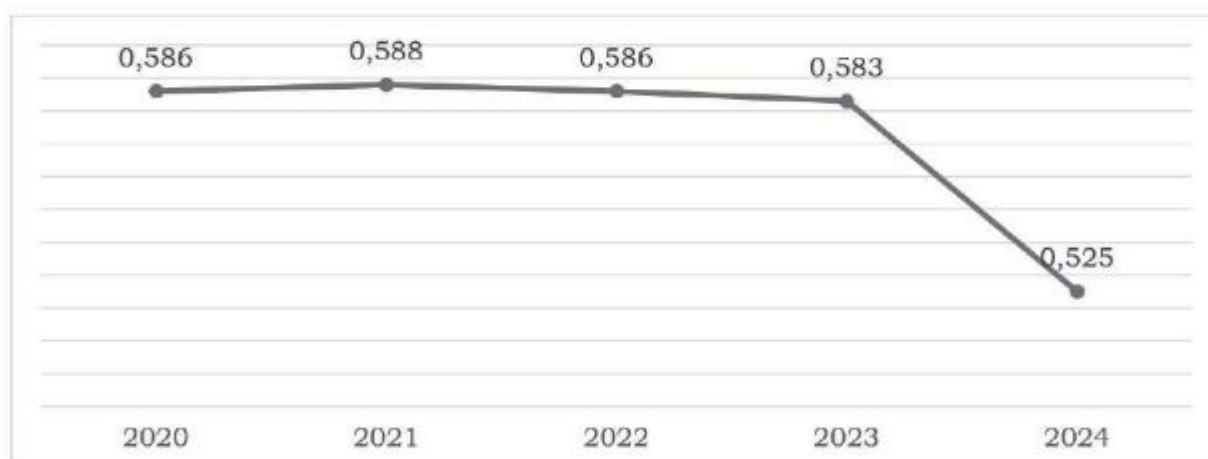


Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

Gambar 2.68.
Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Kota Subulussalam
Tahun 2021-2023

3) Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kota Subulussalam mengalami penurunan setiap tahunnya, terutama tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, IKG Kota Subulussalam mencapai 0,586, namun mengalami penurunan ke angka 0,525. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan yang stabil dalam kesetaraan gender di Kota Subulussalam.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

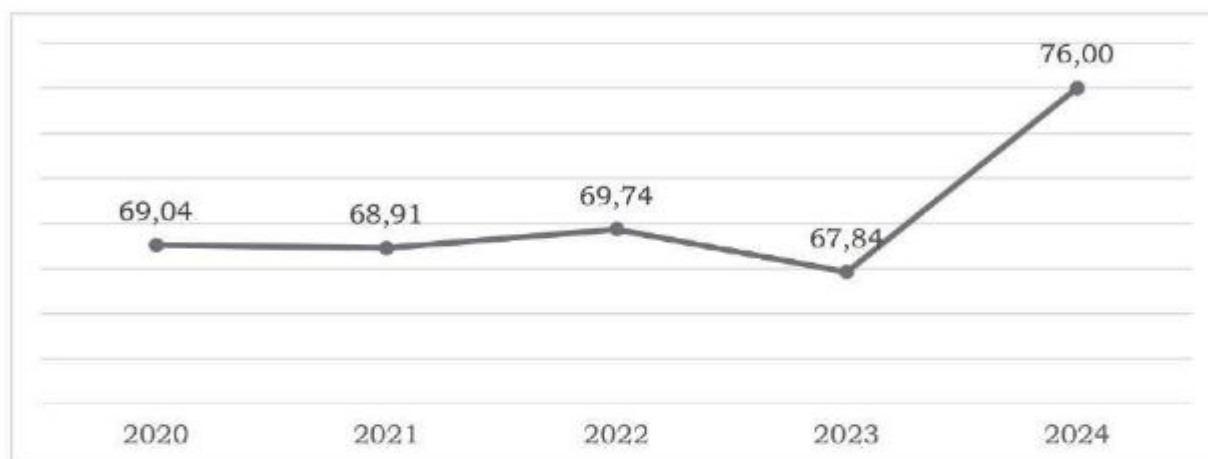
Gambar 2.69.
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Subulussalam Tahun 2020-2023

4) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Subulussalam mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2020, IDG Kota Subulussalam sebesar 69,04, mengalami penurunan pada tahun berikutnya menjadi 68,91. Angka ini meningkat

kembali pada tahun 2022 menjadi 69,74 dan turun kembali menjadi 67,84 pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024 kembali mengalami kenaikan pada angka 76,00 dan tertinggi se-Aceh. Hal ini dapat menunjukkan bahwa peran perempuan dapat dalam kehidupan ekonomi dan politik mengalami peningkatan.

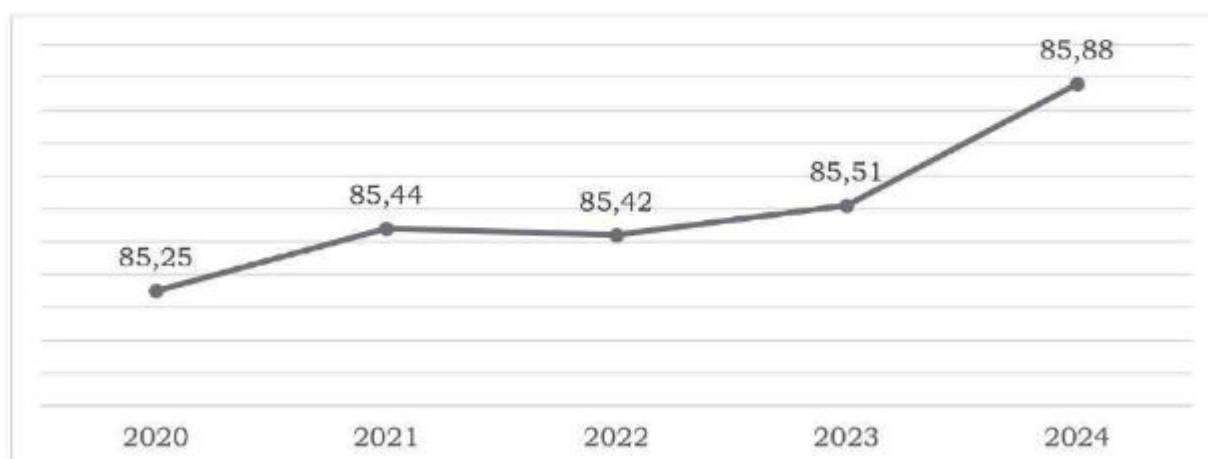
Beberapa penyebab IDG tinggi di antaranya semakin tingginya kesempatan perempuan menduduki kursi dewan perwakilan rakyat kota, kesempatan perempuan bekerja, dan akses pendidikan untuk perempuan yang meningkat.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2.70.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

5) Indeks Pembangunan Gender (IPG)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2.71.
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Subulussalam mengalami kenaikan yang signifikan sejak tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, IPG Kota Subulussalam

sebesar 85,25 dan mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2024 menjadi 85,88. Angka ini menunjukkan keberhasilan daerah dalam pembangunan manusia dengan mempertimbangkan gender.

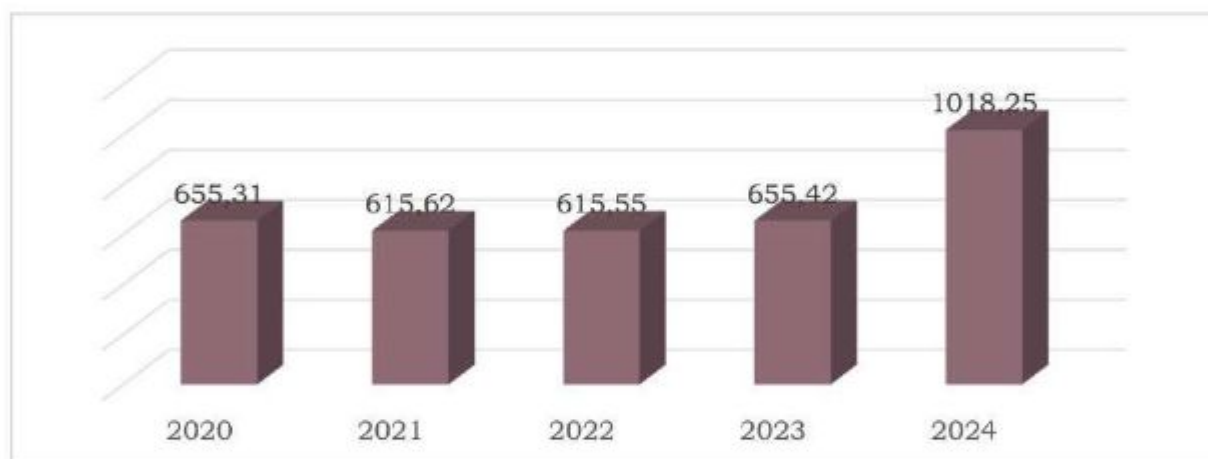
Beberapa faktor penyebab rendahnya IPG adalah ketimpangan aksesibilitas pendidikan, keterbatasan kesehatan reproduksi, dan kekerasan terhadap perempuan.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

1) Kualitas Tenaga Kerja

Rasio penduduk yang menamatkan pendidikan terakhir minimal perguruan tinggi mengalami peningkatan pada tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, rasio penduduk yang menamatkan pendidikan terakhir minimal perguruan tinggi sebesar 655-656 jiwa per 10.000 penduduk, lalu naik pada tahun 2024 menjadi 1.018-1.019 jiwa per 10.000 penduduk.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024

Gambar 2.72.
Rasio Penduduk dengan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Perguruan Tinggi di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 (Per 10.000 penduduk)



Tabel 2.27.

Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	2020	2021	2022	2023	2024
<= Sekolah Dasar	18.265	20.188	19.221	16.590	23.169
Sekolah Menengah Pertama	10.431	9.385	9.592	10.550	11.291
Sekolah Menengah Atas	17.030	17.007	18.337	16.930	23.143
Perguruan Tinggi	5.947	5.705	5.860	6.408	10.087
Total	51.673	51.673	53.010	50.478	67.690

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

2) Rasio ketergantungan

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio ketergantungan penduduk Kota Subulussalam 2020-2024 pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.28.
Rasio Ketergantungan Penduduk Produktif Di Kota Subulussalam
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	29.436	29.770	30.295	30.842	31.639
Jumlah Penduduk Usia > 64	2.434	2.586	2.771	2.959	3.093
Jumlah Usia Tidak Produktif <15 tahun + > 64 tahun	31.870	32.356	33.066	33.801	34.732
Jumlah Penduduk 15 – 64	58.881	60.315	62.133	63.969	64.330
Rasio Ketergantungan Total *100 penduduk	54,13	53,65	53,22	52,83	53,99

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara atau daerah apakah tergolong maju atau yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak Produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

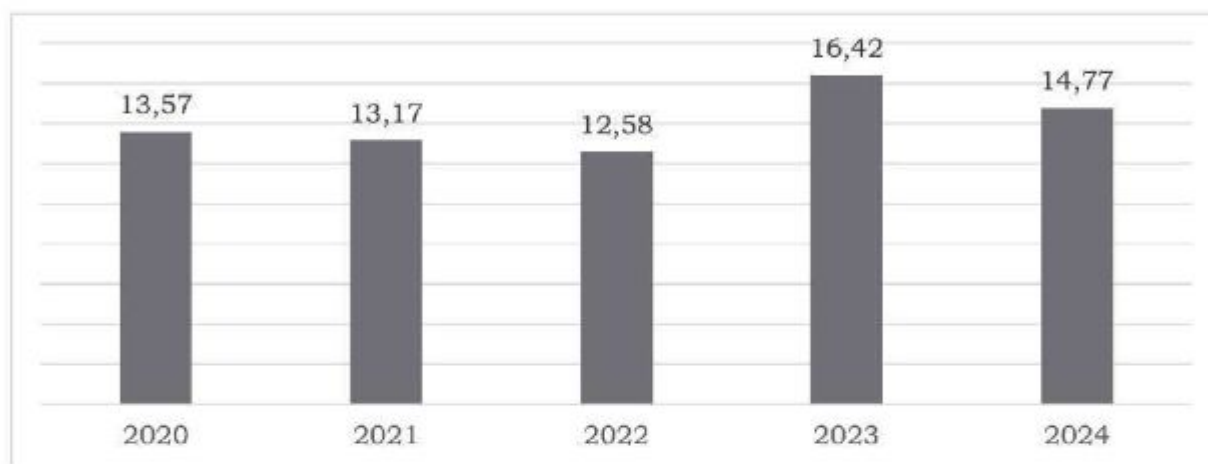
Pada tahun 2020 setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 54 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2024 penduduk usia kerja di Kota Subulussalam masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap

penduduk tua. Rasio ketergantungan tahun 2024 sebesar 53,99 per 100 penduduk artinya setiap 2 orang menanggung 1 orang.

2.3.2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

1) Wirausaha

Persentase wirausaha di Kota Subulussalam mengalami peningkatan sejak tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, persentase wirausaha di Kota Subulussalam sebanyak 13,57 persen, lalu meningkat menjadi 14,77 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025

Gambar 2.73.
Persentase Wirausaha di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024



Tabel 2.29.

Status Pekerjaan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Status Pekerjaan Utama	2020	2021	2022	2023	2024
Berusaha Sendiri	8.351	7.846	5.732	8.508	7.793
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap / Buruh Tidak Dibayar	2.989	3.273	4.077	4.888	4.847
Berusaha Dibantu Buruh Tetap / Buruh Dibayar	976	1.082	2.164	2.660	1.996
Buruh / Karyawan / pegawai	13.601	14.321	12.498	14.353	16.111
Pekerja Bebas	1.663	1.807	3.741	5.497	8.813
Pekerja Keluarga / Tak Dibayar	3.287	3.022	5.284	6.308	4.498
Total	30.867	31.261	33.498	42.214	44.058

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025

2) Indeks Inovasi Daerah

Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Subulussalam mengalami kenaikan sejak tahun 2021-2024. Meskipun pada tahun 2020 kategori IID Kota Subulussalam *disclaimer* atau tidak dapat dinilai, namun IID Kota Subulussalam tahun 2021-2024 berada pada kategori Kota Inovatif.

Dibandingkan rata-rata kabupaten/kota inovatif, Kota Subulussalam tergolong salah satu terendah. Lemahnya komitmen pemerintah daerah, keterbatasan SDM, keterbatasan infrastruktur riset dan pengembangan, kolaborasi dan jejaring multi pihak, serta akses pendanaan terbatas menjadi beberapa permasalahan dalam pengembangan inovasi daerah.

Tabel 2.30.
Indeks Inovasi Daerah

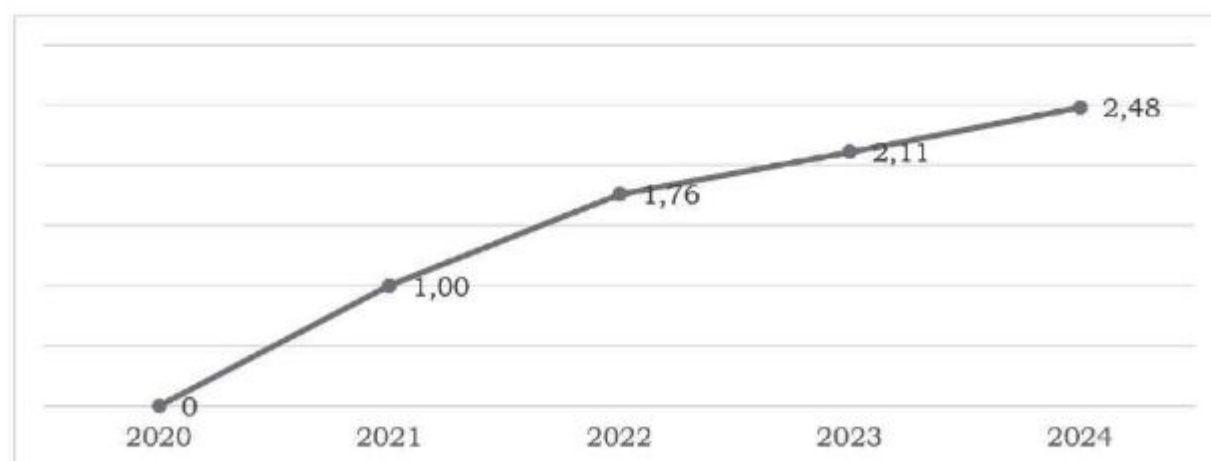
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Indeks Inovasi Daerah	0,00	31,44	35,60	44,51	43,88
Predikat Indeks Inovasi Daerah	Disclaimer	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif

Sumber : BKPSDM Kota Subulussalam, 2025

2.3.3. Transformasi Digital

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks SPBE Kota Subulussalam tahun 2020 masih belum mendapatkan kategori atau NA. Lalu pada tahun 2021, memperoleh nilai 1,00. Angka ini meningkat menjadi 2,48 pada tahun 2024 atau berkategori “Cukup”.



Sumber : Kementerian PAN&RB, 2024

Gambar 2.74.
Indeks SPBE Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

2.3.4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Tabel 2.30. terlihat bahwa pertumbuhan PDRB dengan harga berlaku mulai tahun 2021 yang sebesar 2.110.949,42 mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2024 sebesar 2.761.850,00 atau terjadi kenaikan sebesar 650.900,86 dari nilai tahun 2021 sebesar 2.110.949,14.

Tabel 2.31.
PDRB menurut Pengeluaran (ADHB) tahun 2020-2024

No	Pengeluaran	PDRB Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
		Harga Berlaku				
		2020	2021	2022	2023	2024*
1	Konsumsi Rumah Tangga	1.310.238,88	1.346.392,96	1.429.635,00	1.514.857,77	1.591.090,00
2	Konsumsi LNPR	56.026,16	55.298,47	58.894,11	64.889,21	76.310,00
3	Konsumsi Pemerintah	580.477,71	622.367,57	645.008,85	651.758,68	706.880,00
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.054.990,63	1.102.650,14	1.153.756,80	1.239.051,12	1.318.070,00
5	Perubahan Inventori	(26.818,60)	(7.485,27)	(8.115,06)	10.664,00	4.030,00
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	(1.168.236,36)	(1.008.274,73)	(914.275,72)	(921.632,50)	(934.530,00)
	Produk Domestik Regional Bruto	1.803.678,42	2.110.949,14	2.364.903,98	2.559.588,28	2.761.850,00

Tabel 2.32.
PDRB menurut Pengeluaran (ADHK) tahun 2020-2024

No	Pengeluaran	PDRB Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
		Harga Konstan 2010				
		2020	2021	2022	2023	2024*
1	Konsumsi Rumah Tangga	898.211,71	911.740,72	932.950,99	963.601,51	996.150,00
2	Konsumsi LNPR	38.259,31	37.486,76	38.944,99	42.086,80	48.140,00
3	Konsumsi Pemerintah	370.182,44	384.869,56	375.569,06	371.644,81	397.550,00
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	646.480,99	656.401,71	663.708,76	690.096,55	710.330,00
5	Perubahan Inventori	(5.393,31)	(5.149,11)	(5.003,85)	6.349,00	2.110,00
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	(562.334,42)	(546.352,98)	(507.869,01)	(514.721,17)	(531.030,00)
	Produk Domestik Regional Bruto	1.358.687,66	1.385.406,72	1.438.996,66	1.559.057,50	1.623.250,00

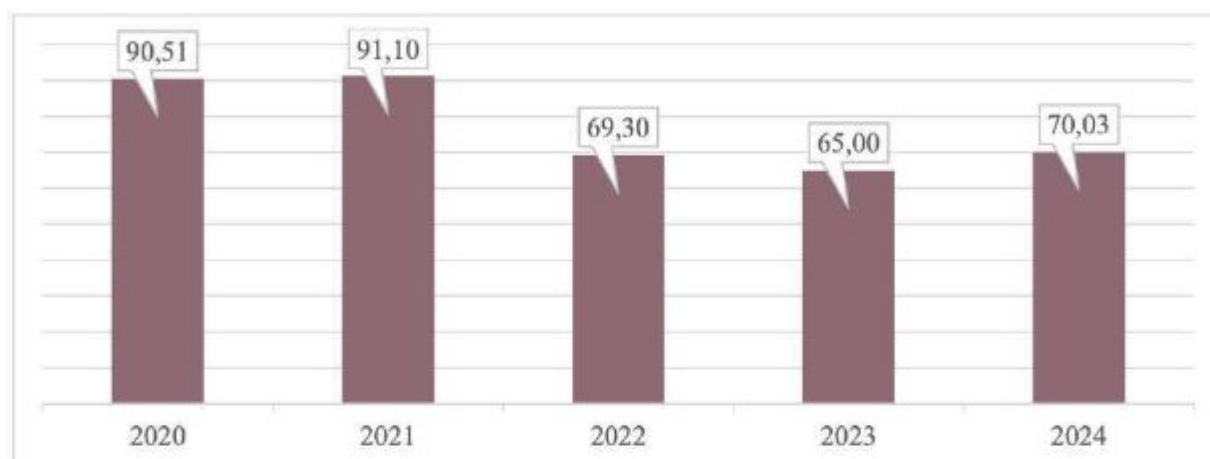
Laju Pertumbuhan PDRB tahun 2024 yang dipengaruhi oleh berbagai jenis pengeluaran yang mengalami pertumbuhan PDRB pada pengeluaran rumah tangga dengan angka 61,37 persen yang mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel serta lainnya.

2.3.5. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1) Rumah Layak Huni

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak

huni. Pencapaian suatu lingkungan perumahan yang baik adalah suatu rumah tersebut memiliki jaringan air bersih, listrik dan sanitasi, dan juga seberapa besar proporsi lingkungan kumuh perkotaan. Berikut akan dijelaskan kondisi perumahan sebagai dasar untuk menentukan arah kebijakan di bidang perumahan dalam RPJMD Kota Subulussalam 2020-2024.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam, 2025

Gambar 2.75.

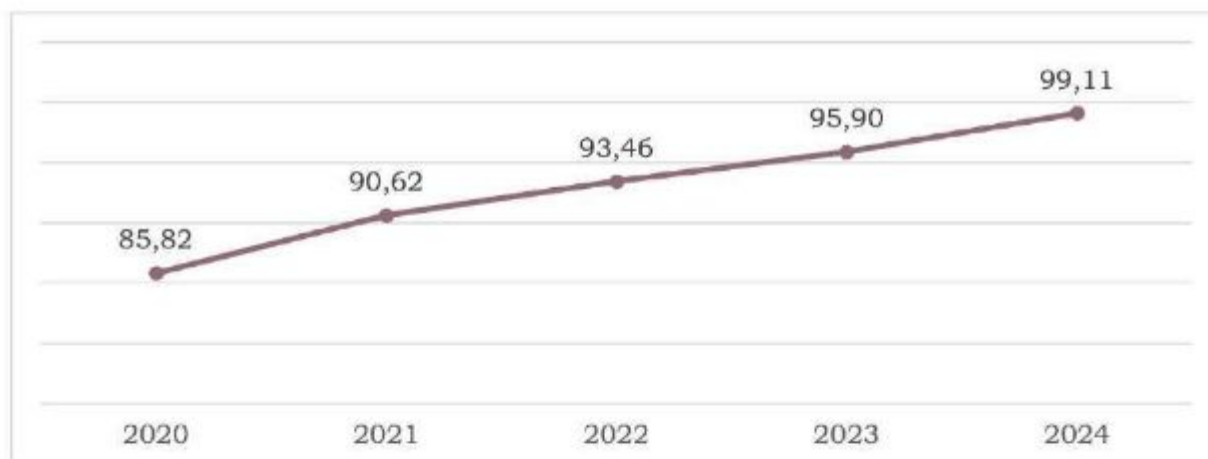
Persentase Rumah Tinggal Layak Huni Kota Subulussalam Tahun 2020–2024

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam bahwa sampai pada tahun 2020, persentase rumah layak huni Kota Subulussalam sebesar 90,61 persen. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 70,03 persen.. Sesuai dengan program prioritas nasional dan Gubernur Aceh, pembangunan rumah layak huni ini akan terus ditingkatkan terutama yang diperuntukkan bagi keluarga miskin melalui data rumah tangga miskin (basis data terpadu) yang bisa didanai dari dana otsus dan dana-dana lain yang mendukung pencapaian rumah layak huni semaksimal mungkin.

2) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Subulussalam Tahun 2023 masih di bawah angka 100,00. Artinya Kemahalan Konstruksi di Kota Subulussalam Tahun 2022 tidak lebih mahal dibandingkan Kota Makassar. Adapun perkembangan IKK Kota Subulussalam tahun 2020-2024 disajikan pada Gambar 2.64.

Biaya material yang tergolong tinggi, produktivitas tenaga kerja rendah, perizinan konstruksi panjang dan tumpang tindih, infrastruktur logistik buruk, minimnya adopsi teknologi konstruksi modern, inflasi dan gejolak ekonomi makro merupakan beberapa penyebab IKK di Kota Subulussalam masih rendah.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024

Gambar 2.76.
Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

3) Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat. Oleh karenanya kebutuhan akan transportasi umum akan semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana dan prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan).

Tabel 2.33.
Rasio Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor
di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Jenis Kendaraan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit)	20.745	25.291	25.972	27.721	32.778
Panjang jalan (Km)	640,49	640,49	640,49	640,49	640,49
Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan	0,031	0,025	0,025	0,023	0,020

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2025

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan di Kota Subulussalam pada tahun 2024 mencapai 0,020 yang berarti bahwa setiap panjang jalan sepanjang 1 Km dapat diakses kendaraan baik kendaraan roda 50 kendaraan bermotor. Kondisi ini berbeda dengan kondisi pada tahun sebelumnya, dimana rasio ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan terus meningkat.

2.3.6. Stabilitas Ekonomi Makro

1) Inflasi

Pengukuran tingkat inflasi Kota Subulussalam masih mengacu pada Kota Meulaboh, dikarenakan Meulaboh memiliki jarak yang paling dekat dengan Kota Subulussalam dan memiliki Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Acuan penilaian ini berdasarkan kepada data yang di keluarkan oleh BPS Aceh, bahwasanya penilaian inflasi di Aceh terdapat pada 3 (tiga) daerah yakni Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe dan Kota Meulaboh.

Hasil penilaian inflasi yang terjadi di Kota Meulaboh menunjukkan bahwa tingkat inflasi masih dalam kondisi inflasi sedang (3,29 persen). Angka ini meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun 2023 yaitu 1,42 persen. Berikut disajikan secara rinci inflasi yang terjadi di 3 Kota Provinsi Aceh sejak tahun 2020-2024.

Tabel 2.34.
Tingkat Inflasi Kota di Aceh Tahun 2020-2024

Tahun	Meulaboh	Banda Aceh	Lhokseumawe	Aceh	Indonesia
2020	4,24	3,46	3,55	3,59	1,68
2021	2,07	2,41	1,97	2,24	1,87
2022	6,56	6,00	5,37	5,89	5,51
2023	1,42	1,53	1,56	1,53	3,08
2024	3,29	2,16	2,79	2,17	1,57

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

2) Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Terdapat 2 Bank yang beroperasi di Kota Subulussalam dengan status cabang, yaitu Bank Aceh Syariah (BAS) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Sedikitnya jumlah bank di Kota Subulussalam disebabkan oleh diterapkannya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Adapun beberapa capaian kinerja di Kota Subulussalam adalah sebagai berikut:

- Nilai Sakip Kota Subulussalam mengalami kenaikan yang signifikan sejak tahun 2020. Pada tahun 2020, Kota Subulussalam memperoleh predikat C, naik menjadi CC pada tahun 2024.

- b. Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks-RB) Kota Subulussalam meningkat dari 40,02 pada tahun 2020 menjadi 59,24 pada tahun 2024. Peningkatan ini tergolong sangat lambat setiap tahunnya.
- c. Capaian penilaian LPPD Kota Subulussalam fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2020 memperoleh predikat Rendah, lalu turun pada 2021 menjadi Sangat Rendah dan naik kembali menjadi Rendah pada tahun 2022-2024.
- d. Indeks Pelayanan Publik di Kota Subulussalam tergolong Baik atau berkategori B.
- e. Kepatuhan standar pelayanan publik di Kota Subulussalam berada pada kategori B atau Kualitas Kepatuhan Tinggi.
- f. Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa meningkat setiap tahunnya, dari 18,20 atau kategori Kurang pada tahun 2021, meningkat menjadi 63,92 atau kategori Cukup pada tahun 2024.
- g. Indeks Reformasi Hukum Kota Subulussalam meningkat dari 58,20 pada tahun 2022 menjadi 77,34 pada tahun 2024.

Tabel 2.35.
Beberapa Capaian Kinerja pada Sekretariat Daerah

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Sakip	44,56 / C	45,05 / C	45,50 / C	47,79 / C	52,40 / CC
Indeks Reformasi Birokrasi	40,02 / C	44,65 / C	46,95 / C	42,02 / C	59,24 / CC
LPPD	Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Indeks Pelayanan Publik	NA	3,16 / B-	3,52 / B	3,44 / B	3,82 / B
Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Ombudsman RI	NA	84,05 / B	85,35 / B	84,94 / B	85,78 / B
Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0,00 / Kurang	18,20 / Kurang	23,80 / Kurang	42,51 / Kurang	63,92 / Cukup
Indeks Reformasi Hukum	NA	NA	58,20	55,51	77,34

2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

1) Angka kriminalitas

Angka kriminalitas di Kota Subulussalam mengalami kenaikan sejak tahun 2020. Angka kriminalitas mengalami kenaikan dari 81 kasus sampai 82 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2020 ke angka 179 kasus sampai 180 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2024. Angka Kriminalitas Kota Subulussalam disajikan pada Tabel 2.73. Pemerintah Kota Subulussalam memberikan program-program dalam upaya penciptaan polhukam yang kondusif serta bekerja sama dengan institusi vertikal dalam hal ini POLRI dan TNI.

2) Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi di Kota Subulussalam hanya 3 kali dalam kurun waktu 2020-2024. Pada tahun 2023, hanya sekali demonstrasi terkait ekonomi. Lalu pada tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah demonstrasi, yaitu terkait politik dan ekonomi. Hal ini juga diperkuat dengan terselenggaranya pemilu dan pilkada serentak pada Februari 2024 dan November 2024.

Tabel 2.36.
Jumlah Demo di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Bidang Politik	-	-	-	-	1
Ekonomi	-	-	-	1	1
Kasus Pemogokan Kerja	-	-	-	-	-
Jumlah Unjuk Rasa	-	-	-	1	2

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025



Tabel 2.37.
Angka Kriminalitas Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kasus narkoba	25	35	34	56	39
Jumlah kasus pembunuhan	0	2	1	1	0
Jumlah kejahatan seksual	3	12	5	14	4
Jumlah kasus penganiayaan	20	24	58	55	56
Jumlah kasus pencurian	20	30	54	142	66
Jumlah kasus penipuan	6	18	25	37	13
Jumlah kasus pemalsuan uang	0	0	0	0	0
Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	74	121	177	305	178
Jumlah penduduk	90.751	92.671	95.199	97.770	99.062
Angka kriminalitas (8)/(9)	81,54	130,57	185,93	311,96	179,69

Sumber : Polres Kota Subulussalam, 2025

3) Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan

Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) di Kota Subulussalam tergolong sukses. Hal ini terlihat bahwa semua kasus ditangani hingga selesai atau mencapai 100,00 persen pada tahun 2020-2023. Namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 98 persen. Begitu juga terhadap pelanggaran perda. Adapun Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Gambaran kondisi ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di Kota Subulussalam direfleksikan dari data tentang sarana keamanan, angka kriminalitas, serta upaya dan peran serta masyarakat dalam menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan lingkungan.



Tabel 2.38.
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	100	100	100	100	98
Persentase Penegakan Perda	100	100	100	100	98

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan WH Kota Subulussalam, 2025

2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Budaya Gentar Kawasan

Indeks Daya Saing Daerah

Pada tahun 2021, penilaian dilakukan atas 4 aspek, yaitu aspek Ekosistem Inovasi, Aspek Penguat, Aspek Sumber Daya Manusia, dan Aspek Pasar. Kota Subulussalam memperoleh nilai 1,952 atau kategori Sedang. Aspek pendukung paling besar adalah Aspek Penguat dan Aspek Sumber Daya Manusia. Sedangkan aspek yang harus ditingkatkan adalah Aspek Ekosistem Inovasi (0,818) dan Aspek Pasar (1,729).

Namun, pada tahun 2022, Kota Subulussalam memperoleh nilai NA. Nilai NA ini dikarenakan terdapat satu indikator penilaian yang tidak memiliki data (Komponen Lingkungan Pengendalian). Lalu pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 2,77 dan 3,24 pada tahun 2024.

Tabel 2.39.
IDSD Kota Subulussalam Tahun 2021-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
IDSD	1,952	NA	2,77	3,24

Sumber : BRIN, 2024

Beberapa pilar IDSD Kota Subulussalam Tahun 2024 yang sudah tergolong baik (>3,00) di antaranya adalah:

- Institusi
- Adopsi TIK
- Kualitas Ekonomi Makro
- Kesehatan
- Keterampilan
- Pasar Produk
- Pasar Tenaga Kerja
- Ukuran Pasar
- Dinamika Bisnis

Sedangkan pilar IDSD Kota Subulussalam Tahun 2024 yang perlu peningkatan di antaranya adalah:

- Infrastruktur
- Sistem Keuangan
- Kapabilitas Inovasi.

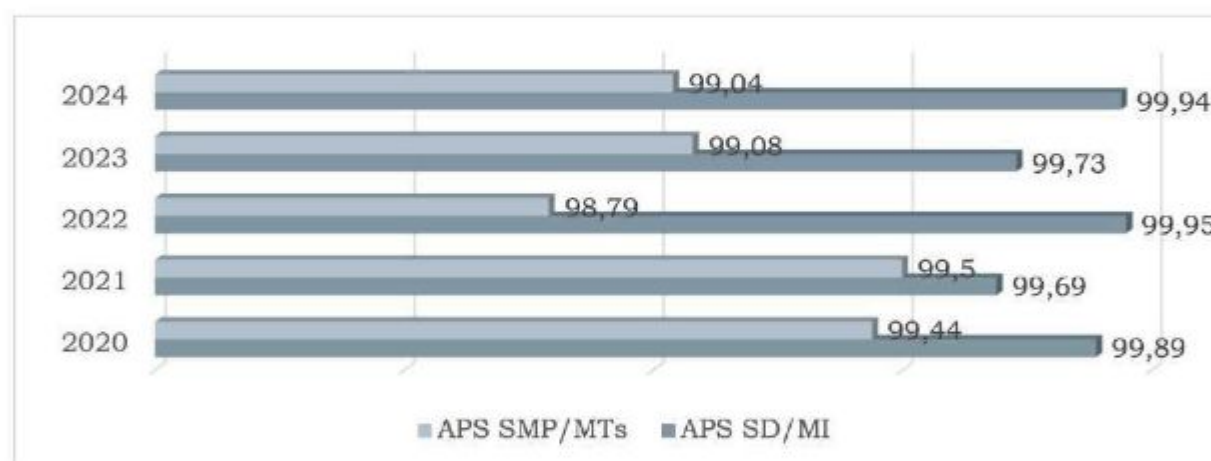
2.4.4. Kinerja setiap Urusan Pemerintah Daerah

2.4.4.1. Bidang Urusan Pendidikan

1) Angka Partisipasi Kasar (APS)

APS Kota Subulussalam jenjang SD/MI mengalami fluktuasi setiap tahunnya. APS tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu 99,95 persen. Lalu mengalami peningkatan pada tahun 2024 yaitu 99,94 persen. Angka ini tentunya menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan partisipasi sekolah pada jenjang usia sekolah. APS jenjang SMP/MTs juga mengalami hal yang sama. APS SMP/MTs tertinggi pada tahun 2021, yaitu 99,5 persen. Namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022 menjadi 98,79 persen, dan naik kembali tahun 2024 menjadi 99,04 persen.

Beberapa faktor penyebab rendahnya APS Kota Subulussalam adalah kemiskinan dan kebutuhan anak bekerja, aksesibilitas pendidikan, dan bencana alam tahunan.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

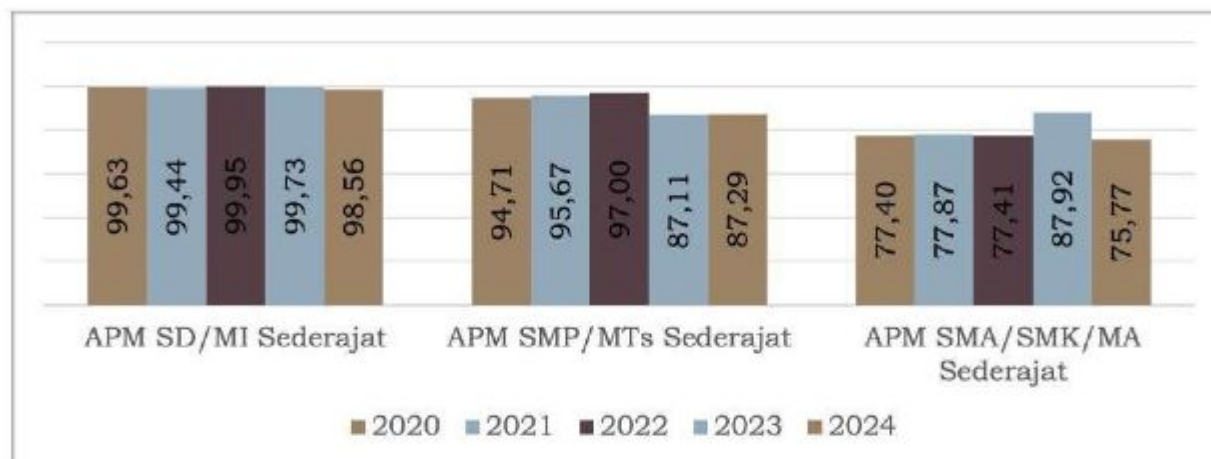
Gambar 2.77.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

2) Angka Partisipasi Murni (APM)

Capaian APM SD/MI Sederajat mengalami penurunan sejak tahun 2020. Pada tahun 2020, APM SD/MI Sederajat Kota Subulussalam berada pada angka 99,63 persen, lalu turun menjadi 98,56 persen pada tahun 2024. Hal ini merupakan suatu peringatan mengingat angka capaian APM SD/MI Sederajat pada tahun 2024 turun. Untuk APM SMP/MTs Sederajat, juga mengalami penurunan yang signifikan sejak tahun 2020. Pada tahun 2020, APM SMP/MTs Sederajat Kota Subulussalam pada angka 94,71 persen, menurun menjadi 87,29 pada tahun 2024. APM SMA/SMK/MA Sederajat mengalami penurunan sejak tahun 2020 ke

tahun 2024, dari 77,30 persen menjadi 75,77 persen. Hal ini menjadi perhatian khusus untuk meningkatkan partisipasi penduduk usia 15-18 tahun untuk bersekolah pada jenjang SMA/SMK/MA Sederajat. Hal ini juga selaras dengan rata-rata lama sekolah Kota Subulussalam yang hanya berada pada kelas VIII SMP/MTs Sederajat.



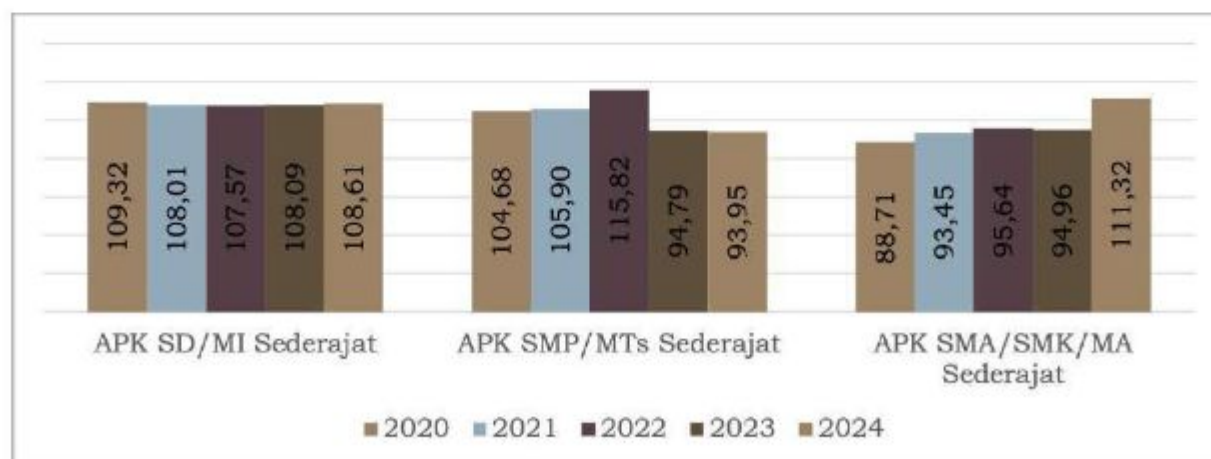
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025

Gambar 2.78.

Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

3) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Sederajat Kota Subulussalam mengalami penurunan sejak tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2020-2024 APK Kota Subulussalam di atas angka 100,00 persen dimana hal ini berbanding lurus dengan APM Kota Subulussalam yang meningkat sejak tahun 2020. Artinya, penduduk usia 6-12 tahun telah bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan SD/MI sederajat.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025

Gambar 2.79.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Namun, hal ini berbanding terbalik dengan Capaian APK SMP/MTs sederajat Kota Subulussalam dimana mengalami kenaikan pada tahun 2024. Pada tahun 2020, APK SMP/MTs sederajat Kota Subulussalam sebesar 104,68 persen, menurun menjadi 93,95 persen pada tahun 2024. Namun untuk APK SMA/SMK/MA sederajat Kota Subulussalam, meningkat sejak tahun 2020, dari 88,71 persen menjadi 111,32 persen. Meskipun demikian, APK SMP/MTs sederajat dan SMA/SMK/MA sederajat yang tinggi sangat mempengaruhi peningkatan IPM Kota Subulussalam.

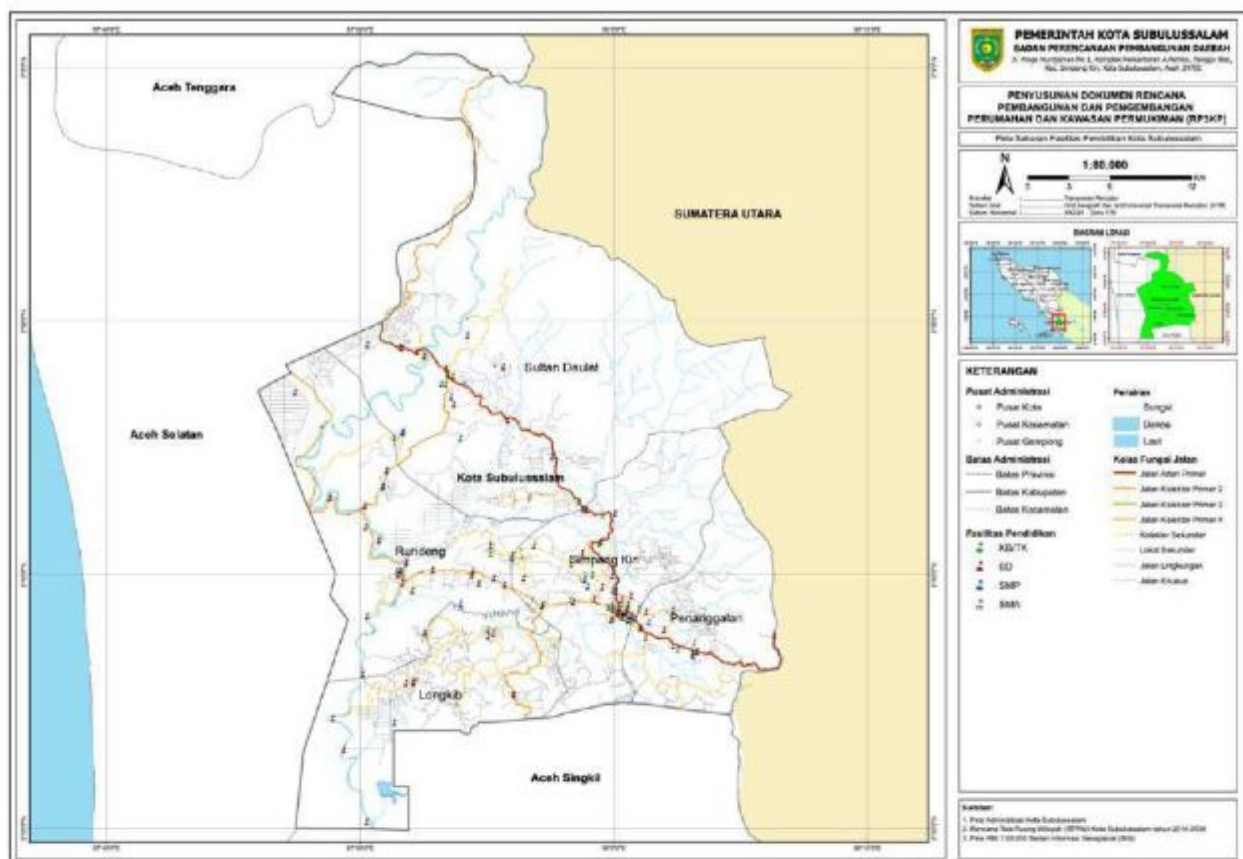
4) Fasilitas Pendidikan

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar x 10.000 di Kota Subulussalam meningkat sejak tahun 2020, dari 72,70 menjadi 78,72 pada tahun 2024 (melebihi angka ideal yaitu 52 per 10.000 penduduk). Hal ini didukung dengan peningkatan jumlah sekolah pada semua jenjang sejak 2020. Namun, penurunan Jumlah penduduk usia (13 sd 15) thn hanya 5.777 orang pada tahun 2024, lebih rendah dari penduduk usia 7 sd 12 tahun, yaitu 12.134 orang. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidik menengah per 10.000 menurun dari 34,29 pada tahun 2020 menjadi 50,92 pada tahun 2024. Adapun Fasilitas Pendidikan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.40.
Fasilitas Pendidikan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar x 10.000	72,7	74,8	75,83	76,8	78,72
Rasio ideal per 10.000			52		
Total Sekolah pendidikan dasar (unit)	125	130	134	138	141
Jumlah sekolah (SD) Unit	83	86	86	86	86
Jumlah sekolah (SMP) Unit	28	30	33	37	40
Jumlah sekolah (MI) Unit	5	5	5	5	5
Jumlah sekolah (MTs) Unit	9	9	10	10	10
Jumlah penduduk usia (7 sd 12) thn + (13 sd 15) orang	17.193	17.379	17.671	17968	17.911
Jumlah penduduk usia (7 sd 12) thn	11.597	11.720	11.915	12094	12.134
Jumlah penduduk usia (13 sd 15) thn	5.596	5.659	5.756	5874	5.777
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah X 10.000	34,29	35,17	34,5	35,11	50,92
Total unit	26	27	27	28	28
Jumlah sekolah (SMA) unit	14	14	14	14	14
Jumlah sekolah (SMK) unit	5	6	6	6	6
Jumlah sekolah (MA) unit	7	7	7	8	8
Jumlah penduduk usia (16 sd 19) Tahun (orang)	7.583	7.678	7.827	7974	5.498

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024



Sumber : RP3KP Kota Subulussalam, 2023

Gambar 2.80.
Peta Sebaran Fasilitas Pendidikan di Kota Subulussalam

5) Kualifikasi Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan

Kualifikasi guru adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan guru dengan melalui pendidikan khusus keahlian. Guru yang *qualified* adalah guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Guru profesional harus memenuhi kriteria dari segi kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat profesional. Artinya guru pada tiap satuan pendidikan harus memenuhi kualifikasi akademik dengan bidang keilmuan yang relevan dengan bidang studi atau mata pelajaran yang mereka ajarkan di sekolahnya sehingga mereka disebut kompeten untuk bidang pekerjaannya. Persoalannya banyak guru pada jenjang pendidikan dasar yang memperoleh keserjanaannya di luar bidang studi atau mata pelajaran yang diampu. Kualifikasi guru berdasarkan jenjang pendidikan Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.19.



Tabel 2.41.
Kualifikasi Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2020-2024

Tahun	Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru (Orang)	Kualifikasi S1/D-IV (Orang)	Persentase (%)
2020	SD	918	756	82,35
	SMP	485	469	96,7
	SMA	535	535	100
2021	SD	1047	885	84,53
	SMP	2649	2633	99,4
	SMA	558	558	100
2022	SD	1047	885	84,53
	SMP	2649	2633	99,4
	SMA	558	558	100
2023	SD	1083	983	90,77
	SMP	593	593	100,00
	SMA	604	604	100
2024	SD/MI	1203	1203	100,00
	SMP/MTs	603	603	100,00
	SMA/SMK/MA	602	602	100,00

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam, 2025

6) Daftar Akreditasi Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan untuk menunjukkan adanya akuntabilitas publik di bidang pendidikan. Data Akreditasi Sekolah berdasarkan jenjang pendidikan di Kota Subulussalam menunjukkan bahwa untuk satuan jenjang pendidikan SD, sebagian besar berakreditasi B dan C (masing-masing 55,81 persen dan 39,53 persen). Hanya sedikit sekolah yang berakreditasi A, yaitu sebanyak 1,16 persen. Masih terdapat 3 sekolah yang tidak terakreditasi (TT), yaitu sebesar 3,49 persen. Sedangkan untuk jenjang MI, terdapat 3 sekolah yang berakreditasi B dan 3 sekolah terakreditasi C.

Untuk satuan pendidikan SMP, sebagian besar terakreditasi C dan B (masing-masing 54,29 persen dan 31,43 persen). Sedangkan untuk sekolah yang terakreditasi A, hanya 3 sekolah dari total 35 unit. Namun masih terdapat sekolah yang tidak terakreditasi, yaitu sebanyak 2 sekolah. Sedangkan untuk jenjang pendidikan MTs, terdapat 3 sekolah terakreditasi B, 7 sekolah terakreditasi C, dan terdapat 2 sekolah yang tidak terakreditasi. Hal ini menjadi perhatian penting untuk pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan akreditasi sekolah yang berakreditasi A dan tergolong kecil untuk jenjang SD dan SMP. Selain itu masih terdapat beberapa sekolah SD dan SMP yang belum terakreditasi.

Untuk satuan pendidikan SMA, terdapat 4 sekolah telah terakreditasi A, 7 sekolah terakreditasi B, dan 3 lainnya C. Untuk jenjang MA, 2 sekolah terakreditasi A, 5 sekolah C dan terdapat 1 tidak terakreditasi. Sedangkan untuk jenjang SMK, 3 dari 6 sekolah telah terakreditasi B, sisanya masing-masing 1 sekolah untuk akreditasi A, B, dan tidak terakreditasi.

Tabel 2.42.
Daftar Akreditasi Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Di Kota Subulussalam

Jenjang Satuan Pendidikan	A	B	C	TT	TOTAL
SD	1	48	34	3	86
MI	0	3	2	0	5
SMP	3	11	19	2	35
MTs	0	3	7	2	12
SMA	4	7	3	0	14
MA	2	0	5	1	8
SMK	1	3	1	1	6
TOTAL	11	75	71	9	166

Sumber: <https://archive.ban-pdm.id/data/akreditasi#>, diakses Januari 2024

2.4.4.2. Bidang Urusan Kesehatan

1) Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia di Kota Subulussalam untuk jenis rumah sakit dan puskesmas sudah terpenuhi, rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan rujukan tersedia di Kecamatan Simpang Kiri (Ibu Kota Subulussalam) dengan tipe C dan akreditasi paripurna (A) serta puskesmas tersedia 8 unit pada yang tersebar di setiap kecamatan. Sedangkan Poskesdes yang berjumlah 77 unit. Sementara jumlah desa di Kota Subulussalam sebanyak 82 desa. Ini berarti masih terdapat kampung yang belum memiliki poskesdes.

Rasio ketersediaan fasilitas kesehatan di Kota Subulussalam tahun 2024 mendekati 1 (0,89). Hal ini menunjukkan bahwa setiap 1 fasilitas kesehatan telah secara ideal melayani 1.000 penduduk. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan berkurangnya jumlah poskesdes.

Tabel 2.43.
Fasilitas Kesehatan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio puskesmas, klinik, poskesdes per satuan penduduk x 1.000	1,02	1,03	0,97	0,97	0,89
Rasio Rumah sakit persatuan penduduk x 100.000	1	1	1	1	1
Jumlah puskesmas, klinik, poskesdes per satuan penduduk	93	95	92	93	88
Puskesmas	7	8	8	8	8
Klinik	3	4	6	3	2
Poskesdes	82	82	77	77	77
Rumah Sakit	1	1	1	1	1
Jumlah Penduduk	90.751	92.671	95.199	97.770	99.062

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2025

2) Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Rasio ketersediaan dokter umum di Kota Subulussalam telah mencapai jumlah ideal yaitu 0,31 per 1.000 penduduk atau 31 dokter per 100.000 penduduk. Angka ini hampir mencapai angka ideal yaitu 38 dokter per 100.000 penduduk. Begitu juga halnya dengan dokter gigi dan dokter gigi spesialis, hampir mencapai angka ideal yaitu 0,98 per 7.500 penduduk atau 13 dokter per 100.000 penduduk. Jumlah dokter spesialis Kota Subulussalam belum mencapai jumlah ideal karena hanya terdapat 19 dokter per 100.000 penduduk.

Tabel 2.44.
Jumlah dan Rasio Dokter per Satuan Penduduk
di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Tenaga Kesehatan Persatuan Penduduk 1.000	8,07	4,75	11,37	11,53	5,23
Jumlah Keseluruhan Tenaga Kesehatan	732	440	1.082	1.127	519
Rasio Dokter Umum Per 1.000 Penduduk	0,37	0,47	0,52	0,39	0,31
Dokter Umum	34	44	50	38	31
Rasio Dokter Spesialis Per 1.000 Penduduk	0,09	0,15	0,16	0,16	0,19
Dokter Spesialis	8	14	15	16	19
Rasio Dokter Gigi dan Dokter Spesialis Gigi Per 7.500 Penduduk	0,41	0,49	9,06	11,58	0,98
Dokter Gigi + Dokter Gigi Spesialis	5	6	115	151	13
Perawat	218	75	300	313	105
Bidan	326	201	427	435	272
Tenaga Kefarmasian	60	30	63	71	19
Tenaga Kesehatan Masyarakat	35	30	56	63	31
Tenaga Kesehatan Lingkungan	9	10	10	16	12
Tenaga Gizi	13	7	13	14	9
Ahli Teknologi Laboratorium Medik	24	23	33	10	8

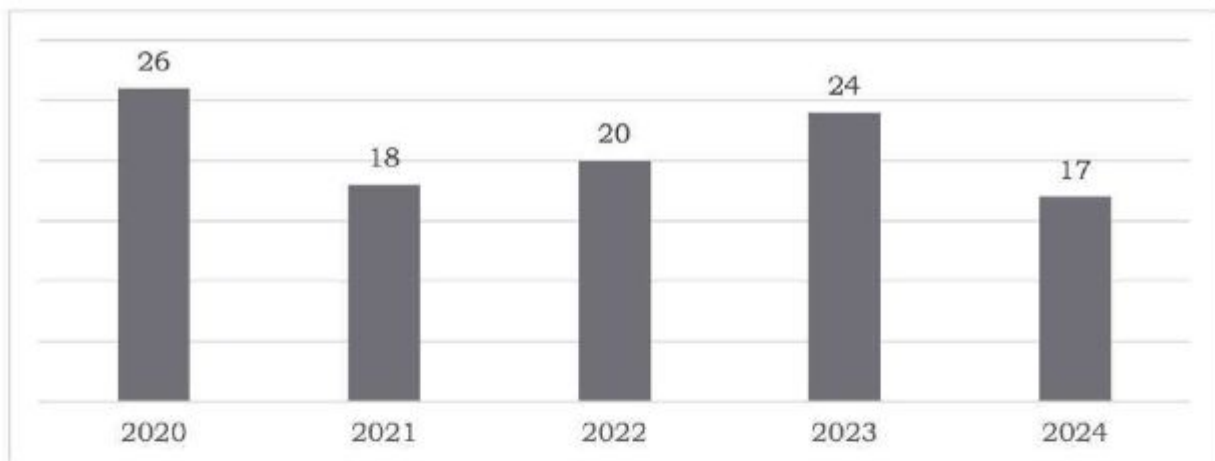
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2024

3) Cakupan Desa *Universal Child Immunization* (UCI)

Indikator lain yang diukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan imunisasi adalah Universal Child Immunization atau biasa disingkat UCI. UCI adalah gambaran suatu desa/kelurahan di mana lebih 80 persen dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap.

Berdasarkan grafik di bawah dapat dilihat Desa UCI di Kota Subulussalam mengalami perubahan di tahun 2024 yaitu sebanyak 17 persen tergolong desa UCI. Imunisasi dasar lengkap yang dilaksanakan ditujukan untuk mencapai kekebalan kelompok (herd imunity) yaitu adalah suatu kondisi dimana sebagian besar masyarakat telah terlindungi dari suatu penyakit. Cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata akan membentuk kekebalan kelompok sehingga mencegah penularan suatu penyakit yang sebenarnya dapat kita cegah dengan imunisasi. Untuk mencapai kekebalan kelompok, maka cakupan imunisasi rutin harus mencapai minimal 96 persen secara merata di seluruh wilayah, sampai unit terkecil yaitu tingkat desa/kelurahan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan cakupan UCI yaitu melalui komunikasi dan edukasi tentang pentingnya imunisasi kepada seluruh masyarakat, sehingga masyarakat tidak ada keraguan lagi dalam mengikuti program imunisasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah bersama seluruh pihak terkait.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2025

Gambar 2.81.

Cakupan Desa UCI (Universal Child Immunization) di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

4) Tuberkulosis (TBC)

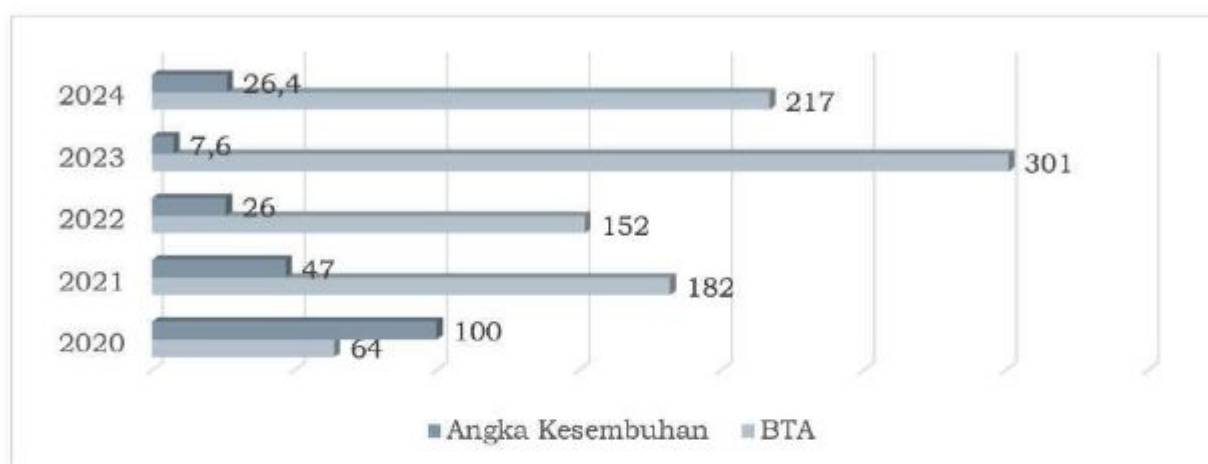
Tuberkulosis merupakan penyakit menular langsung, disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium Tuberculosis*. Sumber penularan adalah pasien tuberkulosis Basil Tahan Asam Positif (BTA Positif) melalui percik relik dahak yang dikeluarkannya. Tuberkulosis dengan BTA negatif juga masih memiliki kemungkinan menularkan penyakit TB meskipun dengan tingkat penularan yang kecil. Beban penyakit yang disebabkan oleh Tuberkulosis dapat diukur dengan Case Notification Rate, Prevalens (Jumlah Kasus Tuberkulosis pada suatu titik waktu tertentu). Case Notification Rate (CNR) adalah jumlah semua kasus Tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan diantara 100.000 penduduk yang ada di suatu wilayah tertentu. Angka ini berguna untuk menggambarkan kecenderungan (trend) meningkat atau menurunnya penemuan kasus dari tahun ke tahun di suatu wilayah.

Berdasarkan grafik di bawah dapat dilihat jumlah kasus tuberkulosis pada tahun 2024 jumlah BTA positif sebanyak 217 kasus dengan jumlah angka kesembuhan 26,4 persen. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2023 yang berjumlah 301 kasus dengan angka kesembuhan mengalami kenaikan sebesar 7,6 persen.

Kasus TBC ini mengalami kenaikan, untuk itu pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan standar orang terduga TBC terdiri dari Pemeriksaan klinis (gejala dan tanda), pemeriksaan penunjang dan edukasi. Dinas Kesehatan Kota Subulussalam dan

Puskesmas telah memberikan pelayanan kepada orang terduga TBC yaitu pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, edukasi / promosi dan rujukan.

Salah satu upaya untuk mengendalikan TBC yaitu dengan pengobatan. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pengobatan TBC adalah angka keberhasilan pengobatan (Success Rate). Success Rate merupakan jumlah semua kasus tuberkulosis yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan. Angka keberhasilan pengobatan ini menggambarkan kualitas pengobatan TBC.

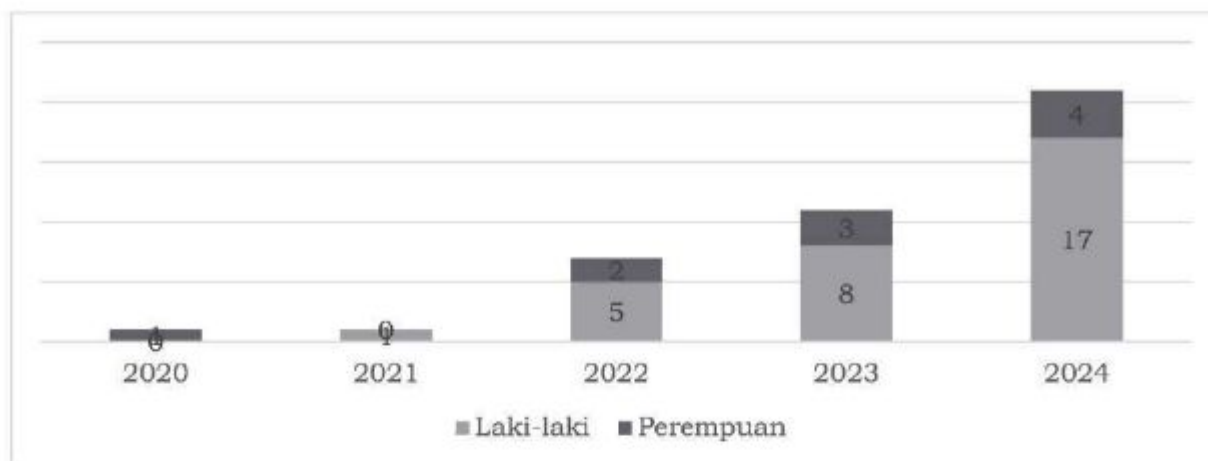


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2025

Gambar 2.82.
Kasus Tuberkulosis di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

5) HIV/AIDS

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi *Human Immunodeficiency Virus* yang dapat menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah terinfeksi berbagai penyakit lain. HIV dapat ditularkan melalui hubungan seks, transfusi darah, penggunaan jarum suntik bergantian dan penularan dari ibu ke anak (prenatal). Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dahulu dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui layanan konseling dan tes HIV baik secara sukarela (konseling dan tes sukarela/KTS) maupun atas dasar tes atas Inisiatif Pemberi Layanan Kesehatan dan Konseling (TIPIK). Sedangkan prevalensi HIV pada suatu populasi tertentu dapat diketahui melalui metode Sero Survey, dan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP).



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.83.
Kasus HIV/AIDS yang dilaporkan di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

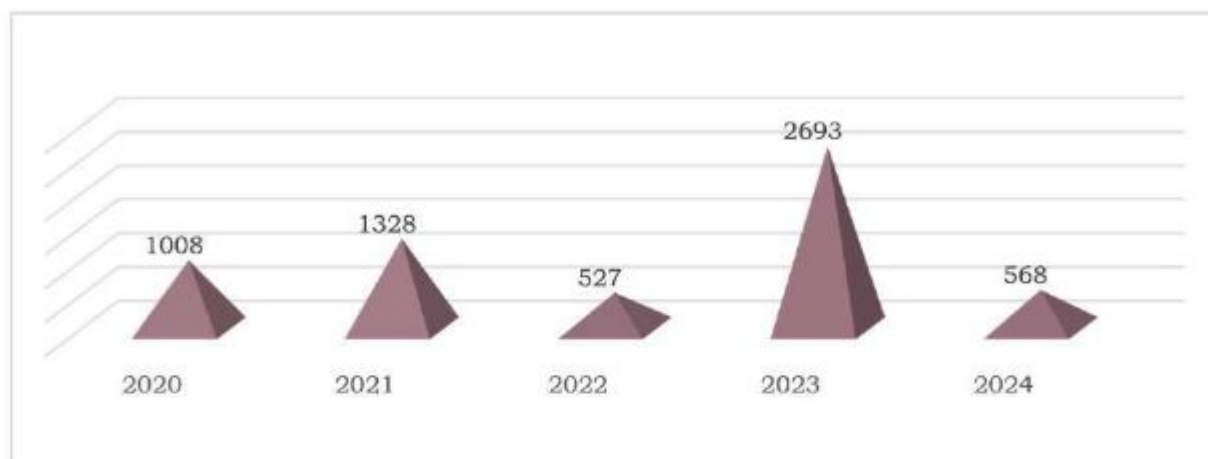
Grafik di atas menunjukkan angka penderita HIV di tahun 2020 berjumlah 1 kasus perempuan, pada tahun 2021 terdapat 1 kasus yaitu laki-laki dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 21 kasus, 17 laki-laki dan 4 perempuan. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui layanan konseling dan tes HIV baik secara sukarela (konseling dan sukarela/KTS) maupun atas dasar tes inisiatif pemberian layanan kesehatan dan konseling (TIPK). Dinas kesehatan kota Subulussalam melalui Puskesmas telah memberikan layanan berupa tes HIV di 7 Puskesmas dan 1 RSUD serta melakukan layanan klinik PDP (pelayanan, dukungan dan pengobatan).

6) Diare

Diare merupakan penyakit endemis dan juga merupakan penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) yang sering disertai dengan kematian. Target cakupan pelayanan penderita diare yang datang ke sarana kesehatan dan kader kesehatan adalah 10 persen dari perkiraan jumlah penderita diare (insiden diare dikali jumlah penduduk di satu wilayah kerja dalam waktu satu tahun). 15 Salah satu penyebab diare pada masyarakat adalah perilaku hidup sehat yang belum baik, masih banyak sampah yang dibuang bukan pada tempatnya, buang air besar tidak di jamban, serta kebiasaan minum air mentah dan makan yang tidak didahului dengan cuci tangan.

Grafik di bawah menunjukkan persentase diare tahun 2024 mengalami kenaikan yaitu sejumlah 568 kasus. Target Penemuan Penderita Diare di Sarana adalah 90 persen. Kualitas pelayanan proporsi penderita diare balita rata-rata penggunaan oralit proporsi penderita diare pada balita yang diberi zink. Cakupan penanganan diare pada Kota Subulussalam belum maksimal, masih banyak

terjadinya kasus diare yang belum mendapatkan pelayanan yang memadai. Salah satu penyebab diare pada masyarakat adalah perilaku hidup bersih dan sehat yang belum baik, masih banyak sampah yang dibuang bukan pada tempatnya dan kebiasaan minum air mentah serta makan yang tidak di dahulukan dengan mencuci tangan terlebih dahulu.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.84.
Angka Kesakitan Diare di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

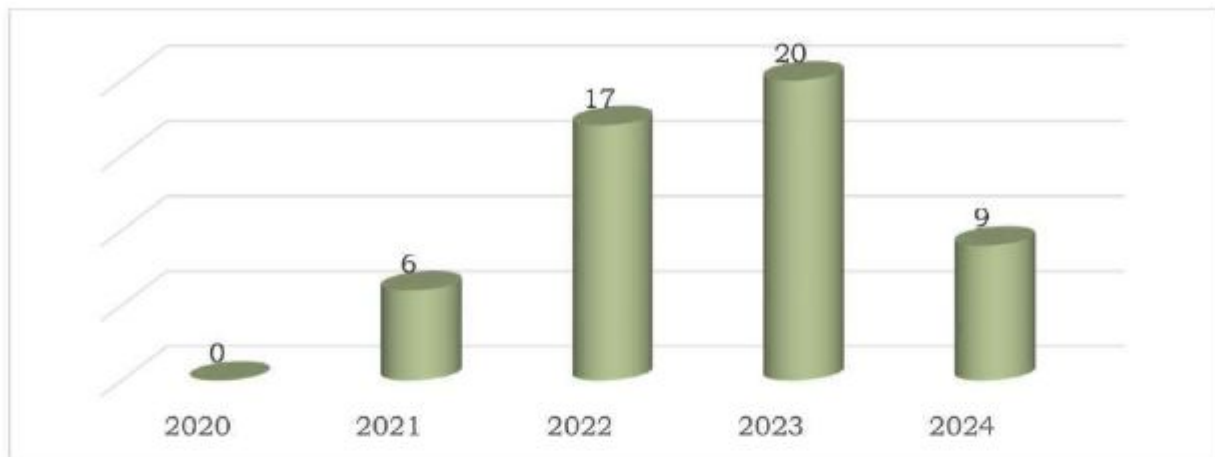
7) Demam Berdarah Dengue (DBD)

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue yang tergolong *Arthropod-Borne Virus*, genus *Flavivirus* dan famili *Flaviiviridae*. DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk dari genus *Aedes*, terutama *Aedes aegypti* atau *Aedes Albopictus*. Penyakit DBD dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat.

Grafik di bawah menunjukkan jumlah kasus DBD pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dari 20 kasus menjadi 9 kasus. Selain angka kesakitan, besaran masalah DBD juga dapat diketahui dari angka kematian atau CFR yang diperoleh dari proporsi kematian terhadap seluruh kasus yang dilaporkan. Tingginya kasus DBD di Kota Subulussalam pada tahun 2024 memerlukan langkah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Upaya edukasi kepada masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat agar segera memeriksakan diri ke sarana kesehatan jika ada anggota keluarganya yang memiliki gejala DBD. Hal ini menjadi penting sebagai pertolongan segera untuk mencegah keparahan dan komplikasi yang berujung pada fatalitas. Dinas Kesehatan Kota Subulussalam dan Puskesmas akan terus berupaya untuk menekan kasus DBD di Kota Subulussalam dengan

mensosialisasikan program 1 rumah 1 jumantik, *pilot project* kawasan bebas jentik dan GIRIJ.



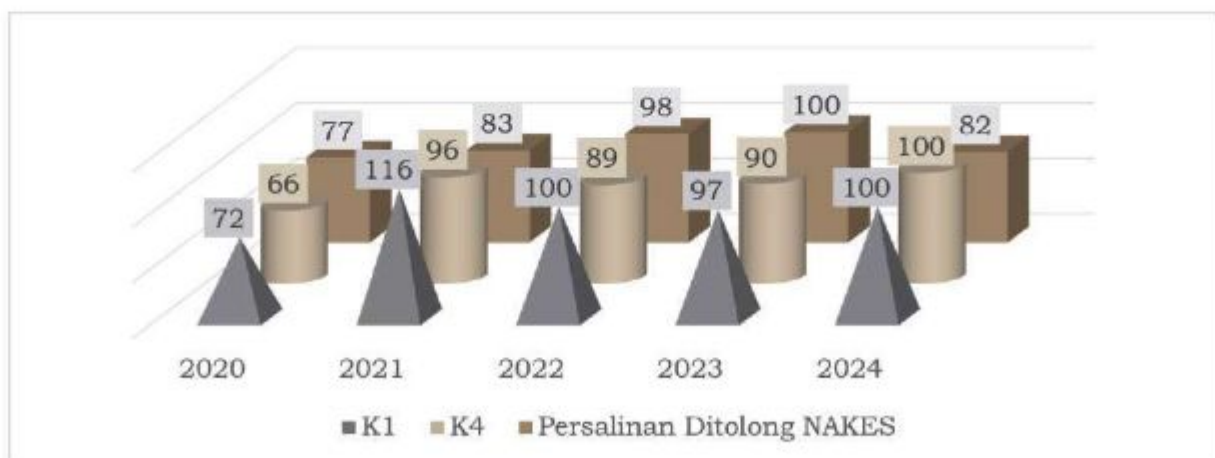
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.85.

Kasus Demam Berdarah Dengue di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

8) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil juga harus memenuhi frekuensi minimal di tiap trimester, yaitu satu kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), satu kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan dua kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu sampai persalinan). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan/atau janin berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan dan penanganan dini komplikasi kehamilan.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.86.

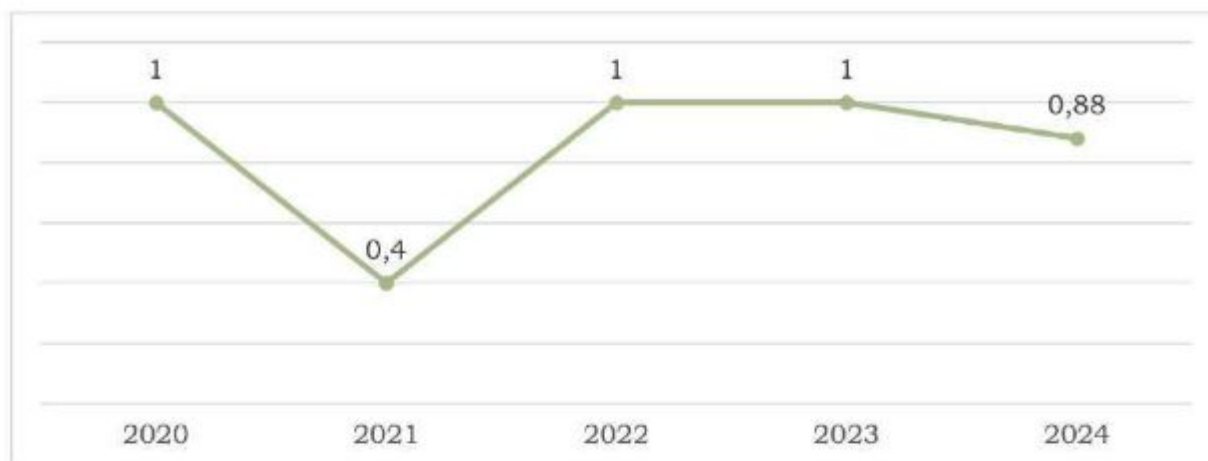
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang akan memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap trimester dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan.

Gambar di atas menunjukkan kunjungan K1, K4 di tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi masing-masing 100 persen. Sedangkan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil yang ditolong oleh tenaga kesehatan mengalami penurunan menjadi 82 persen. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian di atas adalah dengan menjalin kerjasama yang baik dalam melaksanakan pemantauan wilayah setempat antara Puskesmas dengan Bidan Praktik Swasta (BPS) yang berpraktik di wilayah kerja Puskesmas dibutuhkan, sehingga kunjungan K4 terpantau dan dilaporkan dengan baik. Diharapkan ke depan Puskesmas lebih meningkatkan forum komunikasi BPS di Puskesmas, sehingga kualitas dan kuantitas pemantauan dan pelaporan dari BPS ke Puskesmas akan semakin lebih baik dan lebih maksimal.

9) Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Persentase BBLR di Kota Subulussalam pada tahun 2024 yaitu 0,88 persen, yang artinya terdapat 88 bayi dari 1.000 bayi dengan berat badan lahir rendah. Bayi dengan berat badan lahir rendah ini rentan sakit atau mengalami infeksi, sedangkan dalam jangka panjang, bayi tersebut berisiko mengalami keterlambatan perkembangan motorik atau kemampuan dalam belajar. Semakin rendah berat badan bayi lahir maka semakin banyak masalah medis yang akan dihadapi, apalagi jika bayi tersebut terlahir prematur. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan BBLR ini dengan memperhatikan gizi ibu hamil dan pemeriksaan antenatal yang adekuat.

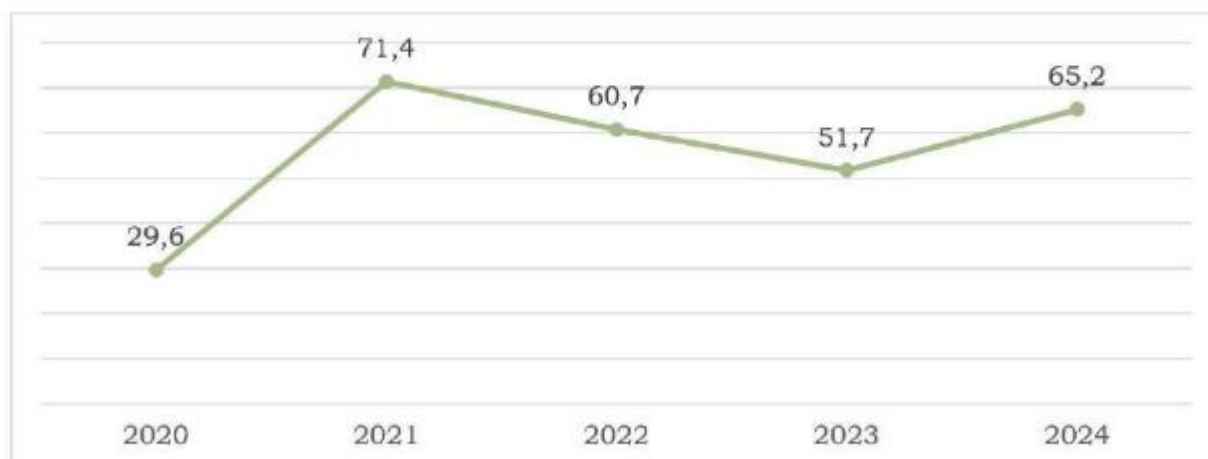


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.87.
Persentase Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

10) Pemberian ASI Eksklusif

Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi 0-6 bulan di Kota Subulussalam pada tahun 2024 mengalami penurunan dengan persentase 65,2 persen dibandingkan tahun 2021 yang sudah mencapai 71,4 persen. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan dengan program cakupan bayi berusia 6 bulan mendapat ASI Eksklusif. WHO merekomendasikan pemberian ASI secara eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan sampai usia 24 bulan. Mulai umur 6 bulan bayi mendapatkan makanan pendamping ASI yang bergizi sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya. Menyusui secara eksklusif adalah tidak memberikan bayi makanan dan minuman lain, termasuk air putih, selain menyusui (kecuali obat-obatan, vitamin/mineral tetes dan ASI perah).



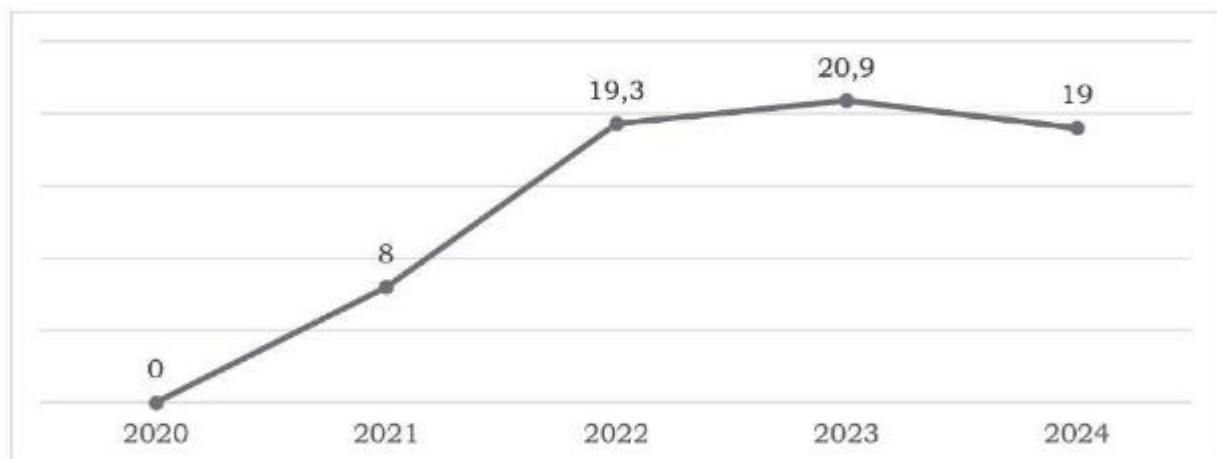
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.88.
Cakupan Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi 0-6 Bulan
di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

11) Angka kematian kasar/ *Gross Death Rate (GDR)* di Rumah Sakit

Angka kematian kasar (*Gross Death Rate/GDR*) di rumah sakit adalah angka kematian umum untuk setiap 1.000 pasien yang keluar rumah sakit, baik yang hidup maupun yang meninggal. GDR merupakan salah satu indikator untuk menilai kualitas pelayanan medis di rumah sakit. GDR dihitung berdasarkan jumlah kematian dalam periode tertentu dibagi dengan populasi yang berisiko meninggal dalam periode tersebut.

GDR RSUD Kota Subulussalam mengalami peningkatan sejak tahun 2020-2024. GDR Kota Subulussalam Tahun 2020 bahkan mencapai 0 kasus per 1.000 pasien keluar. Angka ini tentunya menjadi anomali mengingat kasus Covid-19 yang telah terjadi di Kota Subulussalam. Kemudian pada tahun 2021-2024 mengalami kenaikan dari 8 kasus per 1.000 pasien keluar menjadi 19 kasus per 1.000 pasien keluar.



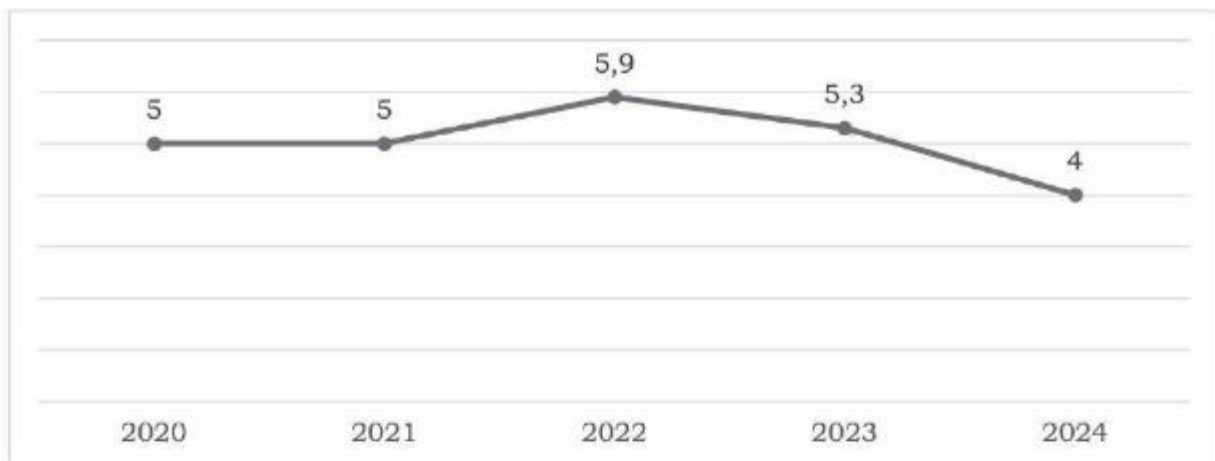
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.89.

Angka Kematian Kasar (*Gross Death Rate/GDR*) di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

12) Angka kematian murni/ *Nett Death Rate (NDR)* di Rumah Sakit

Nett Death Rate (NDR) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1.000 pasien yang keluar dari rumah sakit. NDR merupakan indikator yang menggambarkan kualitas pelayanan di rumah sakit. Nilai NDR yang masih dapat ditoleransi adalah 25 per 1.000.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.90.

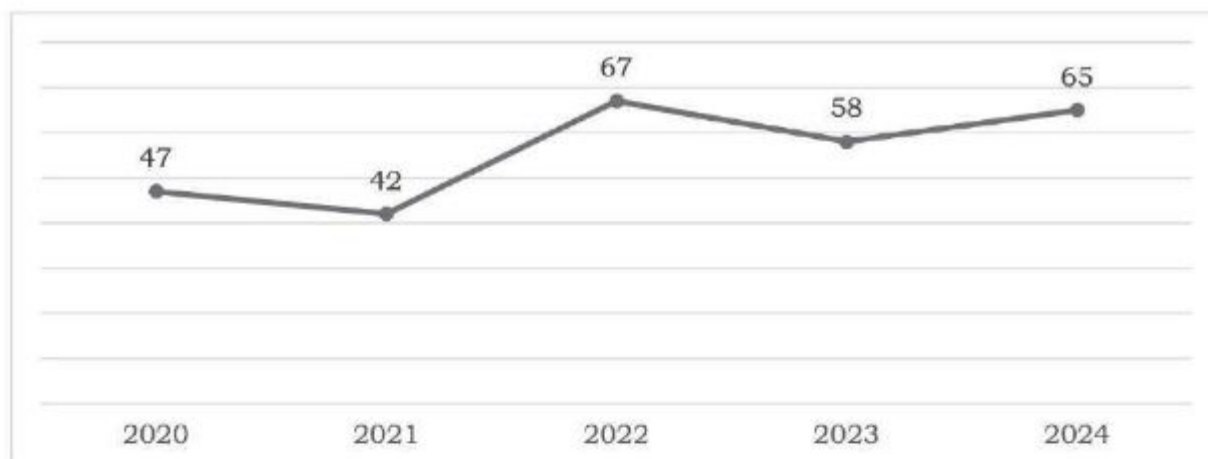
Angka kematian murni/ *Nett Death Rate* (NDR) di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

NDR RSUD Kota Subulussalam mengalami fluktuasi sejak tahun 2020-2024. NDR RSUD Kota Subulussalam berkisar pada angka 4 kasus per 1.000 pasien keluar. NDR tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu mencapai 59 kasus per 10.000 pasien keluar, lalu turun kembali pada tahun 2023 menjadi 53 kasus per 10.000 pasien keluar.

13) *Bed Occupation Rate* (BOR) di Rumah Sakit

Bed Occupancy Rate (BOR) adalah persentase pemakaian tempat tidur di rumah sakit pada satuan waktu tertentu. BOR merupakan salah satu indikator pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan fasilitas dan efisiensi pelayanan kesehatan. Nilai BOR yang ideal adalah antara 60-85 persen. BOR yang rendah menunjukkan kurangnya pemanfaatan fasilitas perawatan rumah sakit, sedangkan BOR yang tinggi menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur yang tinggi. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat BOR, antara lain: Ketersediaan sumber daya manusia, Ketersediaan sarana dan prasarana, Prosedur yang belum terstandarisasi, Peralatan dan perlengkapan, Modal atau investasi.

BOR RSUD Kota Subulussalam mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2022 yang memenuhi BOR yang ideal, lalu pada tahun 2024. BOR RSUD Kota Subulussalam Tahun 2024 hanya berkisar pada angka 65 persen.



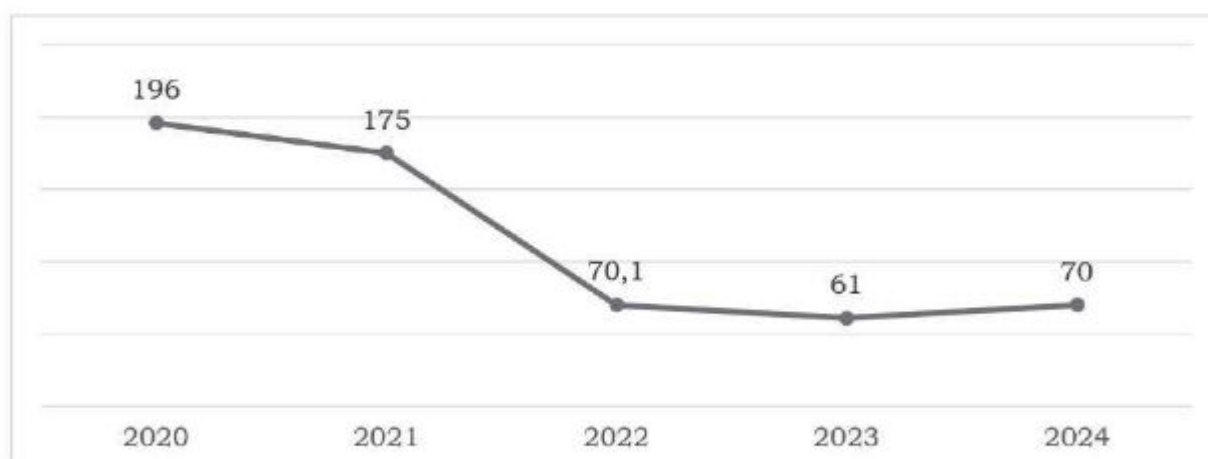
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.91.

Bed Occupancy Rate (BOR) di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

14) Bed Turn Over (BTO) di Rumah Sakit

Bed Turn Over (BTO) yaitu Angka perputaran tempat tidur atau frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. BTO RSUD Kota Subulussalam mengalami penurunan setiap tahunnya sejak 2020-2023. Pada tahun 2020-2021, BTO RSUD Kota Subulussalam berada di atas angka 100 kali, dan turun menjadi 70 kali pada tahun 2024. Angka ini tentunya masih jauh dari angka ideal.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.92.

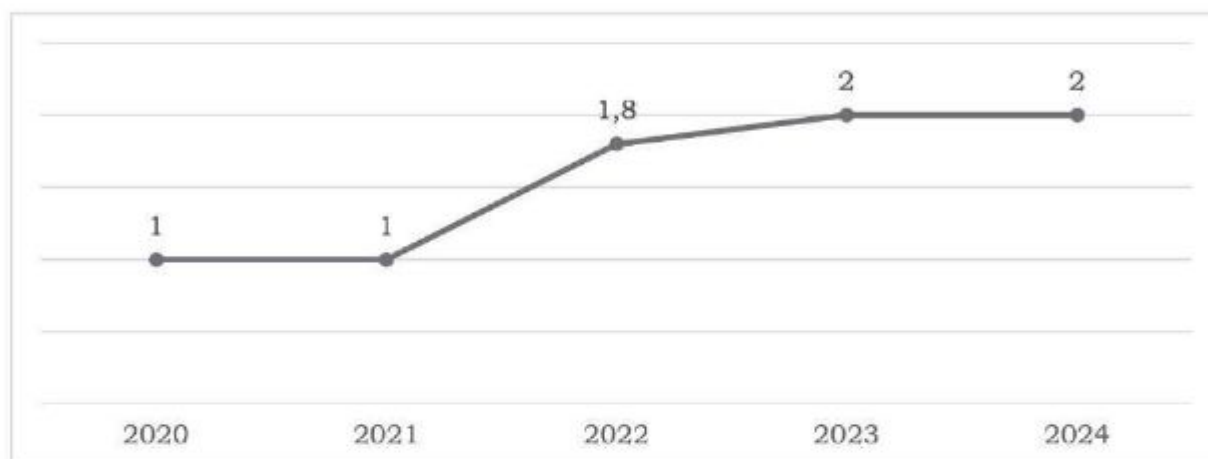
Bed Turn Over (BTO) di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

15) Turn of Interval (TOI) di Rumah Sakit

Turn Over Interval (TOI) adalah rata-rata hari di mana tempat tidur tidak ditempati setelah diisi oleh pasien sebelumnya. TOI merupakan indikator yang

menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur di rumah sakit. Nilai TOI yang ideal adalah antara 1–3 hari. Semakin besar nilai TOI, artinya semakin lama tempat tidur kosong dan tidak digunakan oleh pasien. Kondisi ini dapat membuat tempat tidur menjadi tidak produktif dan merugikan manajemen rumah sakit secara ekonomi.

TOI RSUD Kota Subulussalam mengalami peningkatan sejak 2020-2024, yaitu dari 1 hari menjadi 2 hari. Angka ini masih dalam ambang ideal TOI.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2024

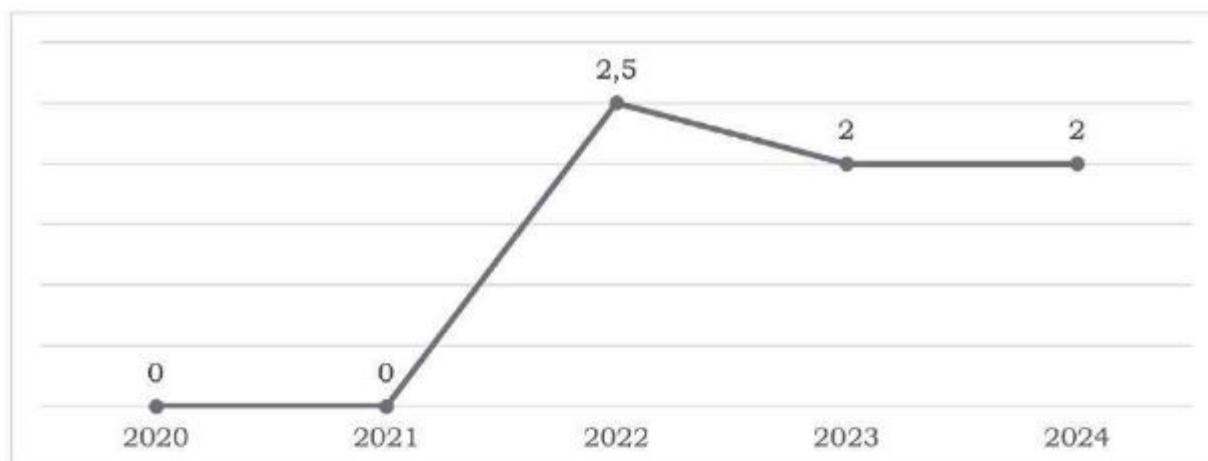
Gambar 2.93.

Turn of Interval (TOI) di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

16) Average Length of Stay (ALOS) di Rumah Sakit

Average Length of Stay (ALOS) adalah rata-rata lama rawat inap pasien di rumah sakit dalam satuan hari. ALOS dihitung dengan membagi jumlah total hari rawat semua pasien dengan jumlah pasien yang masuk atau keluar selama periode tertentu. Pasien rawat jalan tidak termasuk dalam perhitungan. ALOS yang ideal adalah 6-9 hari. Sedangkan untuk pasien BPJS, batas maksimal rawat inap hanya 3 hari.

ALOS RSUD Kota Subulussalam mengalami peningkatan sejak 2020-2024, yaitu dari 0 hari menjadi 2 hari. Pada tahun 2022, mengalami peningkatan hingga 2,5 hari. Angka ini dapat disebabkan oleh banyak pasien BPJS pada RSUD Kota Subulussalam.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.94.
Average Length of Stay (ALOS) di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

17) Posyandu

Posyandu di Kota Subulussalam setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Posyandu aktif tertinggi pada tahun 2022, yaitu mencapai 70,00 persen dari total 120 posyandu. Namun mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 47,00 persen dari 115 posyandu. Pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan menjadi 99,13 persen posyandu yang aktif. Begitu juga rasio posyandu per 100 balita berkisar pada angka 1,1-1,2.

Tabel 2.45.
Kondisi Posyandu di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Posyandu (Unit)	115	120	120	115	115
Posyandu Aktif (Persen)	57,00	39,00	70,00	47,00	114
Rasio Posyandu per 100 balita	1,1	1,2	1,2	1,1	99,13

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2025

2.4.4.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Kondisi Jalan

Berdasarkan *Data Base Jalan Tahun 2024* Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam bahwa provinsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Subulussalam pada tahun 2020-2024 cenderung meningkat. Pada tahun 2020, kondisi jalan baik di Kota Subulussalam meningkat pada tahun 2024, dari 149,2 Km menjadi 206,56 Km atau meningkat 38,45 persen.

Rendahnya persentase jalan kota dalam kondisi baik ini dapat disebabkan beberapa faktor yaitu dari faktor mutu jalan dimana jalan yang baru dibangun kurang dari 1 tahun sudah kembali rusak atau berlubang. Faktor selanjutnya adalah beban kendaraan yang melewati jalan tersebut melebihi batas beban/tonase dari kelas/mutu jalan sehingga jalan menjadi rusak kemudian faktor kebijakan dan perencanaan jalan yang masih bersifat parsial dan faktor terakhir dikarenakan terbatasnya pendanaan untuk pemeliharaan jalan.



Tabel 2.46.
Proporsi Panjang Jaringan Jalan di Kota Subulussalam Tahun 2020–2024

Kondisi Jalan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Baik (Km)	149,2	182,19	176,622	207,033	206,359
Sedang (Km)	96,01	182,58	108,077	66,961	76,805
Rusak (Km)	94,62	79,16	163,617	6,210	6,330
Rusak Berat (Km)	133,86	29,76	25,366	193,476	184,186
Total Panjang Jalan (Km)	473,69	473,69	473,69	473,680	473,680
Persentase jalan dalam kondisi Baik (Persen)	31,37	38,3	37,287	43,71	43,56
Persentase jalan dalam kondisi Sedang (Persen)	20,18	38,38	22,816	14,14	16,22
Persentase jalan dalam kondisi Rusak (Persen)	19,89	16,64	34,542	1,32	1,34
Persentase jalan dalam kondisi Rusak Berat (Persen)	28,14	6,26	5,3547	40,84	38,88

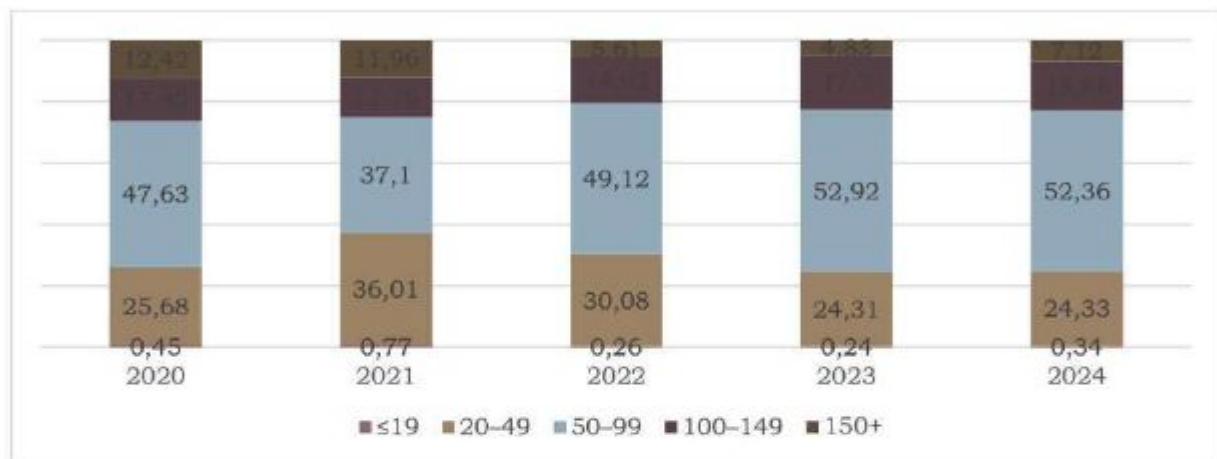
Sumber: Dinas PUPR Kota Subulussalam, 2024

2.4.4.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai (meter persegi)

Sebagian besar rumah tangga di Kota Subulussalam memiliki luas lantai antara 50-99 meter persegi. Kurang 1 persen rumah tangga yang memiliki luas lantai kurang dari 19 meter persegi. Sedangkan untuk rumah tangga yang memiliki luas lantai lebih dari 150 meter persegi hanya 7,12 persen pada tahun 2024.

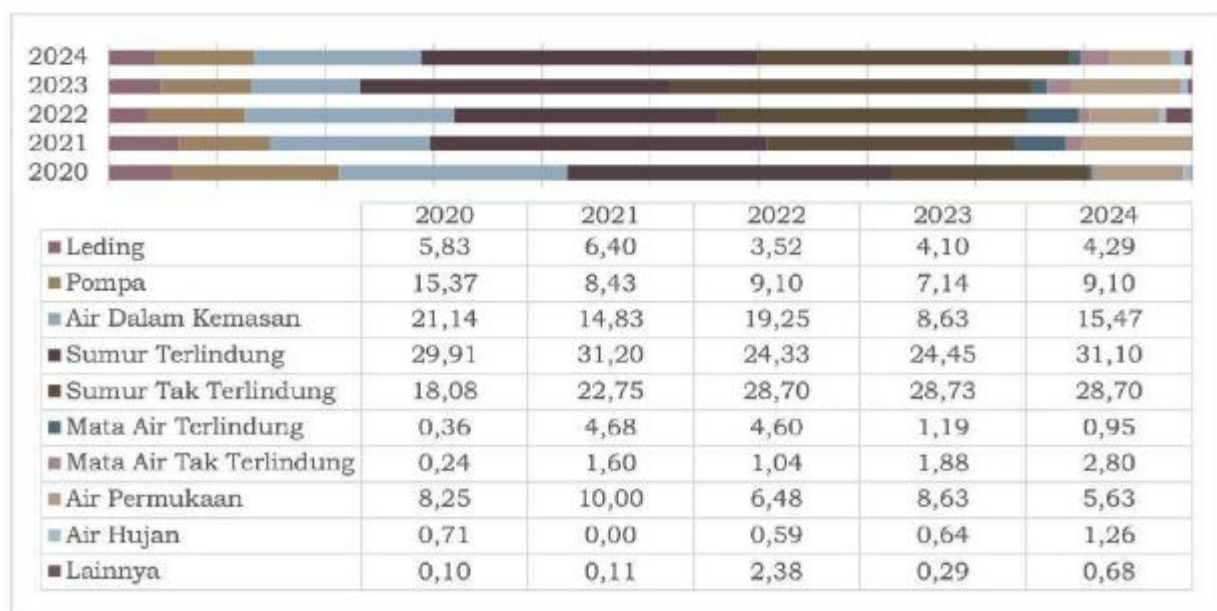
2) Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum



Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, 2024

Gambar 2.95.

Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai (meter persegi)



Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, 2024

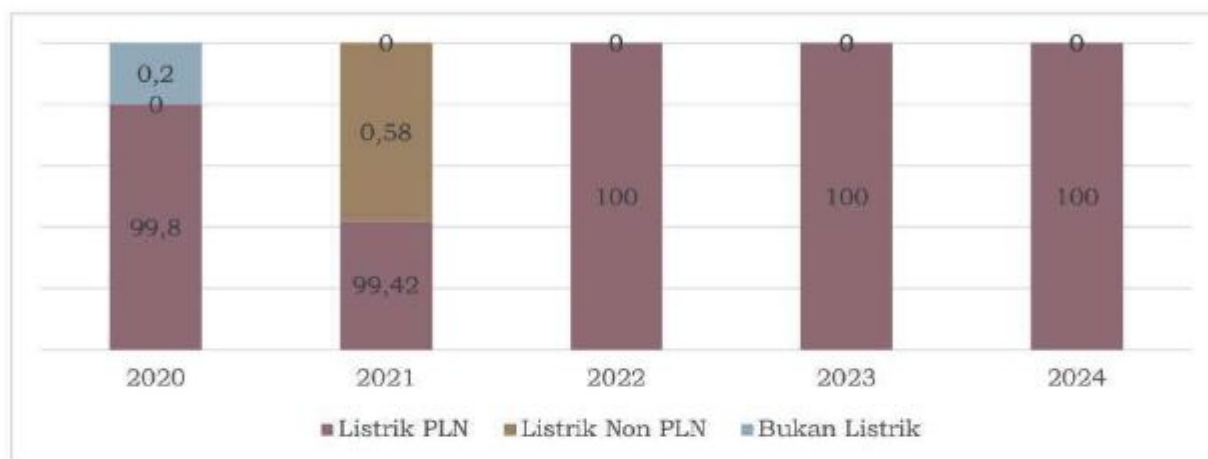
Gambar 2.96.

Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum

Dalam 5 tahun terakhir, sebagian besar rumah tangga di Kota Subulussalam memiliki sumber air minum sumur dan air kemasan. Kurang 6 persen rumah tangga yang bersumber air minum dari mata air.

3) Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan

Penggunaan sumber penerangan dari Listrik PLN pada tahun 2024 mencapai 100,00 persen. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2021, yaitu 99,42 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, 2024

Gambar 2.97.
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan
Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

4) Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar



Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Subulussalam, 2023

Gambar 2.98.
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan
Fasilitas Buang Air Besar

Selama 5 tahun terakhir, sebagian besar rumah tangga di Kota Subulussalam menggunakan fasilitas buang air besar Sendiri. Pada tahun 2024, masih terdapat 5,36 persen rumah tangga yang belum memiliki fasilitas buang air besar. Hal ini merupakan catatan penting dalam meningkatkan rumah layak huni di Kota Subulussalam. Selain itu, perlu meningkatkan kesadaran PHBS ke masyarakat Kota Subulussalam.

5) Persentase areal kawasan kumuh

Berdasarkan Surat keputusan Wali Kota Subulussalam Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Subulussalam, luas kawasan kumuh di Kota Subulussalam seluas 320,17 Ha. Pada tahun 2021, belum terdapat perubahan SK terkait kawasan kumuh. Angka ini tidak ada berubah sejak tahun 2020-2023, yaitu 0,24 persen. Namun angka ini meningkat pada tahun 2024 menjadi 0,26 persen. Persentase Areal Kawasan Kumuh di Kota Subulussalam tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.47.

Persentase Areal Kawasan Kumuh di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase areal kawasan kumuh	0,24	0,24	0,24	0,24	0,26

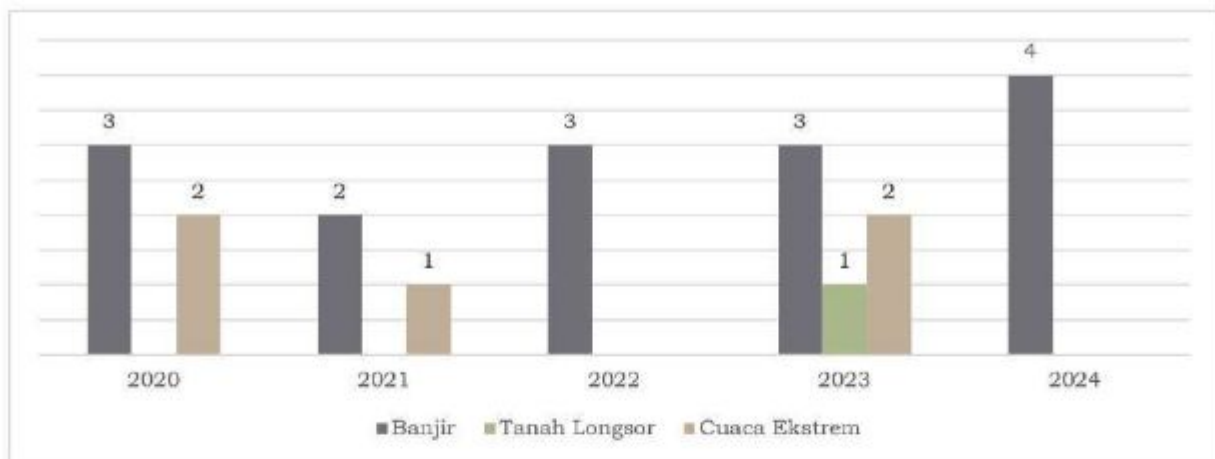
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam, 2025

Penanganan kawasan kumuh terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Subulussalam dengan berkolaborasi program Kotaku pemerintah pusat. Penanganan kawasan kumuh serta pembangunan rumah layak huni termasuk di dalamnya merupakan program prioritas.

2.4.4.5. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Bencana Daerah

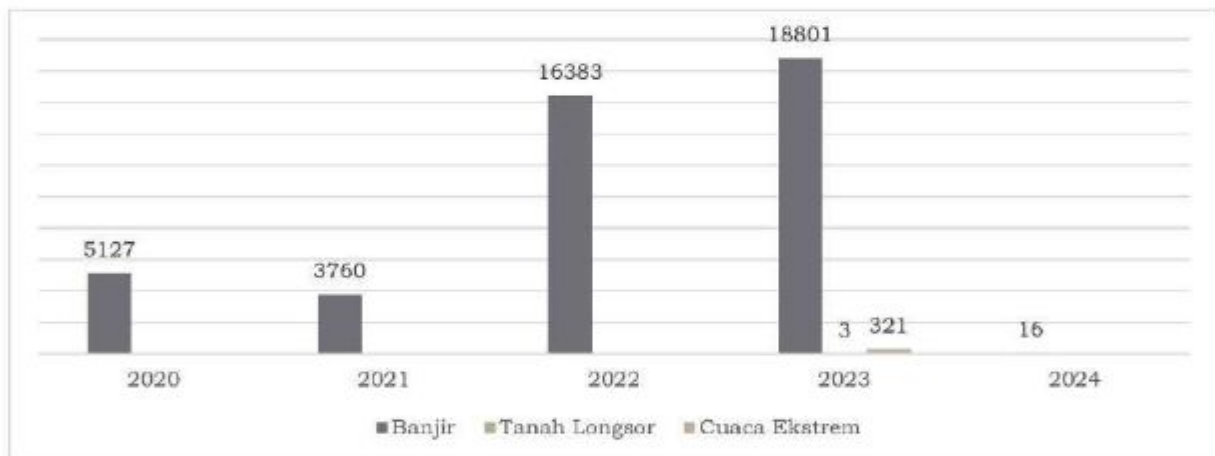
Jumlah korban bencana akibat bencana hidrometeorologis mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Jumlah korban tertinggi diakibatkan oleh bencana banjir yang berasal dari Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Longkib, dan Kecamatan Rundeng yang merupakan daerah aliran sungai Lae Soraya. Jenis bencana yang sering terjadi di Kota Subulussalam adalah banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.



Sumber : BNPB, 2025

Gambar 2.99.
Jumlah Bencana Hidrometeorologis di Kota Subulussalam

Sedangkan untuk korban, banjir merupakan penyumbang korban bencana tertinggi. Meskipun demikian, korban bencana banjir hanya sebatas mengungsi dan tidak menyebabkan korban jiwa. Sedangkan untuk tanah longsor memakan korban jiwa sebanyak 3 orang pada tahun 2023.



Sumber : BNPB, 2025

Gambar 2.100.
Jumlah Korban Bencana Hidrometeorologis di Kota Subulussalam

Dengan adanya bencana hidrometeorologis tersebut, dapat berdampak pada daerah, di antaranya:

- 1) Dampak sosial seperti korban jiwa dan pengungsian, gangguan pendidikan dan konflik sosial;
- 2) Dampak ekonomi seperti kerugian materi langsung, penurunan produktivitas dan kemiskinan;

- 3) Dampak infrastruktur seperti rusaknya jaringan transportasi, gangguan listrik dan komunikasi dan risiko kesehatan masyarakat;
- 4) Dampak jangka panjang seperti ketahanan pangan terganggu, migrasi penduduk dan beban fiskal pemerintah daerah.

2.4.4.6. Bidang Urusan Sosial

1) Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Sejalan dengan perkembangan kondisi sosial saat ini, jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) turut meningkat secara kuantitas maupun kompleksitasnya termasuk bentuk permasalahan kesejahteraan sosial kontemporer. Semakin meningkatnya kondisi kemajuan masyarakat terutama PMKS ini tercermin pada indikator sosial, antara lain meningkatnya jangkauan pelayanan sosial, menurunnya jumlah PMKS, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS, serta semakin tumbuh berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial. Berikut akan disajikan jumlah PMKS di Kota Subulussalam yang tertangani.

Data PMKS di Kota Subulussalam dari tahun ke tahun secara jumlah terbesar adalah Fakir Miskin, lanjut usia/Jompo, penyandang disabilitas, perempuan rawan sosial ekonomi dan Korban Narkotika. Pemberian jaminan sosial rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial perlu diprioritaskan untuk kelompok tersebut tanpa mengesampingkan intervensi untuk PMKS lainnya.

Berbagai program dan kegiatan pelayanan sosial telah dilaksanakan oleh pemerintah, seperti: pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial. Namun demikian, upaya-upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan jika dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilaksanakan. Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial dan hambatan tersebut, menimbulkan tantangan ke depan bagi Kota Subulussalam adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS.

2) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Data DTKS menunjukkan terdapat penurunan jumlah penduduk DTKS di Kota Subulussalam sejak 2021-2024. Begitu juga dengan jumlah KK. DTKS tertinggi terdapat pada kecamatan Simpang Kiri dan terendah dari Kecamatan Longkib.



Sumber : Dinas Sosial , 2025

Gambar 2.101.
Rekapitulasi Penduduk yang tergolong DTKS
di Kota Subulussalam Tahun 2021-2024



Sumber : Dinas Sosial , 2025

Gambar 2.102.
Rekapitulasi Keluarga yang tergolong DTKS
di Kota Subulussalam Tahun 2021-2024

Tabel 2.48.
Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

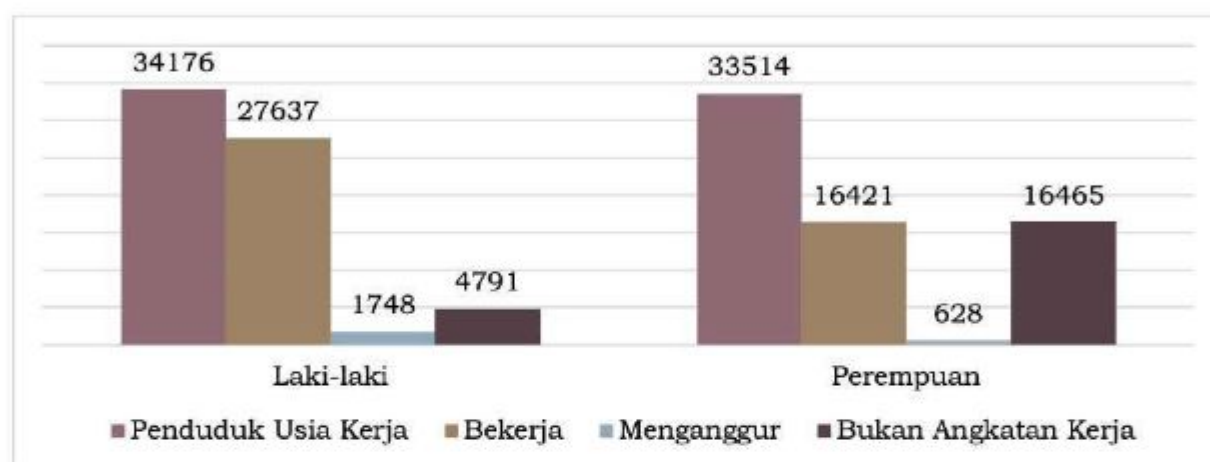
Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Anak Terlantar	1.191	1.108	1.065	946	3
Anak Nakal	0	0	0	14	4
Korban Narkotika	2	1	1	27	34
Penyandang Cacat	455	401	373	393	403
Gelandangan dan Pengemis	3	3	5	0	0
Tuna Susila	2	2	2	6	6
Fakir Miskin	26.493	26.493	26.493	6054	6749
Anak Wanita dan Lansia Korban Tindak Kekerasan	2	2	1	1	0
Orang dengan HIV/AIDS	0	0	0	0	0
Bekas Narapidana	55	50	53	67	76
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	1.096	911	917	924	896
Keluarga berumah Tidak Layak Huni	1.974	1.795	1.730	1004	1003
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	6	15	13	18	21
Anak Balita Terlantar	0	0	0	0	0
Anak Jalanan	0	0	0	0	0
TOTAL	31.998	31.502	31.370	9.454	9.195

Sumber: Dinas Sosial Kota Subulussalam, 2025

2.4.4.7. Bidang Urusan Tenaga Kerja

1) Penduduk Usia Kerja

Pengamatan terhadap sejumlah data Penduduk Usia Kerja di Kota Subulussalam, Jumlah penduduk usia kerja (PUK) atau penduduk 15 tahun ke atas di Kota Subulussalam pada 2024 diperkirakan mencapai 67.690 orang. Ditinjau dari aspek gender, jumlah penduduk usia kerja laki-laki tercatat sebanyak 34.176 orang atau 50,49 persen sebanding dengan PUK perempuan yaitu 33.514 orang atau 49,51 persen dari keseluruhan penduduk usia kerja.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025

Gambar 2.103.
Jumlah Penduduk Usia Kerja Kota Subulussalam Tahun 2024

Upaya-upaya terus dilakukan selama satu dekade pemerintahan Kota Subulussalam, melalui instansi terkait setiap tahun dilakukan pelatihan-pelatihan bagi angkatan kerja baik yang terdaftar maupun untuk usia angkatan kerja lain.

2) Jumlah Program BLK

Tabel 2.49.
Program Balai Tenaga Kerja Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Program Pelatihan	8	5	10	15	11
Jumlah BLK	1	1	1	1	1

Sumber : Disnakertrans Kota Subulussalam, 2025

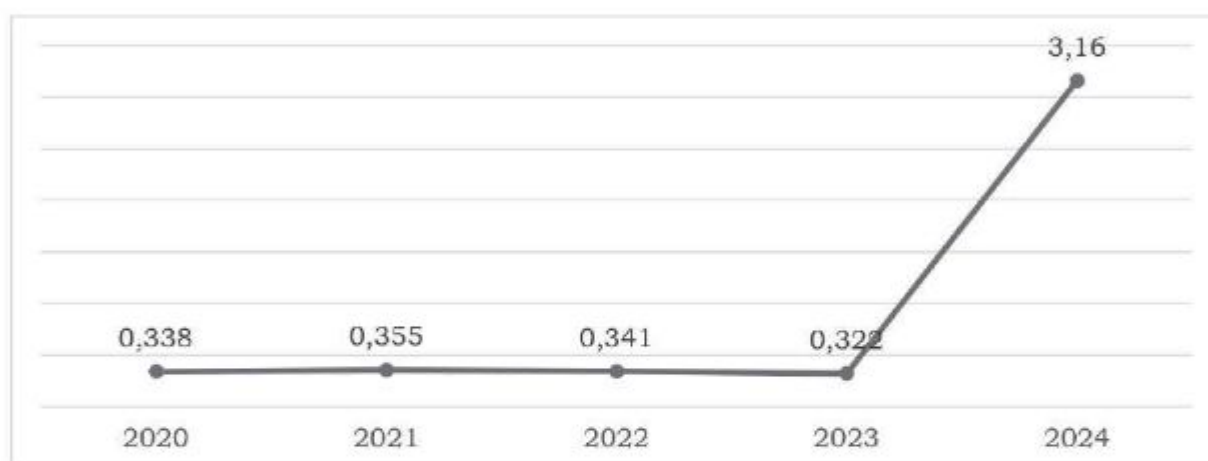
Jumlah Program Pelatihan pada BLK Kota Subulussalam mengalami kenaikan sejak tahun 2020 hingga 2024. Tercatat pada tahun 2020 jumlah BLK Kota Subulussalam sebesar 8 program, meningkat pada tahun 2024 menjadi 11 program. Dengan meningkatnya program BLK setiap tahunnya, juga mendukung

peningkatan kewirausahaan di Kota Subulussalam. Diharapkan kedepannya dapat membuka lapangan pekerjaan bagi usaha wirausaha muda.

2.4.4.8. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Perempuan Melahirkan Berumur Kurang 20 Tahun

Angka perempuan melahirkan berumur kurang dari 20 tahun di Kota Subulussalam mengalami penurunan sejak 2020. Meskipun mengalami kenaikan pada tahun 2021, namun pada tahun 2024 mengalami kenaikan hingga angka 3,16 persen. Angka ini tentunya menjadi perhatian khusus untuk memberikan pelayanan keluarga sejahtera dan meningkatkan kesiapan ibu hamil.



Sumber : Sistem Informasi Keluarga, 2024

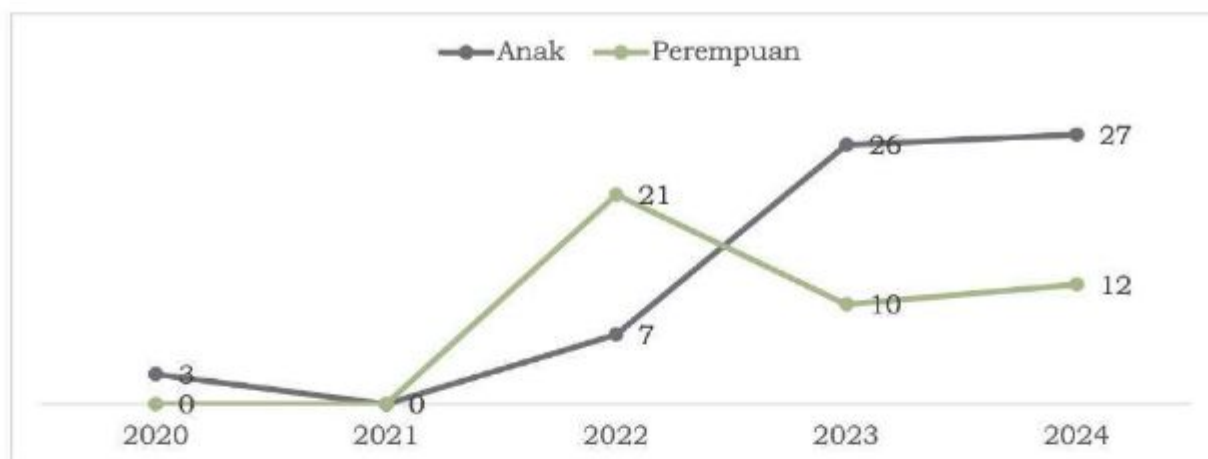
Gambar 2.104.

**Proporsi Perempuan Pernah Kawin 15-49 tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Yang Pertama Kali Berumur Kurang dari 20 tahun
Kota Subulussalam Tahun 2020-2024**

Pernikahan dini, kenakalan remaja yang mengarah pada kehamilan di luar nikah dan usia sekolah, kemiskinan, rendahnya pendidikan seksual, akses terbatas terhadap layanan KB, rendahnya kontrol orang tua serta dispensasi nikah oleh pengadilan agama menjadi beberapa penyebab perempuan melahirkan berumur kurang 20 tahun.

2) Kekerasan Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani di Kota Subulussalam meningkatkan setiap tahunnya sejak tahun 2020. Kekerasan pada anak tertinggi terjadi pada tahun 2024 mencapai 27 kasus. Sedangkan kekerasan pada perempuan tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu mencapai 21 kasus.



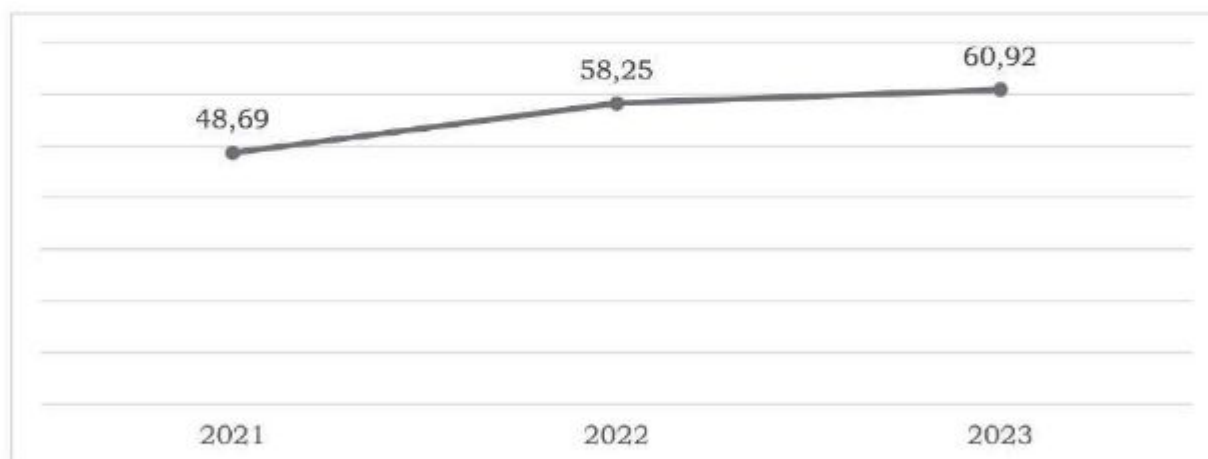
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, 2024

Gambar 2.105.

Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang Ditangani Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

3) Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)

Capaian Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) di Kota Subulussalam mengalami kenaikan sejak tahun 2021. Pada tahun 2021, IPHA Kota Subulussalam sebesar 48,69 dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 60,92. Hal ini menunjukkan pembangunan di Kota Subulussalam dengan memerhatikan pemenuhan hak anak terus dilaksanakan setiap tahunnya.



Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

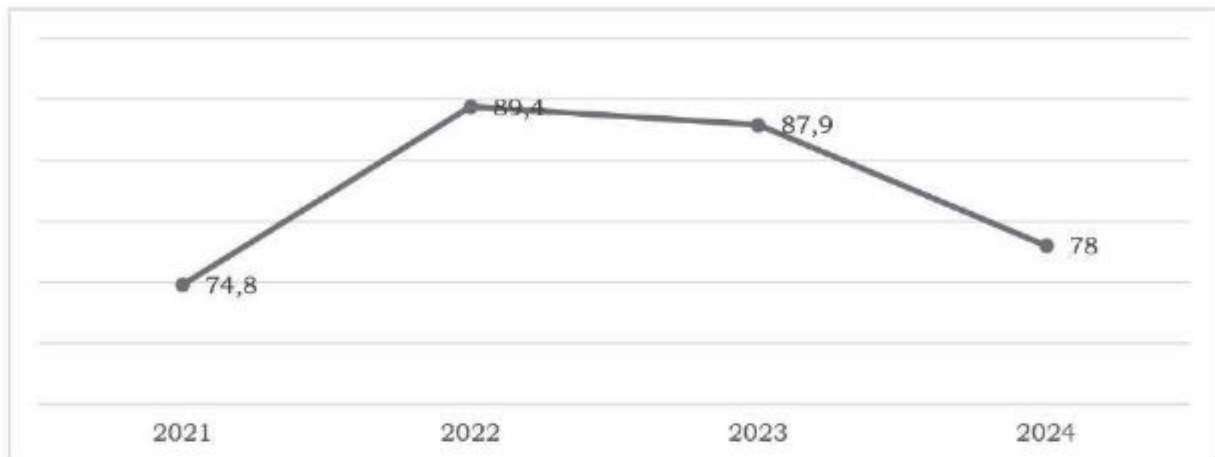
Gambar 2.106.

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Kota Subulussalam Tahun 2021-2023

2.4.4.9. Bidang Urusan Pangan

Skor Pola Pangan Harapan

Skor pola pangan harapan (PPH) Kota Subulussalam sejak tahun 2021-2024 mengalami kenaikan, dari 74,8 menjadi 78. Puncak PPH tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu 89,4.



Sumber : BPS Aceh, 2025

Gambar 2.107.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Subulussalam Tahun 2021-2024

Beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya skor PPH adalah:

- a. Faktor ketersediaan pangan seperti gagal panen dan ketergantungan impor dari kabupaten/kota lain;
- b. Faktor ekonomi dan harga pangan seperti inflasi harga pangan pokok dan daya beli masyarakat rendah;
- c. Faktor sosial dan budaya seperti kebiasaan konsumsi tidak beragam dan urbanisasi (cenderung mengonsumsi makan cepat saji);
- d. Faktor kebijakan dan distribusi;
- e. Faktor lingkungan dan kesehatan seperti degradasi lahan pertanian.

2.4.4.10. Bidang Urusan Pertanahan

1) Sertifikat Tanah

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Kota Subulussalam melaksanakan urusan wajib pertanahan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya. Selain kedudukan sebagai daerah otonom, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kekhususan Aceh, Pemerintah Kota Subulussalam juga berkedudukan sebagai daerah Otonomi Khusus dimana Urusan Pertanahan menjadi salah satu urusan yang diamanahkan sebagai urusan kekhususan.

Secara umum permasalahan sektor pertanahan di Kota Subulussalam, tidak dapat dilepaskan dari persoalan perkembangan wilayah sebagaimana terjadi di wilayah-wilayah lain dan adanya Kekhususan urusan pertanahan. Berkenaan dengan hal tersebut permasalahan sektor pertanahan di Kota Subulussalam berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, objeknya dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yakni:

- 1) permasalahan pertanahan secara umum berhubungan dengan masyarakat; dan
- 2) permasalahan pertanahan terkait dengan tanah aset pemerintah Kota Subulussalam.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanahan salah satunya dapat dilihat dari persentase luas lahan bersertifikat. Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan/mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian di dalam kepemilikan lahan. Semakin besar lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah. Administrasi pertanahan di Kota Subulussalam sepertinya belum sesuai dengan yang diharapkan. Banyaknya sertifikat tanah yang dikeluarkan menurut jenis hak atas tanah di Kota Subulussalam tahun 2020–2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.50.
Banyaknya Sertifikat Tanah yang di Keluarkan Menurut Jenis Hak Atas Tanah di Kota Subulussalam Tahun 2020-2023

Uraian	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Hak Milik	809	3.427	2.408	1797
Hak Guna Bangunan	164	62	3	5
Hak Guna Usaha	0	13	0	31
Hak Pakai	8	27	12	18
Tanah Wakaf	0	0	1	0

Sumber: Dinas Pertanahan Kota Subulussalam, 2025

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan di Kota Subulussalam antara lain tingkat pemahaman masyarakat yang rendah, banyaknya status kepemilikan tanah yang tumpang tindih. Upaya Pemerintah Kota Subulussalam untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan menyediakan fasilitas dan SDM Kota Subulussalam di Bidang Pertanahan, menyediakan fasilitas bebas biaya pengurusan sertifikat tanah untuk masyarakat miskin dengan proda dan prona, melakukan identifikasi potensi lahan yang dapat

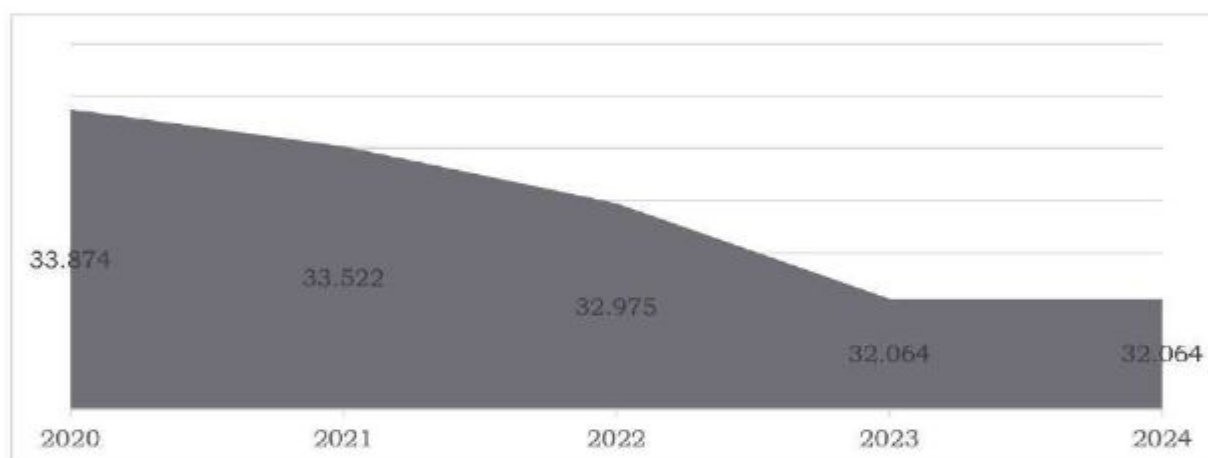
dimanfaatkan untuk pertanian dari lahan yang diterlantarkan oleh pemegang HPH dan HGU di wilayah Kota Subulussalam.

2) Sengketa Tanah

Hingga 2024, belum ada sengketa tanah negara yang diselesaikan.

2.4.4.11. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Wilayah tutupan hutan di Kota Subulussalam mengalami penurunan sejak tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, tutupan hutan di Kota Subulussalam seluas 33.874 hektar, lalu menurun menjadi 32.064 hektar pada tahun 2024. Selain itu, ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Subulussalam belum ada pendataan secara menyeluruh untuk penetapan dan luas RTH terbaru.



Sumber : BPS Aceh, 2025

Gambar 2.108.
Luas Tutupan Lahan di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024



Tabel 2.51.
Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

No.	Kabupaten/Kota	Luas RTH (Ha)					Letak Kota	Luas Wilayah Kota	Besar Persentase RTH
		2020	2021	2022	2023	2024		(Ha)	≤ 10%
1	Kota Subulussalam	1.809,64	1809,64	1.809,64	1.809,64	1.809,64	Kota Subulussalam	139.100,00	1,3

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2024

2.4.4.12. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Penduduk Ber E-KTP

Indikator ini dapat menggambarkan tertib administrasi kependudukan dan salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Gambaran rinci jumlah penduduk yang telah memiliki kartu tanda penduduk disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.52.
Persentase Penduduk Ber-EKTP di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jlh. Penduduk yang memiliki KTP	64.999	69.241	71.852	62.277	66.169
Jlh. Penduduk yang wajib KTP >17 thn	55.871	60.001	62.883	65.880	67.003
Rasio	1,16	1,15	1,14	1,05	0,99

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, 2025

Tahun 2020, jumlah penduduk wajib memiliki KTP sebanyak 64.999 orang dari total jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 55.871 orang atau dengan kata lain persentase angka perekaman KTP elektronik telah lebih 100 persen. Jumlah penduduk wajib KTP terus meningkat setiap tahunnya pada tahun 2024. Pada tahun 2024, jumlah penduduk yang memiliki KTP sebanyak 66.169 orang.

2) Rasio bayi Berakte Kelahiran

Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama. Jumlah bayi yang berakte kelahiran di Kota Subulussalam pada tahun 2025 mencapai 13.796 bayi dengan bayi yang telah memiliki akte kelahiran sebanyak 0,96. Rasio bayi berakte kelahiran di Kota Subulussalam tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.53.
Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jlh. Bayi lahir berakte kelahiran (org)	12232	12232	10.572	13.631	13.796
Jlh. Keseluruhan Bayi yang Lahir Hidup(org)	1766	1513	1.739	4.246	14.307
Rasio	6,93	8,02	6,08	3,21	0,96

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, 2025

Rasio bayi berakte kelahiran pada tahun 2024 adalah 0,96 yang mengindikasikan jumlah akte kelahiran yang dikeluarkan tidak mencakup keseluruhan bayi. Namun menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Subulussalam khususnya dinas yang terkait untuk dapat melakukan dan tindakan agar akta kelahiran dengan mudah diperoleh. Hal-hal yang dapat dilakukan misalnya dinas catatan sipil dan kependudukan dapat melakukan kerjasama dengan rumah sakit, bidan, klinik bersalin agar setiap anak yang lahir pihak keluarga bayi dapat secara langsung mendapatkan akta kelahiran.

3) Rasio Pasangan Berakte Nikah

Rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah berakte nikah terhadap jumlah keseluruhan pasangan yang telah menikah. Rasio pasangan berakte nikah di Kota Subulussalam tahun 2020-2024 mengalami kenaikan dari 0,41 di tahun 2020 meningkat menjadi 0,54 pada tahun 2024. Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah pasangan nikah di Kota Subulussalam masih banyak yang belum memiliki akte nikah. Jumlah persentase pasangan berakte nikah tersebut masih tergolong rendah, terdapat jumlah pasangan sebesar 46,00 persen yang belum memiliki akte nikah.

Tabel 2.54.
Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jlh. Pasangan yang telah Berakte Nikah	15.902	18.250	21.102	22.467	23.372
Jumlah Keseluruhan pasangan Nikah	38.568	39.845	41.809	43.080	44.353
Rasio	0,41	0,46	0,50	0,52	0,54

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, 2024

Hal ini dapat disebabkan seperti :

- kurangnya pemahaman pasangan menikah terhadap pentingnya tertib administrasi nikah;
- banyaknya pasangan nikah yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA); dan
- rendahnya sosialisasi tentang pentingnya pencatatan administrasi nikah.

2.4.4.13. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka dari itu pemerintah perlu terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu indikatornya adalah tersedianya perkantoran pemerintahan desa di setiap desa. Berikut disajikan cakupan kantor pemerintahan desa di Kota Subulussalam pada Tabel berikut.

Tabel 2.55.
Cakupan Kantor Pemerintahan Desa di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jlh. Kantor Desa	47	47	47	47	47
Jlh. Seluruh Pemerintahan Desa	82	82	82	82	82
Persentase (Persen)	57,32	57,32	57,32	57,32	57,32

Sumber: DPMK Kota Subulussalam, 2024

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung memberikan informasi bahwa hingga tahun 2024 Sudah 47 kampung yang memiliki kantor Desa tetap, jumlah ini masih jauh dari harapan dikarenakan jumlah kampung di Kota Subulussalam mencapai 82 kampung atau sekitar 50 persen dari total kampung yang memiliki kantor, selebihnya masih dalam status penyewaan.

Pemerintah Kota Subulussalam mengupayakan pembangunan kantor pemerintahan kampung secara bertahap sehingga seluruh desa/kampung memiliki kantor pemerintahan yang tetap.

2) BUMDes yang aktif

BUMDes merupakan Badan Usaha Milik Desa yang dikelola oleh pemerintah Kampung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes, setiap pemerintah kampung mendaftarkan BUMDes pada Portal BUMDes yang disediakan. Hingga tahun 2022, terdapat 71 Kampung yang telah membentuk BUMDes (86,59 persen). Dari 71 kampung tersebut, terdapat 41 kampung yang telah mendaftar pada Portal BUMDES atau sebanyak 57,75 persen. Hanya terdapat 1 BUMDes yang telah berbadan hukum dari 71 BUMDes yang terbentuk.

2.4.4.14. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Subulussalam tahun 2020 adalah sebesar 2,91 persen, menurun pada tahun 2024 yaitu 2,70 persen. Jumlah persentase tersebut merupakan kategori tinggi dalam klasifikasi pertumbuhan penduduk. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kota Subulussalam sangat berhubungan dengan letak strategis Kota Subulussalam sebagai jalur lintas Aceh-Sumatera Utara dan memiliki tingkat aktivitas perekonomian yang beragam dan cepat. Daerah ini menjadi daya tarik beberapa investor yang bergerak dibidang perkebunan, industri tambang, perumahan, perbankan, industri makanan dan minimarket/retail waralaba, sehingga banyak penduduk di Kota Subulussalam datang dari luar dan menetap di Kota Subulussalam.

2) Rasio Akseptor KB

Besarnya angka partisipasi KB (*akseptor*) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Data rasio akseptor KB merupakan jumlah akseptor KB yang terdiri dari akseptor KB laki-laki dan akseptor KB perempuan sebagaimana tercantum dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.56.
Rasio Akseptor KB dan Jumlah Pasangan Usia Subur
di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Akseptor KB	82,77	82,77	47,64	18,70	83,33
Jumlah Akseptor KB	25.388	25.388	6.745	2.784	18.281
Jumlah pasangan usia subur	30.673	30.673	14.158	14.882	15.836

Sumber: DP3AKB Kota Subulussalam, 2024

Adanya jumlah pasangan usia subur yang menggunakan akseptor KB sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 terjadinya fluktuasi jumlah pengguna akseptor KB. Semakin tinggi penggunaan akseptor KB semakin tinggi juga penanganan jumlah penduduk yang meningkat.

3) Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah usia 15-49 Tahun

Pemakaian kontrasepsi bagi pasangan usia subur yang menikah sampai pada tahun 2023 mencapai 82,77 persen. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 18,7 persen. Ke depan Pemerintah Kota Subulussalam dapat melakukan sosialisasi dan penyuluhan lebih aktif dan berkelanjutan. Berikut

jumlah pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 tahun sejak tahun 2020-2024 pada Tabel di bawah.

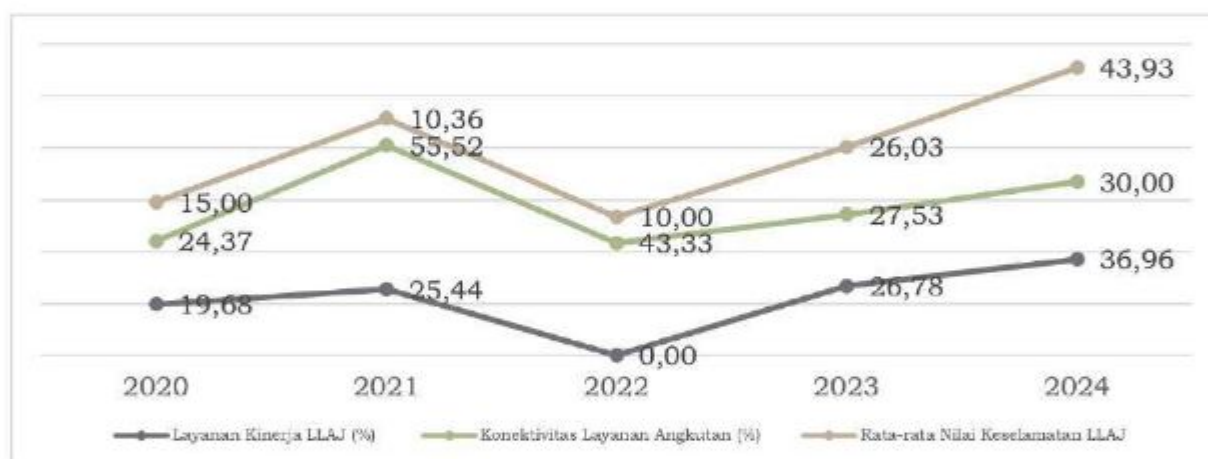
Tabel 2.57.
Tabel Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (%)	82,77	82,77	47,64	18,7	83,32
Jumlah peserta KB Aktif	25.388	25.388	6.745	2.784	10.565
Jumlah pasangan usia subur	30.673	30.673	14.158	14.882	15.386

Sumber: DP3AKB Kota Subulussalam, 2024

2.4.4.15. Bidang Urusan Perhubungan

1) Layanan Lalu Lintas Angkutan Jalan



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.109.
Layanan Kinerja LLAJ Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Persentase Layanan Kinerja LLAJ Kota Subulussalam mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada Tahun 2020 sebesar 19,68 persen lalu meningkat pada tahun 2024 menjadi 36,96 persen. Begitu juga 2 komponen pendukungnya, mengalami peningkatan sejak 2020-2024.

2) Izin Trayek

Dinas Perhubungan Kota Subulussalam menginformasikan bahwa sampai saat ini Kota Subulussalam belum mengeluarkan izin trayek. Hal ini disebabkan

sarana dan prasarana yang tersedia belum difungsikan sebagaimana mestinya dan terbatasnya SDM di bidang pengujian kendaraan bermotor.

3) Jumlah Terminal Bis

Kota Subulussalam hanya memiliki 1 terminal Bis tipe C yang sudah tidak berfungsi optimal untuk melayani armada angkutan penumpang. Kondisi saat ini terminal tersebut beralih fungsi sebagai pusat pasar. Hal ini disebabkan kurang tepatnya lokasi terminal yang berada di tengah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan.

4) Jumlah Locket Travel

Hingga tahun 2024, jumlah loket travel di Kota Subulussalam berjumlah 13 loket. Beberapa Locket Travel di antaranya adalah Mulia Wisata, Mentari Tour Utama, Sadakata Travel, Himpak, Mentari Jaya.

2.4.4.16. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

1) Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi

Sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi yang tersedia di Kota Subulussalam terdiri dari: akses internet, *hotspot*, jaringan telepon seluler, media informasi dan radio komunikasi. Hanya terdapat 27 kampung yang memiliki BTS (*base transceiver station*) dan sisanya tidak memiliki BTS. Masih terdapat 23 kampung yang memiliki kekuatan sinyal internet lemah. Hanya 66 kampung yang memiliki sinyal 5G/4G/LTE, sisanya masih kualitas 3G ke bawah.

Hanya 3 kecamatan yang memiliki warnet dan jasa ekspedisi swasta, terdapat 2 kecamatan yang belum memiliki sarana komunikasi, yaitu Kecamatan Rundeng dan Kecamatan Longkib.



Tabel 2.58.

Jumlah Kampung menurut Keberadaan BTS, Sinyal Telepon Seluler dan Sinyal Internet Telepon Seluler di Kota Subulussalam

Kecamatan	Keberadaan BTS		Kekuatan Sinyal Telepon Seluler				Sinyal Internet Telepon Seluler			
	Ada	Tidak Ada	Sangat Kuat	Kuat	Lemah	Tidak Sinyal	5G/4G/LTE	3G/H/H+/EVDO	2,5G/E/GPRS	Tidak Ada Sinyal Internet
Simpang Kiri	9	8	3	13	1	0	17	0	0	0
Penanggalan	7	6	2	10	1	0	13	0	0	0
Rundeng	3	20	3	7	13	0	11	10	2	0
Sultan Daulat	5	14	5	10	4	0	18	0	1	0
Longkib	3	7	1	5	4	0	7	3	0	0
Subulussalam	27	55	14	45	23	0	66	13	3	0

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

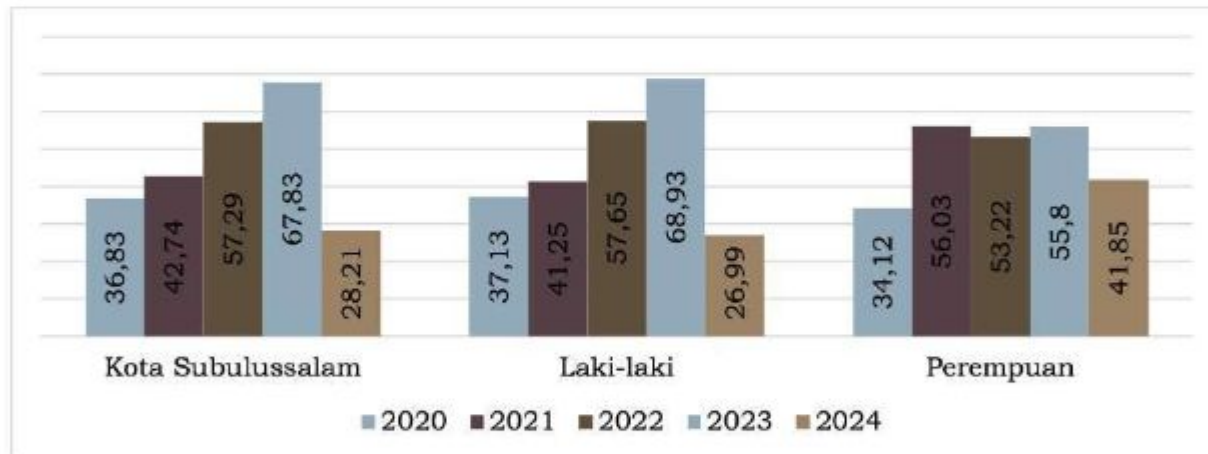
Tabel 2.59.
Jumlah Kampung menurut Keberadaan Fasilitas Komunikasi
di Kota Subulussalam

Kecamatan	Warnet	Kantor Pos / Pos Pembantu / Rumah Pos	Pos Keliling	Perusahaan Jasa Ekspedisi Swasta
Simpang Kiri	6	0	0	4
Penanggalan	7	1	0	1
Rundeng	0	0	0	0
Sultan Daulat	4	0	0	1
Longkib	0	0	0	0
Subulussalam	17	1	0	6

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

2) Anggota Rumah Tangga Mengakses Internet

Anggota rumah tangga yang mengakses internet di Kota Subulussalam penurunan sejak tahun 2020-2024. Tercatat tahun 2020, Persentase Anggota Rumah Tangga Mengakses Internet sebesar 36,83 persen, menurun menjadi 28,21 persen pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 mengalami penurunan drastis menjadi 28,21 persen. Secara umum, penduduk perempuan lebih dominan menggunakan internet dibandingkan laki-laki pada tahun 2024.



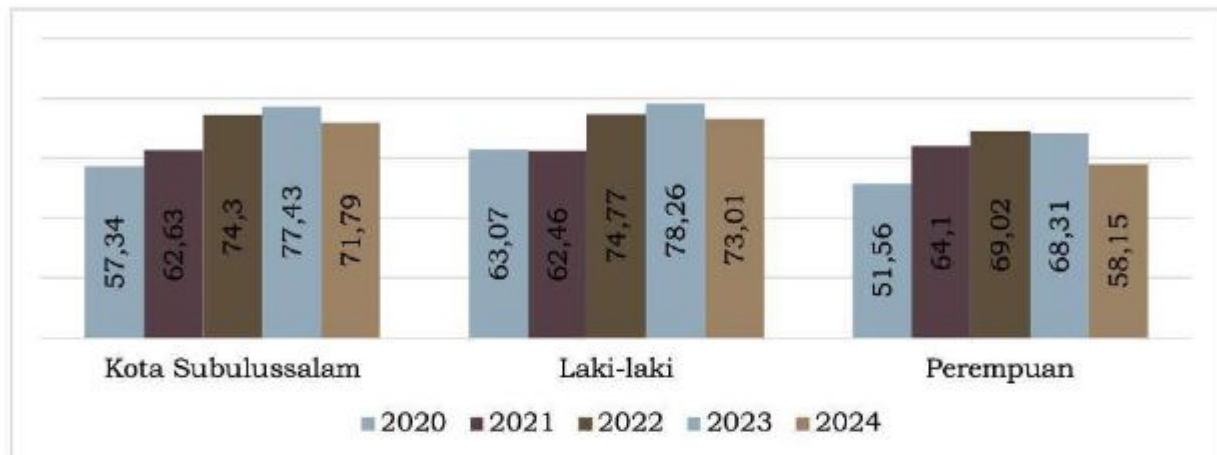
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.110.
Persentase Anggota Rumah Tangga Mengakses Internet
Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

3) Persentase Anggota Rumah Tangga Menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel atau Komputer

Anggota rumah tangga yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel atau Komputer di Kota Subulussalam meningkat sejak tahun 2020. Tercatat tahun 2020, Persentase Anggota Rumah Tangga yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/

Nirkabel atau Komputer sebesar 57,34 persen, pada tahun 2024 menjadi 71,79 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya penduduk di Kota Subulussalam yang melek teknologi. Secara umum, penduduk laki-laki lebih dominan menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel atau Komputer dibandingkan perempuan.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

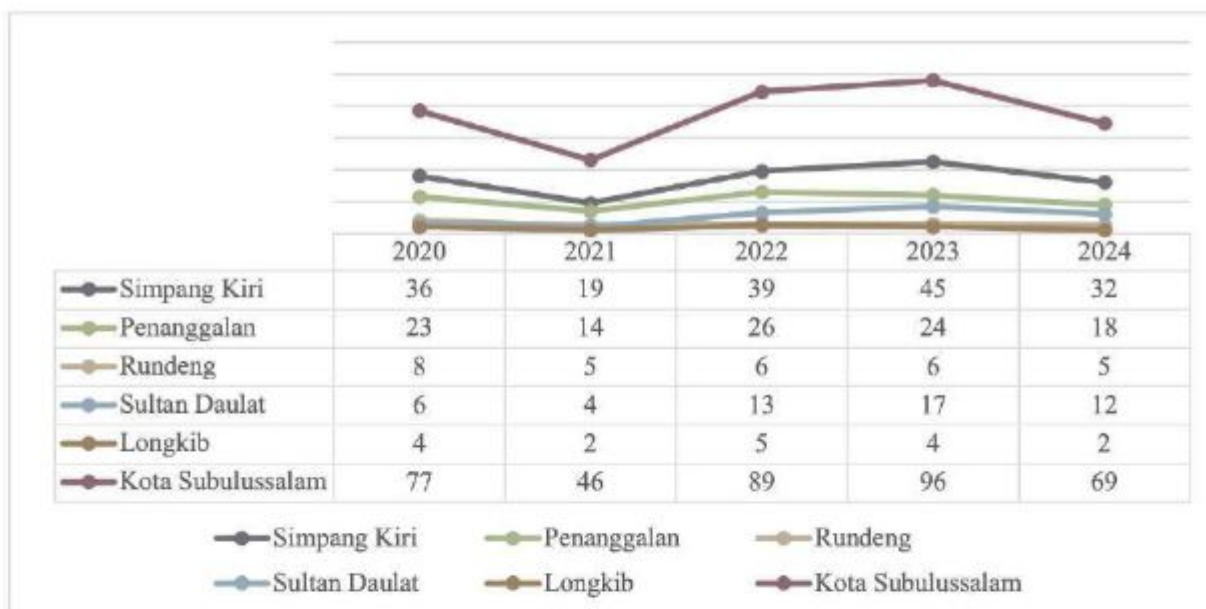
Gambar 2.111.
Persentase Anggota Rumah Tangga Menggunakan Telepon Seluler (HP)/
Nirkabel atau Komputer di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

2.4.4.17. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Jumlah Koperasi

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran. Jumlah koperasi di setiap kecamatan di Kota Subulussalam sejak tahun 2020-2024 disajikan pada gambar di bawah ini.

Secara umum, jumlah koperasi aktif di Kota Subulussalam menurun sejak tahun 2020-2024. Peningkatan yang terjadi dari 77 koperasi menjadi 69 koperasi. Koperasi paling banyak berada pada Kecamatan Simpang Kiri.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025

Gambar 2.112.
Jumlah Koperasi di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

2) Jumlah Usaha Kecil Menengah

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.” Kriteria usaha kecil dan menengah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Tabel 2.60.
Jumlah usaha agroindustri dan Industri Pengolahan dalam Kategori Kecil dan Menengah di Kota Subulussalam Tahun 2020–2023

No	Uraian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Agro Industri	256	271	271	174
2	Industri pengolahan	955	714	718	825
Jumlah		1211	985	989	999

Sumber: Disperindagkop & UKM Kota Subulussalam, 2024

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah usaha kecil menengah di Kota Subulussalam terus meningkat dari tahun 2020 hingga 2023. Puncak kenaikan jumlah UKM terjadi pada tahun 2020, yaitu sebanyak 1.211 UKM. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2023, namun secara tren mengalami kenaikan yang signifikan sejak tahun 2020. Beberapa jenis usaha yang dilakukan oleh usaha ini bergerak di usaha makanan, pakaian jadi, furnitur, komputer, logam, perbengkelan dan reparasi elektronik.

Walaupun adanya peningkatan jumlah usaha kecil dan menengah, pemerintah harus terus memberikan dukungan dan akses informasi kepada pengusaha terutama terhadap permodalan, jaminan berusaha dan peningkatan hasil dan mutu terhadap produk yang dihasilkan. Permodalan dapat ditempuh dengan membangun keaktifan koperasi dan perbankan. Sedangkan jaminan berusaha serta peningkatan mutu hasil produksi dapat dilakukan dengan membuat regulasi yang baik dan pemerintah dapat melakukan pelatihan bagi pengusaha demi pengembangan usaha ke level yang lebih baik lagi.

2.3.1.18. Bidang Urusan Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi adalah segala bentuk kegiatan Penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Investasi yang ada di Kota Subulussalam secara keseluruhan merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kota Subulussalam masih sangat sedikit jumlahnya. Pada tahun 2020 jumlah investor sebanyak 157 investor. Pada tahun 2024, terjadi penurunan jumlah investor menjadi 112 investor dengan nilai investasi sebesar 1.854.625.839.298 rupiah.

Tabel 2.61.**Jumlah Investor PMDN/PMA di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024**

Tahun	Jumlah Investor	PMDN (Rp)	PMA (Rp)	Total (Rp)
2020	157	296.667.242.789	-	296.667.242.789
2021	232	169.445.600.000	-	169.445.600.000
2022	32	335.982.549.440	-	335.982.549.440
2023	34	914.125.993.087	-	914.125.993.087
2024	112	1.854.625.839.298	-	1.854.625.839.298

Sumber: DPMP2TSP Kota Subulussalam, 2025

Jika dibandingkan Tahun 2022, indeks daya saing investasi Tahun 2023 menunjukkan penurunan nilai di beberapa kabupaten/kota. Kenaikan atau penurunan nilai indeks daya saing investasi didukung dan dipengaruhi oleh empat lingkup di setiap kabupaten/kota. Pada peringkat 3 (tiga) teratas tetap diduduki oleh Banda Aceh, Aceh Besar dan Aceh Utara. Sementara untuk peringkat 10 (sepuluh) besar masih didominasi oleh kabupaten/kota yang sama. Kota Subulussalam tahun 2022-2023 masih menduduki peringkat 23 se-Aceh.



Tabel 2.62.
Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Kota se-Aceh Tahun 2022-2023

Kabupaten/Kota	Stabilitas Ekonomi Makro		Pemerintahan dan Institusi Publik		Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja		Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		Nilai Indeks Daya Saing Investasi		Peringkat	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Banda Aceh	1,843	1,286	-0,182	0,067	3,132	3,312	1,920	1,496	1,678	1,540	1	1
Aceh Besar	1,504	1,320	1,745	1,485	0,624	0,072	1,288	2,136	1,359	1,253	2	2
Aceh Utara	1,031	1,627	0,309	1,113	1,171	0,685	0,433	0,329	0,568	1,050	3	3
Bener Meriah	-0,592	-0,514	0,186	1,461	-0,035	0,166	1,082	0,623	0,126	0,362	10	4
Aceh Barat	-0,005	0,049	1,060	-0,087	0,413	0,553	0,130	1,224	0,319	0,344	5	5
Lhokseumawe	1,428	1,283	-0,568	-0,339	0,400	0,194	0,214	0,352	0,303	0,300	6	6
Sabang	-0,918	-0,803	-0,207	1,363	-0,661	-0,402	1,849	1,483	0,016	0,285	12	7
Bireuen	0,536	0,476	0,521	-0,293	0,640	0,612	0,394	0,191	0,523	0,269	4	8
Nagan Raya	1,596	1,428	-0,674	-0,989	0,376	1,097	-0,141	-0,083	0,229	0,252	8	9
Pidie	0,288	0,519	0,316	0,557	0,095	0,297	0,086	-0,639	0,190	0,233	9	10
Aceh Tengah	-0,020	-0,227	0,277	0,310	0,310	-0,069	0,461	0,348	0,259	0,113	7	11
Aceh Selatan	-0,550	-0,711	0,624	-0,140	-0,113	0,128	-0,112	-0,369	0,031	-0,259	11	12
Aceh Tamiang	-0,420	-0,162	-0,769	0,130	0,130	0,037	-0,887	-1,240	-0,472	-0,294	17	13
Aceh Timur	0,153	0,380	-0,355	-0,682	0,135	0,191	-1,352	-1,348	-0,323	-0,302	15	14
Pidie Jaya	-0,994	-0,925	0,575	0,297	-1,117	-0,830	-0,156	-0,004	-0,360	-0,333	16	15
Langsa	-0,407	0,049	0,089	-0,448	0,032	-0,777	-0,132	-0,364	-0,105	-0,385	14	16
Aceh Barat Daya	-0,408	-0,497	-1,359	0,116	-0,796	-1,035	-1,284	-0,575	-0,961	-0,485	21	17
Aceh Jaya	-0,560	-0,741	0,408	-0,188	-0,538	-0,340	0,374	-0,701	0,007	-0,492	13	18
Singkil	-0,878	-1,010	0,267	0,199	-1,321	-1,257	-0,801	-0,191	-0,654	-0,543	18	19
Simeulue	-1,030	-1,122	-0,781	-1,921	-1,154	-1,011	0,070	0,424	-0,742	-0,861	19	20
Aceh Tenggara	-0,600	-0,656	-1,400	-1,070	-1,026	-0,812	-1,159	-1,217	-1,046	-0,939	22	21
Gayo Lues	-0,914	-0,782	-0,495	-0,785	-1,046	-1,046	-1,289	-1,349	-0,936	-0,991	20	22
Subulussalam	-0,552	-0,993	-1,270	-1,170	-1,025	-1,005	-1,869	-1,523	-1,179	-1,173	23	23

Sumber: DPMPSTSP Aceh, 2024

Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Adapun beberapa peraturan daerah atau qanun yang mendukung iklim usaha adalah sebagai berikut:

- Qanun Kota Subulussalam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah;
- Qanun Kota Subulussalam Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Qanun Kota Subulussalam Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Kota Subulussalam;
- Qanun Kota Subulussalam Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK);
- Peraturan Daerah Kota Subulussalam Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kualitas Dan Pengendalian Pencemaran Air;
- Qanun Kota Subulussalam Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kota Subulussalam;
- Qanun Kota Subulussalam Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
- Qanun Kota Subulussalam Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Lae Kombih;
- Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota.

2.4.4.19. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

1) Jumlah Organisasi Pemuda

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan data dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Subulussalam Tahun 2022 ada 18 organisasi pemuda yang semuanya terhimpun di bawah koordinasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

2) Jumlah Organisasi Olah Raga

Banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah

daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Berdasarkan data dari dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga kota Subulussalam terdapat 10 klub olahraga yang mendapatkan sentuhan tangan pemerintah yaitu klub sepak bola dan klub bola voli yang berada di setiap kecamatan dalam Kota Subulussalam. Jika dilihat lebih jauh, banyak klub olahraga lainnya dalam berbagai cabang yang berada di Kota Subulussalam seperti: bulu tangkis, tenis meja, futsal, karate, taekwondo, tarung derajat, pencak silat, sepeda, panahan, catur, balap motor, perbakin dan lain-lain.

3) Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Kegiatan pembinaan kepemudaan bertujuan untuk menumbuh kembangkan kreativitas para pemuda, meningkatkan sumber daya pemuda agar mereka dapat menggali potensi mereka sebagai bekal untuk menjadi masyarakat yang berpikir positif, inovatif dan produktif, serta untuk melatih sikap mandiri, bekerjasama, kebersamaan dan kekeluargaan.

Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Subulussalam, Mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 baru satu kegiatan kepemudaan yang sudah menjadi agenda tahunan pemerintah Kota Subulussalam yaitu kegiatan Pencegahan penggunaan Narkoba di kalangan generasi Muda. Banyaknya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan kepemudaan yang tinggi merupakan indikator efektivitas keberadaan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk itu pemerintah ke depan perlu mengupayakan penambahan kegiatan kepemudaan.

4) Organisasi Olahraga

Banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Disporapar melaporkan di Kota Subulussalam sampai saat ini ada 10 klub olahraga yang mendapatkan pembinaan pemerintah yaitu klub sepak bola dan bola voli yang berada di setiap kecamatan. Namun klub olahraga lainnya seperti; bulu tangkis, tenis meja, futsal, renang, sepeda, tinju, dan panjat tebing belum terdata dengan baik.

Tabel 2.63.
Keaktifan Organisasi Olahraga di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

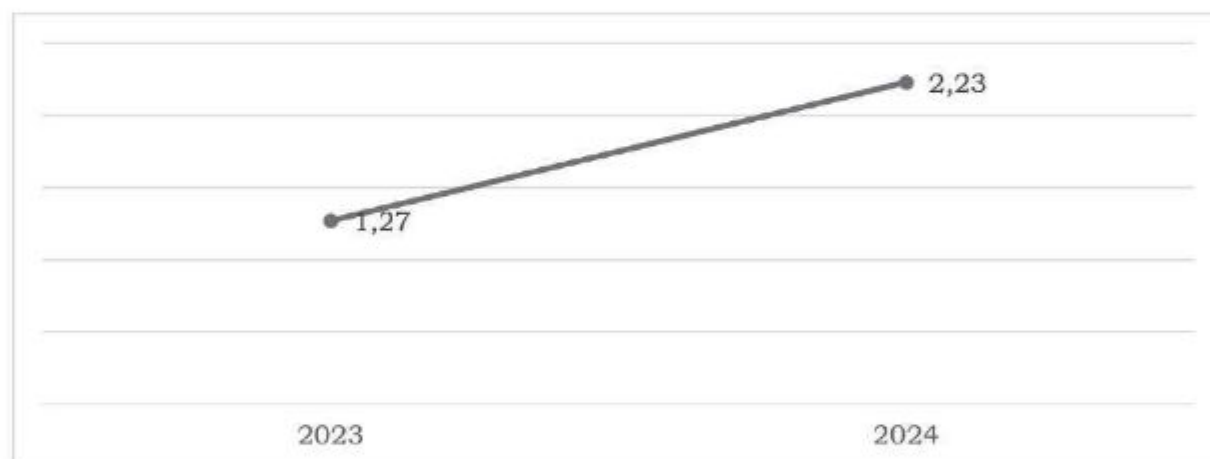
Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Organisasi Olahraga Aktif	27	28	28	28	10
Jumlah Organisasi Olahraga	33	33	33	33	33
Persentase Organisasi Olahraga Aktif	81,82	84,85	84,85	84,85	30

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Subulussalam, 2024

Persentase organisasi olahraga aktif menurun sejak 2020, dari 81,82 persen menjadi 30,00 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini tergolong baik dengan semakin bertambahnya organisasi olahraga yang aktif.

2.4.4.20. Bidang Urusan Statistik

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kota Subulussalam baru mulai dihitung sejak tahun 2022 dengan status uji coba. Perolehan nilai IPS tahun 2023 sebesar 1,27 dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 2,23. Hal ini menunjukkan perbaikan pembangunan bidang statistik setiap tahunnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.113.
Nilai Indeks Pembangunan Statistik Kota Subulussalam Tahun 2023-2024

2.4.4.21. Bidang Urusan Kebudayaan

Menurut laporan BP3 (Badan Pengelolaan dan Pelestarian Purbakala) Aceh, Dari 3 Situs Budaya yang ada di Subulussalam baru satu yang memiliki juru pelihara dan sudah di lakukan pemugaran oleh pemerintah yaitu Kompleks makam Syekh Hamzah Fansyuri di Desa Oboh, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam. Keragaman budaya di Kota Subulussalam juga dapat dilihat dari banyaknya

peninggalan budaya yang bersejarah seperti Makam, Tugu, Rumah Tradisional, Monumen dan Benteng.

Tabel 2.64.
Cagar Budaya di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Cagar Budaya	6	6	6	15	15
Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	40	0	0	20	0

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam, 2025

Hingga tahun 2024, jumlah cagar budaya di Kota Subulussalam berjumlah 15 cagar. Namun, pada tahun 2021 dan 2022 serta 2024 tidak cagar budaya yang dilestarikan. Pada tahun 2020 dimana terdapat 2 cagar budaya yang dilestarikan.

Seni Budaya

Seni Budaya adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara hidup berkembang secara bersama pada suatu kelompok yang mengandung unsur keindahan (estetika) secara turun temurun dari generasi ke generasi. Masyarakat Kota Subulussalam merupakan masyarakat yang heterogen, terdiri dari beragam suku, bahasa dan adat istiadat sehingga menghasilkan seni budaya yang beragam juga. Beberapa seni budaya yang terdapat di Kota Subulussalam di antaranya seperti Tari Dampeng, Tari Piring, Tari Lambe-lambe, Tari Srindayung, Tari siwah, Tari Adok, Tari Sikambang, Tari Ambai-ambai ken, Tari rapai sedok, Tari Mendatar Inai, Tari Biyahat sampai dengan saat ini masih digunakan.

Tabel 2.65.
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Subulussalam Tahun 2020 s.d. 2024

No	Capaian Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	0	0	0	0	0
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	0	0	0	0	0
3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	1,1	1,1	1,4	2,0	3,0
4	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2

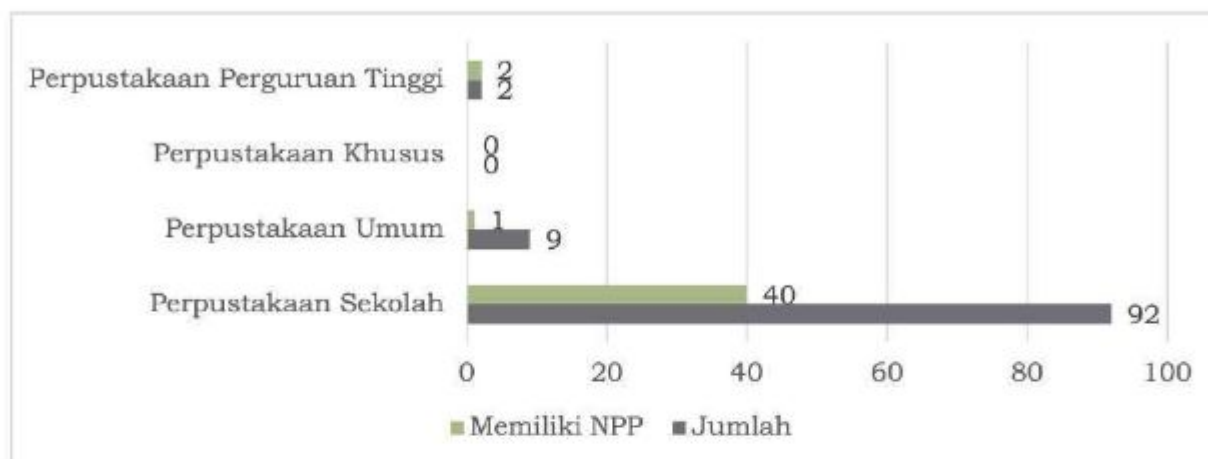
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam, 2025

2.4.4.22. Bidang Urusan Perpustakaan

1) Jumlah Perpustakaan

Perpustakaan merupakan wadah dimana di dalamnya terdapat berbagai jenis dan kelompok bahan pustaka yang diperuntukkan bagi masyarakat luas yang

disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Banyaknya jumlah perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas berupa bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan.



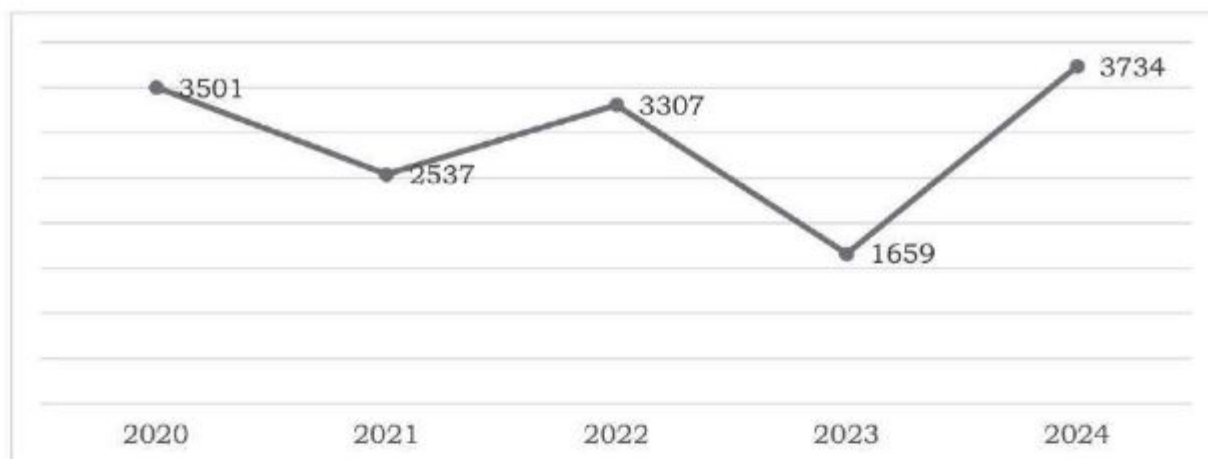
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.114.
Perpustakaan di Kota Subulussalam

Selama kurun waktu tahun 2020–2024, Kota Subulussalam hanya memiliki 1 (satu) buah perpustakaan milik pemerintah daerah, namun jumlah perpustakaan lain seperti perpustakaan sekolah pada tahun 2024 sebanyak 92 unit, perpustakaan perguruan tinggi 2 unit, dan perpustakaan umum 9 unit.

2) Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan Daerah Kota Subulussalam tahun 2020–2024 mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, kunjungan perpustakaan mencapai 3.501 kunjungan, menurun pada angka 1659 kunjungan pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 3.734 kunjungan. Ini menunjukkan minat baca masyarakat masih sangat rendah. Pemerintah kota Subulussalam ke depan perlu meningkatkan sosialisasi minat baca bagi masyarakat baik melalui media iklan, Poster, baliho, ataupun dengan menggunakan media lainnya yang efektif dapat meningkatkan minat baca masyarakat.

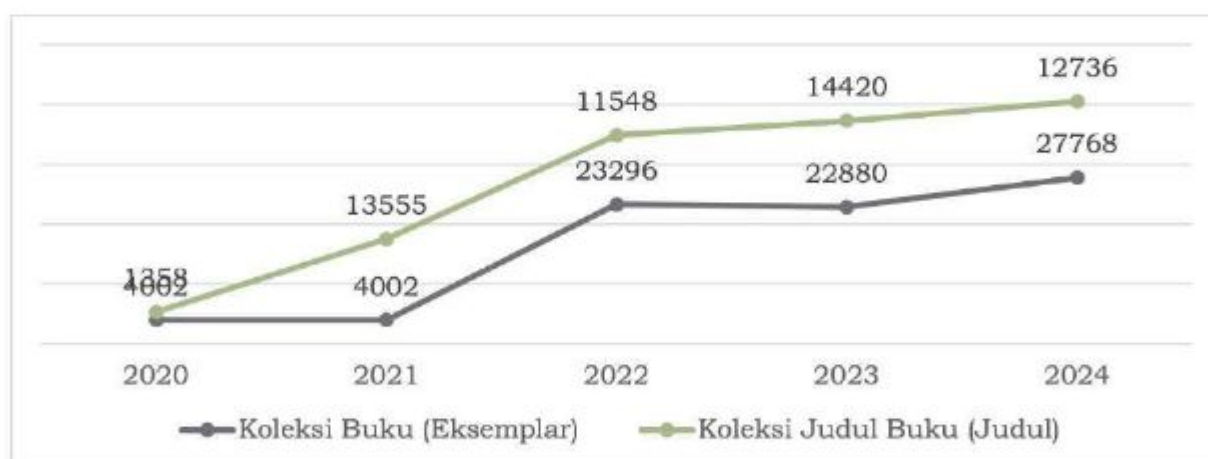


Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.115.
Kunjungan Perpustakaan Daerah Tahun 2020-2024

3) Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan

Sama halnya dengan ketersediaan jumlah perpustakaan, banyaknya jumlah ketersediaan buku pada perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Selain itu juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.116.
Koleksi Buku Perpustakaan Daerah Tahun 2020-2024

Fasilitas yang memadai belum terlihat di Perpustakaan Umum Kota Subulussalam dengan persediaan buku di rak-rak perpustakaan yang tidak banyak serta buku yang disediakan kebanyakan buku-buku tahun tinggi. Hal ini

menjadi salah satu penyebab minimnya pengunjung ke Perpustakaan Kota Subulussalam.

Sejauh ini buku yang disediakan di perpustakaan Kota Subulussalam sebanyak 27.768 eksemplar dan 12.736 judul buku. Buku-buku ini dikumpulkan dari sejak kota Subulussalam berdiri hingga saat ini. Buku di perpustakaan Kota Subulussalam berdasarkan bantuan perpustakaan provinsi, perpustakaan nasional dan pihak ketiga. Koleksi buku di Kota Subulussalam masih banyak yang belum *ter-update* dan kondisi yang sudah sangat memprihatinkan.

2.4.4.23. Bidang Urusan Kearsipan

Pengelolaan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat membutuhkan arsip dokumen. Perkembangan pengelolaan arsip secara baku sejak tahun 2020-2024 di Kota Subulussalam masih sangat rendah, hingga tahun 2022 belum ada 1 (Satu) SKPD pun yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Hal ini disebabkan kelemahan SDM aparatur pengelola arsip pada SKPD Kota Subulussalam, SKPD dalam Lingkup Pemerintah Kota Subulussalam masih sedang berbenah dalam segala aspek pelayanan terhadap masyarakat termasuk tata pengelolaan arsip yang baik dan benar. Di samping itu masih banyak SKPD dalam lingkup Pemerintah kota Subulussalam yang belum memiliki gedung kantor dan prasarana yang memadai sehingga belum dapat menerapkan sistem pengelolaan arsip secara baku.

Pada tahun 2024 juga hanya 2 perangkat daerah yang baru menerapkan Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). Hal ini menjadi perhatian bagi lembaga kearsipan daerah dalam menerapkan Srikandi secara menyeluruh. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Subulussalam sebagai lembaga kearsipan memperoleh predikat “Tidak Diberikan Kategori” oleh Arsip Nasional Republik Indonesia pada tahun 2024 pada pengawasan kearsipan.

2.4.4.24. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

Potensi sumber daya ikan di Kota Subulussalam cukup besar, mengingat Kota Subulussalam mempunyai jumlah panjang sungai sekitar 16,72 Km. Lahan budidaya perikanan dapat memanfaatkan lahan daratan basah(sawah), kolam, tambak dan rawa. Ketersediaan ikan per kapita Kota Subulussalam mengalami kecenderungan meningkat dalam 5 tahun terakhir. Peningkatan tersebut antara

lain disebabkan oleh produksi ikan di Kota Subulussalam yang terus tumbuh terutama pada budidaya perikanan. Walaupun demikian, ketersediaan ikan di Kota Subulussalam masih disertai dengan adanya pasokan ikan dari Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Singkil serta Provinsi Sumatera Utara. Secara rinci produksi ikan di Kota Subulussalam tersaji pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.66.
Produksi Perikanan di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum	128,6	127,7	79,02	87,49	49
Perikanan Budidaya	33	35	32,15	37,48	3
Jumlah	161,6	162,7	111,2	124,97	52

Sumber : Distanbunkan Kota Subulussalam, 2024

Ke depan diperlukan kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada pengoptimalan pembangunan perikanan terutama dalam sektor budidaya ikan untuk peningkatan produksi, memanfaatkan penerapan dan implementasi teknologi dan informasi perikanan dan mengoptimalkan peran balai benih ikan dalam rangka penyediaan benih ikan unggul.

2.4.4.25. Bidang Urusan Pariwisata

1) Kunjungan Wisata

Jumlah wisatawan di Kota Subulussalam selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan, hal ini karena adanya beberapa tempat wisata baru yang mulai tumbuh dan ramai dikunjungi wisatawan asing dan lokal. Berikut disajikan dalam tabel perkembangan jumlah kunjungan wisatawan sejak tahun 2020-2024.

Tabel 2.67.
Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Tamu Mancanegara	70	NA	68	4	457
2	Jumlah Tamu Nusantara	14.615	13.330	15.989	24.841	24.841

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, 2025

2) Tempat Wisata dan Cagar Budaya

Kota Subulussalam memiliki keragaman objek wisata baik wisata alam maupun wisata religi. Beberapa objek wisata di Kota Subulussalam di antaranya adalah.

Tabel 2.68.

Nama dan Lokasi Objek Wisata yang Ada di Kota Subulussalam

No.	Nama Objek Wisata	Alamat
1.	Tahura Lae Kombih	Desa Jontor
2.	Arung jeram lae Kombih	Desa Sikelang
3.	Wisata Alam Penuntungan	Desa penuntungan
4.	Air Terjun SKPC	Desa penuntungan
5.	Air Terjun Kedabuhan	Desa lae Ikan
6.	Irigasi Bahorok	Desa Namo Buaya
7.	Air Terjun Silangit-langit	Desa Singgersing
8.	Pemandian Nantampuk Mas	Desa lae Mbersih
9.	Air Terjun Batu Napal	Desa lae Raso
10.	Makan Syech Hamzah fansuri	Desa Oboh

Sumber : Disporapar Kota Subulussalam, 2025

Dari beberapa objek wisata seperti yang ditampilkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa Kota Subulussalam memiliki jumlah wisata alam yang banyak dan masing-masing lokasi wisata alam tersebut memiliki keunikan dan keunggulan sendiri. Namun sampai pada saat ini lokasi objek wisata tersebut masih belum menjadi perhatian pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana serta promosi destinasinya.

Peluang dalam pengembangan destinasi wisata di Kota Subulussalam sangat menjanjikan, mengingat bahwa Kota Subulussalam berada di jalur lintas dua kabupaten yang sudah memiliki pengembangan wisata yang sudah lebih baik. Kabupaten Aceh singkil memiliki pulau banyak, dimana rata-rata wisatawan yang datang pasti singgah atau menginap dahulu di Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Selatan memiliki wisata pesisir pantai yang banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dan lokal. Jadi pemerintah Kota Subulussalam melalui dinas terkait membaca peluang pengembangan objek wisata yang ada.

3) Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel

Terdapat 1 Hotel Bintang 1, 1 Hotel Bintang 3 dan 14 Akomodasi penginapan lainnya di Kota Subulussalam hingga 2024.

Tabel 2.69.
Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya Menurut Klasifikasi di Kota Subulussalam
Tahun 2020-2024

Tahun	Bintang 1	Bintang 2	Bintang 3	Bintang 4	Bintang 5	Akomodasi Lainnya
2020			1			10
2021			1			9
2022			1			10
2023			1			15
2024	1		1			14

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025

4) Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran

Rumah makan / restoran di Kota Subulussalam meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlah rumah makan / restoran di Kota Subulussalam mencapai 48 unit, lalu meningkat tahun 2025 menjadi 54 unit. Rumah Makan / Restoran terbanyak terdapat pada Kecamatan Simpang Kiri.

Tabel 2.70.
Jumlah Rumah Makan / Restoran di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Simpang Kiri	37	37	...	41	41
Penanggalan	11	11	...	12	12
Rundeng					1
Sultan Daulat					
Longkib					
Subulussalam	48	48	...	53	54

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025

2.4.4.26. Bidang Urusan Pertanian

Sektor pertanian menjadi tiga besar penyumbang PDRB di Kota Subulussalam, sebesar 25,05 persen pada tahun 2024. Namun kontribusi sektor pertanian Kota Subulussalam cenderung mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2020-2024, ini disebabkan kompetisi dengan sektor lain dalam hal penggunaan sumber daya. Selain itu, penurunan jumlah rumah tangga pertanian juga berdampak pada penurunan kontribusi pertanian.

Alih fungsi lahan terjadi pada lahan sawah produktif dengan frekuensi tanam dan tingkat produktivitas tinggi, sebagaimana banyak ditemui pada lahan sawah. Sehingga alih fungsi lahan menjadi isu strategis Kota Subulussalam agar laju alih fungsi lahan tidak semakin besar.

1) Tanaman Pangan

Sektor pertanian terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Namun yang menjadi inti utama pertanian adalah tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel di bawah menunjukkan bahwa produksi padi sawah pada tahun 2020 sebesar 3344,80 ton menurun menjadi 487,32 ton pada tahun 2024. Produktivitas padi sawah per hektar rata-rata berkisar 5,56 ton per Ha. Sedangkan komoditi jagung mengalami penurunan luasan tanam dan panen, sehingga mempengaruhi jumlah produksi tiap tahunnya. Produktivitas jagung mengalami penurunan dari 5,30 Ton/Ha di tahun 2020 menjadi 5,32 ton per Ha di tahun 2024.

Tabel 2.71.

Luas Panen, Luas Tanam, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Utama di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Komoditi Pangan Utama	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Padi	Luas Panen (Ha)	978,00	525,00	349,10	63,00	63,00
	Produksi (Ton)	3344,80	2.100	44,69	350,28	350,28
	Produktivitas (Ton/Ha)	3,42	0,25	0,12	5,56	5,56
Jagung	Luas Panen (Ha)	3083,00	2898,00	1.449,00	1.975,00	93
	Produksi (Ton)	16588,00	20.286	57,02	161,31	487,32
	Produktivitas (Ton/Ha)	5,30	7,00	0,04	8,15	5,24

Sumber : Distanbunkan Kota Subulussalam, 2025

Dari penjelasan secara ringkas mengenai keadaan komoditi tanaman pangan utama di atas dengan mempertimbangkan kebutuhan pangan masyarakat yang terus meningkat maka Upaya pemerintah Kota Subulussalam untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan antara lain:

- penerapan anjuran teknologi budidaya dan penggunaan varietas unggul;
- pengendalian hama dan penyakit tanaman padi;
- Peningkatan fungsi penyuluh pertanian;
- peningkatan sarana produksi pertanian; dan
- peningkatan luas tanam khusus untuk tanaman padi ladang, talas dan jagung.

2) Perkebunan

Potensi perkebunan di Kota Subulussalam sangat menjanjikan, khususnya komoditi kelapa sawit, hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah luasan kebun kelapa sawit rakyat dan minat masyarakat dalam budidaya sawit. Ketersediaan permintaan akan buah kelapa sawit oleh beberapa perusahaan pabrik kelapa sawit di Kota Subulussalam menjadikan komoditi ini menjadi komoditi unggulan daripada komoditi perkebunan lainnya. Seperti kakao, karet,

kelapa dalam, gambir dan lada. Berikut disajikan dalam tabel luas dan produksi beberapa jenis komoditi unggulan perkebunan Kota Subulussalam.

Dari tabel di bawah menunjukkan bahwa, pada tahun 2020 jumlah luas panen perkebunan kelapa sawit yang sudah menghasilkan mencapai 11.529 Ha dengan produksi panen sebesar 35.729 ton. Produksi ini menurun pada tahun 2024 menjadi 20.221 Ha dengan menghasilkan 24.004 ton. Semua Kecamatan di Kota Subulussalam memiliki potensi perkebunan kelapa sawit. Sementara itu perkebunan karet mengalami perluasan luas panen, pada tahun 2024 mencapai 3.154 Ha dengan produksi 1.209 ton. Pada tahun 2024, mengalami penurunan areal panen kakao menjadi 456 ha dengan jumlah produksi sebesar 120 ton.

Tabel 2.72.
Luas, Produksi dan Produktivitas Beberapa Jenis Komoditi Perkebunan
Unggulan di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Komoditi Perkebunan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Kelapa Sawit	Luas Panen (Ha)	11.529	10.689	19.304	19.304	20.221
	Produksi (Ton)	35.729	29.120	28.800	28.800	24.004
	Produktivitas (Ton/Ha)	3,1	2,72	1,49	1,49	1,18
Karet	Luas Panen (Ha)	2828	2.896	3.467	3.467	3.154
	Produksi (Ton)	1.628	1.636	1.555	1.555	1.209
	Produktivitas (Ton/Ha)	0,58	0,56	0,58	0,58	0,38
Kakao	Luas Panen (Ha)	388	378	674	674	456
	Produksi (Ton)	253	216	233	233	120
	Produktivitas (Ton/Ha)	0,65	0,57	0,35	0,35	0,26

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025

Ada beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya produksi kelapa sawit, karet dan kakao antara lain:

- a. kurangnya pemeliharaan;
- b. berkurangnya Tanaman Menghasilkan (TM);
- c. bertambahnya jumlah Tanaman Rusak (TR).

Upaya Pemerintah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kelapa sawit, karet dan kakao antara lain:

- a. peningkatan pemeliharaan dan melaksanakan *replanting* (menanam kembali) untuk semua komoditi perkebunan;
- b. peningkatan penerapan anjuran teknologi budidaya yang baik;
- c. perluasan areal penanaman; dan
- d. peningkatan penyuluhan kepada petani.

3) Peternakan

Populasi hewan ternak utama di Kota Subulussalam mengalami kenaikan sejak tahun 2020. Tercatat pada tahun 2020 jumlah populasi ternak di Kota Subulussalam mencapai 179.484 ekor. Angka ini mengalami kenaikan menjadi 260.425 ekor pada tahun 2023. Populasi ternak kambing sebagian besar berada di kecamatan Rundeng, dan kecamatan Simpang Kiri sedangkan Populasi ternak domba terbesar berada di Kecamatan Rundeng dan kecamatan Longkib.

Tabel 2.73.
Populasi Ternak di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

No	Jenis Ternak	Populasi (Ekor)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi Potong	2207	3021	3407	3344	3410
2	Kambing	5330	8766	4765	9810	9845
3	Kerbau	225	184	163	246	250
4	Domba	2108	2602	1494	1872	1900
5	Ayam Kampung	53524	134541	8328	7348	-
6	Ayam Pedaging	33896	159058	263000	233000	239000
7	Ayam Petelur	60792	11380	1000	2500	-
8	Itik	21402	1904	1696	2305	1715
Total		179484	321456	283853	260425	256120

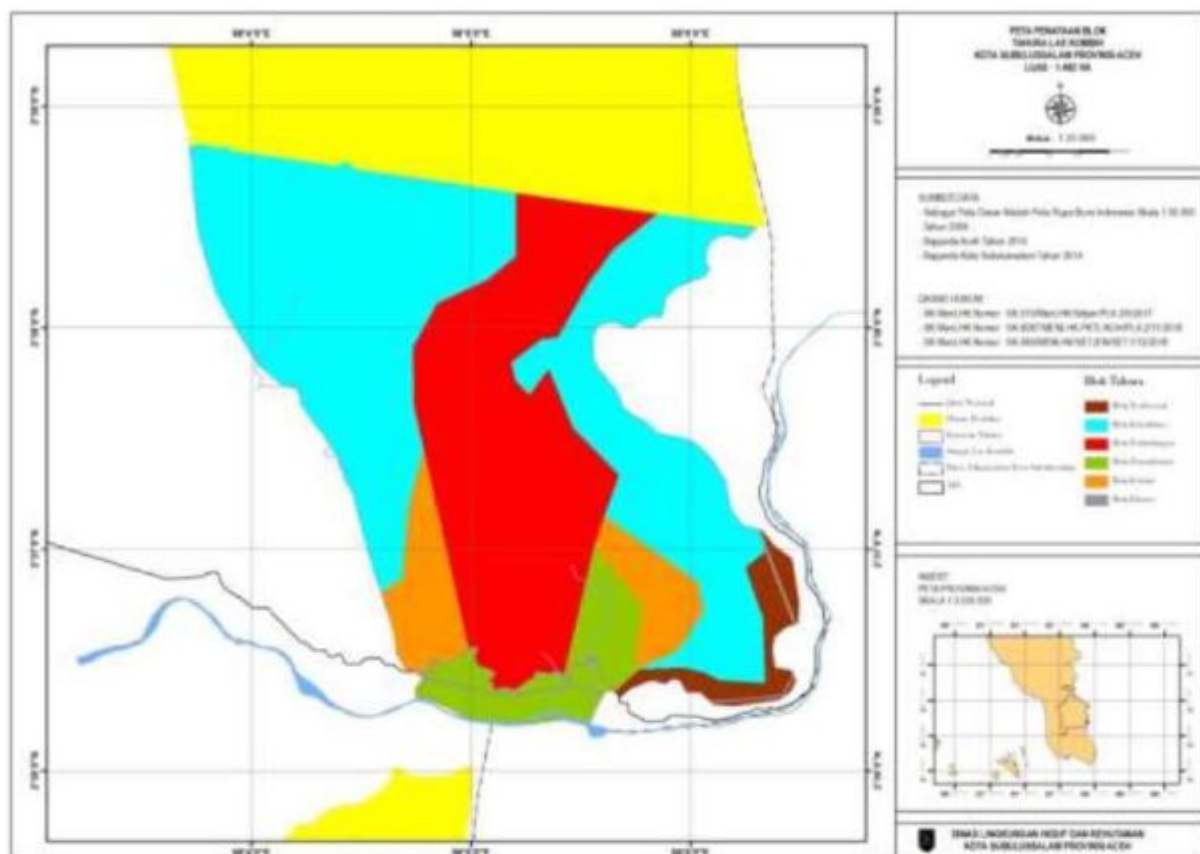
Sumber : Distanbunkan Kota Subulussalam, 2024

Usaha peternakan secara umum sampai saat ini merupakan usaha sampingan/usaha rumah tangga, terutama pada ternak besar seperti sapi dan kerbau, sehingga produksi dan produktivitasnya masih dikategorikan rendah. Upaya Pemerintah Kota Subulussalam untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak (kecil dan besar) antara lain:

- peningkatan populasi ternak; dan
- pengembangan kawasan peternakan terpadu.

2.4.4.27. Bidang Urusan Kehutanan

Secara geografis wilayah Taman Hutan Raya (TAHURA) Lae Kombih terletak pada 02°36' - 02°38' Lintang Utara (LU) dan 98°04' - 98°06' Bujur Timur (BT). Lokasi TAHURA secara administratif terletak di Kecamatan Penanggalan di 2 (dua) desa/kelurahan yaitu Jontor dan Lae Ikan. Lokasi areal Taman Hutan Raya



Gambar 2.118.
Peta Blok Kawasan TAHURA Lae Kombih

2.4.4.28. Bidang Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Listrik

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah memadai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fasilitas listrik salah satunya dapat dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik. Rasio ketersediaan daya listrik di Kota Subulussalam selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.74.
Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Listrik (KWH)	45.576.112	45.576.112	48.257.186	48.257.186	4.754.068
Konsumsi Listrik (KWH)	42.901.111	42.901.111	44.996.204	44.996.204	4.413.492
Rasio	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

Kebutuhan Energi Listrik Kota Subulussalam setiap tahunnya terus meningkat. Jumlah kebutuhan energi listrik Kota Subulussalam pada tahun 2020 sebesar 42.901.111 KWh dan terus meningkat pada tahun 2023 menjadi 44.996.204 KWh. Penyebab bertambahnya kebutuhan energi listrik ini adalah meningkatnya pertumbuhan penduduk, pelayanan sosial, bisnis, industri, kantor pemerintah dan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Bila mencermati ketersediaan daya listrik yang ada, maka di perkirakan pada tahun-tahun mendatang produksi listrik yang ada sudah tidak mampu lagi memenuhi konsumsi listrik seluruh Kota Subulussalam, dengan asumsi bahwa semakin tingginya laju pertumbuhan penduduk dan semakin banyaknya tumbuh usaha-usaha industri terbaru yang sangat membutuhkan energi listrik, jadi ini merupakan permasalahan serius yang harus dihadapi pemerintah Kota Subulussalam Ke depan.

Upaya Pemerintah Kota Subulussalam untuk mengatasi krisis daya listrik antara lain:

- a. mencari alternatif lain dalam hal pemenuhan ketersediaan daya listrik daerah;
- b. koordinasi dengan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Subulussalam;

mencari investor untuk berinvestasi di Kota Subulussalam pada sektor kelistrikan.

2.4.4.29. Bidang Urusan Perdagangan

1) Jumlah Pedagang

Peran pedagang dalam upaya mempercepat ekonomi sangat penting dikarenakan pedagang adalah sebagai pelaku utama dalam pembangunan perdagangan di suatu daerah. Semakin banyak dan beragamnya aktivitas perdagangan pada suatu daerah semakin membuka peluang penciptaan lapangan usaha serta kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Berikut disajikan dalam tabel jumlah pedagang besar, menengah dan kecil di setiap Kecamatan di Kota Subulussalam.

Jumlah pedagang di Kota Subulussalam didominasi oleh pedagang kecil yakni sebesar 85,82 persen dari keseluruhan pedagang di Kota Subulussalam dan secara sebarannya berpusat di Ibukota Subulussalam. Sebagian besar pedagang berada di ibukota (Kecamatan Simpang Kiri dan Penanggalan), yaitu mencapai 60,58 persen. Adapun sebaran pedagang di Kota Subulussalam Tahun 2023 seperti tabel di bawah ini.

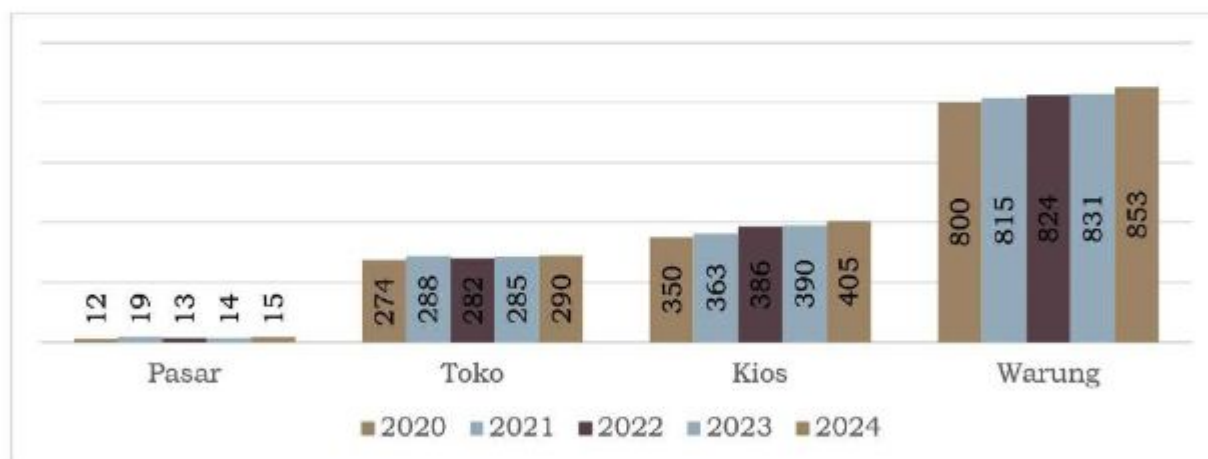
Tabel 2.75.**Banyaknya Pedagang di Kota Subulussalam Menurut Kecamatan Tahun 2024**

Kecamatan	Pedagang Besar (org)	Pedagang Menengah (org)	Pedagang Kecil (org)	Jumlah
Simpang Kiri	49	93	625	767
Penanggalan	18	20	220	258
Rundeng	7	14	167	188
Sultan daulat	8	20	310	338
Longkib	3	8	130	141
Jumlah	85	160	1452	1692
Persentase (%)	5,02	9,46	85,82	100,00

Sumber : Disperindagkop & UKM Kota Subulussalam, 2025

2) Jumlah Sarana Perdagangan

Perdagangan di Kota Subulussalam di dukung dengan sarana prasarana seperti pasar umum, pasar desa dan pasar modern. Adanya peningkatan jumlah sarana perdagangan di Kota Subulussalam sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi di Kota Subulussalam khususnya di sektor perdagangan sangat baik perkembangannya, dan ini akan berdampak kepada tingkat pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan. Kondisi sarana prasarana perdagangan di Kota Subulussalam dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025

Gambar 2.119.

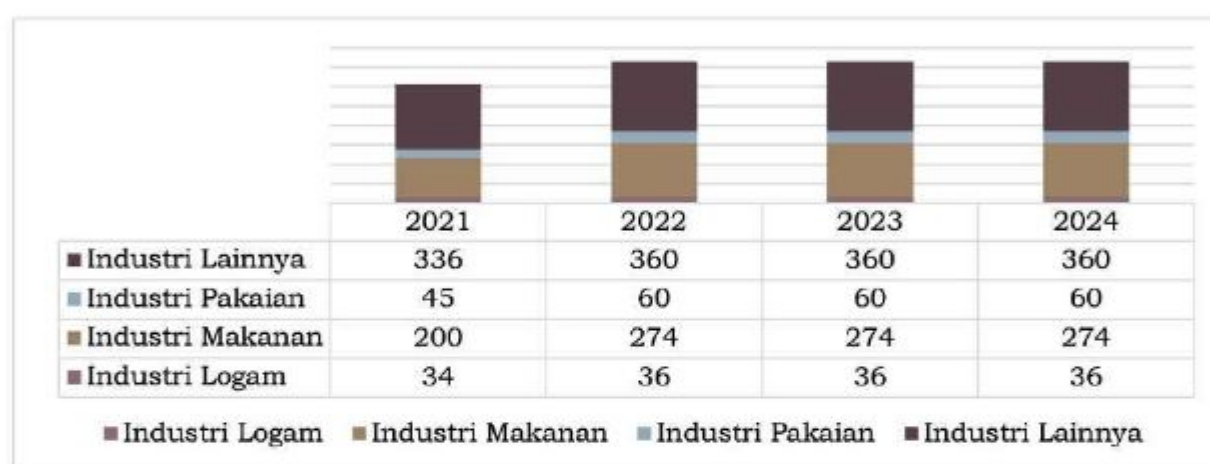
**Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kota Subulussalam
Tahun 2020-2024**

2.4.4.30. Bidang Urusan Perindustrian

Potensi industri di Kota Subulussalam secara keseluruhan di tahun 2024 berjumlah 730 unit usaha, yang terdiri dari industri dalam skala kecil sampai besar. Kehadiran industri secara langsung juga dapat menyerap tenaga kerja dan

memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi daerah. Berikut ditampilkan beberapa jenis industri di Kota Subulussalam.

Pertumbuhan sektor industri di Kota Subulussalam sangat cepat. Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah industri yang beroperasi di Kota Subulussalam terus bertambah bahkan mencapai dua kali lipat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun. Pertumbuhan ini akan mampu memberikan *multiplier effect* yang tinggi. Upaya pemerintah Kota Subulussalam untuk meningkatkan sektor industri melalui pembinaan para pelaku usaha industri (hulu dan hilir) khususnya industri kecil dan industri rumah tangga dalam bentuk kelompok-kelompok industri binaan pemerintah.



Sumber : BPS Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.120.
Banyaknya Industri Menurut Jenisnya di Kota Subulussalam
Tahun 2021-2024

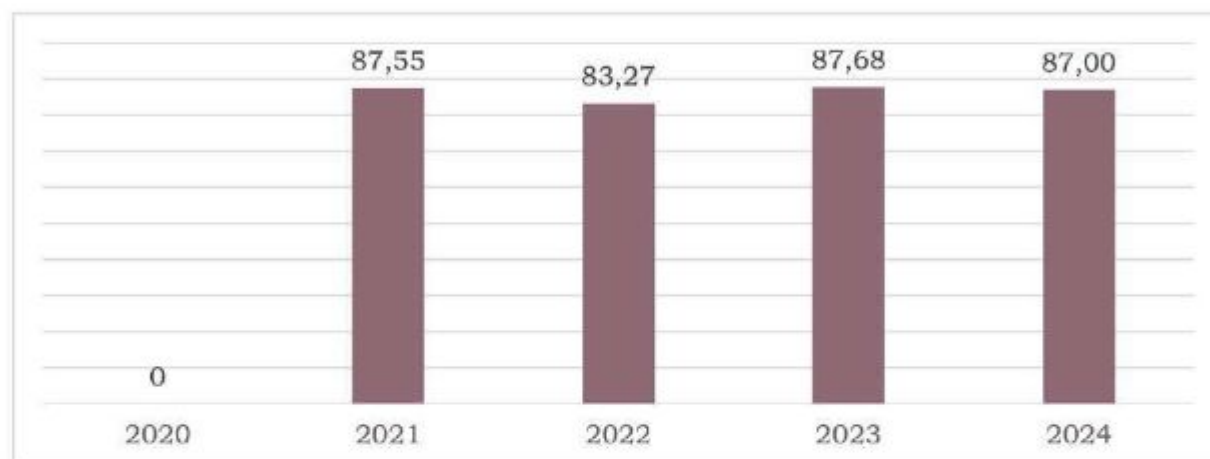
2.4.4.31. Bidang Urusan Transmigrasi

Transmigrasi pada dasarnya merupakan pembangunan wilayah dalam rangka peningkatan taraf hidup serta pemanfaatan sumber daya alam dan manusia agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa melalui program terpadu dan lintas sektoral. Dengan kata lain, transmigrasi bertujuan untuk meratakan penyebaran jumlah penduduk/tenaga kerja serta pembukaan dan pengembangan daerah produksi baru dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat menjamin peningkatan taraf hidup transmigran dan masyarakat sekitarnya. Jumlah transmigrasi lokal di Kota Subulussalam sampai pada tahun 2024 berjumlah 7 kelompok transmigrasi.

2.4.4.32. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan

1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

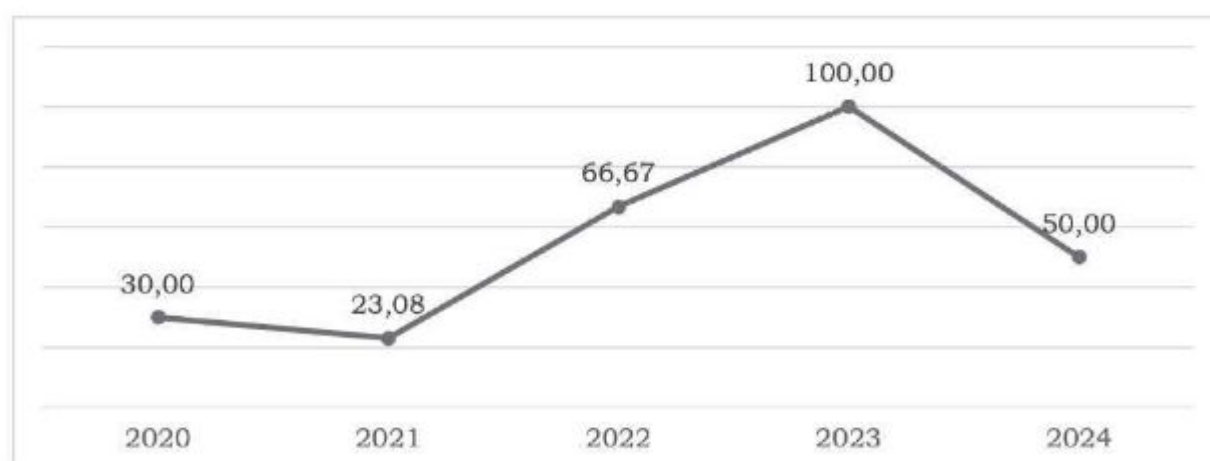
Kepuasan masyarakat di Kota Subulussalam mengalami berada di atas angka 80,00 dari interval 100,00, artinya terdapat 8 dari 10 orang yang puas dengan pengelolaan pemerintahan di Kota Subulussalam tahun 2020-2024. Data dari Sekretariat Daerah Kota Subulussalam menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 sebesar 87,00 atau kategori “Baik”.



Sumber: Sekretariat Daerah Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.121.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

2.4.4.33. Bidang Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Sumber : Sekretariat DPRK Subulussalam, 2025

Gambar 2.122.
Persentase Qanun Kota Subulussalam yang Disahkan Tahun 2020-2024

Persentase qanun yang disahkan paling tinggi pada tahun 2023 yang mencapai 100 persen. Semua rancangan qanun disahkan pada tahun 2023. Lalu pada tahun 2024, kembali menurun pengesahan qanun menjadi 50 persen dari total rancangan qanun.

2.4.4.34. Bidang Urusan Perencanaan

1) Konsistensi Program

Adapun tingkat konsisten adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat konsistensi program RPJMD ke Renstra mengalami fluktuasi setiap tahun. Tingkat inkonsistensi tertinggi pada tahun 2022 sebesar 3,30 persen. Pada tahun 2024, tingkat inkonsistensi sebesar 1,80 persen.
- b. Tingkat inkonsistensi program RPJMD ke RKPK juga mengalami inkonsistensi. Tingkat inkonsistensi tertinggi pada tahun 2024 sebesar 3,70 persen dan tingkat inkonsistensi terendah pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,61 persen.
- c. Tingkat inkonsistensi program RPJMD ke RKPK juga mengalami inkonsistensi. Tingkat inkonsistensi tertinggi pada tahun 2024 sebesar 4,82 persen dan tingkat inkonsistensi terendah pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,60 persen.
- d. Tingkat inkonsistensi dokumen perencanaan ke dokumen penganggaran tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar 4,94 persen. Sedangkan tingkat inkonsistensi terendah sebesar 1,26 persen.



Tabel 2.76.
Konsistensi RPJMD dengan Renstra, RKPK, Perubahan Renstra dan Perubahan RKPK Tahun 2021-2024

Tahun	Dokumen Perencanaan	Jumlah	Dokumen Perencanaan	Konsisten		Tidak Konsisten	
				Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
2021	RPJMD	185	Renstra	171	98,84	2	1,16
			RKPK	162	97,01	5	2,99
			Perubahan RKPK	154	97,47	4	2,53
2022	RPJMD	185	Renstra	176	96,70	6	3,30
			RKPK	150	96,77	5	3,23
			Perubahan RKPK	151	96,79	5	3,21
2023	Perubahan RPJMD	172	Perubahan Renstra	166	98,81	2	1,19
			RKPK	163	99,39	1	0,61
			Perubahan RKPK	165	99,40	1	0,60
2024	Perubahan RPJMD	172	Renstra	164	98,20	3	1,80
			RKPK	156	96,30	6	3,70
			Perubahan RKPK	158	95,18	8	4,82

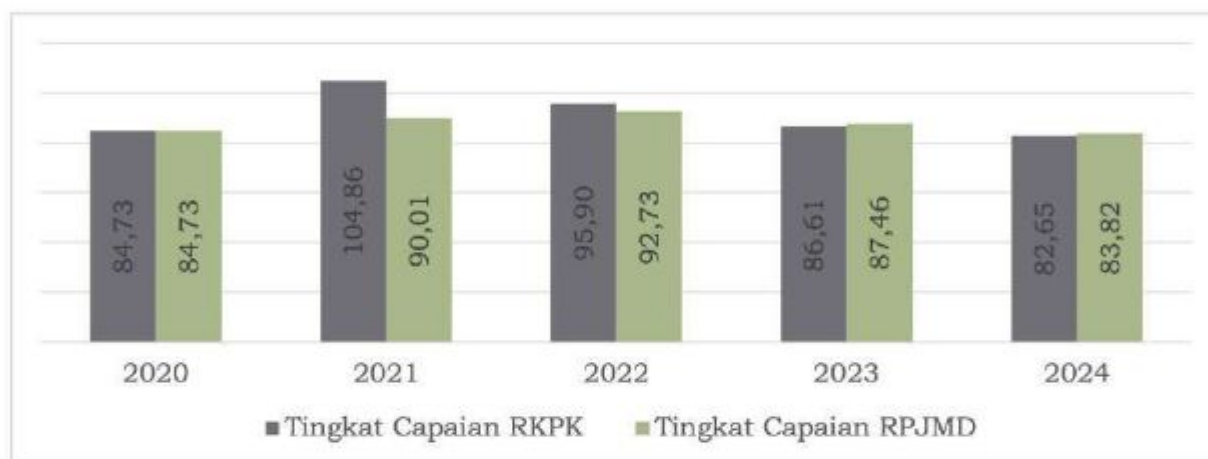


Tabel 2.77.
Konsistensi RKPD/Perubahan RKPD dengan KUA-PPAS/KUPA-PPPAS Tahun 2021-2024

Tahun	Dokumen Perencanaan	Jumlah	Dokumen Perencanaan	Konsisten		Tidak Konsisten	
				Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
2021	RKPK	167	KUA-PPAS	165	98,21	3	1,79
2022	RKPK	155	KUA-PPAS	154	95,06	8	4,94
2023	RKPK	164	KUA-PPAS	161	98,17	3	1,83
2024	RKPK	162	KUA-PPAS	157	98,74	2	1,26

2) Capaian Kinerja RKPK dan RPJMD

Capaian kinerja program RKPK mengalami fluktuasi sejak tahun 2020-2024. Capaian tertinggi pada tahun 2020, yaitu 84,73 persen. Lalu mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 86,61 persen. Capaian kinerja RPJMD juga mengalami penurunan pada tahun 2024, yaitu 83,82 persen dibandingkan tahun 2020, yaitu 84,73 persen. Penurunan capaian kinerja dapat disebabkan oleh beban defisit anggaran.



Gambar 2.123.
Capaian Kinerja Program RKPK dan RPJMD 2020-2024

2.4.4.35. Bidang Urusan Keuangan

1) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

IPKD Kota Subulussalam mengalami penurunan pada tahun 2023. Pada tahun 2021-2022, IPKD Kota Subulussalam berkategori B atau Perlu Perbaikan. Pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi C atau Sangat Perlu Perbaikan.

Tabel 2.78.
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai	NA	62,2076	70,5588	59,8902	NA
Kategori	NA	B / Perlu Perbaikan	B / Perlu Perbaikan	C / Sangat Perlu Perbaikan	NA

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam, 2024

2) Opini BPK

Gambaran umum pengelolaan keuangan dan aset Kota Subulussalam sudah berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Hal ini tergambar dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan

keuangan di Kota Subulussalam yang pada masuk ke dalam kategori wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun 2020-2024.

3) Penetapan APBK

Penetapan APBK Subulussalam hanya tepat waktu pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini tentunya mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di Kota Subulussalam, terutama tahun 2024 yang ditetapkan pada Maret 2024.

Tabel 2.79.
Penetapan APBK Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Penetapan APBK	Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu

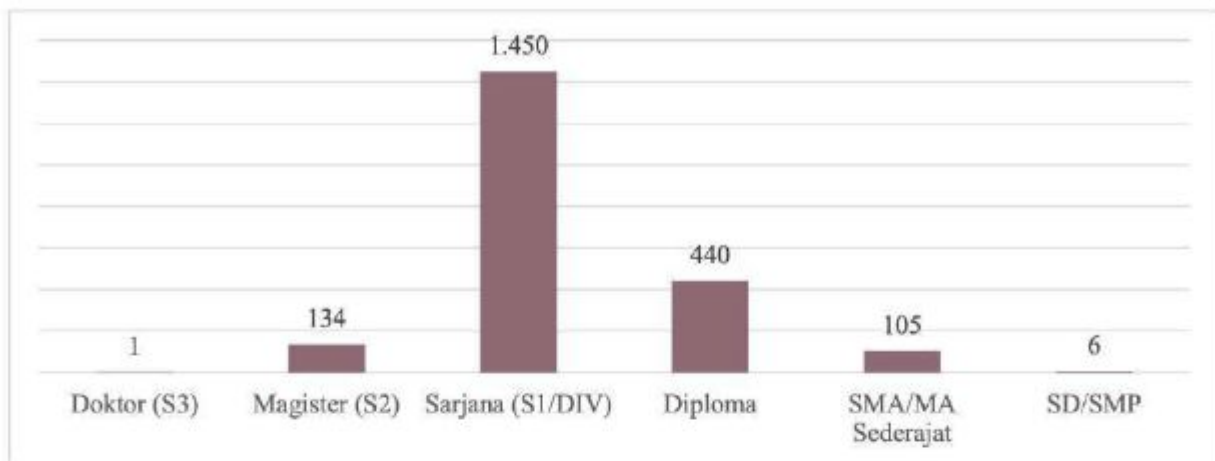
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kota Subulussalam, 2024

2.4.4.36. Bidang Urusan Kepegawaian

Hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengubah paradigma manajemen kepegawaian, dari administrasi pegawai ke manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Administrasi ASN sekedar merupakan rangkaian aktivitas penyusunan dan pencatatan data serta informasi (*drafting and recording data plus information*) pegawai secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan ASN. Sementara Manajemen ASN adalah rangkaian aktivitas menilai ASN sebagai sumberdaya, aset, faktor determinan dalam sukses/gagalnya program-program pembangunan pemerintah, sehingga dalam manajemen ASN, program dan kegiatan terstruktur serta transparan dalam pengelolaan human capital ASN. Pemerintah Kota Subulussalam yang memiliki belum banyak predikat keunggulan perlu bergegas menjadi pioneer dalam mendesain dan mengimplementasikan paradigma baru manajemen ASN di lingkup Pemerintah Kota Subulussalam.

1) Tingkat Pendidikan ASN Kota Subulussalam

Paradigma baru manajemen ASN memandang perlu ada perubahan dalam pengelolaan ASN, dari perspektif lama manajemen kepegawaian yang menekankan pada hak dan kewajiban individual pegawai menuju perspektif baru yang menekankan pada manajemen pengembangan SDM secara strategis (*strategic human resource management*). Kondisi aparatur sipil negara di Pemerintahan Kota Subulussalam dapat digambarkan pada gambar di bawah ini.



Sumber : BKPSDM Subulussalam, 2025

Gambar 2.124.

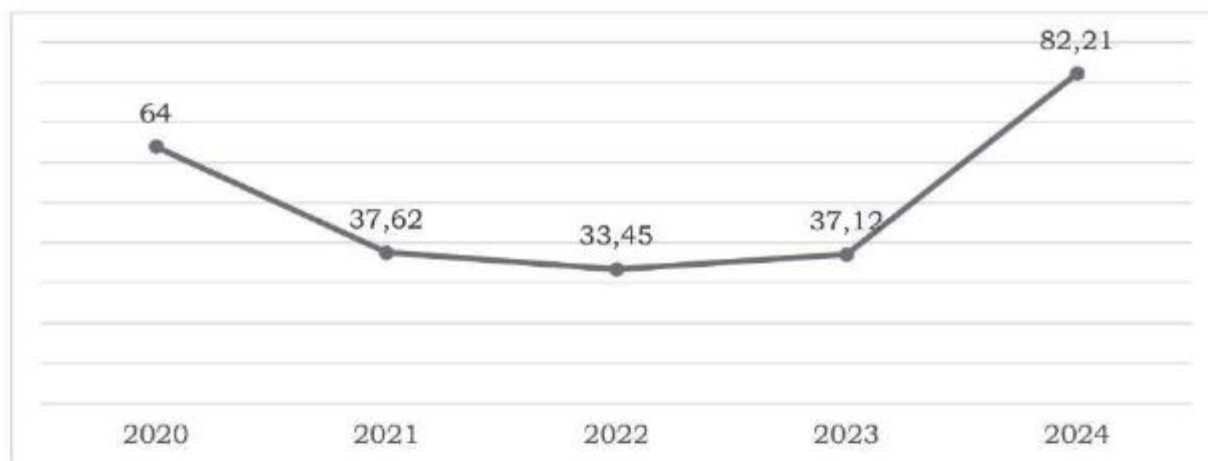
Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Subulussalam Tahun 2024

Secara kuantitas dapat dilakukan dengan menambah jumlah aparatur sipil negara jika memang dibutuhkan demi mencapai kondisi ideal, dan secara kualitas dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur sipil negara. Secara umum ada dua hal pokok yang merupakan pelaksanaan dari fungsi Manajemen ASN yang terdiri atas Manajemen PNS dan Manajemen PPPK meliputi penyusunan dan penetapan formasi/kebutuhan PNS, pengadaan, pemberian kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan, pengembangan karier, penetapan sistim pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan terhadap pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.

2) Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesional ASN mengalami penurunan sejak tahun 2020. Pada tahun 2020, Indeks Profesionalitas ASN Kota Subulussalam sebesar 64, lalu mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 82,21.

Rendahnya pengembangan kapasitas ASN, sistem meritokrasi yang tidak sesuai dengan kinerja, ketimpangan beban administrasi, fasilitas dan teknologi pekerjaan, dan invensi dan inovasi menjadi faktor rendahnya pencapaian IPASN.



Sumber : BKPSDM Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.125.
Indeks Profesionalitas ASN Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

2.4.4.37. Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Hingga 2024, hanya 5 orang yang mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jenjang eselonnya. Kelima tersebut mengikuti diklat PIM II.

Tabel 2.80.
Pejabat Struktural yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pejabat Struktural yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan Sesuai Eselon (Orang)	2	2	2	2	5

Sumber : BKPSDM Kota Subulussalam, 2025

2.4.4.38. Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan

Produk Pengembangan

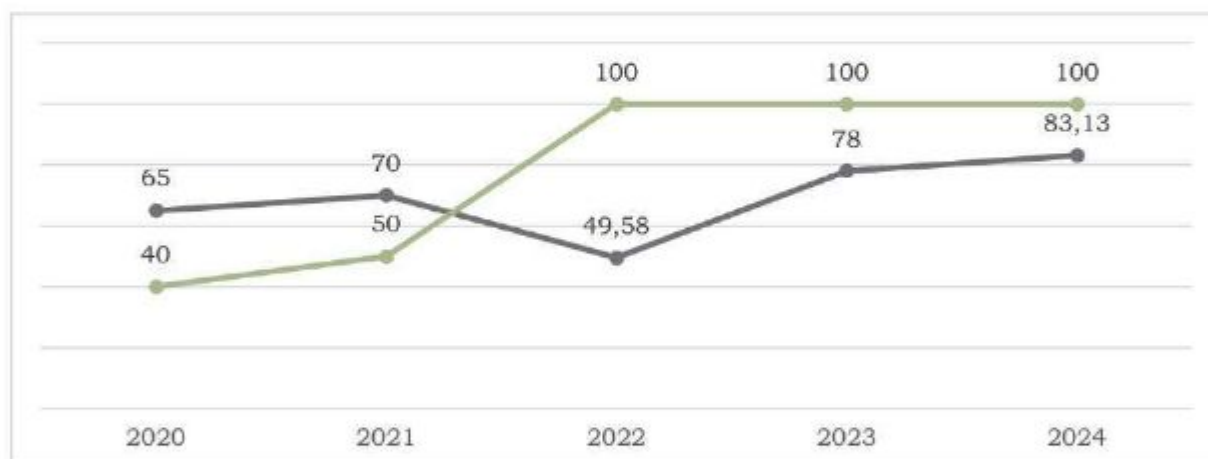
Adapun beberapa produk pengembangan pada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut:

- Studi *Environmental Health Risk Assessment* (EHRA atau Studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan) <Tahun 2024>;
- Penjaringan Produk Unggulan Daerah (PUD) Kota Subulussalam <Tahun 2024>;
- Determination of characteristics of stunting risk families in Subulussalam, Aceh in 2022 using k-modes cluster analysis* <Tahun 2024>;
- Perbandingan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam Tahun 2021 Dan Tahun 2022 Berdasarkan Indeks Komposit Desa/Kampung <Tahun 2023>;

- e. Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) <2022>;
- f. Perbandingan kinerja indikator makro Kota Subulussalam dengan kabupaten tetangga <Tahun 2022>;
- g. Kajian capaian indikator makro pembangunan Kota Subulussalam tahun 2015-2020 <Tahun 2021>.

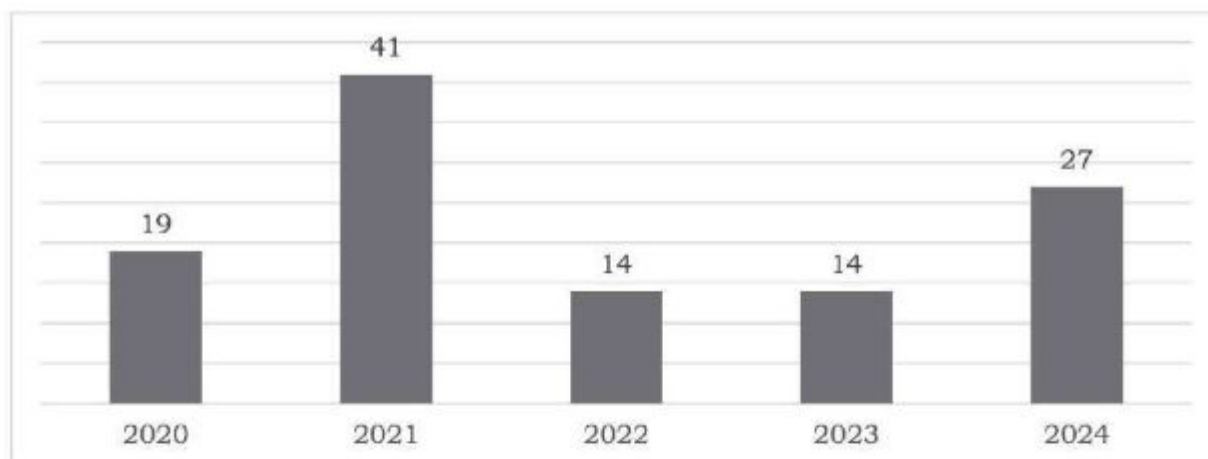
2.4.4.39. Fokus Layanan Urusan Pengawasan

Pelayanan bidang urusan pengawasan menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengawasan internal terhadap kinerja pegawai dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan. Pengawasan memiliki dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari fungsi manajemen maupun dari sisi pencapaian visi dan misi pemerintah. Ia memiliki kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan sekaligus menjadi pengawal dalam pelaksanaan program.



Gambar 2.126.
Persentase Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Tingkat Penanganan Pengaduan Oleh Masyarakat di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Jumlah temuan BPK di Kota Subulussalam menurun sejak tahun 2020-2024. Tahun 2020 sebanyak 19 kasus, meningkat hingga tahun 2024, yaitu 23 kasus. Angka ini merupakan capaian yang sangat baik terhadap penurunan angka temuan BPK. Namun, persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan belum optimal, yaitu hanya 83,13 persen.



Gambar 2.127.
Jumlah Temuan BPK di Kota Subulussalam Tahun 2020-2023

2.4.4.40. Fokus Layanan Urusan Kewilayahan

Kecamatan dengan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kota Subulussalam berdasarkan kecamatan tahun 2020-2024 mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020-2022, IDM Kota Subulussalam tergolong Berkembang. Lalu pada tahun 2023-2024 tergolong Maju. Pada tahun 2024, terdapat 2 kecamatan yang tergolong Berkembang, yaitu Kecamatan Rundeng dan Kecamatan Sultan Daulat, 2 kecamatan Maju, yaitu Kecamatan Penanggalan dan Kecamatan Longkib, serta 1 kecamatan Mandiri yaitu Kecamatan Simpang Kiri.

Tabel 2.81.
Indeks Desa Membangun Kota Subulussalam Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020-2024

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Simpang Kiri	0,6698 / Berkembang	0,6726 / Berkembang	0,7248 / Maju	0,81170 / Maju	0,8629 / Mandiri
Penanggalan	0,6711 / Berkembang	0,6728 / Berkembang	0,7539 / Maju	0,79259 / Maju	0,7907 / Maju
Longkib	NA	0,5591 / Tertinggal	0,5877 / Tertinggal	0,72895 / Maju	0,7385 / Maju
Rundeng	0,5775 / Tertinggal	0,5728 / Tertinggal	0,6018 / Berkembang	0,65380 / Berkembang	0,6740 / Berkembang
Sultan Daulat	0,6000 / Berkembang	0,5998 / Berkembang	0,6076 / Berkembang	0,64318 / Berkembang	0,6599 / Berkembang
Subulussalam	0,6143 / Berkembang	0,6139 / Berkembang	0,6510 / Berkembang	0,7152 / Maju	0,7363 / Maju

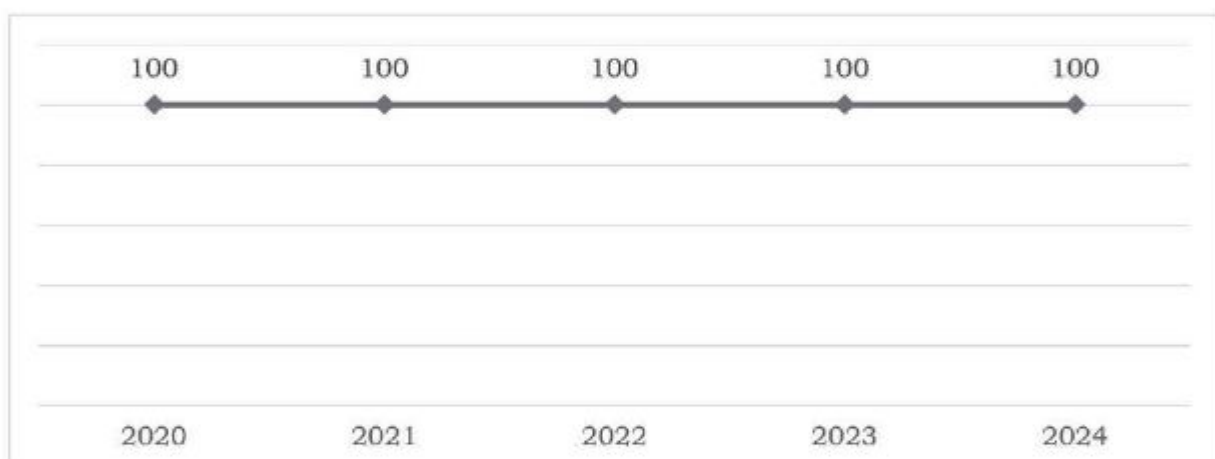
Sumber : Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, 2024

Desa mandiri di Kota Subulussalam sebesar 23,17 persen atau 19 dari 82 kampung. Masih terdapat 4,88 persen atau 4 dari 82 kampung tergolong tertinggal dan 1 kampung sangat tertinggal. Beberapa kampung yang tergolong tertinggal ini disebabkan:

- a. Ekonomi kampung yang lemah
- b. Keterbatasan infrastruktur dasar di kampung
- c. Sumber daya manusia (SDM) yang rendah
- d. Tata kelola pemerintahan kampung yang kurang baik
- e. Akses teknologi dan informasi yang terbatas
- f. Faktor geografis dan bencana alam
- g. Kurangnya partisipasi masyarakat serta dukungan pemerintah kota dalam pembangunan.

2.4.4.41. Fokus Layanan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Persentase penyelesaian potensi konflik di Kota Subulussalam mencapai 100,00 persen, terutama potensi konflik yang diakibatkan oleh SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan) dan potensi akibat pemilu dan pilkada.



Gambar 2.128.
Persentase Penyelesaian Potensi Konflik Kota Subulussalam
Tahun 2020-2024

2.4.4.42. Fokus Layanan Urusan Kekhususan

a. Syariat Islam

Dinul Islam merupakan suatu rangkaian dari 3 (tiga) pilar yaitu syari'ah, aqidah dan akhlak. Definisi Syari'ah adalah sistem norma (kaidah) Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, mengenai hubungan manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Aqidah adalah iman (keyakinan) yang ditautkan dengan Rukun Iman yang merupakan asas seluruh ajaran Islam. Sedangkan kaidah yang mengatur hubungan langsung manusia dengan Allah disebut kaidah ibadah. Selanjutnya akhlak adalah sikap yang menimbulkan perilaku baik dan

buruk. Akhlak berasal dari kata khuluk yang berarti perangai, sikap, perilaku, watak, budi pekerti.

Syariat Islam telah berlaku secara sah menjadi hukum positif di Aceh sejak tahun 2002, mulai dari tahun ini sudah beberapa qanun yang di hasilkan, qanun-qanun tersebut adalah Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum). Untuk menegakkan Syariat Islam dilakukan dengan beberapa langkah antara lain:

- **Menghidupkan Mesjid dan Meunasah**

Di samping menghidupkan Mesjid dan Meunasah melalui shalat jamaah, dianjurkan di setiap meunasah dan masjid diadakan pengajian untuk setiap tingkat umur, baik anak-anak dengan TPA dan TQA, maupun remaja dan orang tua. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi orang yang tinggal di Aceh tidak bisa mengaji dan tidak ada alasan tidak memahami agama Islam.

- **Pemberdayaan Zakat**

Wujud dari pemberdayaan zakat adalah terbentuknya Baitul Mal pada tingkat Kampong dan Kota. Sumber zakat pada tingkat kampong difokuskan pada hasil pertanian kampong dan usaha-usaha pada tingkat kampong, sedang sumber zakat Baitul Mal Kota adalah dari hasil perdagangan dan usaha pada tingkat Kota.

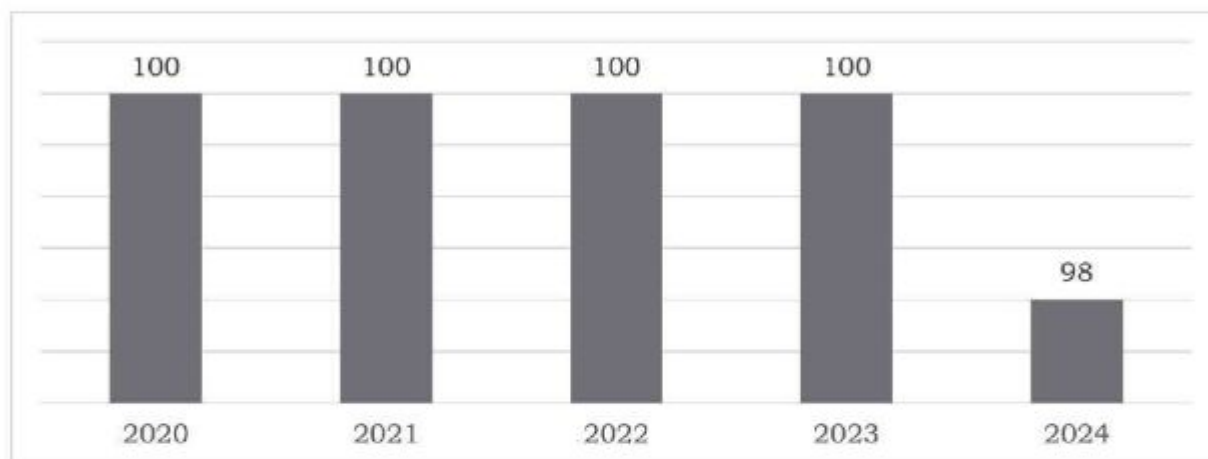
- **Lingkungan Kantor dan Sekolah yang Islami**

- Semua orang pada pagi hari sampai siang berada di tempat kerja dan lembaga pendidikan, sehingga apa yang diprogramkan pada menghidupkan mesjid dan meunasah terpenuhi secara lengkap, maka setiap lembaga atau kantor bergabung menjadi satu dan mempunyai kewenangan yang berbeda. Wilayatul Hisbah (WH) berwenang mengawasi pelaksanaan qanun-qanun Syariat Islam, Satpol PP berwenang mengawasi Perda atau qanun non Syariat. Dalam pelaksanaan kewenangan ini di lapangan masih terjadinya benturan kewenangan, dikarenakan ada sebagian anggota dari Satpol PP dan WH belum memahami secara detail apa yang menjadi tugas mereka.

Tabel 2.82.**Kasus Pelanggaran Syari'at Islam di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024**

No.	Pelanggaran	Kasus				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Busana Muslim	0	0	0	0	1
2	Khamar	2	2	2	3	2
3	Maisir	0	2	2	1	3
4	Khalwat	0	0	0	0	2
Jumlah Kasus		0	2	4	4	8

Sumber : Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam, 2024

**Gambar 2.129.****Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Syariat Islam Tahun 2020-2024****b. Pelaksanaan Ibadah**

Kondisi rumah ibadah berupa Mesjid dan meunasah, yang terus meningkat jumlahnya di Kota Subulussalam, ternyata belum sepenuhnya melaksanakan ibadah shalat lima waktu secara berjemaah. Faktanya, masih sangat banyak Masjid dan meunasah yang tersebar dalam wilayah Kota Subulussalam yang belum benar-benar rutin melaksanakan salat berjemaah lima waktu, kebanyakan hanya melaksanakan salat berjemaah Magrib dan Isya serta pelaksanaan salat jemaah Jumat.

- **Penyelenggaraan Kehidupan Adat**

Dalam masyarakat Kota Subulussalam sebagai bagian dari masyarakat Aceh, adat merupakan sesuatu yang tertulis ataupun tak tertulis yang menjadi pedoman di dalam bermasyarakat. Adat yang dipahami ini merupakan titah dari para pemimpin dan para pengambil kebijakan terdahulu guna jalannya sistim dalam masyarakat. Dalam masyarakat Kota Subulussalam, adat atau hukum adat tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sesuatu yang telah diputuskan sebagai adat atau hukum adat haruslah seirama

dengan ketentuan syariat. Dan jika adat atau hukum adat ini bertentangan Ajaran Syariat maka adat itu akan dihapuskan. Inilah bukti bahwa masyarakat Subulussalam sangat menjunjung tinggi Nilai-nilai keagamaan.

- Penyelenggaraan Pendidikan

Upaya Kota Subulussalam meningkatkan pendidikan Islami melalui dayah sudah membudaya, sehingga meskipun saat ini Kota Subulussalam memiliki lembaga pendidikan Formal, namun minat masyarakat Kota Subulussalam tetap tinggi untuk menimba ilmu pada lembaga pendidikan dayah. Tujuan pendidikan dayah adalah untuk menjaga kebutuhan masyarakat dalam bidang studi keagamaan dan dalam upaya untuk mengendalikan gejala- gejala negatif yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi dalam masyarakat.

Tabel 2.83.

Jumlah Masjid Dan Meunasah Dalam Kota Subulussalam Tahun 2020–2024

No.	Kecamatan	Masjid dan Menasah/Mushalla	Jumlah				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Simpang Kiri	Masjid Agung	1	1	1	1	1
		Masjid Jami'i	1	1	1	1	1
		Masjid Biasa	23	24	26	26	26
		Mushalla	17	52	53	53	53
2	Penanggalan	Masjid Jami'i	1	1	1	1	1
		Masjid Biasa	15	14	14	14	14
		Mushalla	16	32	33	33	33
3	Rundeng	Masjid Jami'i	1	1	1	1	1
		Masjid Biasa	22	24	24	24	24
		Mushalla	14	6	6	6	6
4	Sultan Dulat	Masjid Jami'i	1	1	1	1	1
		Masjid Biasa	19	19	19	19	19
		Meunasah	24	17	17	17	17
5	Longkib	Masjid Jami'i	1	1	1	1	1
		Masjid Biasa	14	14	14	14	14
		Mushalla	9	9	9	9	9
Jumlah Masjid			99	99	99	101	101
Jumlah Mushalla dan Meunasah			80	80	80	116	116
Jumlah Masjid/Mushalla			179	217	221	221	221

Sumber : Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam, 2024

Lembaga pendidikan dayah dalam masyarakat merupakan sebuah kebutuhan, karena dayah berperan sebagai media kontrol dalam lingkungan masyarakat. Perkembangan dayah di Kota Subulussalam dari tahun ke tahun terus meningkat dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang membutuhkan pendidikan agama Islam.

2.5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.5.1. Capaian Pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Capaian pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 disajikan pada Lampiran 2. Adapun capaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

- 1) Rata capaian kinerja tujuan pada misi “Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas” adalah 86,49 persen. Capaian kinerja terendah pada tujuan “Meningkatkan Kualitas SDM generasi muda melalui Pembinaan Olahraga”, yaitu sebesar 73,56 persen.
 - a. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada misi “Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas” adalah 91,90 persen. Capaian kinerja terendah pada sasaran “Meningkatkan Pembinaan Organisasi Olahraga untuk mewujudkan SDM generasi muda yang berkualitas” yaitu 73,41 persen. Capaian kinerja tertinggi pada sasaran “Meningkatkan Kualitas Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan” yaitu 99,06 persen.
 - b. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tujuan “Meningkatkan Kualitas Aksesibilitas, Mutu dan Daya Saing Pendidikan” adalah 95,60 persen. Capaian kinerja terendah pada sasaran “Meningkatkan Pemberian Beasiswa Berprestasi untuk Peningkatan Kualitas SDM Subulussalam” yaitu 82,70 persen. Capaian kinerja tertinggi pada sasaran “Meningkatkan Kualitas Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan” yaitu 99,06 persen.
 - c. Capaian kinerja sasaran pada tujuan “Meningkatkan Kualitas SDM generasi muda melalui Pembinaan Olahraga” dengan sasaran “Meningkatkan Pembinaan Organisasi Olahraga untuk mewujudkan SDM generasi muda yang berkualitas” adalah 73,41 persen.
- 2) Rata capaian kinerja tujuan pada misi “Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas” adalah 99,51 persen. Capaian kinerja terendah pada tujuan “Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak”, yaitu sebesar 98,68 persen. Sedangkan capaian kinerja tertinggi pada tujuan “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan” yaitu 99,93 persen.
 - a. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada misi “Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas” adalah 71,24 persen. Capaian kinerja terendah pada sasaran “Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap

- Pembuatan Dokumen Perencanaan dan Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup” yaitu dengan rata-rata 00,00 persen. Indikator Kota Layak Anak belum mencapai target yang ditetapkan. Capaian kinerja tertinggi pada sasaran “Meningkatnya Pemantauan Terhadap Kualitas Lingkungan” yaitu 98,89 persen.
- b. Capaian kinerja sasaran pada tujuan “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan” dengan sasaran “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” adalah 70,08 persen. Indikator dengan capaian terendah adalah Laju Pertumbuhan Penduduk dengan 45,33 persen.
 - c. Capaian kinerja sasaran pada tujuan “Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak” dengan sasaran “Meningkatkan derajat kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak” adalah 49,90 persen. Indikator dengan capaian terendah adalah Kota Layak Anak dengan 00,00 persen.
 - d. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tujuan “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup” adalah 79,13 persen. Capaian kinerja terendah pada sasaran “Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Pembuatan Dokumen Perencanaan dan Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup” yaitu 00,00 persen. Capaian kinerja tertinggi pada sasaran “Meningkatnya Pemantauan Terhadap Kualitas Lingkungan” yaitu 98,89 persen.
- 3) Rata capaian kinerja tujuan pada misi “Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Berbasis Kesejahteraan Masyarakat” adalah 83,97 persen. Capaian kinerja terendah pada tujuan “Mengembangkan Infrastruktur Pariwisata untuk Kesejahteraan Masyarakat”, yaitu sebesar 80,00 persen.
- a. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada misi “Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Berbasis Kesejahteraan Masyarakat” adalah 71,72 persen. Capaian kinerja terendah pada sasaran “Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Pelestarian Kebudayaan Daerah” yaitu dengan 14,77 persen. Capaian kinerja tertinggi pada sasaran “Meningkatnya infrastruktur jalan yang baik dan terintegrasi” yaitu 100,00 persen.
 - b. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tujuan “Meningkatnya Infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas” adalah 89,20 persen. Capaian kinerja terendah pada sasaran “Meningkatnya akses air minum layak” yaitu 63,33

- persen. Capaian kinerja tertinggi pada sasaran “Meningkatnya infrastruktur jalan yang baik dan terintegrasi” yaitu 100,00 persen.
- c. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tujuan “Mengembangkan Infrastruktur Pariwisata untuk Kesejahteraan Masyarakat” adalah 28,02 persen. Capaian kinerja terendah pada sasaran “Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Pelestarian Kebudayaan Daerah” yaitu 14,77 persen.
- 4) Rata capaian kinerja tujuan pada misi “Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Yang Memiliki Nilai Ekonomis Dan Prospek Pasar Yang Baik” adalah 98,78 persen. Capaian kinerja terendah pada tujuan “Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat”, yaitu sebesar 98,80 persen.
- a. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada misi “Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Yang Memiliki Nilai Ekonomis Dan Prospek Pasar Yang Baik” adalah 85,11 persen. Capaian kinerja terendah pada sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan” yaitu dengan 49,39 persen.
- b. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tujuan “Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat” adalah 93,55 persen. Capaian kinerja terendah pada sasaran “Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi” yaitu 86,94 persen. Capaian kinerja tertinggi pada sasaran “Meningkatkan komoditas pertanian yang mendukung kesejahteraan rakyat” yaitu 99,89 persen.
- c. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tujuan “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat” adalah 81,79 persen. Capaian kinerja terendah pada sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan” yaitu 49,39 persen.
- 5) Rata capaian kinerja tujuan pada misi “Mewujudkan Pemerintahan Yang Baru, Profesional Dan Transparan” adalah 69,41 persen. Capaian kinerja terendah pada tujuan “Meningkatkan akses informasi dan telekomunikasi yang cepat, aman dan Transparan.”, yaitu sebesar 43,78 persen. Sedangkan capaian kinerja tertinggi pada tujuan “Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana” yaitu 88,38 persen.
- a. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada misi “Mewujudkan Pemerintahan Yang Baru, Profesional Dan Transparan” adalah 71,66 persen. Capaian kinerja terendah pada sasaran “Meningkatnya Layanan informasi dan Telekomunikasi” yaitu dengan 41,36 persen. Capaian kinerja tertinggi pada

- sasaran “Meningkatnya sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana” yaitu dengan rata-rata 98,29 persen.
- b. Capaian kinerja sasaran pada tujuan “Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, profesional dan transparan” dengan sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas pelayanan publik” adalah 65,14 persen. Indikator dengan capaian kinerja terendah yaitu Nilai AKIP dengan 20,00 persen.
 - c. Capaian kinerja sasaran pada tujuan “Meningkatkan Layanan kinerja Lalulintas Angkutan Jalan” dengan sasaran “Meningkatnya Konektivitas dan Keselamatan Layanan Angkutan Jalan” adalah 89,95 persen.
 - d. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tujuan “Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana” adalah 96,70 persen. Capaian kinerja terendah pada sasaran “Meningkatnya Ketahanan dan keselamatan kebakaran” yaitu 95,11 persen.
 - e. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tujuan “Meningkatkan akses informasi dan telekomunikasi yang cepat, aman dan Transparan” dengan sasaran “Meningkatnya Layanan informasi dan Telekomunikasi” adalah 41,36 persen.
- 6) Rata capaian kinerja tujuan pada misi “Mewujudkan Penerapan Syariat Islam Melalui Pengaturan Sistem Sosial Yang Berbasis Islam Dalam Kehidupan” adalah 97,14 persen. Capaian kinerja terendah pada tujuan “Peningkatan Kesejahteraan Anak Yatim, Fakir Miskin, Kaum Dhuafa”, yaitu sebesar 94,81 persen.
- a. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada misi “Mewujudkan Penerapan Syariat Islam Melalui Pengaturan Sistem Sosial Yang Berbasis Islam Dalam Kehidupan” adalah 91,17 persen. Capaian kinerja terendah pada sasaran “Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan syariat Islam” yaitu dengan rata-rata 86,76 persen.
 - b. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tujuan “Terwujudnya Sistem Sosial dan Budaya yang Sejalan Dengan Nilai-nilai Keislaman” adalah 89,41 persen. Capaian kinerja terendah pada sasaran “Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan syariat Islam” yaitu 86,41 persen.
 - c. Capaian kinerja sasaran pada tujuan “Peningkatan Kesejahteraan Anak Yatim, Fakir Miskin, Kaum Dhuafa” dengan sasaran “Penguatan Tatanan Ekonomi Berbasis Syariat” adalah 100,00 persen.

Adapun capaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

- 1) Rata capaian kinerja tujuan pada misi “Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas” adalah 65,97 persen. Capaian kinerja terendah pada tujuan “Meningkatkan Kualitas SDM generasi muda melalui Pembinaan Olahraga”, yaitu sebesar 33,33 persen.
 - a. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada misi “Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas” adalah 83,76 persen. Capaian kinerja terendah pada sasaran “Meningkatkan Pemberian Beasiswa Berprestasi untuk Peningkatan Kualitas SDM Subulussalam” yaitu 27,79 persen. Capaian kinerja tertinggi pada sasaran “Meningkatkan Pembinaan Organisasi Olahraga untuk mewujudkan SDM generasi muda yang berkualitas” yaitu 100,00 persen.
 - b. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tujuan “Meningkatkan Kualitas Aksesibilitas, Mutu dan Daya Saing Pendidikan” adalah 79,70 persen. Capaian kinerja terendah pada sasaran “Meningkatkan Pemberian Beasiswa Berprestasi untuk Peningkatan Kualitas SDM Subulussalam” yaitu 27,79 persen. Capaian kinerja tertinggi pada sasaran “Meningkatkan Kualitas Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan” yaitu 97,55 persen.
 - c. Capaian kinerja sasaran pada tujuan “Meningkatkan Kualitas SDM generasi muda melalui Pembinaan Olahraga” dengan sasaran “Meningkatkan Pembinaan Organisasi Olahraga untuk mewujudkan SDM generasi muda yang berkualitas” adalah 100,00 persen.
- 2) Rata capaian kinerja tujuan pada misi “Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas” adalah 99,27 persen. Capaian kinerja terendah pada tujuan “Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak”, yaitu sebesar 98,03 persen. Sedangkan capaian kinerja tertinggi pada tujuan “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan” yaitu 99,94 persen.
 - a. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada misi “Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas” adalah 74,17 persen. Capaian kinerja terendah pada sasaran “Meningkatkan derajat kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak” yaitu dengan rata-rata 49,63 persen. Indikator Kota Layak Anak belum mencapai target yang ditetapkan. Capaian kinerja tertinggi pada sasaran “Meningkatkan Upaya Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim” yaitu 100,00 persen.

- b. Capaian kinerja sasaran pada tujuan “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan” dengan sasaran “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” adalah 85,51 persen. Indikator dengan capaian terendah adalah Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dengan 42,04 persen.
 - c. Capaian kinerja sasaran pada tujuan “Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak” dengan sasaran “Meningkatkan derajat kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak” adalah 49,63 persen. Indikator dengan capaian terendah adalah Kota Layak Anak dengan 00,00 persen.
 - d. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tujuan “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup” adalah 97,98 persen. Capaian kinerja terendah pada sasaran “Meningkatnya Pemantauan Terhadap Kualitas Lingkungan” yaitu 97,31 persen.
- 3) Rata capaian kinerja tujuan pada misi “Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Berbasis Kesejahteraan Masyarakat” adalah 35,10 persen. Capaian kinerja terendah pada tujuan “Mengembangkan Infrastruktur Pariwisata untuk Kesejahteraan Masyarakat”, yaitu sebesar 0,00 persen.
- a. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada misi “Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Berbasis Kesejahteraan Masyarakat” adalah 62,09 persen. Capaian kinerja terendah pada sasaran “Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Pelestarian Kebudayaan Daerah” yaitu dengan 00,00 persen. Capaian kinerja tertinggi pada sasaran “Meningkatnya infrastruktur jalan yang baik dan terintegrasi” yaitu 100,00 persen.
 - b. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tujuan “Meningkatnya Infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas” adalah 85,66 persen. Capaian kinerja terendah pada sasaran “Meningkatnya akses air minum layak” yaitu 56,47 persen. Capaian kinerja tertinggi pada sasaran “Meningkatnya infrastruktur jalan yang baik dan terintegrasi” yaitu 100,00 persen.
 - c. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tujuan “Mengembangkan Infrastruktur Pariwisata untuk Kesejahteraan Masyarakat” adalah 3,17 persen. Capaian kinerja terendah pada sasaran “Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Pelestarian Kebudayaan Daerah” yaitu 00,00 persen. Capaian kinerja tertinggi pada sasaran “Meningkatkan Promosi dan Daya Tarik Wisatawan” yaitu 6,33 persen.

- 4) Rata capaian kinerja tujuan pada misi “Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Yang Memiliki Nilai Ekonomis Dan Prospek Pasar Yang Baik” adalah 100,00 persen.
- a. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada misi “Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Yang Memiliki Nilai Ekonomis Dan Prospek Pasar Yang Baik” adalah 95,05 persen. Capaian kinerja terendah pada sasaran “Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi” yaitu dengan 81,25 persen.
 - b. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tujuan “Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat” adalah 90,71 persen. Capaian kinerja terendah pada sasaran “Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi” yaitu 81,25 persen. Capaian kinerja tertinggi pada sasaran “Meningkatkan komoditas pertanian yang mendukung kesejahteraan rakyat” yaitu 100,00 persen.
 - c. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tujuan “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat” adalah 99,39 persen. Capaian kinerja terendah pada sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan” yaitu 97,56 persen.
- 5) Rata capaian kinerja tujuan pada misi “Mewujudkan Pemerintahan Yang Baru, Profesional Dan Transparan” adalah 85,08 persen. Capaian kinerja terendah pada tujuan “Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana”, yaitu sebesar 43,62 persen. Sedangkan capaian kinerja tertinggi pada tujuan “Meningkatkan Layanan kinerja Lalulintas Angkutan Jalan” yaitu 100,00 persen.
- a. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada misi “Mewujudkan Pemerintahan Yang Baru, Profesional Dan Transparan” adalah 79,72 persen. Capaian kinerja terendah pada sasaran “Meningkatnya Layanan informasi dan Telekomunikasi” yaitu dengan 44,57 persen. Capaian kinerja tertinggi pada sasaran “Meningkatnya Konektivitas dan Keselamatan Layanan Angkutan Jalan” yaitu dengan rata-rata 98,69 persen.
 - b. Capaian kinerja sasaran pada tujuan “Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, professional dan transparan” dengan sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas pelayanan publik” adalah 75,00 persen. Indikator dengan capaian kinerja terendah yaitu Nilai AKIP dengan 00,00 persen.

- c. Capaian kinerja sasaran pada tujuan “Meningkatkan Layanan kinerja Lalulintas Angkutan Jalan” dengan sasaran “Meningkatnya Konektivitas dan Keselamatan Layanan Angkutan Jalan” adalah 98,69 persen.
 - d. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tujuan “Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana” adalah 87,78 persen. Capaian kinerja terendah pada sasaran “Meningkatnya Ketahanan dan keselamatan kebakaran” yaitu 75,76 persen.
 - e. Capaian kinerja sasaran pada tujuan “Meningkatkan akses informasi dan telekomunikasi yang cepat, aman dan Transparan” dengan sasaran “Meningkatnya Layanan informasi dan Telekomunikasi” adalah 44,57 persen.
- 6) Rata capaian kinerja tujuan pada misi “Mewujudkan Penerapan Syariat Islam Melalui Pengaturan Sistem Sosial Yang Berbasis Islam Dalam Kehidupan” adalah 97,35 persen. Capaian kinerja terendah pada tujuan “Peningkatan Kesejahteraan Anak Yatim, Fakir Miskin, Kaum Dhuafa”, yaitu sebesar 96,00 persen.
- a. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada misi “Mewujudkan Penerapan Syariat Islam Melalui Pengaturan Sistem Sosial Yang Berbasis Islam Dalam Kehidupan” adalah 93,27 persen. Capaian kinerja terendah pada sasaran “Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan syariat Islam” yaitu dengan rata-rata 89,91 persen.
 - b. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tujuan “Terwujudnya Sistem Sosial dan Budaya yang Sejalan Dengan Nilai-nilai Keislaman” adalah 91,93 persen. Capaian kinerja terendah pada sasaran “Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan syariat Islam” yaitu 89,91 persen. Capaian kinerja tertinggi pada sasaran “Meningkatnya Pembinaan Adat Istiadat yang Bernilai Syariat” yaitu 100,00 persen.
 - c. Capaian kinerja sasaran pada tujuan “Peningkatan Kesejahteraan Anak Yatim, Fakir Miskin, Kaum Dhuafa” dengan sasaran “Penguatan Tatanan Ekonomi Berbasis Syariat” adalah 100,00 persen.

2.5.2. Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama

Capaian pelaksanaan indikator kinerja utama (IKU) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 disajikan pada Lampiran 3. Adapun capaian IKU Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

- 1) Rata-rata capaian IKU Kota Subulussalam pada tahun 2020-2024 adalah 78,99 persen. Capaian IKU terendah pada indikator “Predikat Kota layak Anak

Subulussalam”, “Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha dan/atau kegiatan Yang Sudah Dinilai/Diperiksa (> 80%)”, dan “Pola Pangan Harapan” masing-masing 0,00 persen. Capaian IKU tertinggi pada indikator “Persentase Sekolah yang terakreditasi $\geq$ B”, “Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah $\geq$ C”, “Indeks Kualitas Udara”, “Persentase Jalan Kondisi Baik”, “Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan”, “Indeks Melek Al-Qur'an”, “Persentase Mesjid yang Aktif Shalat Jamaah 5 waktu”, “Persentase Kasus Pelanggaran Syari'at Islam yang ditangani”, dan “Persentase penyaluran ZIS terhadap golongan penerima ZIS” masing-masing 100,00 persen.

- 2) Rata-rata capaian IKU Kota Subulussalam pada tahun 2024 adalah 84,05 persen. Capaian IKU terendah pada indikator “Predikat Kota layak Anak Subulussalam”, “Persentase benda/situs cagar budaya daerah yang dilestarikan”, dan “Nilai AKIP” masing-masing 0,00 persen.

2.5.3. Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Bidang Urusan

Capaian pelaksanaan kinerja indikator kinerja daerah (IKD) berdasarkan bidang urusan disajikan pada Lampiran 4. Adapun capaian kinerja IKD berdasarkan bidang urusan sebagai berikut.

- 1) Rata-rata capaian kinerja aspek pelayanan umum IKD berdasarkan bidang urusan tahun 2020-2024 adalah 76,96 atau berkategori “Sedang”. Capaian terendah pada bidang urusan kelautan dan perikanan yaitu 28,80 persen. Sedangkan capaian tertinggi pada bidang urusan statistik dan kecamatan dengan masing-masing 100,00 persen.
- 2) Rata-rata capaian kinerja aspek pelayanan umum IKD berdasarkan bidang urusan tahun 2024 adalah 67,33. Capaian terendah pada bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman; pangan; pertanahan; kebudayaan; dan transmigrasi dengan masing-masing 00,00 persen. Sedangkan capaian tertinggi pada bidang urusan tenaga kerja; komunikasi dan informatika; penanaman modal; statistik; kearsipan; pertanian; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; penelitian dan pengembangan; kecamatan; kesatuan bangsa dan politik dengan masing-masing 100,00 persen.
- 3) Rata-rata capaian IKD aspek kesejahteraan masyarakat yaitu 87,22 persen dengan capaian terendah berasal dari tahun 2023 yaitu 77,51 persen dan capaian tertinggi berasal dari tahun 2021 yaitu 94,85 persen.

- 4) Rata-rata capaian IKD aspek daya saing daerah yaitu 72,99 persen dengan capaian terendah berasal dari tahun 2024 yaitu 67,14 persen dan capaian tertinggi berasal dari tahun 2020 yaitu 92,73 persen.
- 5) Rata-rata capaian IKD berdasarkan bidang urusan dengan menggunakan perhitungan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah diperoleh nilai 76,96 atau berkategori "Tinggi".

Tabel 2.84.
Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Daerah Aspek Pelayanan Umum Tahun 2020-2024

No.	Bidang Urusan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata	Keterangan
1	Pendidikan	98,70	98,78	99,30	83,80	69,30	92,26	Sangat Tinggi
2	Kesehatan	75,89	78,15	76,59	62,31	77,00	73,99	Sedang
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35,75	31,35	30,93	73,10	65,68	45,67	Sangat Rendah
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	65,00	99,62	77,27	0,00	0,00	40,32	Sangat Rendah
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	70,06	71,66	70,90	95,19	87,41	77,16	Tinggi
6	Sosial	50,00	46,63	66,67	100,00	83,15	62,62	Rendah
7	Tenaga Kerja	21,04	54,08	22,29	100,00	100,00	42,12	Sangat Rendah
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	75,51	75,58	75,56	95,53	93,86	80,60	Tinggi
9	Pangan	33,33	51,11	33,33	100,00	0,00	43,56	Sangat Rendah
10	Pertanahan	33,33	33,33	36,77	0,00	0,00	34,48	Sangat Rendah
11	Lingkungan Hidup	33,33	42,60	50,00	58,73	88,20	53,62	Rendah
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100,00	100,00	90,02	70,77	71,75	85,77	Tinggi
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	82,11	81,88	100,00	100,00	98,23	90,34	Tinggi
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	85,43	78,71	74,16	51,40	55,43	70,95	Sedang
15	Perhubungan	57,12	62,13	45,77	66,67	66,67	55,01	Rendah
16	Komunikasi dan Informatika	100,00	97,28	90,21	100,00	100,00	97,50	Sangat Tinggi
17	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah	75,35	90,89	66,68	19,81	21,32	42,53	Sangat Rendah
18	Penanaman Modal	66,67	38,38	54,63	96,88	100,00	58,19	Rendah
19	Statistik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
20	Kebudayaan	25,00	25,00	66,67	0,00	0,00	23,33	Sangat Rendah
21	Perpustakaan	13,94	24,30	31,51	78,96	91,56	34,61	Sangat Rendah
22	Kearsipan	100,00	50,00	50,00	10,25	100,00	57,69	Rendah
23	Kelautan dan Perikanan	11,08	16,41	9,86	33,33	33,33	20,80	Sangat Rendah
24	Pariwisata	42,65	34,91	30,95	100,00	50,00	46,67	Sangat Rendah
25	Pertanian	77,10	89,55	90,08	100,00	100,00	90,72	Tinggi
26	Energi dan Sumber Daya Mineral	100,00	100,00	94,60	100,00	100,00	98,20	Sangat Tinggi
27	Perdagangan	96,43	95,74	100,00	100,00	100,00	97,39	Sangat Tinggi
28	Perindustrian	100,00	34,33	33,87	97,78	62,35	67,01	Sedang
29	Transmigrasi	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	60,00	Rendah
30	Sekretariat Daerah	64,12	75,00	74,67	63,70	77,17	70,85	Sedang
31	Sekretariat DPRK	80,00	76,92	88,89	100,00	87,50	89,37	Tinggi
32	Inspektorat Daerah	75,24	81,20	57,81	45,44	34,38	64,34	Rendah
33	Perencanaan	90,00	90,00	90,00	78,07	75,54	81,24	Tinggi

No.	Bidang Urusan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata	Keterangan
34	Keuangan	99,79	97,28	97,94	66,67	66,67	94,08	Sangat Tinggi Tinggi
35	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan	100,00	100,00	100,00	74,43	73,66	79,24	
36	Penelitian dan pengembangan Kecamatan			72,40	100,00	100,00	86,46	Tinggi
37	Kesatuan Bangsa dan Politik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi Sedang
38					50,00	100,00	75,00	
Kekhusuan Aceh								
39	Pendidikan Islam	98,53	83,33	84,36	79,56	33,05	72,67	Sedang
40	Keagamaan	92,37	83,33	100,00	100,00	80,83	92,73	Sangat Tinggi
41	Kebudayaan	100,00	50,00	50,00	50,00	16,67	36,67	Sangat Rendah
Rata-rata		72.43	70.24	69.62	70.79	67.33	67.94	Sedang

Tabel 2.85.
Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Tahun 2020-2024

No.	Bidang Urusan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata	Keterangan
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	92,06	94,85	82,90	77,51	75,55	87,22	Tinggi
2	ASPEK DAYA SAING DAERAH	92,73	79,87	83,84	83,12	67,14	72,99	Sedang
3	ASPEK PELAYANAN UMUM	72,43	70,24	69,62	70,79	67,33	70,08	Sedang
Total		85,39	81,75	78,53	76,84	70,15	76,96	Tinggi

2.5.4. Capaian Pelaksanaan Kinerja RPJMD

Capaian pelaksanaan RPJMD Kota Subulussalam Hingga Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.79. Adapun capaian RPJMD Kota Subulussalam adalah sebagai berikut:

- a. Rata-rata capaian kinerja Program RPJMD Kota Subulussalam sebesar 83,82 persen dengan capaian kinerja tertinggi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, dan Kecamatan Penanggalan dengan masing-masing capaian 100,00 persen. Sedangkan capaian kinerja terendah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan capaian kinerja hanya 37,94 persen.
- b. Rata-rata capaian serapan anggaran Program RPJMD Kota Subulussalam sebesar 164,97 persen dengan capaian kinerja tertinggi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan capaian sebesar 980,38 persen. Sedangkan capaian kinerja terendah pada Dinas Sosial dengan capaian kinerja hanya 63,02 persen.

2.5.5. Capaian Pelaksanaan Kinerja RKPK

Capaian pelaksanaan RKPK Subulussalam Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.80. Adapun capaian RKPK Subulussalam adalah sebagai berikut:

- a. Rata-rata capaian kinerja Program RKPK Subulussalam sebesar 92,65 persen dengan capaian kinerja tertinggi pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Kecamatan Penanggalan dan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dengan masing-masing capaian 100,00 persen. Sedangkan capaian kinerja terendah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan capaian kinerja hanya 37,94 persen.
- b. Rata-rata capaian kinerja kegiatan RKPK Subulussalam sebesar 79,83 persen dengan capaian kinerja tertinggi pada Kecamatan Longkib dengan capaian 99,94 persen. Sedangkan capaian kinerja terendah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan capaian kinerja hanya 39,35 persen.
- c. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan RKPK Subulussalam sebesar 81,10 persen dengan capaian kinerja tertinggi pada Dinas Pangan dengan capaian kinerja 100,00 persen. Sedangkan capaian kinerja terendah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan capaian kinerja hanya 34,96 persen.
- d. Rata-rata capaian serapan anggaran Program RKPK Subulussalam sebesar 75,53 persen dengan capaian kinerja tertinggi pada Kecamatan Longkib dengan capaian sebesar 100,78 persen. Sedangkan capaian kinerja terendah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan capaian kinerja hanya 33,83 persen.
- e. Rata-rata capaian serapan anggaran kegiatan RKPK Subulussalam sebesar 76,12 persen dengan capaian kinerja tertinggi pada Kecamatan Longkib dengan capaian 101,36 persen. Sedangkan capaian kinerja terendah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan capaian kinerja hanya 38,84 persen.
- f. Rata-rata capaian serapan anggaran sub kegiatan RKPK Subulussalam sebesar 80,01 persen dengan capaian kinerja tertinggi pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dengan capaian kinerja 298,08 persen. Sedangkan capaian kinerja terendah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan capaian kinerja hanya 35,50 persen.

Tabel 2.86.
Capaian Kinerja RPJMD Subulussalam Hingga Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Capaian Serapan Anggaran	
		Program	Kategori	Program	Kategori
1	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	99,44	Sangat Tinggi	113,28	Sangat Tinggi
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	79,39	Tinggi	119,00	Sangat Tinggi
3	Dinas Kesehatan	98,84	Sangat Tinggi	140,07	Sangat Tinggi
4	Rumah Sakit Umum Daerah	90,06	Tinggi	125,18	Sangat Tinggi
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	68,81	Sedang	78,78	Tinggi
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100,00	Sangat Tinggi	673,43	Sangat Tinggi
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	100,00	Sangat Tinggi	142,03	Sangat Tinggi
8	Dinas Sosial	79,01	Tinggi	63,02	Rendah
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	98,50	Sangat Tinggi	226,39	Sangat Tinggi
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	85,50	Tinggi	249,50	Sangat Tinggi
11	Dinas Pangan	84,38	Tinggi	92,36	Sangat Tinggi
12	Dinas Pertanahan	66,65	Sedang	94,63	Sangat Tinggi
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	81,58	Tinggi	138,94	Sangat Tinggi
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	69,53	Sedang	78,26	Tinggi
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	37,94	Sangat Rendah	135,40	Sangat Tinggi
16	Dinas Perhubungan	100,00	Sangat Tinggi	87,45	Tinggi
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	80,28	Tinggi	109,69	Sangat Tinggi
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100,00	Sangat Tinggi	119,89	Sangat Tinggi
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	71,38	Sedang	106,64	Sangat Tinggi
20	Sekretariat Majelis Adat Aceh	71,02	Sedang	117,94	Sangat Tinggi
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	53,42	Rendah	980,38	Sangat Tinggi
22	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	96,95	Sangat Tinggi	371,72	Sangat Tinggi
23	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	89,67	Tinggi	148,47	Sangat Tinggi
24	Sekretariat Daerah	91,07	Sangat Tinggi	109,14	Sangat Tinggi
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota	68,58	Sedang	100,93	Sangat Tinggi
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	92,24	Sangat Tinggi	111,20	Sangat Tinggi
27	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	96,60	Sangat Tinggi	87,24	Tinggi
28	sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	100,00	Sangat Tinggi	144,58	Sangat Tinggi

No	Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Capaian Serapan Anggaran	
		Program	Kategori	Program	Kategori
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	76,95	Tinggi	91,28	Sangat Tinggi
30	Inspektorat	73,65	Sedang	126,33	Sangat Tinggi
31	Kecamatan Longkib	98,4	Sangat Tinggi	177,28	Sangat Tinggi
32	Kecamatan Penanggalan	100,00	Sangat Tinggi	129,38	Sangat Tinggi
33	Kecamatan Rundeng	61,81	Rendah	136,83	Sangat Tinggi
34	Kecamatan Simpang Kiri	80,88	Tinggi	113,27	Sangat Tinggi
35	Kecamatan Sultan Daulat	61,36	Rendah	125,51	Sangat Tinggi
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	91,39	Sangat Tinggi	197,05	Sangat Tinggi
37	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	98,66	Sangat Tinggi	112,74	Sangat Tinggi
38	Sekretariat Baitul Mal	92,89	Sangat Tinggi	88,73	Tinggi
39	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	82,14	Tinggi	69,88	Sedang
Minimal		37,94	Sangat Rendah	63,02	Rendah
Rata-rata		83,82	Tinggi	164,97	Sangat Tinggi
Median		85,5	Tinggi	119	Sangat Tinggi
Maksimal		100	Sangat Tinggi	980,38	Sangat Tinggi

Tabel 2.87.
Capaian Kinerja RKPK Subulussalam Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Capaian Kinerja						Capaian Serapan Anggaran					
		Sub Kegiatan	Kategori	Kegiatan	Kategori	Program	Kategori	Sub Kegiatan	Kategori	Kegiatan	Kategori	Program	Kategori
1	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	80,00	Tinggi	84,47	Tinggi	100,00	Sangat Tinggi	69,16	Sedang	83,16	Tinggi	85,76	Tinggi
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	82,82	Tinggi	65,82	Rendah	65,82	Rendah	68,59	Sedang	73,38	Sedang	73,38	Sedang
3	Dinas Kesehatan	77,16	Tinggi	76,61	Tinggi	100,00	Sangat Tinggi	77,94	Tinggi	72,33	Sedang	76,02	Tinggi
4	Rumah Sakit Umum Daerah	78,57	Tinggi	84,65	Tinggi	93,62	Sangat Tinggi	74,85	Sedang	89,87	Tinggi	90,36	Tinggi
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	72,33	Sedang	62,60	Rendah	63,92	Rendah	62,98	Rendah	62,52	Rendah	52,72	Rendah
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	95,83	Sangat Tinggi	98,19	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi	89,81	Tinggi	84,48	Tinggi	83,40	Tinggi
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	41,10	Sangat Rendah	85,40	Tinggi	87,24	Tinggi	82,50	Tinggi	88,21	Tinggi	89,84	Tinggi
8	Dinas Sosial	81,17	Tinggi	73,76	Sedang	66,51	Sedang	72,78	Sedang	71,47	Sedang	64,41	Rendah
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	85,36	Tinggi	86,85	Tinggi	99,89	Sangat Tinggi	68,72	Sedang	87,30	Tinggi	98,50	Sangat Tinggi
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	79,46	Tinggi	71,63	Sedang	85,50	Tinggi	72,39	Sedang	77,95	Tinggi	77,30	Tinggi
11	Dinas Pangan	100,00	Sangat Tinggi	91,54	Sangat Tinggi	84,38	Tinggi	93,77	Sangat Tinggi	89,49	Tinggi	87,59	Tinggi
12	Dinas Pertanahan	82,50	Tinggi	73,44	Sedang	66,65	Sedang	86,21	Tinggi	65,45	Rendah	64,57	Rendah
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	90,37	Tinggi	84,00	Tinggi	81,93	Tinggi	91,54	Sangat Tinggi	93,57	Sangat Tinggi	89,24	Tinggi
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	91,46	Sangat Tinggi	67,26	Sedang	70,53	Sedang	60,00	Rendah	61,58	Rendah	50,75	Sangat Rendah
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	34,96	Sangat Rendah	39,35	Sangat Rendah	37,94	Sangat Rendah	35,50	Sangat Rendah	38,84	Sangat Rendah	33,83	Sangat Rendah
16	Dinas Perhubungan	84,60	Tinggi	98,17	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi	89,23	Tinggi	92,32	Sangat Tinggi	96,99	Sangat Tinggi
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	59,96	Rendah	52,34	Rendah	73,70	Sedang	61,73	Rendah	56,68	Rendah	65,42	Rendah
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	97,50	Sangat Tinggi	98,77	Sangat Tinggi	99,49	Sangat Tinggi	91,41	Sangat Tinggi	87,16	Tinggi	97,34	Sangat Tinggi
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	67,81	Sedang	82,48	Tinggi	77,33	Tinggi	65,61	Rendah	67,35	Sedang	74,16	Sedang
20	Sekretariat Majelis Adat Aceh	88,96	Tinggi	70,89	Sedang	71,02	Sedang	74,40	Sedang	73,26	Sedang	64,69	Rendah
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	96,98	Sangat Tinggi	99,69	Sangat Tinggi	53,42	Rendah	84,33	Tinggi	94,53	Sangat Tinggi	98,85	Sangat Tinggi
22	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	94,44	Sangat Tinggi	87,56	Tinggi	84,62	Tinggi	66,07	Sedang	77,68	Tinggi	67,42	Sedang
23	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	99,47	Sangat Tinggi	90,30	Tinggi	83,53	Tinggi	85,33	Tinggi	73,59	Sedang	63,13	Rendah
24	Sekretariat Daerah	97,37	Sangat Tinggi	80,00	Tinggi	83,33	Tinggi	90,30	Tinggi	89,09	Tinggi	83,70	Tinggi
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota	92,05	Sangat Tinggi	75,79	Sedang	73,19	Sedang	77,91	Tinggi	72,02	Sedang	64,42	Rendah
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	75,57	Sedang	97,22	Sangat Tinggi	74,43	Sedang	82,62	Tinggi	80,45	Tinggi	79,61	Tinggi

No	Perangkat Daerah	Capaian Kinerja						Capaian Serapan Anggaran					
		Sub Kegiatan	Kategori	Kegiatan	Kategori	Program	Kategori	Sub Kegiatan	Kategori	Kegiatan	Kategori	Program	Kategori
27	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	98,28	Sangat Tinggi	93,59	Sangat Tinggi	95,74	Sangat Tinggi	94,07	Sangat Tinggi	88,45	Tinggi	83,68	Tinggi
28	sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	81,82	Tinggi	98,18	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi	298,08	Sangat Tinggi	89,49	Tinggi	93,62	Sangat Tinggi
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	73,77	Sedang	61,76	Rendah	77,85	Tinggi	60,46	Rendah	64,49	Rendah	72,76	Sedang
30	Inspektorat	83,06	Tinggi	90,51	Tinggi	85,78	Tinggi	87,67	Tinggi	92,64	Sangat Tinggi	92,48	Sangat Tinggi
31	Kecamatan Longkib	94,37	Sangat Tinggi	99,94	Sangat Tinggi	99,89	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi	101,36	Sangat Tinggi	100,78	Sangat Tinggi
32	Kecamatan Penanggalan	76,23	Tinggi	86,05	Tinggi	100,00	Sangat Tinggi	68,22	Sedang	80,90	Tinggi	82,30	Tinggi
33	Kecamatan Rundeng	61,08	Rendah	56,97	Rendah	60,90	Rendah	58,88	Rendah	62,30	Rendah	43,75	Sangat Rendah
34	Kecamatan Simpang Kiri	72,00	Sedang	76,30	Tinggi	80,88	Tinggi	53,82	Rendah	57,44	Rendah	50,38	Sangat Rendah
35	Kecamatan Sultan Daulat	72,97	Sedang	61,84	Rendah	61,36	Rendah	66,91	Sedang	51,58	Rendah	45,20	Sangat Rendah
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	66,67	Sedang	86,34	Tinggi	91,39	Sangat Tinggi	53,20	Rendah	71,05	Sedang	77,15	Tinggi
37	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	83,52	Tinggi	83,65	Tinggi	98,66	Sangat Tinggi	79,32	Tinggi	83,87	Tinggi	92,54	Sangat Tinggi
38	Sekretariat Baitul Mal	91,44	Sangat Tinggi	63,96	Rendah	92,89	Sangat Tinggi	56,34	Rendah	53,32	Rendah	77,53	Tinggi
39	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	79,77	Tinggi	75,82	Sedang	100,00	Sangat Tinggi	67,83	Sedang	67,95	Sedang	60,13	Rendah
Minimal		34,96		39,35		37,94		35,50		38,84		33,83	
Rata-rata		81,10	Tinggi	79,84	Tinggi	82,65	Tinggi	80,01	Tinggi	76,12	Tinggi	75,53	Sedang
Median		82,50		83,65		84,38		74,40		77,68		77,30	
Maksimal		100,00		99,94		100,00		298,08		101,36		100,78	

2.5.6. Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

Capaian standar pelayanan minimal (SPM) Kota Subulussalam meningkat sejak tahun 2020 (Tabel 2.88). Peningkatan SPM ini tentunya dengan meningkatnya ketersediaan data yang disajikan pada *website* pelaporan SPM. Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan SPM di Kota Subulussalam adalah:

- a. Pelayanan kesehatan yang belum memadai seperti fasilitas kesehatan tidak merata, SDM kesehatan yang tidak ideal, serta belum maksimalnya pelayanan kesehatan dasar
- b. Pendidikan yang kurang berkualitas seperti pemerataan guru, infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang tidak merata dan kurang bagus, tingkat partisipasi sekolah yang rendah, serta minimnya akses pendidikan inklusif
- c. Air bersih dan sanitasi
- d. Pelayanan terhadap korban bencana dan korban dampak program pemerintah
- e. Infrastruktur dasar yang masih kurang merata
- f. Kualitas SDM pelayanan dasar
- g. Keterbatasan anggaran

2.5.7. Capaian Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Melihat perkembangan TPB Kota Subulussalam berdasarkan rancangan KLHS-RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029, Sasaran TPB yang digunakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Setelah dilakukan penyelarasan, terdapat 320 indikator yang terdiri atas 97 indikator kewenangan daerah, 46 indikator yang bukan kewenangan kabupaten/kota, dan 177 indikator yang tidak memiliki lampiran pada Perpres 111 Tahun 2022. Berikut adalah rekapitulasi capaian TPB Kota Subulussalam hingga 2024:

- 1) Terdapat 59 indikator TPB yang telah mencapai target nasional (SST)
- 2) Terdapat 49 indikator TPB yang belum mencapai target nasional (SBT)
- 3) Terdapat 17 indikator yang tidak terdapat data (NA)
- 4) Terdapat 39 indikator yang bukan kewenangan kabupaten/kota (TKD)
- 5) Terdapat 157 indikator yang tidak memiliki sasaran target pada Perpres 111 Tahun 2022.

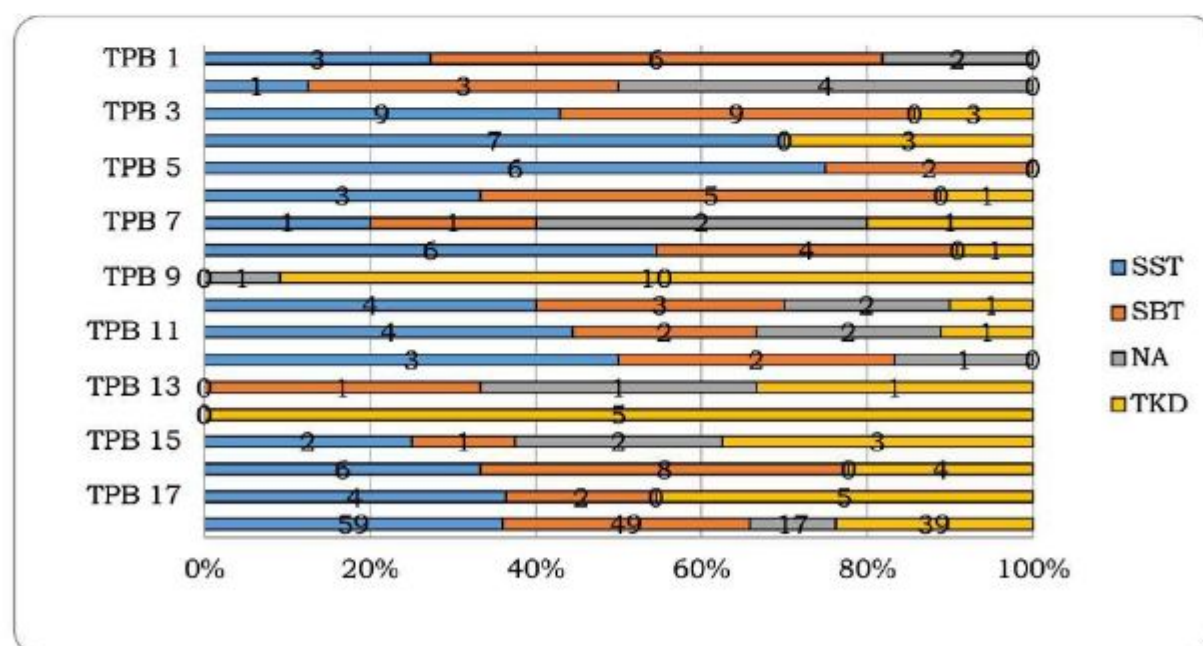
TPB yang telah mencapai target sasaran nasional mencapai 46,8 persen. Sedangkan TPB yang tidak/belum mencapai target nasional mencapai 39,5 persen. Sedangkan data yang tidak tersedia hanya 13,7 persen. Keseluruhan indikator

pada TPB 12 telah mencapai target nasional. Untuk TPB 14, tidak dilakukan pengkajian dikarenakan Kota Subulussalam tidak memiliki wilayah laut.

Tabel 2.88.
Capaian TPB Kota Subulussalam

TPB	SST	SBT	NA	TKD	Tidak Ada Lampiran	Total
TPB 1	3	6	2	0	15	26
TPB 2	1	3	4	0	6	14
TPB 3	9	9	0	3	17	38
TPB 4	7	0	0	3	8	18
TPB 5	6	2	0	0	8	16
TPB 6	3	5	0	1	20	29
TPB 7	1	1	2	1	1	6
TPB 8	6	4	0	1	9	20
TPB 9	0	0	1	10	3	14
TPB 10	4	3	2	1	10	20
TPB 11	4	2	2	1	13	22
TPB 12	3	2	1	0	1	7
TPB 13	0	1	1	1	1	4
TPB 14	0	0	0	5	4	9
TPB 15	2	1	2	3	5	13
TPB 16	6	8	0	4	19	37
TPB 17	4	2	0	5	17	28
Total	59	49	17	39	157	321

Sumber : Hasil Analisis, 2025



Sumber : Hasil Analisis, 2025

Gambar 2.130.
Capaian TPB Kota Subulussalam Berdasarkan Tujuan

Tabel 2.89.

Capaian Standar Pelayanan Minimal Kota Subulussalam berdasarkan Bidang Urusan Pelayanan

No.	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian SPM					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Bidang Urusan Pendidikan					99,26	99,26	
		Pendidikan Anak Usia Dini				97,78	97,78	
		Pendidikan Dasar				100,00	100,00	
		Pendidikan Kesetaraan				100,00	100,00	
2	Bidang Urusan Kesehatan		69,58	63,98	77,75	68,89	82,23	
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	99,48	100,00	100,00	94,23	
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00	95,70	98,00	54,29	86,35	
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00	99,37	100,00	51,25	89,47	
		Pelayanan Kesehatan Balita	60,00	64,53	72,00	76,92	99,14	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	45,00	72,23	93,00	97,49	60,70	
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	60,00	18,81	44,00	72,47	34,37	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	74,00	14,57	57,00	81,06	70,55	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	13,00	7,75	15,00	49,05	84,33	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	81,00	66,20	100,00	74,96	97,65	
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	100,00	100,00	100,00	81,38	100,00	
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	59,00	57,01	96,00	20,46	100,00	
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	43,00	72,10	58,00	67,40	69,95	
3	Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum		73,50	51,28	81,43	57,82	51,62	
		Penyediaan kebutuhan pokok air minum	97,00	52,41	90,47	44,84	29,96	
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	50,00	50,14	72,39	70,80	73,28	
4	Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat		100,00	64,80		100,00	72,50	
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100,00			100,00	100,00	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	100,00	64,80		100,00	45,00	
5	Urusan Pemerintah Bidang Trantibumlinmas			99,38	59,93	88,34	98,39	
		Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum		100,00	100,00	63,50	100,00	
		Pelayanan informasi rawan bencana		100,00	100,00	93,13	100,00	
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100,00	33,44	92,39	97,14	
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100,00	33,11	96,00	100,00	
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		96,90	33,11	96,67	94,81	
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		11,11	125,50		26,67	80,64	
		Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	3,33	88,00		75,54	84,33	



No.	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian SPM					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
		Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	10,00			19,56	61,28	
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti		180,00		9,44	87,66	
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	20,00	50,00		18,50	85,00	
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota		184,00		10,33	84,94	
		KOTA SUBULUSSALAM	63,55	80,99	73,04	73,50	80,77	

2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.6.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Kota Subulussalam

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Subulussalam Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPD Kota Subulussalam Tahun 2025-2026. Program dan kegiatan yang disusun oleh perangkat daerah diharapkan mampu melaksanakan strategi kebijakan maupun menjawab tantangan ataupun permasalahan yang akan dihadapi.

Permasalahan Pembangunan tahun 2026 yang menjadi dasar penentuan isu strategis berdasarkan hasil analisis pada berbagai permasalahan pembangunan pada setiap urusan pemerintah daerah dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Tingginya angka defisit dan hutang daerah;
- 2) Rendahnya kualitas SDM dan derajat hidup masyarakat;
- 3) Belum optimalnya infrastruktur pelayanan dasar untuk mendorong perekonomian yang terintegrasi;
- 4) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan;
- 5) Belum optimalnya penerapan syariat Islam.

2.6.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

A. Pendidikan

1. Persentase SD dan SMP Terakreditasi minimal B masih sedikit
Terdapat 68 SD/MI dan SMP/MTs (49,28 persen) di Kota Subulussalam yang telah terakreditasi A dan B atau ada masih terdapat 50,72 persen SD/MI dan SMP/MTs yang masih terkakreditas C dan TT.
2. Masih rendahnya Angka Rata-rata lama sekolah
Angka rata-rata lama sekolah Kota Subulussalam merupakan terendah se-Aceh pada tahun 2024, yaitu sebesar 8,43 tahun atau hanya sampai tidak lulus SMP/MTs.
3. Masih rendahnya angka melanjutkan tingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK
Angka melanjutkan Kota Subulussalam merupakan paling rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Aceh. Hal ini terlihat dari rata-rata lama sekolah di Kota Subulussalam pada angka 8,43 tahun.
4. Kualifikasi pendidikan guru sekolah dasar dan menengah Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV tentu akan memiliki kompetensi dan pemahaman tentang materi yang lebih baik. Kemampuan materi seorang guru akan bertambah seiring dengan latar belakang pendidikan yang diterima, dengan pendidikan yang lebih tinggi maka

pemahaman akan materi pendidikan akan menjadi lebih baik. Hal ini tentu menjadi perhatian Pemerintah Subulussalam untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan para tenaga pendidik.

B. Kesehatan

1. Angka prevalensi Stunting yang tinggi

Dari segi kesehatan, Kota Subulussalam masih memiliki angka *stunting* tertinggi se-Aceh tahun 2022. Tahun 2023, angka *stunting* di Kota Subulussalam mencapai 29,6 persen. Perlunya penggunaan anggaran DAU Spesifik dalam penanganan *stunting*, terutama pada intervensi *stunting* spesifik. Selain itu, pengawasan internal terkait rincian belanja *stunting* menjadi perhatian khusus dalam penyusunan anggaran sehingga penanganan *stunting* tepat sasaran serta penggunaan belanja efektif dan efisien. Pada tahun 2024, mengalami penurunan pada angka 27,5 persen, namun angka ini masih tergolong tinggi dimana 7,7 persen tergolong sangat parah.

2. Masih terdapatnya Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup

Angka kematian ibu (AKI) Kota Subulussalam per 100.000 kelahiran hidup adalah 525. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapatnya kematian ibu di Kota Subulussalam.

3. Masih terdapatnya Prevalensi Bayi Gizi Buruk Kota Subulussalam

Kasus gizi buruk di Kota Subulussalam tahun 2024 sebanyak 0,21 persen. Hal ini menunjukkan masih terdapat kasus gizi buruk di Kota Subulussalam.

4. Masih terdapatnya Prevalensi Gizi Kurang Kota Subulussalam

5. Cakupan Desa *Universal Child Immunization* (UCI) yang masih rendah

Cakupan Desa UCI Kota Subulussalam mencapai 17 persen. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, yaitu 26 persen.

6. Masih terdapatnya kasus TB Paru

Pada tahun 2024, jumlah penderita TB Paru sejumlah 217 kasus dengan tingkat. Jika melihat dari jumlah penderita pada tabel diatas, pemerintah Kota Subulussalam diperkirakan akan sulit untuk mencapai target nasional.

7. Masih terdapatnya kasus Demam Berdarah

Pada tahun 2024 kasus demam berdarah sebanyak 9 kasus. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan gaya hidup bersih dan sehat di masyarakat.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Masih terdapatnya rumah tinggal yang belum bersanitasi

Pada tahun 2024 baru sekitar 61,57 persen rumah tinggal yang sudah memiliki sanitasi layak. Angka ini tergolong tinggi karena hampir 38,43 persen rumah tinggal yang belum memiliki akses sanitasi layak.

2. Sangat minimnya Ruang Terbuka Hijau Publik

Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah perkotaan paling sedikit 20 persen dari luas wilayah kota, sedangkan ruang terbuka hijau privat minimal 10 persen. Luas ruang terbuka hijau Kota Subulussalam hingga tahun 2024 sebesar 1,03 persen. Hal ini masih kurang dari proporsi ideal untuk perkotaan, bahkan tergolong sangat kecil.

3. Perlunya Penyediaan Talud pencegahan longsor dan abrasi

Dengan kondisi geografi Kota Subulussalam yang umumnya perbukitan, bencana longsor sering terjadi. Selain itu, karena dilalui oleh banyak sungai, potensi abrasi sangat besar terjadi di Kota Subulussalam. Hingga tahun 2024, terdapat 5 kasus bencana daerah. Selain itu, perlunya upaya preventif agar perumahan masyarakat aman dari abrasi dan longsor.

4. Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah yang masih kurang terkelola dengan baik

Pengelolaan air limbah di Kota Subulussalam 60,46 persen. Terdapat 39,54 persen air limbah yang tidak terkelola dengan baik. Hal ini akan berdampak pada kualitas air di Kota Subulussalam, sehingga akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan akibat air limbah.

5. Sistem Drainase Perkotaan yang sangat minim

6. Masih kurangnya cakupan pemeliharaan jalan urusan kota

Pemeliharaan jalan di Kota Subulussalam tergolong rendah. Meskipun persentase jalan dalam kondisi baik hanya 43,57 persen. Sisanya masih dalam kondisi sedang, rusak dan rusak berat.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Masih tingginya kawasan Lingkungan permukiman kumuh

Persentase luas areal kumuh di Kota Subulussalam mencapai 0,26 persen. Persentase luas areal kumuh diharapkan mencapai 0 persen.

2. Masih terdapatnya Rumah Tidak Layak Huni

Rumah layak huni di Kota Subulussalam mencapai 70,03 persen. Masih terdapat 29,97 persen rumah tidak layak huni yang harus segera mendapatkan perhatian dari pemerintahan.

E. Sosial

1. PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
2. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hanya 78,73 persen. Masih terdapat 11,27 persen yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya.
3. Penyandang Cacat Fisik dan Mental yang Menerima Jaminan Sosial
Jumlah cacat fisik dan mental pada tahun 2024 sebesar 403 orang.
4. Masih tingginya angka kemiskinan
Persentase kemiskinan Kota Subulussalam tahun 2024 sebesar 16,38 persen atau 13.800 orang.

F. Tenaga Kerja

1. Jumlah Pengangguran Terbuka masih tinggi
Jumlah pengangguran terbuka Kota Subulussalam pada tahun 2024 jumlah pengangguran sebesar 5,12 persen dan masih dibawah Provinsi Aceh, namun di atas Nasional.

G. Pertanahan

1. Luas lahan bersertifikat
Tahun 2023, terdapat 1797 sertifikat hak milik, 5 sertifikat hak guna bangunan, 31 sertifikat hak guna usaha, dan 18 sertifikat hak pakai yang dikeluarkan. Masih terdapat banyak tanah yang belum memiliki sertifikat serta masih banyak tanah yang masih dalam proses penyelesaian konflik.
2. Penyelesaian kasus sengketa tanah
Perselesaian kasus sengketa tanah di Kota Subulussalam tergolong tinggi. Konflik yang umum terjadi adalah antara masyarakat dengan perusahaan.

H. Lingkungan Hidup

1. Pencemaran air
Pengelolaan air limbah di Kota Subulussalam 78,80 persen. Terdapat 21,20 persen air limbah yang tidak terkelola dengan baik. Hal ini akan berdampak pada kualitas air di Kota Subulussalam, sehingga akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan akibat air limbah.
2. Pengelolaan sampah melalui aktivitas 3R

Cakupan pengelolaan persampahan Kota Subulussalam hanya terdapat di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Penanggalan. Cakupan persampahan sebesar 88,33 persen untuk kedua kecamatan tersebut. Masih terdapat 3 kecamatan yang belum terlayani persampahan.

I. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Masih adanya penduduk yang belum memiliki e-KTP

Pada tahun 2024, jumlah penduduk yang memiliki KTP sebanyak 66.169 orang dengan rasio kepemilikan e-KTP hanya 0,99.

2. Penduduk yang berpasangan belum memiliki akta nikah

Jumlah pasangan yang telah berakte nikah pada tahun 2024 hanya 23.372 pasangan dari total 44.353 pasangan. Hal ini menunjukkan masih rendahnya rasio pasangan yang telah memiliki akte nikah, yaitu 0,54. Artinya masih terdapat lebih 46 persen pasangan belum berakte nikah.

J. Pemberdayaan Masyarakat Kampung

1. Masih rendahnya BUMDES

Jumlah kampung yang memiliki BUMDes di Kota Subulussalam hanya 86,59 persen, masih terdapat kampung yang belum memiliki BUMDes.

K. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Pernikahan usia dini
2. Tingkat kelahiran usia remaja
3. Peserta KB baru dan KB aktif
4. Angka Stunting

Angka Stunting di Kota Subulussalam hingga tahun 2024 berada pada angka 27,5 persen.

L. Perhubungan

1. Izin Trayek

Dinas Perhubungan Kota Subulussalam menginformasikan bahwa sampai saat ini Kota Subulussalam belum mengeluarkan izin trayek. Hal ini disebabkan sarana dan prasarana yang tersedia belum difungsikan sebagaimana mestinya dan terbatasnya SDM di bidang pengujian kendaraan bermotor.

2. Pengelolaan Terminal terpadu

Pengelolaan terminal terpadu Kota Subulussalam masih belum terkelola dengan baik sebagai terminal tipe C, sehingga terminal belum terkelola sebagaimana mestinya.

M. Penanaman Modal

1. Investor berskala nasional

Masih rendahnya investor berskala nasional di Kota Subulussalam. Tahun 2024, tercatat jumlah investor yang masuk hanya 112 investor dengan nilai inovasi sebesar Rp1.854.625.839.298.

2. Daya serap tenaga kerja perusahaan PMDN dan PMA.

N. Kebudayaan

1. Buku Induk Kebudayaan

Masih belum tersedianya Rencana Induk Kebudayaan di Kota Subulussalam hingga tahun 2024.

O. Pariwisata

1. Kunjungan wisata

Kunjungan wisata di Kota Subulussalam sudah mulai bertambah dengan begitu banyaknya objek wisata yang bagus. Hal ini terlihat dari jumlah wisatawan pada tahun 2024 sebanyak 25.298 wisatawan. Angka ini bertambah dibandingkan tahun 2022, yaitu 15.989 wisatawan.

2. Lama kunjungan wisata

3. PAD sektor wisata

PAD sektor wisata di Kota Subulussalam dapat dianggap tidak ada. Hal ini terlihat dari realiasi anggaran Kota Subulussalam tahun 2024.

4. Pengelolaan sektor wisata religi dan ekowisata

P. Perdagangan

1. Nilai ekspor produk antar-daerah

2. Bantuan binaan pemda untuk kelompok pedagang informal

Q. Aspek Daya Saing Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Konsumsi rumah tangga per kapita Kota Subulussalam tahun 2023 adalah Rp1.235.598,00; lalu mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi Rp1.111.170,00.

2. Inovasi daerah

Jumlah inovasi daerah Kota Subulussalam yang tercatat hingga tahun 2024 ada sebanyak 10 inovasi. Hal ini tergolong rendah dibandingkan Provinsi dan Kabupaten/Kota lain. Selain itu, aspek daya saing di Kota Subulussalam berdasarkan hasil Indeks Daya Saing Daerah tergolong sangat rendah.

3. PDRB per Kapita yang masih rendah

PDRB per Kapita Kota Subulussalam tahun 2024 adalah 27,88 juta per orang per tahun. Angka ini masih di bawah provinsi, yaitu 98,2 juta per orang per tahun.

2.7. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Berdasarkan permasalahan yang disajikan pada sub bab di atas, maka isu strategis Kota Subulussalam Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

1) Penurunan angka defisit dan hutang daerah

Beberapa upaya yang dapat dilakukan di antaranya:

- a. Penguatan pendapatan asli daerah (PAD)
- b. Efisiensi belanja daerah
- c. Restrukturisasi hutang dan kewajiban daerah
- d. Optimalisasi dana transfer pusat
- e. Peningkatan tata kelola dan transparansi
- f. Diversifikasi sumber pembiayaan
- g. Sinergi dengan pemerintahan pusat

2) Peningkatan kualitas SDM dan derajat hidup masyarakat

Beberapa upaya yang dapat dilakukan di antaranya:

- a. Pendidikan berkualitas dan merata
- b. Kesehatan yang terjangkau dan berkualitas
- c. Penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran
- d. Perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan
- e. Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender
- f. Pembangunan infrastruktur dasar
- g. Penguatan inovasi dan teknologi
- h. Partisipasi masyarakat dan *good governance*
- i. Lingkungan hidup yang berkelanjutan

3) Optimalisasi infrastruktur pelayanan dasar untuk mendorong perekonomian yang terintegrasi

Beberapa upaya yang dapat dilakukan di antaranya:

- a. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar
- b. Penguatan infrastruktur pendukung ekonomi
- c. Integrasi kebijakan dan perencanaan pembangunan
- d. Pemberdayaan masyarakat dan UMKM
- e. Pemeliharaan dan keberlanjutan infrastruktur
- f. Penguatan konektivitas regional

4) Optimalisasi tata kelola pemerintahan

Beberapa upaya yang dapat dilakukan di antaranya:

- a. Penguatan sistem e-Government
- b. Reformasi birokrasi
- c. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas
- d. Penguatan pemberantasan korupsi
- e. Kolaborasi dengan masyarakat dan swasta
- f. Peningkatan kapasitas aparatur
- g. Evaluasi kebijakan berbasis data

5) Optimalisasi penerapan syariat Islam

Beberapa upaya yang dapat dilakukan di antaranya:

- a. Penguatan *legal framework*
- b. Pendidikan dan sosialisasi
- c. Pemberdayaan ekonomi dan sosial
- d. Penegakan hukum yang adil dan transparan
- e. Dialog dan partisipasi publik

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan kondisi perekonomian hasil perhitungan dari Badan Pusat Statistik Tahun 2025, serta tantangan dan prospek perekonomian tahun 2026 serta gambaran kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan. Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut akan dirumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2026 beserta proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan tahun 2026, termasuk di dalamnya perkiraan potensi sumber dan besaran pendapatan dari seluruh sektor.

3.1. Kinerja Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Daerah

Perkembangan kinerja pembangunan daerah secara nasional di antaranya adalah:

- 1) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional pada angka 4,91 persen;
- 2) Tingkat kemiskinan nasional pada angka 8,57 persen;
- 3) Rasio gini berkisar pada angka 0,308-0,402;
- 4) Indeks pembangunan manusia (IPM) pada angka 75,02.
- 5) Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera, dengan pertumbuhan 5,0 persen dan 3,5 persen (yoy);
- 6) Pulau Jawa tumbuh tinggi, dengan Provinsi DKI Jakarta sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang tumbuh sebesar 4,9 persen (yoy);
- 7) Provinsi dengan kontribusi perekonomian paling tinggi di Wilayah Kalimantan adalah Provinsi Kalimantan Timur, tumbuh sebesar 6,2 persen (yoy);
- 8) Pertumbuhan ekonomi wilayah Sulawesi didorong oleh pertumbuhan tinggi Provinsi Sulawesi Tengah (9,9 persen yoy);
- 9) Pertumbuhan ekonomi wilayah Maluku dan Papua didorong oleh dua sumber pertumbuhan, yaitu: Provinsi Papua Barat (20,8 persen yoy) dan Provinsi Maluku Utara tumbuh 13,7 persen (yoy);
- 10) Bali-Nusa mencatatkan pertumbuhan positif pada tahun 2024 didukung oleh Provinsi NTB yang tumbuh 5,3 persen (yoy) dan Provinsi Bali yang tumbuh 5,5% (yoy);
- 11) Kontribusi ekonomi Pulau Sumatera untuk PDB Nasional adalah 22,12 persen, terbesar kedua setelah Pulau Jawa (57,02 persen).
- 12) Kemandirian fiskal daerah relatif masih rendah dengan:

- a. 83 persen rata-rata proporsi pendapatan transfer (TKD) terhadap total Pendapatan Daerah (2020-2024);
 - b. 16 persen rata-rata proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah (2020-2024);
- 13) Belanja daerah masih didominasi oleh belanja rutin dimana 68 persen rata-rata proporsi Belanja Operasional terhadap total Belanja Daerah (2020-2024);
- 14) Belanja pegawai menjadi komponen belanja operasional terbesar (36 persen).

Kinerja ekonomi Aceh selama tahun 2020-2024 relatif stabil kecuali pada tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan akibat dampak dari *pandemic Covid-19* yang melanda dunia dan Indonesia. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Aceh relatif lebih kecil bila di dibandingkan dengan Nasional (0.37% dan 2.07%). Pada tahun 2023 kinerja ekonomi nasional mengalami perlambatan sedangkan perekonomian Aceh mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 0.01 persen dari tahun 2022. Secara umum pertumbuhan ekonomi Aceh masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini tentu saja perlu diintervensi pada berbagai sektor sebagai upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Perekonomian Aceh yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 mencapai Rp. 57,56 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp. 36,70 triliun. Pertumbuhan ekonomi Aceh triwulanan dengan migas pada triwulan I tahun 2024 tumbuh sebesar 4,82 persen (yoy) dan lebih tinggi bila dibandingkan triwulan I tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4.18 persen. Sedangkan laju Pertumbuhan tanpa migas triwulan I 2024 tumbuh sebesar 4.18 persen dan lebih rendah bila dibandingkan dengan triwulan I tahun 2023 sebesar 5.78 persen. Pertumbuhan ekonomi Aceh triwulan I tahun 2024 lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,11 persen

Berdasarkan perhitungan oleh Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, Perekonomian Kota Subulussalam pada tahun 2024 tumbuh 3,90 persen, naik sebesar 1,93 poin bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun 2020 sebesar 1,97 persen. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB sebesar 25,05 persen, sektor industri pengolahan sebesar 19,37 persen, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 16,64 persen. Tiga sektor dominan di atas, bila digabung menjadi 61,06 persen yang artinya lebih dari separuh dari PDRB Kota Subulussalam sangat bergantung pada tiga sektor tersebut. Ini artinya bila ketiga sektor tersebut

mengalami kenaikan atau penurunan maka akan sangat memberikan dampak terhadap PDRB secara keseluruhan.

Pada tahun 2024, laju pertumbuhan jasa keuangan dan asuransi sebesar 22,37 persen, laju pertumbuhan pada sektor pertanian sebesar 3,38 persen, transportasi pergudangan sebesar 13,38 persen, sektor informasi dan komunikasi sebesar 2,19 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 1,61 persen dan industri pengolahan sebesar 4,43 persen menjadi laju pertumbuhan yang dominan. Laju pertumbuhan yang mengalami penurunan di masa *new normal* adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar -2,90 persen. Penurunan pada sektor jasa keuangan dan asuransi diduga diakibatkan oleh implementasi dari Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Kondisi perekonomian Kota Subulussalam pada tahun 2022 meningkat secara signifikan dibandingkan tahun 2020 yang merupakan dampak dari pandemi Covid-19. Meskipun pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan positif, Namun capaian yang diperoleh jauh di bawah target RKPK maupun RPJMD. Namun, pada tahun 2024, pertumbuhan PDRB Kota Subulussalam naik sebesar 0,6 persen atau pada angka 4,12 persen.

3.2 PDRB Perkapita

Konsumsi rumah tangga per kapita dihitung dengan cara nilai PDRB Menurut Pengeluaran komponen konsumsi rumah tangga dibagi dengan jumlah penduduk wilayah tersebut. Pada tahun 2024 PDRB per kapita Kota Subulussalam mencapai 27,88 juta rupiah, naik dari tahun 2020 sebesar 20,00 juta rupiah. Nilai konsumsi rumah tangga per kapita maupun per rumah tangga di Kota Subulussalam dalam kurun waktu 2020-2024 terus meningkat, ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata daya beli penduduk yang juga indikasi adanya peningkatan rata-rata pendapatan. Selain pendapatan, peningkatan nilai konsumsi rumah tangga juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain, di antaranya adalah tingkat inflasi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Pengeluaran konsumsi rumah tangga tahun 2024 mencapai 1.111.170 rupiah dan meningkat dibandingkan tahun 2020 yang hanya pada angka 917.945 rupiah.

Pengeluaran terbesar didominasi oleh pengeluaran untuk kebutuhan pangan (>50 persen). Lebih dari 10 persen pengeluaran rumah tangga didominasi oleh pembelian rokok. Sedangkan sebagian besar pengeluaran non pangan dihabiskan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga. Hal ini karena masih banyak penduduk Kota Subulussalam belum memiliki rumah pribadi kepemilikan sendiri.

Konsumsi rumah tangga per kapita dihitung dengan cara nilai PDRB Menurut Pengeluaran komponen konsumsi rumah tangga dibagi dengan jumlah penduduk wilayah tersebut. Pada tahun 2024 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per tahun atas dasar harga berlaku kota Subulussalam mencapai 16,06 juta rupiah, sedikit menurun dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 14,53 juta rupiah. Sementara untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per tahun atas dasar harga konstan mencapai 10,06 juta rupiah di tahun 2024.

Nilai konsumsi rumah tangga per kapita maupun per rumah tangga di Kota Subulussalam dalam kurun waktu 2020-2024 memiliki tren meningkat, ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata daya beli penduduk yang juga indikasi adanya peningkatan rata-rata pendapatan. Selain pendapatan, peningkatan nilai konsumsi rumah tangga juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain, di antaranya adalah tingkat inflasi dan perubahan gaya hidup masyarakat.

Lima sektor penyumbang PDRB terbesar Kota Subulussalam pada tahun 2024 adalah:

- 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (25,05 persen);
- 2) Industri Pengolahan (19,37 persen);
- 3) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (16,64 persen);
- 4) Konstruksi (14,31 persen);
- 5) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (5,97 persen).

Tabel 2.31. menyajikan pertumbuhan PDRB dengan harga berlaku mulai tahun 2021 yang sebesar 2.110.949,42 mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2024 sebesar 2.761.850,00 atau terjadi kenaikan sebesar 650.900,86 dari nilai tahun 2021 sebesar 2.110.949,14. Laju Pertumbuhan PDRB tahun 2024 yang dipengaruhi oleh berbagai jenis pengeluaran yang mengalami pertumbuhan PDRB pada pengeluaran rumah tangga dengan angka 61,37 persen yang mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel serta lainnya. Laju pertumbuhan PDRB Kota Subulussalam tahun menurut harga konstan 2020-2024 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.32.

3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif” di antaranya:

- 1) Swasembada Pangan dan Energi:
 - a. Pengembangan *food estate* dan digitalisasi pertanian;
 - b. Energi terbarukan untuk ketahanan energi nasional.
- 2) Pertumbuhan Ekonomi Inklusif:
 - a. Hilirisasi SDA dan industrialisasi padat karya;
 - b. Pembangunan 3 juta rumah untuk pengentasan kemiskinan.
- 3) Peningkatan Produktivitas:
 - a. Reformasi pendidikan & kesehatan (Makan Bergizi Gratis, RS Daerah);
 - b. Kemudahan berbisnis dan stabilitas makroekonomi.

Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi 2026 melalui:

- 1) Peningkatan Produktivitas:
 - a. Hilirisasi SDA (nikel, tembaga, bauksit, sawit, rumput laut);
 - b. Digitalisasi ekonomi dan layanan publik.
- 2) Swasembada Pangan: *Food estate*, modernisasi pertanian, subsidi pupuk, penguatan pangan lokal.
- 3) Swasembada Energi: Pengembangan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan impor.
- 4) Meningkatkan Investasi Produktif:
 - a. FDI berorientasi ekspor dan investasi non-APBN;
 - b. Peningkatan kepastian kebijakan dan hukum.
5. Deregulasi Perizinan: Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja untuk stabilitas makroekonomi.

Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah melalui:

- 1) Pendanaan pembangunan harus berbasis sinergi:
 - a. APBD untuk jalan, irigasi usaha tani, pelatihan SDM;
 - b. APBN untuk bendungan, sarana pascapanen, subsidi pupuk;
 - c. Swasta & CSR untuk pengolahan lahan, penyediaan benih, KUR.
- 2) Efisiensi belanja daerah:
 - a. Fokus pada program prioritas RPJMN 2025-2029;
 - b. Skema pendanaan inovatif, termasuk KPDBU (Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha).

Tindak Lanjut untuk Pemerintah Daerah diwujudkan melalui:

- 1) Sinkronisasi RKPD 2026 dengan RKP 2026: Pemda harus menyesuaikan prioritas daerah dengan sasaran nasional.
- 2) Meningkatkan PAD dan Efisiensi Belanja:
 - a. Meningkatkan PAD melalui inovasi pajak daerah dan retribusi;
 - b. Mengurangi belanja pegawai yang tidak produktif.
- c. Penguatan Program Ekonomi Lokal:
 - a. Mendorong hilirisasi industri berbasis SDA lokal;
 - b. Mempercepat investasi sektor unggulan daerah dengan deregulasi.
- c. Strategi Swasembada Pangan & Energi di Daerah:
 - a. Meningkatkan produksi pangan lokal (padi, jagung, kedelai);
 - b. Pengembangan energi terbarukan berbasis potensi daerah.
- c. Kolaborasi dengan Sektor Swasta & Lembaga Keuangan:
 - a. Skema KPDBU untuk proyek infrastruktur daerah;
 - b. Pemanfaatan CSR & investasi swasta untuk proyek strategis.
- c. Pemantauan & Evaluasi Pembangunan:
 - a. Mengoptimalkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
 - b. Rutin mengevaluasi RKPD dan mengawal pelaksanaan kebijakan prioritas.

Kebijakan yang dirumuskan dalam pembangunan ekonomi tahun 2026 sebagai berikut:

- 1) Memperkuat infrastruktur untuk mendorong perekonomian yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan serta hilirisasi produk unggulan, program diarahkan pada:
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perekonomian;
 - b. Peningkatan kualitas konektivitas antar-wilayah di Kota Subulussalam;
 - c. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan.
- 2) Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar, program diarahkan pada:
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dasar;
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
 - c. Peningkatan kualitas pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat;
 - d. Perkuatan dan perluasan akses penduduk miskin terhadap pendidikan dan kesehatan;

- e. Pendampingan dan pemberdayaan keluarga miskin dalam kegiatan ekonomi produktif;
 - f. Pendampingan pemasaran produk usaha penduduk miskin.
- 3) Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berorientasi pada potensi unggulan daerah dan UMKM serta hilirisasi produk unggulan, program diarahkan pada:
- a. Peningkatan aksesibilitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. Peningkatan kuantitas dan kualitas produk dan produktivitas sektor pertanian, jasa-jasa, industri dan perdagangan;
 - c. Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk sektor pertanian, jasa-jasa, industri dan perdagangan;
 - d. Peningkatan dan pengembangan sarana perdagangan;
 - e. Peningkatan jasa transportasi pergudangan;
 - f. Peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja;
 - g. Peningkatan pengelolaan destinasi wisata.
- 4) Memperkuat tata pemerintahan melalui percepatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas dan penguasaan IPTEK, program diarahkan pada:
- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat OPD hingga Pemerintahan Kampung;
 - b. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
- 5) Memperkuat Tatahan Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Damai, Islami dan Berbudaya setelah pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum kepala daerah secara serentak, program diarahkan pada:
- a. Peningkatan peran trantibunlinmas dalam rangka pemulihan tahun politik;
 - b. Peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat;
- 6) Menekan dan Mengurangi laju defisit anggaran yang sudah terjadi
- a. Peningkatan peran perencanaan, keuangan, dan pengawasan dalam rangka pengelolaan anggaran secara efisien dan efektif;
 - b. Peningkatan alokasi pembiayaan untuk pembayaran pada pihak ketiga.
- 7) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing
- a. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM di birokrasi pemerintahan
 - b. Peningkatan kualitas SDM di luar pemerintahan

3.4. Arah Kebijakan Keuangan Kota Subulussalam

Efektivitas kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPK Subulussalam Tahun 2026 sebagai pelaksanaan agenda RPJPD Kota Subulussalam Tahun 2025-2045 di tahun pertama dan RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah Kota Subulussalam. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan Kota Subulussalam selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal Kota Subulussalam sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPK Subulussalam, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti APBN, hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Arah kebijakan keuangan Kota Subulussalam difokuskan pada penurunan angka defisit anggaran dan hutang daerah.

RKPK Subulussalam merupakan dasar bagi penyusunan pengelolaan keuangan Kota Subulussalam dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah) yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman penyusunan KUA-PPAS, disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan perencanaan dan penganggaran lebih fokus pada program dan kegiatan yang berorientasi pada penyelesaian target prioritas dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPD dan rancangan awal RPJMD Kota Subulussalam tahun 2025-2029 dan prioritas pembangunan dalam RKPD 2026.

3.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Kota Subulussalam

Pada tahun 2026, direncanakan pendapatan Kota Subulussalam dapat bersumber dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (bagian laba BUMD) dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah;
- 2) Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
- 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, Dana Insentif Daerah dan dana Desa dari APBN. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kota Subulussalam, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan, penerimaan dan penyeteroran Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini.
- 2) Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
- 3) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan asli daerah.
- 4) Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) yang baru agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.

Asumsi pendapatan tahun 2026 Pemerintah Kota Subulussalam tidak jauh berbeda dengan tahun 2025, ini berdasarkan realisasi pendapatan Kota Subulussalam tiga tahun terakhir. Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kota Subulussalam tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 3.1. dan tabel 3.2. berikut ini:

Realisasi Pendapatan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

[illegible]

Tabel 3.2.
Proyeksi Pendapatan Kota Subulussalam Tahun 2026-2027

Kode	Uraian	APBK	Proyeksi	
		2025	2026	2027
4	PENDAPATAN DAERAH	654,817,043,200.00	639,308,490,393.00	721,199,603,215.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	83,204,543,680.00	69,316,211,489.00	77,945,362,539.00
4.1.01	Pajak Daerah	25,530,510,551.00	11,018,739,476.00	16,156,660,157.00
4.1.02	Retribusi Daerah	50,948,760,650.00	50,869,745,923.00	54,122,946,974.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,278,272,479.00	1,278,272,479.00	1,303,965,756.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5,447,000,000.00	6,149,453,611.00	6,361,789,652.00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	565,112,499,520.00	563,492,278,904.00	636,754,240,676.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	537,739,587,000.00	544,670,163,000.00	601,063,104,623.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27,372,912,520.00	18,822,115,904.00	35,691,136,053.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	0	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00

3.4.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan belanja daerah pada tahun 2026 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

- 1) Proyeksi belanja daerah diasumsikan relatif turun dari tahun 2025;
- 2) Perhitungan gaji ASN juga mengalami kenaikan sebab bertambahnya jumlah pegawai.
- 3) Beban hutang Pemerintah Kota Subulussalam yang tidak dapat diselesaikan di tahun 2023 dan tahun 2024.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah masih diarahkan sebagai berikut:

- a. Penanganan dan pengurangan angka defisit anggaran, pembayaran hutang pihak ketiga yang terjadi sampai dengan tahun 2024 dan tidak selesai di pelaksanaan APBK 2025;
- b. Belanja daerah berpedoman pada RKP Nasional 2026 dan RKP Aceh Tahun 2026 serta Program Strategis Nasional, Provinsi dan Program Prioritas Kota Subulussalam;
- c. Belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti alokasi belanja pegawai, belanja pendidikan, belanja kesehatan dan belanja infrastruktur menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan;
- d. Belanja daerah diarahkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan pelaksanaan program prioritas daerah melalui mekanisme bantuan sosial atau hibah serta belanja barang dan jasa yang tersebar di beberapa program dan kegiatan di Satuan Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku;
- e. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- f. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU), DAK, DOKA dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

- g. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial, serta belanja mendesak, wajib dan mengikat;
- h. Belanja daerah berupa belanja operasi dan belanja modal setiap perangkat daerah (PD) diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja-PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dan prioritas pembangunan Tahun 2026;
- i. Dana DOKA diutamakan untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan.

Adapun realisasi belanja Kota Subulussalam tahun mulai dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 3.3. Sedangkan proyeksi belanja tahun 2026-2027 dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.3.

Realisasi Belanja Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Kode	Tahun	2020				2021				2022				2023			
		APBN WEKIB	APBN PERSISWA	KABUPATEN APBD	APBN WEKIB	APBN PERSISWA	KABUPATEN APBD	APBN WEKIB	APBN PERSISWA	KABUPATEN APBD	APBN WEKIB	APBN PERSISWA	KABUPATEN APBD	APBN WEKIB	APBN PERSISWA	KABUPATEN APBD	APBN WEKIB
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
0	BELANJA DAERAH	644.333.765.431,80	780.632.875.093,80	490.170.073.704,40	709.212.843.383,00	324.631.039.474,00	685.124.844.521,48	724.307.663.804,80	930.043.099.137,00	878.700.000.014,34	661.630.638.851,00	620.844.441.573,00	648.844.441.573,00	648.844.441.573,00	648.844.441.573,00	648.844.441.573,00	648.844.441.573,00
3.1	BELANJA STRUKTUR	190.110.616.918,80	439.828.383.523,80	193.476.089.161,80	411.779.091.187,00	193.476.089.161,80	411.779.091.187,00	193.476.089.161,80	411.779.091.187,00	193.476.089.161,80	411.779.091.187,00	411.779.091.187,00	411.779.091.187,00	411.779.091.187,00	411.779.091.187,00	411.779.091.187,00	411.779.091.187,00
3.1.1	Belanja Bangunan	128.114.841.614,80	370.204.608.241,80	128.114.841.614,80	370.204.608.241,80	128.114.841.614,80	370.204.608.241,80	128.114.841.614,80	370.204.608.241,80	128.114.841.614,80	370.204.608.241,80	370.204.608.241,80	370.204.608.241,80	370.204.608.241,80	370.204.608.241,80	370.204.608.241,80	370.204.608.241,80
3.1.2	Belanja Bangunan lain-lain	179.008.548.833,00	160.413.187.474,80	170.223.314.444,00	244.243.903.750,00	247.846.243.345,00	230.328.734.474,41	140.474.137.703,00	314.240.754.713,00	368.712.464.472,84	284.841.000.704,00	230.708.844.573,00	247.846.243.345,00	247.846.243.345,00	247.846.243.345,00	247.846.243.345,00	247.846.243.345,00
3.1.3	Belanja Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Belanja Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Belanja Bangunan	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00
3.1.6	Belanja Bangunan	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00
3.2	BELANJA MODAL	8,90	1.007.000.000.000,00	1.007.000.000.000,00	1.007.000.000.000,00	1.007.000.000.000,00	1.007.000.000.000,00	1.007.000.000.000,00	1.007.000.000.000,00	1.007.000.000.000,00	1.007.000.000.000,00	1.007.000.000.000,00	1.007.000.000.000,00	1.007.000.000.000,00	1.007.000.000.000,00	1.007.000.000.000,00	1.007.000.000.000,00
3.2.1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Pemeliharaan	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00
3.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.888.888.888,89	38.888.888.888,89	38.888.888.888,89	38.888.888.888,89	38.888.888.888,89	38.888.888.888,89	38.888.888.888,89	38.888.888.888,89	38.888.888.888,89	38.888.888.888,89	38.888.888.888,89	38.888.888.888,89	38.888.888.888,89	38.888.888.888,89	38.888.888.888,89	38.888.888.888,89
3.2.4	Belanja Modal Jalan, jembatan, dan bendungan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
3.2.5	Belanja Modal Lain-lain	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
3.2.6	Belanja Modal Lain-lain	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
3.3	BELANJA TENAGA MANUSIA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
3.3.1	Belanja Tenaga Manusi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
3.4	BELANJA TRANSPORT	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00
3.4.1	Belanja Transport	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00
3.4.2	Belanja Transport	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00

Tabel 3.4.
Proyeksi Belanja Kota Subulussalam Tahun 2026-2027

Kode	Uraian	APBK	Proyeksi	
		2025	2026	2027
5	BELANJA	638,529,539,520.00	642.593.488.921,00	718,270,858,918.00
5.1	BELANJA OPERASI	467,859,532,429.00	453.766.080.458,00	486,179,104,210.20
5.1.01	Belanja Pegawai	217,622,873,269.00	250.451.674.654,48	258,502,330,000.20
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231,299,209,000.00	179.488.248.658,52	217,643,728,035.00
5.1.03	Belanja Bunga	5,907,643,660.00	1,070,142,145.00	33,046,175.00
5.1.05	Belanja Hibah	12,459,806,500.00	17.156.015.000,00	5,000,000,000.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	570,000,000.00	5,600,000,000.00	5,000,000,000.00
5.2	BELANJA MODAL	54,661,429,980.00	56.518.972.101,00	82,738,926,721.00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	1,000,000,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11,927,269,520.00	17.862.789.168,00	13,370,732,194.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24,732,659,535.00	21.888.496.533,00	41,817,214,325.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17,721,500,925.00	14.244.950.000,00	23,908,921,202.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	2,022,736,400.00	1,621,959,000.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	280,000,000.00	500,000,000.00	1,020,100,000.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	11,649,397,542.00	30.175.822.523,00	44,834,271,861.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11,649,397,542.00	30.175.822.523,00	44,834,271,861.00
5.4	BELANJA TRANSFER	104,359,179,569.00	102,132,613,839.00	104,518,556,125.80
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	104,359,179,569.00	102,132,613,839.00	104,518,556,125.80

3.4.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Kota Subulussalam

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan terutama bersumber dari :

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
- 2) Pencairan dana cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 4) Penerimaan pinjaman daerah;
- 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman;
- 6) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan bersumber dari :

- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- 2) Penyertaan Modal Daerah
- 3) Pembentukan Dana Cadangan
- 4) Pemberian Pinjaman Daerah
- 5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berkaitan dengan skema pembayaran kewajiban dan hutang yang menjadi beban Pemerintah Kota Subulussalam sampai dengan penyusunan RKPK Subulussalam Tahun 2026, maka Pemerintah Kota Subulussalam sudah melakukan beberapa langkah strategis yang berguna dan bermanfaat dalam mengatasi tunggakan kewajiban dan hutang serta dalam rangka mengantisipasi laju defisit anggaran yang semakin membengkak. Langkah-langkah yang sudah diambil dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Subulussalam antara lain yaitu:

1. Efisiensi belanja yang bukan tidak mempunyai output langsung terhadap capaian visi dan misi kepala daerah khususnya belanja barang pakai habis
2. Tagging terhadap penganggaran belanja-belanja yang peruntukannya sudah jelas dan sumber dananya sudah jelas
3. Melakukan filterisasi pembayaran kewajiban berbasis prioritas sumber pendanaan yang bersifat earmark
4. Pengelompokan pola pembayaran kewajiban yang bertahap dalam penyelesaiannya sesuai dengan kemampuan pendanaan Kota Subulussalam

5. Melakukan review kembali perjanjian dengan PT MSI terkait pola pembayaran dan penyelesaian jangka waktu pembayaran serta besaran angsurang pokok dan bunga
6. Meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah yang mampu mengurangi defisit dan pembayaran kewajiban.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan dan belanja sebagaimana diuraikan di atas maka kebijakan pembiayaan daerah masih diarahkan sebagai berikut:

- 2) Pembayaran hutang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI);
- 3) Penyertaan modal ke Bank Aceh Syariah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui dividen penyertaan modal.

Selanjutnya, realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Kota Subulussalam tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5.
Realisasi Pembiayaan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Kode	Uraian	2020			2021			2022			2023			2024		
		APBN RI/DAU	APBN PERDAKASAS	REALISASI APBN	APBN RI/DAU	APBN PERDAKASAS	REALISASI APBN	APBN RI/DAU	APBN PERDAKASAS	REALISASI APBN	APBN RI/DAU	APBN PERDAKASAS	REALISASI APBN	APBN RI/DAU	APBN PERDAKASAS	REALISASI APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PERBUATAN DASAR	3.428.840.745,00	80.215.200.321,00	10.763.808.907,18	38.118.448.714,00	147.936.437.745,00	8.093.608.670,00	34.083.008.836,89	36.806.500.000,00	100.828.396.143,68	17.758.388.087,00	136.437.411.495,08	18.885.336.988,47			
1.1	PERBUATAN PERMAYAMAN	3.428.840.745,00	80.215.200.321,00	10.763.808.907,18	38.118.448.714,00	147.936.437.745,00	8.093.608.670,00	34.083.008.836,89	36.806.500.000,00	100.828.396.143,68	17.758.388.087,00	136.437.411.495,08	18.885.336.988,47			
1.1.1	Sewa Lokasi, Perak, Jangkar, Angkutan Taluk, Sekelompok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2	Perbaikan Jalan, Chaklang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.3	Rehabilitasi Jalan, Kandang (Tembak yang ditaklukan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.4	Perbaikan Perbaikan, Dampak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.5	Perbaikan Jalan, Kandang (Tembak yang ditaklukan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.6	Perbaikan Perbaikan, Dampak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.7	Perbaikan Jalan, Kandang (Tembak yang ditaklukan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.8	Perbaikan Perbaikan, Dampak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.9	Perbaikan Jalan, Kandang (Tembak yang ditaklukan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.10	Perbaikan Perbaikan, Dampak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2	PERBUATAN PERMAYAMAN	0,00	1.000.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00	3.800.000.000,00	0,000.000.000,00	0,000.000.000,00	4.800.000.000,00	5.200.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00			
1.2.1	Perbaikan Jalan, Dampak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.2	Perbaikan Jalan, Dampak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.3	Perbaikan Jalan, Dampak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.4	Perbaikan Jalan, Dampak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.5	Perbaikan Jalan, Dampak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.6	Perbaikan Jalan, Dampak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.7	Perbaikan Jalan, Dampak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.8	Perbaikan Jalan, Dampak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.9	Perbaikan Jalan, Dampak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.10	Perbaikan Jalan, Dampak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
PERBUATAN PERMAYAMAN		3.428.840.745,00	80.215.200.321,00	10.763.808.907,18	38.118.448.714,00	147.936.437.745,00	8.093.608.670,00	34.083.008.836,89	36.806.500.000,00	100.828.396.143,68	17.758.388.087,00	136.437.411.495,08	18.885.336.988,47			

Tabel 3.6.
Proyeksi Pembiayaan Kota Subulussalam Tahun 2026-2027

Kode	Uraian	APBK 2025	Proyeksi	
			2026	2027
6.1	PEMBIAYAAN			
6.1.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	17.000.000.000,00	2.000.000.000,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	4,000,000,000.00	2,000,000,000.00
6.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	13,000,000,000.00	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	17.000.000.000,00	2.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	39,287,503,680.00	13.715.001.472,00	4,928,744,297.00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	1,000,000,000.00
6.2.03	Pembayaran Pokok Hutang yang Jatuh Tempo	39,287,503,680.00	13.715.001.472,00	3,928,744,297.00
6.2.04	Pembayaran Hutang Pihak Ketiga	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	39,287,503,680.00	13.715.001.472,00	4,928,744,297.00
	Pembiayaan Netto	(39,287,503,680.00)	3.284.998.528,00	(2,928,744,297.00)
	SILPA	-	-	-

Tabel 3.7.

Rangkuman Proyeksi Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Pemerintah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2026-2027

Kode	Uraian	PROYEKSI	
		2026	2027
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	69.316.211.489,00	77.945.362.539,00
4.1.01	Pajak Daerah	11.018.739.476,00	16.156.660.157,00
4.1.02	Retribusi Daerah	50.869.745.923,00	54.122.946.974,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.278.272.479,00	1.303.965.756,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.149.453.611,00	6.361.789.652,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	563.492.278.904,00	636.754.240.676,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	544.670.163.000,00	601.063.104.623,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	18.822.115.904,00	35.691.136.053,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	639.308.490.393,00	721.199.603.215,00
5	BELANJA		
5.1	BELANJA OPERASI	453.766.080.458,00	486.179.104.210,20
5.1.01	Belanja Pegawai	250.451.674.654,48	258.502.330.000,20
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.488.248.658,52	217.643.728.035,00
5.1.03	Belanja Bunga	1.070.142.145,00	33.046.175,00
5.1.05	Belanja Hibah	17.156.015.000,00	5.000.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.600.000.000,00	5.000.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	56.518.972.101,00	82.738.926.721,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah		1.000.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.862.789.168,00	13.370.732.194,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.888.496.533,00	41.817.214.325,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.244.950.000,00	23.908.921.202,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.022.736.400,00	1.621.959.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	500.000.000,00	1.020.100.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.175.822.523,00	44.834.271.861,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.175.822.523,00	44.834.271.861,00
5.4	BELANJA TRANSFER	102.132.613.839,00	104.518.556.125,80
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	102.132.613.839,00	104.518.556.125,80
	Jumlah Belanja	642.593.488.921,00	718.270.858.918,00
	Total Surplus/(Defisit)	(3.284.998.528,00)	2.928.744.297,00
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	17.000.000.000,00	2.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.000.000.000,00	2.000.000.000,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	13.000.000.000,00	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	17.000.000.000,00	2.000.000.000,00

Kode	Uraian	PROYEKSI	
		2026	2027
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.715.001.472,00	4.928.744.297,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	1.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Pokok Hutang yang Jatuh Tempo	13.715.001.472,00	3.928.744.297,00
6.2.04	Pembayaran Hutang Pihak Ketiga	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	13.715.001.472,00	4.928.744.297,00
	Pembiayaan Netto	3.284.998.528,00	(2.928.744.297,00)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-
	TOTAL APBD	656.308.490.393,00	723.199.603.215,00

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan dan isu strategis utama di Kota Subulussalam adalah tingginya angka defisit anggaran dan hutang daerah. Hingga akhir tahun 2024, hutang Kota Subulussalam mencapai 240 miliar rupiah yang berasal dari hutang kepada pihak ketiga dan hutang pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari PT. Sarana Multi Infrastruktur. Dengan kondisi keuangan yang sangat riskan ini, Kota Subulussalam mengalami keterlambatan dan keterhambatan dalam pembangunan.

Pada tahun 2025, Kota Subulussalam telah memiliki Wali Kota dan Wakil Wali Kota Subulussalam baru untuk periode 2025-2030. Pada tahun ini juga disusun Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rankhir-RPJMD) Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 yang menjabarkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Adapun visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Subulussalam Tahun 2025-2030 adalah:

"KOTA SUBULUSSALAM ISLAMI, MAJU DAN BERKELANJUTAN"

Dalam rangka menunjang visi tersebut, maka terdapat pancacita yaitu:

- 1) Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dan Kualitas Kesehatan
- 2) Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam
- 3) Mewujudkan Terciptanya Ekonomi Kerakyatan
- 4) Mewujudkan Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Dan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Baik Dan Bersih
- 5) Mewujudkan Terciptanya Pembangunan Infrastruktur Yang Merata

4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Subulussalam tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran Ranwal RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Subulussalam Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Subulussalam

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target	KET.
					2024	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
VISI : SUBULUSSALAM ISLAMI, MAJU DAN BERKELANJUTAN							
MISI 1: MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KUALITAS KESEHATAN							
1.1.	Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Sumber Daya Manusia		Indeks Pengetahuan	Angka	0,706	0,715	
1.1.1.		Kualitas Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Tinggi	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,43	8,69	
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,31	15,61	
1.2.	Meningkatkan Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat		Indeks Kesehatan	Angka	0,766	0,77	
1.2.1.		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas	Harapan Lama Hidup	Tahun	69,8	70,04	
MISI 2: MENINGKATKAN PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM							
2.1.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah		Indeks Pembangunan Syariat Islam (IPS)	Angka	83,9	85	
2.1.1.		Menguatnya Budaya dan Adat Istiadat yang Bernilai Syariat Islam	Cakupan Budaya dan Adat yang dilestarikan	Persen	100	100	
2.1.2.		Menguatnya Pelaksanaan Syariat Islam pada Setiap Lapisan Masyarakat	Indeks Melek Al-Quran	Angka	83,25	83,75	
2.2.	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat		Angka Kriminalitas	Kasus per 100.000 Penduduk	125,17	90	
2.2.1.		Meningkatnya kenyamanan masyarakat (Trantibunlinmas dan Polhukam)	Persentase Penurunan Kejadian Kejahatan	Persen	22,85	10	
MISI 3 : MEWUJUDKAN TERCIPTANYA EKONOMI KERAKYATAN							
3.1.	Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,12	4,25	
3.1.1.		Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan dan Ketahanan Pangan Daerah yang signifikan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan	Persen	23,91	23,93	
3.1.2.		Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Sumber Daya Lokal	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	19,37	19,39	
			Kontribusi PDRB sektor	Persen	16,64	16,84	

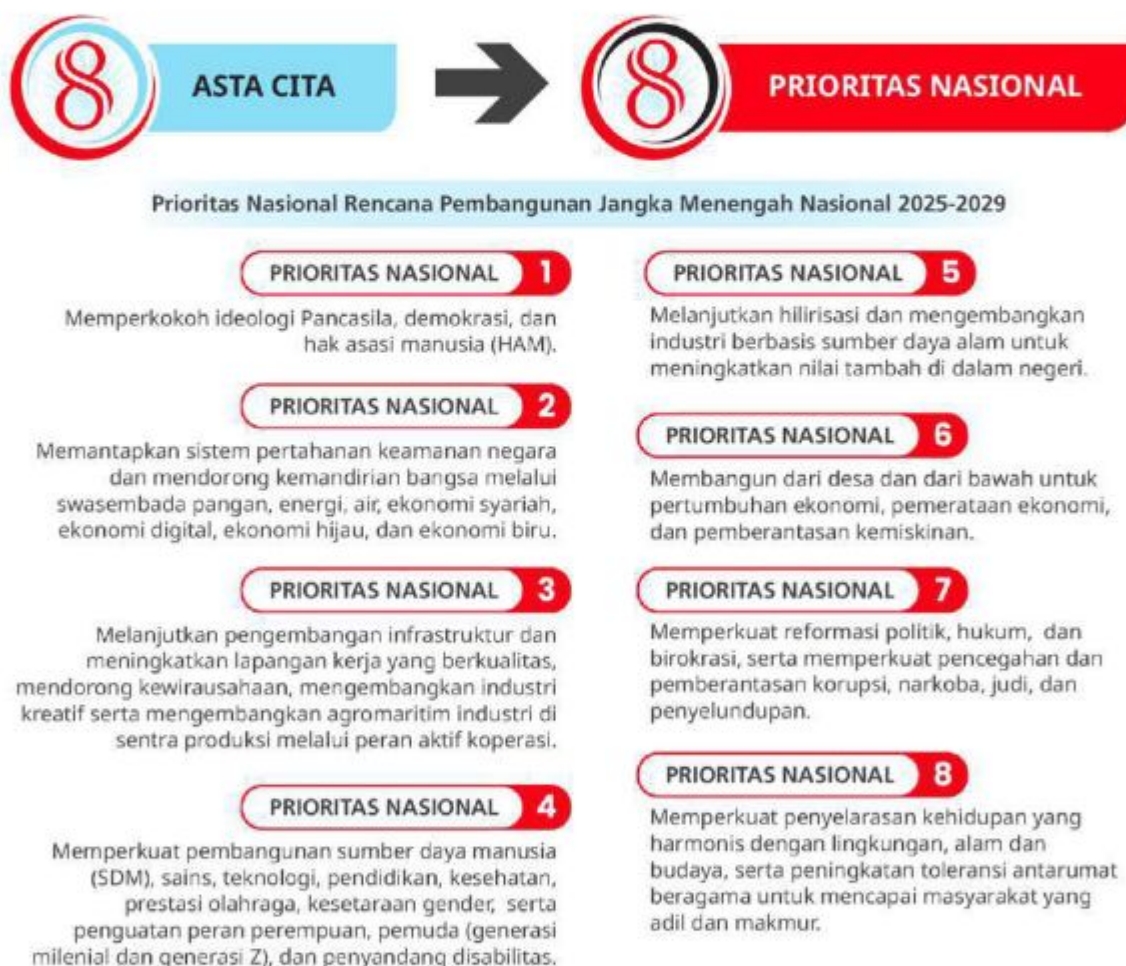
Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target	KET.
					2024	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor				
3.1.3.		Mewujudkan Iklim Investasi yang ramah Investor	Kontribusi PDRB sektor Jasa Perusahaan	Persen	0,26	0,27	
3.2.	Menurunkan Angka Kemiskinan		Tingkat Kemiskinan	Persen	16,38	15,75	
		Meningkatnya Intervensi Penurunan Jumlah Penduduk Miskin dan Memperluas Variasi Lapangan Pekerjaan	Kemiskinan Ekstrem	Persen	0,77	0,6	
3.3.			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,12	4,28	
MISI 4: MEWUJUDKAN TERCIPTANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH YANG BAIK DAN BERSIH							
4.1.	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang reformatif		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	CC	CC	
4.1.1.		Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat dan Pelayanan Publik yang berkualitas dan PRIMA	Nilai SAKIP	Angka	CC	CC	
			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Angka	B	B	
4.1.2.		Tranformasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Baik dan Bersih	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	Sangat Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan	
			Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Angka	3,3	3,39	
MISI 5 : MEWUJUDKAN TERCIPTANYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MERATA							
5.1.	Mewujudkan Aksesibilitas Infrastruktur Pelayanan Dasar secara Merata Berbasis Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana serta Berkelanjutan		Indeks Pilar Infrastruktur IDSD	Angka	2,05	2,09	
5.1.1.		Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas	Rata-rata capaian kinerja Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persen	69,73	70,5	
5.1.2.		Terwujudnya Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	74,28	74,75	
			Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,4	0,42	

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, terdapat 8 prioritas nasional (PN) yang disajikan pada Gambar 4.1. PN menjadi pedoman dalam penyusunan:

- 1) Rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan;
- 2) Intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan;
- 3) Rencana kerja di tiap instansi pemerintah; hingga
- 4) Penyusunan intervensi teknis strategis seperti halnya proyek strategis nasional.



Gambar 4.1.
8 (Delapan Prioritas Nasional)

Beberapa sasaran pembangunan nasional yaitu:

- 1) Pertumbuhan ekonomi menjadi 6,3 persen;
- 2) GNI per kapita menjadi 5.870 USD;
- 3) Tingkat kemiskinan turun menjadi 6,5-7,5 persen;

- 4) Rasio gini turun menjadi 0,377-0,380;
- 5) Indeks modal manusia (IMM) meningkat menjadi 0,57;
- 6) Penurunan intensitas emisi GRK menjadi 37,14 persen;
- 7) Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat menjadi 76,67.

Untuk mewujudkan target prioritas nasional tersebut, maka diperlukan intervensi-intervensi pembangunan nasional yang dilaksanakan di Kota Subulussalam berdasarkan Prioritas Nasional (PN) tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Prioritas Nasional Dengan Highlight Intervensi

No	Prioritas Nasional	NO	Highlight Intervensi
1	2	3	4
PN 1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia;	1	Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat
PN 2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan , energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;	1	Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berupa tempat pengolahan sampah di Kota Subulussalam
		2	Pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Wilayah Kota Subulussalam
		3	Pengendalian banjir di Wilayah Kota Subulussalam
		4	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PDAM Kota Subulussalam
		5	Optimalisasi Sistem Pengembangan Air Minum di Kecamatan Penanggalan, Sultan Daulat dan Rundeng
		6	Peningkatan sistem pengelolaan persampahan skala kota melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di Kecamatan Simpang Kiri
		7	Cetak sawah baru untuk Tanaman Padi di Kecamatan Simpang Kiri, Sultan Daulat
		8	Gerakan mandiri pangan (sayuran konsumsi, ikan dan ternak ayam kampung) di Kecamatan yang ada di wilayah Kota Subulussalam
		9	Pemberdayaan penanaman dan produksi jagung bibit unggul Kota Subulussalam
PN 3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	1	Pembangunan Jalan Siperkas - Lac Kombih Kecamatan Rundeng
		2	Pembangunan Jalan SP Darussalam - Darussalam Kecamatan Longkib
		3	Lanjutan Pembangunan Jembatan Desa Danau Trans
		4	Peningkatan Jalan Usaha Tani di 5 Kecamatan Kota Subulussalam
PN 4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	1	Peningkatan Kapasitas

No	Prioritas Nasional	NO	Highlight Intervensi
1	2	3	4
	olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;		
		2	Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di rumah sakit di Kota Subulussalam
		3	Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kota Subulussalam
		4	Percepatan penurunan ketimpangan gender, khususnya di bidang pendidikan dan ekonomi yang didukung oleh penyediaan infrastruktur serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan
		5	Pengendalian penyakit menular dan menular lainnya
		6	Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal)
		7	Fasilitasi literasi digital
		8	Peningkatan kapasitas kepemudaan dan pramuka
		9	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga di lima wilayah kecamatan Kota Subulussalam
		10	Pemberian bimbingan kepada keluarga distabilitas, anak, gelandangan dan pengemis serta alat bantu distabilitas
		11	Kegiatan TPP PKK dan hari Ibu di Kota Subulussalam
PN 5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;	1	Pemanfaatan teknologi digital di sektor jasa pengiriman/logistik
		2	Peningkatan layanan terminal terpadu di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam
		3	Peningkatan layanan perairan sungai di desa Sepang Kecamatan Rundeng
PN 6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;	1	Pengembangan wilayah transmigrasi di kecamatan Kota Subulussalam
		2	Peningkatan sarana dan prasarana Pujasera di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam
PN 7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	1	Penataan dan penyempurnaan regulasi dan kelembagaan otonomi khusus Aceh
		2	Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran
		3	Peningkatan kualitas dan kapasitas APIP
		4	Penegakan hukum syariat yang dilaksanakan Satpol PP dan WH
		5	Pengembangan jasa keuangan yang bersifat syariah di Kota Subulussalam
PN 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	1	Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan

No	Prioritas Nasional	NO	Highlight Intervensi
1	2	3	4
	Makmur		
		2	FKUB di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam

Pada Rakortekrenbang Nasional, terdapat 1 usulan yang memiliki lokasi khusus (lokus) di Kota Subulussalam, yaitu pembangunan SPAM dengan status direkomendasikan dengan catatan untuk diakomodasi hanya pada lokasi Krueng Sabe dan di Simpang Kiri dan perlu dilakukan perbaikan *geotagging* usulan.

Usulan proyek hasil Desk Musrenbangnas Tahun 2025 adalah Pembangunan SPAM dengan proyek Optimalisasi SPAM IKK Simpang Kiri Kota Subulussalam (Pembangunan *Water Treatment Plant* (WTP) dan Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU).

4.2.2 Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2026

Indikasi tema RKPA tahun 2026 yaitu ***"Swasembada Pangan dan Energi serta Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan untuk Penurunan Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja"***. Sedangkan 9 (Sembilan) Prioritas Pembangunan Aceh yaitu:

- 1) Penguatan kekhususan, keistimewaan dan perdamaian Aceh
- 2) Penurunan kemiskinan masyarakat Aceh
- 3) Hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA dan maritim
- 4) Penciptaan lapangan kerja
- 5) Peningkatan infrastruktur yang berkualitas
- 6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia, sains, dan teknologi
- 7) Transformasi digital yang terintegrasi
- 8) Tata kelola birokrasi dan kemandirian fiskal daerah
- 9) Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Sasaran indikator makro wilayah Aceh yang dituangkan dalam Permendagri 10/2025 sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,0 – 5,3 persen
- 2) PDRB per Kapita 48,9 – 50,2 juta per tahun
- 3) Kontribusi PDRB Provinsi 1,1 persen
- 4) Tingkat Kemiskinan 9,46 – 10,46 persen
- 5) Tingkat Pengangguran Terbuka 5,12 – 5,47 persen
- 6) Rasio Gini 0,280 – 0,290
- 7) Indeks Modal Manusia 0,58

- 8) Penurunan Intensitas Emisi GRK 32,91 – 37,47 persen
- 9) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 83,06

Target indikator sasaran pembangunan Aceh Tahun 2026 sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,0 – 5,3 persen
- 2) PDRB per Kapita 53 – 55,12 juta per tahun
- 3) Kontribusi PDRB Provinsi 1,08 persen
- 4) Tingkat Kemiskinan 11,42 – 12,39 persen
- 5) Tingkat Pengangguran Terbuka 4,54 – 5,24 persen
- 6) Rasio Gini 0,287 – 0,291
- 7) Indeks Modal Manusia 0,56
- 8) Penurunan Intensitas Emisi GRK 32,91 – 37,47 persen
- 9) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 83,06

Intervensi pencapaian sasaran pembangunan Aceh untuk wilayah Kota Subulussalam secara khusus tersurat di antaranya:

- 1) Penguatan kekhususan, keistimewaan dan perdamaian Aceh
 - a. Pelatihan Takmir Masjid se-Aceh
 - b. Kapasitas Building dan Literasi Media bagi Remaja Masjid se- Aceh
- 2) Penurunan kemiskinan masyarakat Aceh
 - a. Penyediaan Bibit MPTS Untuk Pemberdayaan Masyarakat Kab. Aceh Timur, Kota Sabang dan Subulussalam
 - b. Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kab/Kota
- 3) Hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA dan maritim
- 4) Penciptaan lapangan kerja
 - a. Pemberdayaan Organisasi untuk Kemandirian Ekonomi Pemuda Se-Aceh
 - b. Standarisasi Lapangan Olahraga SMA/SMK sederajat dan SLB se Aceh
- 5) Peningkatan infrastruktur yang berkualitas
 - a. Pembangunan Jembatan Gajah Mati I Pada Ruas Jalan Jalan Simpang Lawe Deski - Muara Situlen - Batas Kota Subulussalam
- 6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia, sains, dan teknologi
- 7) Transformasi digital yang terintegrasi
 - a. Rakor Pemerintahan Digital Kab/kota se-Aceh
- 8) Tata kelola birokrasi dan kemandirian fiskal daerah
 - a. Bimtek Pengembangan Bina Aparatur DISDUKCAPIL Kab/Kota
- 9) Peningkatan kualitas lingkungan hidup

- a. Penyediaan Bibit MPTS Untuk Pemberdayaan Masyarakat Kab. Aceh Timur, Kota Sabang dan Subulussalam
- b. Penyediaan Bibit Penghijauan Lingkungan Taman Kota, Turus Jalan dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya di Kota Calang, Meulaboh, Suka Makmue, Blangpidie, Tapaktuan, Subulussalam dan Singkil
- c. Sosialisasi Penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 Skala Kabupaten/Kota

Arah pembangunan wilayah kabupaten/kota di Aceh untuk Kota Subulussalam di antaranya:

- 1) Kawasan Pertumbuhan → Kawasan perkotaan Subulussalam
- 2) Kawasan Komoditas Unggulan → Sawit dan Karet

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Subulussalam Tahun 2026

RKPK Subulussalam Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kedua RPD Kota Subulussalam Tahun 2025-2026 yang diarahkan pada pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai bentuk pelaksanaan periode ketiga pembangunan dalam RPJPD Kota Subulussalam tahun 2015-2035. Selain itu, RKPK Subulussalam Tahun 2026 ini juga penjabaran dari Ranwal RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029. Arah kebijakan pembangunan tahun 2026 yaitu Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Perbaikan Tata Kelola Keuangan.

RKPK Subulussalam Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan sinergitas dan sinkronisasi prioritas pembangunan antara Pemerintah Nasional, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota tetangga termasuk mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRK, menuju pembangunan inklusif dan berkelanjutan yang mengarah pada *pro poor*, *pro job*, *pro growth* dan *pro environment*; kebijakan percepatan pencapaian target keadilan untuk semua (*justice for all*), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Mengacu pada RKP Nasional dan RKPA tahun 2026, dan berdasarkan hasil Rakortekrenbang RKPA Tahun 2026 target pembangunan yaitu :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,22 – 4,5 persen;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,30 – 4,00 persen;
3. Rasio Gini 0,270 – 0,276;
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,00 – 72,48;
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 15,75 – 14,90 persen;
6. PDRB per Kapita sebesar 25,50 juta per orang per tahun;
7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 74,50 – 81,87.

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi serta berdasarkan tahapan RPD Kota Subulussalam Tahun 2025-2026 serta Ranwal RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 maka pada tahun 2026 Pembangunan Kota Subulussalam diprioritaskan pada:

- 1) Pembayaran kewajiban/hutang daerah dan mengurangi angka defisit anggaran
- 2) Meningkatkan kualitas SDM dan derajat hidup masyarakat
 - a. Kota Layak Anak;
 - b. Menjamin ketersediaan obat di RSUD Kota Subulussalam dan Puskesmas;
 - c. Penurunan angka *stunting*;
 - d. Memastikan IGD Puskesmas aktif 24 jam;
 - e. Bantuan sebesar 2 juta rupiah untuk keluarga pasien rujuk kurang mampu.
- 3) Memperkuat infrastruktur pelayanan dasar untuk mendorong perekonomian yang terintegrasi
 - a. Penyediaan rumah layak huni kepada masyarakat kurang mampu;
 - b. Aktivasi PDAM Rundeng;
 - c. Rehabilitasi Jalan Simpang Kiri-Rundeng;
 - d. Bantuan modal usaha, peralatan dan perlengkapan UMKM.
- 4) Memperkuat tata kelola pemerintahan
 - a. Pembayaran gaji, tambahan penghasilan, dan insentif guru dan tenaga kesehatan tepat waktu;
 - b. Pembayaran TPP dan Honor tepat waktu;
 - c. Penuntasan pembayaran gaji aparat kampung;
 - d. Menghapuskan segala bentuk pungutan liar (pungli).
- 5) Peningkatan penerapan syariat Islam
 - a. Peningkatan peran ulama dalam pengambilan kebijakan pemerintah;
 - b. Menyelenggarakan *event* santri dan keagamaan setiap tahun.

4.2.4 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Subulussalam dengan Prioritas Aceh dan Prioritas Nasional Tahun 2026

Prioritas pembangunan Kota Subulussalam pada tahun 2026 mensinergikan antara prioritas Nasional dan Provinsi, yang mana ada beberapa prioritas yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Subulussalam, antara lain adalah pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Pemerintah Kota Subulussalam pada tahun 2026 masih mempunyai beban yang besar terkait pengembalian dana PEN baik itu untuk pembayaran pokok

maupun bunga pinjaman. Hal ini menjadi beban Pemerintah Kota Subulussalam dalam rangka menyusun program yang benar-benar prioritas dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan tahun 2026 agar mampu menjaga laju kestabilan keuangan Pemerintah Kota Subulussalam. Lebih lanjut, keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Subulussalam Tahun 2026 dengan prioritas Pemerintah Aceh dan Prioritas Nasional adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 4.3.

Program prioritas Pemerintah Kota Subulussalam disinergikan dengan alokasi pendapatan dan sumber pembiayaan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) berdasarkan Urusan dengan memperhatikan skala Prioritas berdasarkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Kota Subulussalam.

Tabel 4.3.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Subulussalam Dengan Prioritas Pembangunan Pemerintah Aceh dan Prioritas Nasional

AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN		MENGURANGI KETIMPANGAN WILAYAH MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS DAN PENINGKATAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN		MENINGKATKAN PEREKONOMIANDERAH DAN PERBAIKAN TATA KELOLA KEUANGAN	
NO	PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026	NO	PRIORITAS ACEH TAHUN 2026	NO	PRIORITAS KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2026
1	2	3	4	5	6
PN 1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia;	PA 6	Mewujudkan implementasi UUPa sesuai dengan perjanjian damai mou helsinki	PS 1	Pembayaran kewajiban/hutang daerah dan mengurangi angka defisit anggaran
PN 2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan , energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;	PA 7	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kondusivitas diseluruh wilayah aceh		
PN 3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	PA 2	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	PS 3	Memperkuat infrastruktur pelayanan dasar untuk mendorong perekonomian yang terintegrasi
PN 4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;	PA 5	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	PS 2	Meningkatkan kualitas SDM dan derajat hidup masyarakat
PN 5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;	PA 3	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	PS 2	Meningkatkan kualitas SDM dan derajat hidup dan kesehatan masyarakat
PN 6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi ,pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;	PA 4	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis ekonomi unggulan	PS 3	Memperkuat infrastruktur pelayanan dasar untuk mendorong perekonomian yang terintegrasi
PN 7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	PA 8	Mewujudkan tranformasi tata kelola pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang bersih dan berwibawa	PS 4	Memperkuat tata kelola pemerintahan
PN 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur	PA 1	Memantapkan pelaksanaan syariat islam	PS 5	Peningkatan penerapan syariat Islam

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Subulussalam

Pembangunan Kota Subulussalam pada tahun 2026 diselenggarakan dengan tema yaitu ***“Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Perbaikan Tata Kelola Keuangan”***. Hal ini mendorong Pemerintah Kota Subulussalam dalam mengalokasikan pagu di setiap program kegiatan yang ada di setiap satuan kerja pengampu kegiatan guna mendorong dan melaksanakan arah kebijakan pembangunan Kota Subulussalam Tahun 2026 sesuai RPJMD Kota Subulussalam. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Subulussalam disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4.
Arah Kebijakan dan Strategi Kota Subulussalam Tahun 2026

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KUALITAS KESEHATAN	Peningkatan Sarana Dan Prasarana jenjang Paud sampai dengan Menengah Pertama	
		Peningkatan Akreditasi Sekolah PAUD Dan Pendidikan Dasar serta menengah Pertama	
		Peningkatan Mutu Dayah yang Berakreditasi	
		Peningkatan Ketrampilan Berbasis Teknologi Informasi	
		Peningkatan Kapasitas Pendidik yang Bersertifikasi	
		Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan kompetensi	
		Mengembangkan kurikulum lokal berbasis ciri khas daerah	
		Meningkatkan literasi membaca masyarakat	
		Meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda melalui penguatan organisasi kepemudaan dan kepramukaan	
		Perlunya perhatian dari pemerintah kepada mantan narapidana khususnya pemuda-pemuda	
		Meningkatkan prestasi atlet melalui pembinaan dan pengembangan daya saing, penyelenggaraan kejuaraan dan pengembangan cabor, sarana dan prasarana olahraga	
		Meningkatkan Partisipasi Perempuan dan Kelompok Rentan dalam Pembangunan	
		Meningkatkan peran Tim Pengerak PKK sampai dengan level kampung	
		Peningkatan Koordinasi Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak	
		Penguatan Kelembagaan Dan Jaringan PUG Dan PUHA	
		Pemberian Bantuan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Yang Terlibat Tindak Kekerasan	
		Meningkatkan tata kelola dan peningkatan mutu tenaga kesehatan	
		Meningkatkan Kualitas Koordinasi dan Intervensi Lintas Sektor untuk Penurunan angka Stunting	
		Memenuhi sarana prasarana, alat kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan	
		Meningkatkan Gerakan Masyarakat Sehat Melalui Peningkatan Kapasitas Kader Siaga Serta Meningkatkan Fungsi Monev Terintegrasi	
		Meningkatkan Sarana Prasarana Dan Mutu Pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas, Dan Pustu	
		Peningkatan Promosi Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat	

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
		Meningkatkan keaktifan dan sarana prasarana posyandu	
		Peningkatan Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	
		Peningkatan Kesadaran Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	
		Mempercepat proses izin praktek untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis yang memenuhi persyaratan perijinan	
		Penggunaan obat dan bahan medis yang berlabel halal untuk ditinjau dan diterapkan pada fasilitas kesehatan pemerintah yang sudah bersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Halal	
		Pembukaan lapangan pekerjaan untuk apoteker difasilitas kesehatan swasta	
		Upgrade badan diklat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam agar terakreditasi oleh Kemenkes	
		Peningkatan pelayanan kesehatan kedalam dunia pendidikan khususnya kunjungan rutin ke Pondok Pesantren atau Dayah	
		Peningkatan peran organisasi kesehatan dalam mendukung program pemerintah	
		Dukungan untuk program gerakan ayah idaman dan penitipan anak di desa-desa	
		Pelaksanaan sekolah lansia di Kota Subulussalam	
		Peningkatan peran serta milenial dan gen-z untuk mendukung dan menciptakan pola pembelajaran yang lebih edukatif	
		Digitalisasi di dunia pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang mampu bersaing di dunia teknologi informasi	
		Peningkatan peran lembaga pendidikan bidang kesehatan dalam program penurunan angka stunting	
2	MENINGKATKAN PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM	Terbinanya Hubungan Yang Harmonis Antara Ulama Dengan Pemerintah	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Dan SDM Dalam Mengembangkan Dan Mengawasi Adat Istiadat Sesuai Syariat Islam	
		Peningkatan semarak dan syiar islam di setiap hari-hari besar keislaman	
		Penguatan nilai adat istiadat Aceh melalui peningkatan pembinaan budaya,kesenian, adat, hukum adat dan lembaga adat	
		Implementasi regulasi pelaksanaan, pengawasan dan penegakan Syariat islam di semua lini	
		Meningkatkan Kapasitas Masyarakat tangap terhadap ketentraman dan keamanan Lingkungan	

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
		Peningkatan upaya preventif dalam mengatasi konflik horizontal	
		Perlunya regulasi tentang larangan hewan ternak yang masih berkeliaran di area umum dan perkebunan warga	
		Peningkatan terhadap kegiatan kewaspadaan dini untuk mengantisipasi dan mengurangi potensi dini gangguan-gangguan internal	
		Peningkatan kerja sama dengan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan	
		Pelaksanaan program-program keagamaan khususnya dari mubaligh muda	
3	MEWUJUDKAN TERCIPTANYA EKONOMI KERAKYATAN	Meningkatkan kualitas sumber daya dan petani, peternak, dan nelayan serta kualitas hasil pertanian, peternakan dan Perkebunan	
		Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung lancarnya perekonomian	
		Perluasan jumlah lahan pekarangan pangan lestari di masing masing kecamatan untuk pemenuhan kebutuhan pangan lokal	
		Mengoptimalkan sumberdaya dan fasilitas perekonomian di semua sektor pendukung	
		Mengembangkan Destinasi Wisata Yang Memiliki Keunikan/Kekhasan Kota Subulussalam	
		Mengembangkan Kerjasama Dengan Pelaku Jasa Wisata Profesional, Serta Memberdayakan Kelompok Sadar Wisata	
		Menyederhanakan SOP prosedur perizinan	
		Mengoptimalkan pelayanan perizinan berbasis online dan mempersingkat pelayanan	
		Meningkatkan SDM calon tenaga kerja melalui pelatihan yang selektif dan berkesinambungan	
		Meningkatkan Keterampilan Dan Kompetensi Tenaga Kerja	
		Meningkatkan Kerjasama Hubungan Industrial Dalam Rangka Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	
		Mengoptimalkan Pembinaan Dan Penempatan Transmigrasi	
		Meningkatkan kapasitas SDM terhadap digital marketing	
		Memenuhi Layanan rehabilitasi Sosial didalam panti dan diluar Panti	
		Meningkatnya PPKS Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial dan kelompok Rentan	
		Peningkatan Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan	
		Meningkatkan Kapasitas Kinerja Manajemen Kelembagaan Baitul Mal	

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran Zakat, Harta Waqaf Dan Harta Agama Lainnya sesuai	
		Peningkatan perekonomian produktif bagi penyandang disabilitas melalui bantuan modal usaha baik barang maupun uang	
		Peningkatan perekonomian bagi PMKS khususnya bagi perempuan rawan sosial	
		Peningkatan kesejahteraan terhadap mantan kombatan, tapol, napol dan korban konflik baik itu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial kemasyarakatan	
		Peningkatan perekonomian terhadap kelompok asektor	
		Perlunya Qanun pariwisata yang ada di Kota Subulussalam demi memaksimalkan pengelolaan pendapatan reribusi yang bersumber dari lokasi pariwisata	
		Peningkatan sarana dan prasara pariwisata serta peningkatan kualitas SDM pariwisata	
		Peningkatan fasilitas hiburan khususnya untuk anak-anak di Kota Subulussalam yang mampu menunjang PAD	
		Peningkatan sumber daya pangan lokal yang bisa dijadikan bahan baku utama UMKM sebagai brand produk unggulan	
		Peningkatan fasilitasi terhadap organisasi perdagangan	
4	MEWUJUDKAN TERCIPTANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH YANG BAIK DAN BERSIH	Pemantapan Kualitas Organisasi Pemerintah Daerah	
		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Yang Profesional	
		Melaksanakan dukungan inovasi untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	
		Penguatan transparansi informasi melalui peningkatan pelayanan secara elektronik, dengan kualitas informasi, dan komunikasi publik yang baik	
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pelayanan Pencatatan Sipil Dan Kualitas Kependudukan	
		Penyediaan Akses Dan Infrastruktur Teknologi Informasi Serta Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	
		Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan PATEN	
		Penguatan regulasi alokasi dana desa untuk mendukung program	

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
		prioritas pemabngunan daerah	
		Mengoptimalkan fasilitas pemerintah untuk akses bagi calon investor	
		Meningkatkan Pelayanan Penanaman Modal Dan Perizinan	
		Peningkatan kualitas dokumen perencanaan melalui sinkronisasi dan keterkaitan antara Provinsi dan Nasional	
		Peningkatan kualitas dan akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Aset daerah dan Pengadaan Barang dan Jasa	
		Peningkatan kualitas dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran yang berbasis kinerja	
		Menetapkan dan menerbitkan dokumen penganggaran tepat waktu	
		Penguatan kualitas reviu APIP terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran	
		Intensifikasi dan Ektensifikasi pendapatan asli, mendorong peran perusahaan (TJSLP/CSR) dan LSM/CSO dalam pembangunan	
		Penurunan Angka Defisit dan Hutang Daerah	
5	MEWUJUDKAN TERCIPTANYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MERATA	Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur kebinamargaan Pembangunan dan pemeliharaan Transportasi darat dan Angkutan Massal Perkotaan Pembangunan dan Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan transportasi Peningkatan Kemantapan Angkutan Jalan Sampai Ke Pelosok Peningkatan Keselamatan Layanan Penyelenggaraan LLAJ Pembangunan dan penyediaan rumah layak huni dan korban bencana, peningkatan infrastruktur dasar dan kualitas kawasan permukiman, bangunan gedung dan kawasan strategis Pembangunan dan Peningkatan akses sanitasi layak, pengelolaan persampahan, Sistem Drainase Peningkatan dan pembangunan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum Pengendalian kesesuaia pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRW Peningkatan infrastruktur untuk mengatasi permasalahan Sumber Daya Air serta pemenuhan kebutuhan air masyarakat Peningkatan kondisi infrastruktur SDA mendukung konservasi, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak sumber air	

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pengendalian pencemaran dan pengrusakan LH dan mitigasi perubahan iklim	
		Perencanaan, pengawasan, pengendalian pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup dan pembinaan terhadap izin lingkungan	
		Pembangunan dan peningkatan layanan serta pemenuhan standar pengelolaan persampahan	
		Peningkatan edukasi, kualitas data, dan informasi LH kepada masyarakat	
		Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS	
		Peningkatan tata kelola TAHURA	
		Peningkatan efektifitas penegakan hukum kawasan hutan dan DAS	
		Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan	
		Pemanfaatan hutan dan industri kehutanan serta meningkatkan produksi dan produktifitas sumber daya hutan	
		Peningkatan Sarana Prasarana Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana	
		Pengendalian banjir pada daerah rawan bencana banjir	
		Penurunan IRB dengan peningkatan kapasitas daerah melalui upaya-upaya pencegahan dan peringatan dini	

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

RKPK Kota Subulussalam Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan daerah yang berisikan rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana maka dokumen ini memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi Kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPK dan masyarakat.

Guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui, selain berisi program dan kegiatan prioritas, RKPK ini juga mengakomodir prakiraan maju program dan kegiatan serta perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 2027. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026 diprioritaskan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Subulussalam untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian program dan kegiatan untuk memenuhi target capaian kinerja pembangunan yang optimal. Selain itu, prioritas pembangunan tahun 2026 difokuskan untuk mensukseskan target-target program prioritas tahun ke dua RPJMD Kota Subulussalam 2025-2029 yang dijabarkan dalam dokumen RKPK tahun 2026.

Prioritas program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPK ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat baku. Prioritas program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPK ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Tahun 2026. Untuk mengetahui alokasi anggaran per SKPK dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Alokasi Anggaran Per OPD Tahun 2026

No	SKPK	Pagu Indikatif	Persentase (%)
1	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	1.178.727.691,00	0,19
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	152.443.500.766,00	24,68
3	Dinas Kesehatan	71.872.298.896,00	11,64
4	Rumah Sakit Umum Daerah	73.613.982.993,00	11,99
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	24.614.549.339,00	4,50
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.395.437.040,00	1,20
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	6.341.726.187,00	1,03
8	Dinas Sosial	3.016.717.532,00	0,49
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.629.236.374,00	0,43
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	5.545.110.077,00	0,90
11	Dinas Pangan	1.073.530.097,00	0,17
12	Dinas Pertanahan	1.607.973.230,00	0,26
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.992.204.891,00	0,98
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.608.614.334,00	0,42
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	2.404.589.627,00	0,29
16	Dinas Perhubungan	2.405.697.935,00	0,39
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.122.139.588,00	0,51
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2.025.597.036,00	0,33
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.863.558.046,00	0,38
20	Sekretariat Majelis Adat Aceh	1.247.243.683,00	0,20
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.914.616.643,00	0,47
22	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	8.306.419.003,00	1,27
23	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	4.548.961.796,00	0,74
24	Sekretariat Daerah	27.113.565.923,00	4,42
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota	18.366.290.938,00	2,99
26	Badan Perencana Pembangunan Daerah	5.255.844.699,00	0,86
27	Badan Pengelola Keuangan Daerah	144.845.866.198,00	18,92
28	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	538.113.552,00	0,09
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.357.605.085,00	0,38
30	Inspektorat	5.597.707.276,00	0,91
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.927.387.479,00	0,48
32	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	1.723.780.105,00	0,28
33	Sekretariat Baitul Mal	6.261.486.505,00	1,02
34	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	17.062.736.688,00	2,78
35	Kecamatan Longkib	1.755.962.420,00	0,29
36	Kecamatan Penanggalan	2.101.480.274,00	0,34
37	Kecamatan Rundeng	2.084.314.910,00	0,34
38	Kecamatan Simpang Kiri	2.396.767.749,00	0,39
39	Kecamatan Sultan Daulat	1.871.604.316,00	0,30
40	Puskesmas Simpang Kiri	1.940.873.602,00	0,32
41	Puskesmas Penanggalan	1.356.615.000,00	0,22
42	Puskesmas Rundeng	1.679.930.928,00	0,27
43	Puskesmas Sultan Daulat	1.871.318.500,00	0,30
44	Puskesmas Longkib	1.178.412.000,00	0,19
45	Puskesmas Jontor	944.321.000,00	0,15
46	Puskesmas Bakal Buah	890.731.970,00	0,15
47	Puskesmas Batu-batu	698.339.000,00	0,11
JUMLAH		642.593.488.921,00	100,00

Tabel 5.2
Alokasi Anggaran Berdasarkan Urusan Pada RKPK 2026

Kode	Bidang	Nilai
1.01	Pendidikan	164.527.228.457,00
1.02	Kesehatan	156.046.823.889,00
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.564.549.339,00
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.050.000.000,00
1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	13.737.163.227,00
1.06	Sosial	3.016.717.532,00
2.07	Tenaga Kerja	2.589.236.374,00
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.915.116.077,00
2.09	Pangan	1.073.530.097,00
2.10	Pertanahan	1.607.973.230,00
2.11	Lingkungan Hidup	5.972.204.891,00
2.12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.608.614.334,00
2.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.404.589.627,00
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.629.994.000,00
2.15	Perhubungan	2.405.697.935,00
2.16	Komunikasi dan Informatika	3.122.139.588,00
2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.165.761.796,00
2.18	Penanaman Modal	2.025.597.036,00
2.19	Kepemudaan dan Olahraga	2.853.558.046,00
2.22	Kebudayaan	1.947.243.683,00
2.23	Perpustakaan	2.914.272.883,00
2.24	Kearsipan	343.760,00
3.25	Kelautan dan Perikanan	50.000.000,00
3.26	Pariwisata	10.000.000,00
3.27	Pertanian	8.256.419.003,00
3.28	Kehutanan	20.000.000,00
3.30	Perdagangan	213.200.000,00
3.31	Perindustrian	170.000.000,00
3.32	Transmigrasi	40.000.000,00
4.01	Sekretariat Daerah	27.113.565.923,00
4.02	Sekretariat DPRD	18.366.290.938,00
5.01	Perencanaan	5.005.844.699,00
5.02	Kuangan	144.845.866.198,00
5.03	Kepegawaian	2.837.604.187,00
5.04	Pendidikan dan Pelatihan	58.114.450,00
5.05	Penelitian dan Pengembangan	250.000.000,00
6.01	Inspektorat	5.597.707.276,00
7.01	Kecamatan	10.210.129.669,00
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	2.927.387.479,00
9.01	Aceh	13.443.003.298,00
TOTAL		642.593.488.921,00

Tabel 5.3
Mandatory Spending Alokasi Anggaran Kota Subulussalam Tahun 2026

No.	Uraian	Pagu	Persentase
1	Alokasi Belanja Pendidikan	164.527.228.457,00	25,60
2	Alokasi Belanja Kesehatan	117.416.502.635,00	18.27
3	Alokasi Belanja Infrastruktur	91.534.782.488,00	14.24
Total Belanja APBK		642.593.488.921,00	

Rincian Prioritas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKPK tahun 2026 beserta alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada Lampiran 6.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Subulussalam tahun 2026 mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029.

6.1. Indikator Kinerja Utama Kota Subulussalam Tahun 2026

Penetapan indikator kinerja utama (IKU) Kota Subulussalam didasarkan pada sasaran jangka menengah Kota Subulussalam. Adapun IKU Kota Subulussalam Tahun 2026 disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Utama Kota Subulussalam Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target Tahun	KET.
			2024	2026	
1	2	3	4	5	6
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,43	8,69	
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,31	15,61	
3	Harapan Lama Hidup	Tahun	69,8	70,04	
4	Cakupan Budaya dan Adat yang dilestarikan	Persen	100	100	
5	Indeks Melek Al-Quran	Angka	83,25	83,75	
6	Persentase Penurunan Kejadian Kejahatan	Persen	22,85	10	
7	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan	Persen	23,91	23,93	
8	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	19,37	19,39	
9	Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	16,64	16,84	
10	Kontribusi PDRB sektor Jasa Perusahaan	Persen	0,26	0,27	
11	Kemiskinan Ekstrem	Persen	0,77	0,6	
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,12	4,28	
13	Nilai SAKIP	Angka	CC	CC	
14	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Angka	B	B	
15	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	Sangat Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan	
16	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Angka	3,3	3,39	
17	Rata-rata capaian kinerja Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persen	69,73	70,5	
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	74,28	74,75	
19	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,4	0,42	

6.2. Indikator Kinerja Daerah berdasarkan Bidang Urusan

Penetapan indikator kinerja daerah (IKD) bertujuan untuk menggambarkan tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan kinerja daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas spesifik, obyektif,

berkesinambungan, terukur, dapat diperbandingkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dibagi dalam tiga aspek, yaitu:

- 1) Aspek Geografi dan Demografi;
- 2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
- 3) Aspek Daya saing Daerah;
- 4) Aspek Pelayanan Umum;
- 5) Indikator Kinerja Kunci.

IKD ini dituangkan dalam bentuk matriks yang akan dipergunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Selengkapnya, matriks indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6.2.
Indikator Kinerja Daerah Kota Subulussalam Tahun 2026

No.	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2024	Target Kinerja 2026	Ket
1	2	3	4	5	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI				
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	41,12	43	
2	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	Persen	0	0	
3	Konsumsi Listrik per Kapita	KWh / Kapita	144	147	
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	Persen	57,25	63	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	74,28	74,75	
6	Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	61,57	63	
7	Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Ton	12866,25	16000	
8	Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	Persen	17,07	19,51	
9	Indeks Risiko Bencana	Angka	87,87	86,87	
10	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,4	0,42	
11	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	2,1	2	
12	Rasio Penduduk	Persen	103	103	
13	Kepadatan Penduduk	Orang / Km persegi	76	78	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,12	4,25	
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	16,38	15,75	
3	PDRB per Kapita (ADHB)	Juta / orang / tahun	27,88	29,58	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,12	4,28	
5	Indeks Gini	Angka	0,276	0,274	
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	70,64	72,39	
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,80	70,04	
8	Prevalensi Stunting (SSGI)	Persen	27,5	25	
9	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,43	8,69	
10	Harapan lama sekolah	Tahun	15,31	15,61	
11	Angka Literasi (SD)	Angka	46,32	51,32	
12	Angka Literasi (SMP)	Angka	61,24	63,44	
13	Angka Numerasi (SD)	Angka	45,38	51,18	
14	Angka Numerasi (SMP)	Angka	56,08	59,08	
15	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	71,93	72,43	
16	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Angka	37,25	37,75	
17	Cakupan Kepersertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	40,51	41,5	

No.	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi	Target	Ket
			Awal RPJMD 2024	Kinerja 2026	
18	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	100	100	
19	Indeks Perlindungan Anak	Angka	63,89	64,29	
20	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,525	0,465	
21	Indeks Pembangunan Gender	Angka	85,88	86,25	
22	Angka Melek Huruf	Persen	96,44	97,25	
23	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan	Juta Rupiah	8491	9362	
24	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	Persen	1.111.170,00	1.345.000,00	
25	Persentase Penanganan Stunting	Persen	100,00	100,00	
26	Indeks Pembangunan Keluarga iBangga	Angka	65,8	68	
27	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Angka	60,6	65,2	
III ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Angka ketergantungan	Angka	53,99	53,49	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	19,37	19,39	
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Persen	0,92	0,94	
5	Rasio kewirausahaan	Persen	14,77	15,25	
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	68,60	69,60	
7	Indeks Inovasi Daerah	Angka	43,88	46,00	
8	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	47,72	47,82	
10	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	70,03	72	
11	Persentase Desa Mandiri	Persen	23,17	28,05	
12	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,2542	0,2642	
13	Tingkat Inflasi (Meulaboh)	Persen	3,29	3	
14	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Persen	9,61	11,00	
IV ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	77,34	77,84	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2,48	2,6	
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	B	B	
4	Indeks Integritas Nasional	Angka	65,56	73,5	
5	Persentase Pengakuan Perda	Persen	98	100	
6	Persentase Capaian Aksi HAM	Persen	93,3	94,3	
7	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,24	3,29	
V INDIKATOR KINERJA KUNCI					
5.1. Bidang Urusan Pendidikan					
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	48,40	49,5	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	98,56	100	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	87,29	98	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	56,53	69,51	
5	APK PAUD	Persen	44,82	49,51	
6	APK SD/MI	Persen	108,61	100	
7	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	Persen	100	100	
8	Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen	0,1	0,1	
9	APK SMP/MTs	Persen	93,65	100	
10	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	Persen	100	100	
11	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Persen	0,2	0,1	
12	Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	86,5	87,5	
13	Persentase Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	99,8	100	
14	Rasio guru terhadap murid pendidikan SD/MI	Rasio	0,05	0,05	
15	Rasio guru terhadap murid pendidikan SMP/MTs	Persen	0,05	0,05	
16	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 tahun	Persen	99,69	99,82	
17	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Persen	39,68	48,67	

No.	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi	Target	Ket
			Awal RPJMD 2024	Kinerja 2026	
18	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	Persen	47,39	54,07	
19	Iklim Inklusivitas SD	Angka	53,53	58,53	
20	Iklim Inklusivitas SMP	Angka	55,11	59,91	
21	Iklim Keamanan SD	Angka	68,22	70,02	
22	Iklim Keamanan SMP	Angka	66,59	69,59	
23	Iklim Kebinekaan SD	Angka	66,38	68,38	
24	Iklim Kebinekaan SMP	Angka	68,14	70,14	
25	Tingkat kenaikan jumlah Mahasiswa penerima beasiswa Pemerintah Kota Subulussalam	Persen	-84,14	0,1	
26	Persentase tenaga pendidik dayah yang memenuhi standar pendidikan dayah	Persen	36,96	62,10	
27	Persentase Dayah Yang Menerapkan Standar Manajemen Dayah	Persen	33,33	61,11	
28	Jumlah sarana dan prasarana Dayah/BP Yang Dibantu Pemerintah	Dayah/BP	7	95	
5.2. Bidang Urusan Kesehatan					
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Persen	1,94	1,98	
2	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	95,46	96,75	
3	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	84,25	91,43	
4	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100	
2	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	95,46	96,75	
5	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	100	
6	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	56,33	70	
7	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	21,19	80	
8	Persentase warga kesehatan sesuai standar negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining	Persen	67,00	80	
9	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	75,12	100	
10	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	73,97	100	
11	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100	
12	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	52,43	100	
13	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	66,62	100	
14	Cakupan Balita Stunting (EPPGBM)	Persen	14	14	
15	Persentase Balita Gizi Kurang (Underweight) / (BB/U)	Persen	6,37	5,5	
16	Persentase Balita Kurus (Wasting) / (BB/TB)	Persen	4	3,5	
17	Jumlah Terduga TB Paru yang ditemukan	Kasus	2073	1569	
18	Jumlah Kasus TBC yang harus ditemukan (treatment coverage)	Kasus	384	291	
19	Angka keberhasilan Pengobatan TB (treatment success rate)	Persen	90	90	
20	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	9,2	2,9	
21	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	9,2	9,2	
22	Angka Kematian Ibu Per 100,000 Kelahiran Hidup	/100,000 Kelahiran Hidup	254	0	
23	Persentase Posyandu aktif	Persen	99,13	100	

No.	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi	Target	Ket
			Awal RPJMD 2024	Kinerja 2026	
24	Rasio dokter umum per satuan penduduk	/1,000 Penduduk	0,31	0,47	
25	Rasio dokter Spesialis per satuan penduduk	/1,000 Penduduk	0,19	0,21	
26	Rasio dokter Gigi dan Dokter Spesialis Gigi per satuan penduduk	/3,000 Penduduk	0,39	0,55	
27	Penderita diare yang ditangani	Persen	67	100	
28	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	
29	Persentase Penderita HIV/AIDS yang memperoleh layanan kesehatan	Persen	100	100	
30	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	85	90	
31	Persentase Puskesmas yang Berstatus Rawat Inap	Persen	12,5	12,5	
32	Jumlah Bayi Usia < 12 Bulan yang mendapat Imunisasi Rutin Lengkap (IRL)	Persen	36	55	
33	Surveilant AFP	Non Polio AFP/ 100,000 penduduk	4,9	2,5	
34	Surveilant CRS	Kasus/ 10,000 Kelahiran Hidup	0,8	0,7	
35	Surveilant Tetanus Neonatorum (TN)	Kasus/ 1000 Kelahiran Hidup	0	0	
36	Surveilans Campak Rubella	Discarded rate / 100,000 penduduk	0	2	
37	Persentase Penderita Hipertensi yang memperoleh layanan kesehatan	Persen	100	100	
38	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	Persen	100	100	
39	Persentase balita gizi buruk	Persen	0,21	0,15	
40	Persentase Penggunaan Tempat Tidur / Bed Occupancy Rate	Persen	65	67	
41	Rata- rata jumlah hari sebuah tempat tidur tidak ditempati pasien (hari kosong) / Turn Over Interval	Hari	2	2	
42	Rerata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu / Bed Turn Over	Kali	70	60	
43	Angka kematian 48 jam setelah dirawat / Net Death Rate	/1000 penduduk	4	4	
44	Angka kematian umum / Gross Death Rate	/1000 penduduk	19	19	
5.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota					
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	7,2	14,64	
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	0	0	
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	18,52	23,8	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	49,76	54,75	
5	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	45	49	
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	49,36	64	
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	7,31	21,95	

No.	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi	Target	Ket
			Awal RPJMD 2024	Kinerja 2026	
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	
9	Persentase Jalan yang Beraspal	Persen	45,98	49,98	
10	Proporsi Jumlah Jembatan Kota Dalam Kondisi Baik	Unit	58,1	60	
11	Panjang Jalan Kota Yang Dirhab dan diperbaiki	Km	6,12	6	
12	Luas Ruang Terbuka Hijau	Persen	1,02	1,02	
13	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	Persen	50	54	
14	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum	Persen	57,25	59	
15	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Persen	61,57	63	
5.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
1	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	0	0	
2	Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	0	0	
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	19,050	21,00	
4	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	29,97	28	
5	Persentase jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	33,33	33,33	
6	Persentase Areal Wilayah Kumuh	Persen	0,26	0,24	
7	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	70,03	72	
5.5. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	98	100	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	98	100	
3	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	78,79	78,99	
4	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	0,24	0,44	
5	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	71,43	81,43	
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	17,50	16,5	
8	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	80	80	
9	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	71,42	81,42	
10	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100	100	
5.6. Bidang Urusan Sosial					
1	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	10,56	71	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	
3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	60,16	60	
4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	94,24	80	

No.	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2024	Target Kinerja 2026	Ket
5	Persentase PSKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	60	60	
5.7. Bidang Urusan Tenaga Kerja					
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	100	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	67,61	69,61	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Orang	38452882,93	40452882,93	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	54,17	56,17	
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	16,88	18	
6	Persentase pekerja penuh waktu (>35 jam) dalam seminggu	Persen	58,33	58,55	
7	Persentase kasus tenaga kerja yang ditangani dan diselesaikan	Persen	80	80	
5.8. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	0,031	0,05	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Persen	100,000	100,000	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,000 penduduk perempuan)	Orang per 100,000	100,000	100,000	
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	76	77	
5	Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional	Persen	62,34	62,75	
6	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRK	Rasio	0,25	0,25	
7	Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	36,72	37,1	
8	Persentase kasus kekerasan pada perempuan yang mendapat pendampingan dan selesai ditangani	Persen	100	100	
9	Persentase penanganan kekerasan pada anak yang mendapat pendampingan dan selesai ditangani	Persen	100	100	
10	Predikat Kota Layak Anak	Predikat	NA	Pratama	
5.9. Bidang Urusan Pangan					
1	Persentase Cadangan Pangan	Persen	70	70,5	
2	Persentase Kampung Tahan Pangan	Persen	78	82	
5.10. Bidang Urusan Pertanahan					
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	80	85	
2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	75	87	
3	Persentase ketersediaan Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Persen	80	85	
4	Persentase ketersediaan Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	0	60	
5	Persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat	Persen	80	90	
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	0	60	
7	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Persen	0	65	
5.11. Bidang Urusan Lingkungan Hidup					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Angka	74,28	74,75	

No.	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2024	Target Kinerja 2026	Ket
2	Persentase pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	Persen	0,00	0,00	
3	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	0,00	40	
4	Cakupan Pelayanan Persampahan	Persen	61,37	64,5	
5	Dokumen Daya Dukung Daya Tampung (D3TLH)	Ada / Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
5.12. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
1	Persentase Perekaman KTP Elektronik	Persen	98,43	99,45	
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	20,99	40	
3	Persentase Kepemilikan akta kelahiran	Persen	97,16	98,25	
4	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah	10	4	
5	Persentase Penduduk yang melakukan aktivasi IKD	Persen	2,3	20	
5.13. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	34,15	36,59	
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	28,05	32,93	
3	Persentase PKK aktif	Persen	100	100	
4	Persentase Desa yang Memiliki BUMDES	Persen	86,59	87,8	
5	Rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM) Kota Subulussalam	Indeks	0,7363	0,7863	
5.14. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,9	2,84	
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	66,73	66,93	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang terpenuhi (Demand Satisfied)	Persen	72,7	74,6	
4	Rasio Akseptor KB	Rasio	83,82	84,5	
5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	Persen	18,45	18,95	
6	Persentase Peserta KB Baru MKJP	Persen	23,18	23,88	
7	Angka Kelahiran Menurut Umur (Age Specific Fertility Rate) 15-19 Tahun	Persen	18,5	16,2	
8	Kehamilan Tidak Direncanakan	Persen	13,9	11,6	
9	Indeks Lansia Berdaya	Angka	60,9	63,3	
10	Indeks Pengasuhan Remaja	Angka	92	93,3	
11	Persentase Kampung KB Mandiri	Persen	100	100	
5.15. Bidang Urusan Perhubungan					
1	Rasio konektivitas	Angka	57	57	
2	V/C RASIO di Jalan Kabupaten/Kota	Angka	0,15	0,15	
3	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	Rasio	0,024	0,024	
4	Jumlah terminal kewenangan kota	Unit	3	3	
5	Jumlah Angkutan Umum Yang Dilakukan Uji KIR	Unit	0	20	
6	Persentase loket/travel yang terletak di terminal	Persen	0	0	
5.16. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika					
1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	0	0	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik,	Persen	3,64	5	

No.	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2024	Target Kinerja 2026	Ket
	Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
4	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen	71,79	74	
5	Persentase Penduduk yang Menggunakan Internet	Persen	28,21	60	
6	Persentase kampung yang memiliki jaringan minimal 4G/LTE	Persen	80,49	82,93	
5.17. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	Persen	13,73	15	
2	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	10	12	
3	Persentase UMKM Aktif	Persen	10	15	
4	Persentase UKM Aktif	Persen	0	15	
5	Persentase Koperasi Aktif	Persen	75,28	80	
6	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibina	Persen	0	30	
5.18. Bidang Urusan Penanaman Modal					
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	Persen	88,51	90	
2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	112	132	
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (Milyar)	3.871	3.949	
4	Peringkat Indeks Daya Saing Investasi di Aceh	Peringkat	23	23	
5.19. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga					
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	25,83	26,33	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	33	33,89	
3	Persentase peningkatan Prestasi Olahraga	Persen	14	14,50	
4	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Persen	25	30	
5	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	30	35	
6	Jumlah Atlet Berprestasi	Atlet	17	22	
7	Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi	Prestasi	7	7	
5.20. Bidang Urusan Statistik					
1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	
3	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,23	2,7	
5.21. Bidang Urusan Persandian					
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	50	51	
5.22. Bidang Urusan Kebudayaan					
1	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	Persen	0	6,7	
2	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	Festival	0	1	
3	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu	Buah	0	1	
4	Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi	Buah	0	1	
5	Jumlah Adat Dan Budaya Daerah Yang Dilestarikan	Jumlah	1	1	
6	Persentase penanganan kasus adat yang diselesaikan dengan hukum adat	Persen	0	7	
7	Persentase rekomendasi terkait adat yang dikeluarkan	Persen	0	100	
5.23. Bidang Urusan Perpustakaan					

No.	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2024	Target Kinerja 2026	Ket
1	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	68,25	69,25	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	71,93	72,43	
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	3.734	4.117	
4	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	eksemplar	27768	28.326	
5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	12736	12.992	
5.24. Bidang Urusan Kearsipan					
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional/ Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	20	20	
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	0	0	
3	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	0	25,64	
4	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SRIKANDI	Persen	3,00	25,64	
5.25. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan					
1	Persentase Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Persen	52,46	56	
2	Produksi Perikanan Budidaya	ton/tahun	100	111	
3	Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	100	52	
5.26. Bidang Urusan Pariwisata					
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan	Persen	5,88	6,38	
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Persen	7,29	8,29	
3	Tingkat hunian akomodasi	Persen	40	44	
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	0,92	0,94	
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	0,31	0,33	
6	Jumlah Wisatawan	Orang	16.523	17.500	
7	Jumlah Wisata yang Masuk API Award	Objek	0	0	
5.27. Bidang Urusan Pertanian					
1	Produktivitas padi per hektar	Ton/ha	4,7	5,2	
2	Produktivitas jagung per hektar	Ton/ha	5,24	6	
3	Produktivitas Kelapa Sawit per hektar	Ton/ha	11,14	12,5	
4	Populasi Peternakan	Ekor	281.753	7.000	
5	Persentase Unggas yang terserang Penyakit	Persen	0	38	
6	Persentase Ruminansia yang terserang Penyakit	Persen	0	38	
7	Cakupan bina kelompok petani	Persen	100	100	
5.28. Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral					
1	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	Persen	1,08	1,1	
2	Persentase rumah tangga pengguna listrik	Persen	100	100	
5.29. Bidang Urusan Perdagangan					
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	100	100	
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	100	100	
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	100	100	
4	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	Persen	100	100	
5.30. Bidang Urusan Perindustrian					

No.	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja	Ket
			2024	2026	
1	Persentase pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	Persen	2,958	3,2	
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	0	0	
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	
6	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	Nilai Total Kelengkapan Informasi Industri (%)	100	100	
7	Persentase Peningkatan Industri Besar	Persen	8,3	14	
8	Persentase Peningkatan Industri Kecil dan Menengah	Persen	2,96	4,00	
9	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen	25	25	
5.31. Bidang Urusan Transmigrasi					
1	Jumlah Wilayah Transmigrasi yang mendapat Pembinaan	Satuan Permukiman	0	2	
5.32. Sekretariat Daerah					
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0	
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	100	100	
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	80	85	
4	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persen	30	31	
5	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Versi Ombudsman	Kategori	Kepatuhan Tinggi	Kepatuhan Tinggi	
6	Jumlah Qanun dan Perwal yang dipublikasikan pada JDIH	Dokumen	26	40	
7	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa (LKPP)	Indeks	63,92	65	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	85,35	86,35	
5.33. Sekretariat DPRD					
1	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRK	ada/tidak	Ada	Ada	
2	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Qanun, dan Fungsi anggaran dalam dokumen RPJMK maupun dokumen RKPK	ada/tidak	Ada	Ada	
3	Persentase Qanun Yang Disahkan	Persen	80,00	80	
5.34. Perencanaan					
1	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPK	Persen	82,65	85	

No.	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2024	Target Kinerja 2026	Ket
2	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam Renstra	Persen	98,81	99	
3	Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Terhadap Penganggaran	Persen	98,74	100	
5.35. Keuangan					
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	persen	13,243	24,5	
2	Rasio PAD	persen	9,536	12	
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	persen	66,078	71,5	
4	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	persen	0,98	0,7	
5	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	persen	-20,11	0	
6	Assets Management	Jumlah Manajemen Aset 1,2,3	50	75	
7	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	persen	0,61	0,55	
8	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	persen	17,691	100	
9	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	persen	66,67	100	
10	Penetapan APBK	Tepat Waktu/Tidak Tepat	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	
11	Persentase Program yang tidak terlaksana	Persen	0	0	
12	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	Sedang	Sedang	
5.36. Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan					
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	91,09	94	
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	16,23	20	
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	10,42	20	
4	Indeks Profesional ASN	Indeks	82,21	84	
5	Rasio pegawai pendidikan tinggi terhadap pegawai pendidikan menengah/dasar (PNS)	Rasio	18,24	20,15	
6	Jumlah Pejabat Struktural Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan Sesuai Eselon	Orang	9	15	
7	Jumlah Unit KORPRI pada SKPK yang aktif	Unit	0	25	
5.37. Penelitian dan pengembangan					
1	Jumlah Inovasi Daerah yang Didaftarkan	Inovasi	10	15	
2	Persentase implementasi rencana keltbangan	Persen	100	100	
3	Kajian Produk Unggulan Daerah (PUD)	Ada / Tidak	Ada	Ada	
5.38. Pengawasan					
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 0/ Level 1/Level 2/ Level 3	2	3	
2	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 0/ Level 1/Level 2/ Level 3	2	3	
3	Opini Laporan Keuangan	Jumlah 1 - 10 Opini WTP	WTP	WTP	
4	Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persen	83,13	70	
5	Jumlah Temuan BPK	Kasus	14	5	

No.	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi	Target	Ket
			Awal RPJMD 2024	Kinerja 2026	
6	Skor MCP KPK	Angka	82	84	
5.39. Kecamatan					
1	Persentase Kampung Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Baik Dan Tcepat Waktu	Persen	100	100	
2	Rata-rata Indeks Desa Membangunan (IDM) Kecamatan Simpang Kiri	Indeks	0,8629	0,8829	
3	Rata-rata Indeks Desa Membangunan (IDM) Kecamatan Penanggalan	Indeks	0,7907	0,8107	
4	Rata-rata Indeks Desa Membangunan (IDM) Kecamatan Longkib	Indeks	0,7385	0,7485	
5	Rata-rata Indeks Desa Membangunan (IDM) Kecamatan Rundeng	Indeks	0,6740	0,6940	
6	Rata-rata Indeks Desa Membangunan (IDM) Kecamatan Sultan Daulat	Indeks	0,6599	0,6799	
5.40. Kesatuan Bangsa dan Politik					
1	Persentase Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Penelitian	Persen	100	100	
2	Persentase penyelesaian potensi konflik sosial	Persen	63,64	70	
5.41. Keistimewaan dan Kekhususan Aceh					
1	Jumlah Sarana Dan Prasarana Ibadah Yang Dibantu Pemerintah	Mesjid/ Meunasah	4	10	
2	Persentase Pembinaan Dan Pengembangan Syariat Islam	Persen	81,7	82,3	
3	Persentase Pendapatan ZIS	Persen	94,68	85	
4	Persentase Penerima ZIS	Persen	284,44	90	
5	Persentase Penyaluran ZIS	Persen	100	90	
6	Persentase Hasil Sidang yang Menjadi Rekomendasi Kebijakan Daerah	Persen	80	82	
7	Jumlah Kader Ulama Muda yang mendapatkan pendidikan	Orang	40	40	

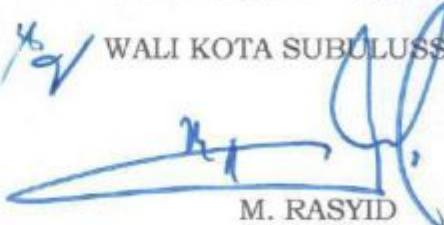
BAB VII PENUTUP

RKPK Subulussalam merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar-sektor, antar-wilayah, dan antar-tingkat pemerintah serta menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) Subulussalam Tahun 2026 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin aparat Pemerintah Kota Subulussalam serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Kota Subulussalam, Lembaga Pemerintahan bersama-sama dengan masyarakat perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPK agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Kota Subulussalam.

Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

Ditetapkan di : Subulussalam
Pada Tanggal : 24 Juli 2025

WALI KOTA SUBULUSSALAM,



M. RASYID



**PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2025**